SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang

a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;

b. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dan disusun dengan berpedoman pada rencana jangka pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional;

c. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 137);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 135);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
15. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
18. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dampak.

19. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil beberapa program.
20. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
24. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II
RUANG LINGKUP RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 2

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, Arah Kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-PD.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 3

Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:
a. pendahuluan;
b. gambaran umum Daerah;
c. Visi, Misi, Program Prioritas pembangunan Daerah;
d. Program Perangkat Daerah dan Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
e. penutup.

Pasal 4

RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berpedoman sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi dapat diberlakukan sebagai program transisi sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi, misi dan program dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 19 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

HENDRI YANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (2.5/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, serta program prioritas dan kerangka pendanaan indikatif yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Penyusunan RPJMD ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan kepala daerah menyusun RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik.

RPJMD ini disusun berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur terpilih untuk periode 2025–2029, serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2045, dengan memperhatikan keterpaduan dengan RPJMN Tahun 2025–2029 dan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs).

RPJMD ini dirancang untuk mendukung pencapaian visi daerah: "**Belitung Timur Nyaman dan Berkemajuan**", yang dijabarkan melalui misi-misi pembangunan yang mencerminkan upaya penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi daerah, dan pelestarian lingkungan hidup.

Fokus utama dalam periode RPJMD ini meliputi:

1. **Penguatan tata kelola pemerintahan**, dengan mendorong pelayanan publik yang profesional, bersih, akuntabel, serta berbasis data dan digital
2. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia**, melalui penguatan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pelestarian budaya, serta pemberdayaan pemuda dan perempuan.
3. **Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi**, melalui pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, peningkatan investasi, peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, pariwisata berbasis geopark, dan UMKM.
4. **Percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan publik**, termasuk jalan, air bersih, sanitasi, listrik desa, dan infrastruktur TIK.

5. **Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup**, melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 disusun dengan mengutamakan prinsip-prinsip perencanaan yang komprehensif dan berorientasi pada hasil. Pertama, RPJMD ini mengusung prinsip keterpaduan, yang memastikan adanya kesinambungan antara proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, sehingga seluruh tahapan pembangunan berjalan secara sinergis dan efektif. Kedua, penyusunannya berbasis pada data dan bukti (evidence-based planning), dengan mengutamakan pendekatan yang objektif, rasional, dan didukung oleh analisis indikator makro serta data sektoral yang valid dan terkini. Ketiga, RPJMD ini dirancang secara partisipatif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, akademisi, dan perangkat daerah, guna menjamin bahwa arah pembangunan mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Terakhir, RPJMD ini juga bersifat responsif terhadap perubahan, termasuk adaptif terhadap dinamika pembangunan global dan nasional, seperti perubahan iklim, krisis pangan dan energi, transformasi digital, serta pergeseran arah kebijakan pemerintah pusat. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan, daya saing, dan keberlanjutan pembangunan Kabupaten Belitung Timur dalam lima tahun ke depan.

PJMD 2025–2029 juga menggarisbawahi beberapa fokus pembangunan dan program unggulan, termasuk:

- 17 Program Unggulan daerah yaitu Nyaman Layanan Publik, Internet Desa Nyaman, Nyaman ASN Berkemajuan, Nyaman Bersinergi, Nyaman Desa Berdaya, RT-ku Nyaman, Nyaman Cerdas, Nyaman Sehat, Nyaman Sejahtera, Petani dan Nelayan Nyaman, Nyaman Kreatif Berkarya, UMKM ku Nyaman Berdaya, Nyaman Kerja, Gerbang Ekonomi, Infrastruktur Nyaman, Nyaman Lestari, dan Nyaman Air Bersih
- 11 Program Andalan yang merupakan bagian dari 17 Program Unggulan, seperti program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang dilaksanakan secara terencana, partisipatif, dan berbasis data, penciptaan 10.000 lapangan kerja melalui pengembangan sektor produktif dan pemagangan terstruktur, pemberian bantuan-bantuan kepada Masyarakat dengan berbasis data terpadu kemiskinan, dan lainnya yang akan dijabarkan dalam dokumen RPJMD yang menjadi lampiran pada peraturan daerah ini.

RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi merupakan komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk membangun masa depan Belitung Timur yang lebih cerah, berkeadilan, dan berdaya saing tinggi. Keberhasilan

implementasi RPJMD ini sangat bergantung pada sinergi antar-sektor, partisipasi aktif masyarakat, serta kepemimpinan pemerintahan daerah yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat segera menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah dan melaksanakan program pembangunan secara konsisten, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 140

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai landasan bagi perencanaan dari pusat hingga daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengamanatkan disusunnya dokumen perencanaan yang terintegrasi mulai dari Pemerintah Pusat hingga ke daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD memiliki jangka waktu 5 tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sebagaimana kaidah tahapan perencanaan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebelum menyusun dokumen RPJMD, maka perlu disusun dokumen RPJMD, dimana metode teknokratik dalam penyusunan dokumen perencanaan mengacu pada pendekatan yang mengutamakan penggunaan analisis data, keahlian teknis, dan pengetahuan khusus dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks penyusunan rencana pembangunan, metode ini menekankan pada penggunaan data empiris, analisis statistik, dan pemahaman mendalam terhadap isu-isu teknis dan kebijakan yang terkait dengan pembangunan. Sehingga dokumen RPJMD yang akan disusun merupakan acuan bagi penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, yang merupakan tahap I dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045.

I.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 18);
31. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13)
32. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah No 137);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 6 NOREG Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: (8.58/2024), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 135).

Selain landasan hukum di atas, penyusunan dokumen RPJMD ini juga mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Kemudian untuk perumusan program pembangunan daerah, mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

I.3 Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antar dokumen untuk membangun keselarasan perencanaan antar dokumen perencanaan dalam lingkup daerah maupun dengan lingkup nasional dan provinsi. Berdasarkan INMENDAGRI No 2 Tahun 2025, bahwa RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 secara simultan terkoordinasi disusun dengan memperhatikan RPJPN, RPJMN 2025-2029, RPJPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045, serta RPJMD daerah lain yang berbatasan. Selain itu, RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 juga perlu memperhatikan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan RTRW Kabupaten Belitung Timur. Secara lebih detail, dapat dilihat pada penjelasan **Gambar 1.1**.

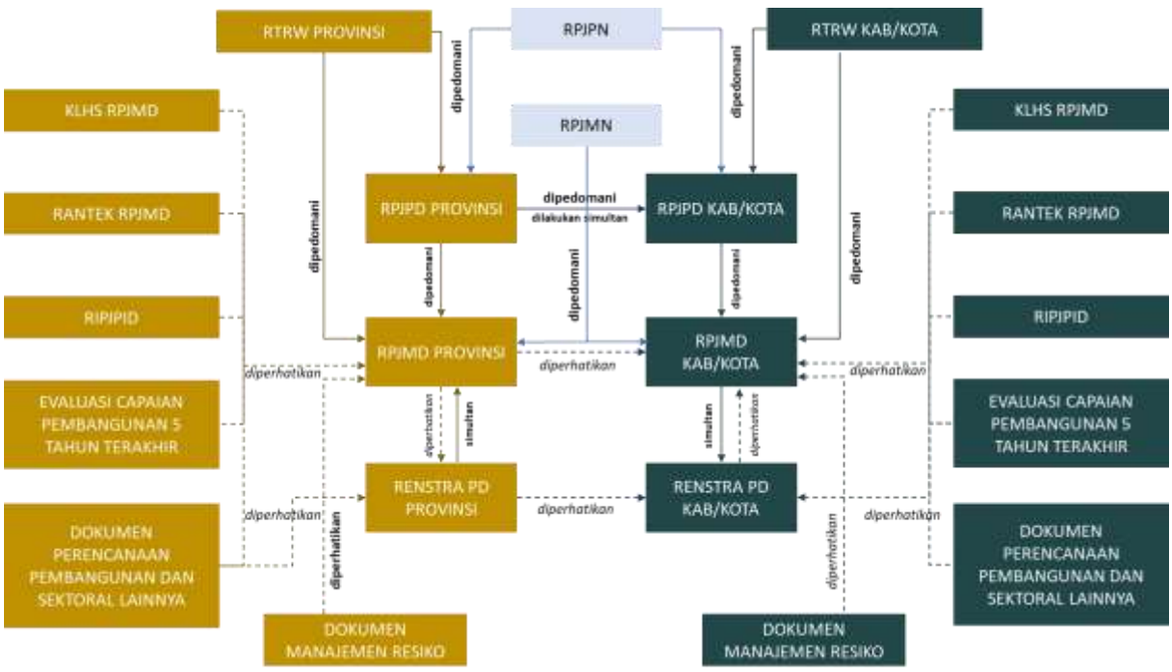

Sumber: INMENDAGRI No. 2 Tahun 2025

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

RPJMD memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya yang membentuk kerangka pembangunan daerah secara menyeluruh. Sebagai dokumen jangka menengah daerah, RPJMD disusun dengan mengacu pada RPJPN dan RPJMN di tingkat nasional, serta RPJPD sebagai dokumen jangka panjang daerah. Kesesuaian ini menjamin kesinambungan arah pembangunan dari pusat hingga daerah. Selain itu, RTRW menjadi acuan penting agar rencana pembangunan sesuai dengan pola ruang yang telah ditetapkan.

Tahap perumusan RPJMD juga dipengaruhi oleh dokumen teknis dan analisis pendukung seperti Rancangan Teknokratik RPJMD (RANTEK), yang menyusun dasar konseptual dan teknis perencanaan, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjamin bahwa pembangunan memperhatikan prinsip keberlanjutan. Evaluasi capaian pembangunan lima tahun terakhir menjadi rujukan penting untuk menilai keberhasilan periode sebelumnya dan mengidentifikasi isu strategis yang masih harus diselesaikan.

RPJMD juga perlu diselaraskan dengan RIPJPID, dokumen perencanaan sektoral, dan dokumen manajemen risiko agar pembangunan yang direncanakan dapat adaptif terhadap perubahan serta berbasis mitigasi

risiko. Setelah RPJMD ditetapkan, dokumen ini menjadi acuan utama bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah), sehingga program dan kegiatan tiap OPD selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah secara keseluruhan. Keterkaitan ini menjadikan RPJMD sebagai dokumen kunci dalam sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berjenjang.

I.3.A Hubungan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 dengan RPJMN Tahun 2025–2029

RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 perlu memperhatikan berbagai permasalahan dan isu strategis nasional dalam RPJMN yang terkait dengan pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 sebagai rujukan Visi, Misi, Isu dan Strategis.

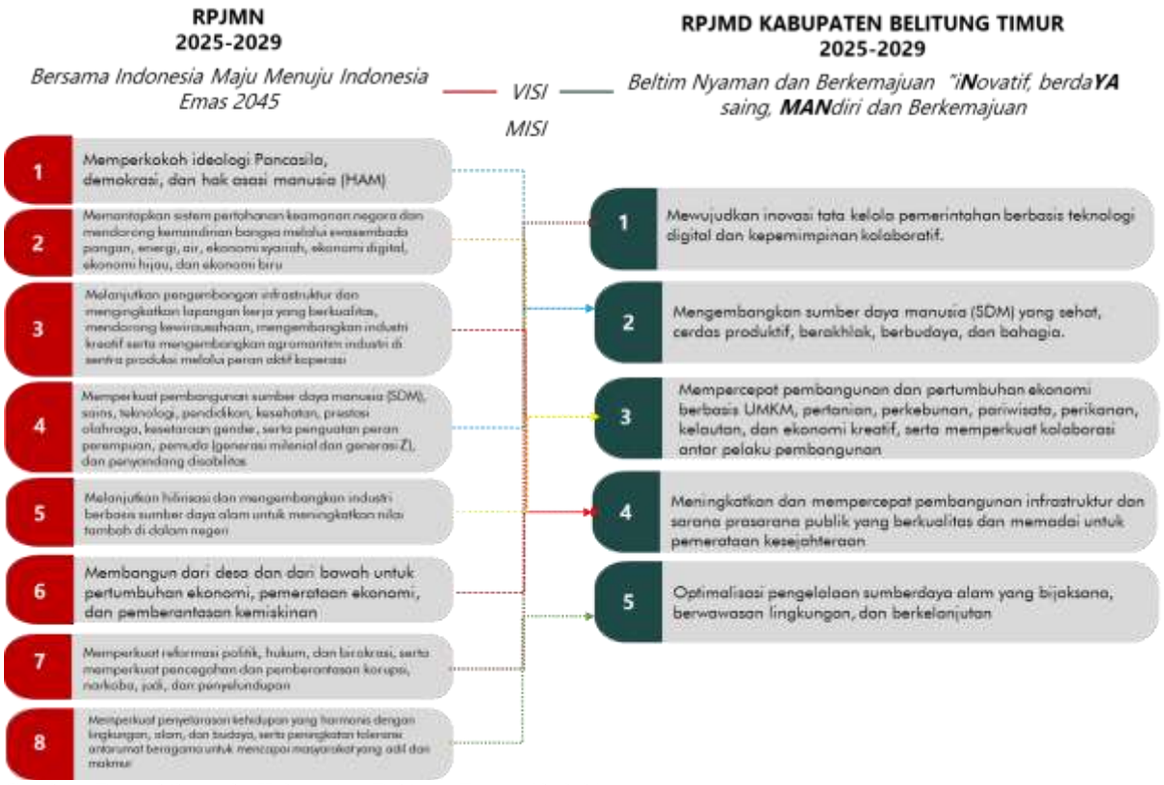

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, (diolah)

Gambar 1. 2 Hubungan RPJMN 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029

Pada penyusunan dokumen RPJMD, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur perlu memastikan bahwa delapan misi nasional yang tertuang dalam RPJMN diadopsi secara kontekstual sesuai dengan potensi, permasalahan, dan kebutuhan lokal. Sebagai contoh, misi nasional untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, kesehatan, dan pengarusutamaan gender dapat diadopsi Belitung Timur dalam bentuk peningkatan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah, penguatan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi lokal. Misi hilirisasi industri berbasis sumber daya alam yang menjadi prioritas nasional, dapat disesuaikan oleh Belitung Timur dengan pengembangan industri pengolahan berbasis perikanan, pertanian, dan pariwisata bahari.

Setiap misi nasional dalam RPJMN menjadi referensi untuk menyusun misi daerah yang selaras, namun tetap mempertimbangkan karakteristik lokal. Melalui keterpaduan ini, RPJMD Belitung Timur tidak hanya menjadi dokumen strategis pembangunan daerah, tetapi juga bagian integral dari

pencapaian tujuan pembangunan nasional. Hubungan RPJMN 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Belitung Timur 2025-2029 berkaitan dengan isu potensi daerah. Kabupaten Belitung Timur mendukung prioritas nasional dengan adanya Pengembangan Geopark Belitong dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui program KAMPIT (Kampung Andalan Mandiri Pusat Inovasi Terpadu). Sehingga, Kabupaten Belitung Timur mendukung Prioritas 2 dan 3 untuk pengembangan Geopark Belitong dan Prioritas Nasional 6 untuk Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui Program KAMPIT.

I.3.B Hubungan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Tahun 2025–2029. Keselarasan ini bertujuan untuk memastikan adanya sinergi program dan kegiatan, sehingga pencapaian target pembangunan daerah dapat berkontribusi langsung terhadap pencapaian target pembangunan provinsi.
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025–2029 menetapkan visi "Mewujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Berdaya Saing, Berbudaya, Mandiri dan Sejahtera", yang sejalan dengan visi Kabupaten Belitung Timur "Beltim Nyaman dan Berkemajuan". Keduanya menempatkan keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai pilar utama pembangunan.

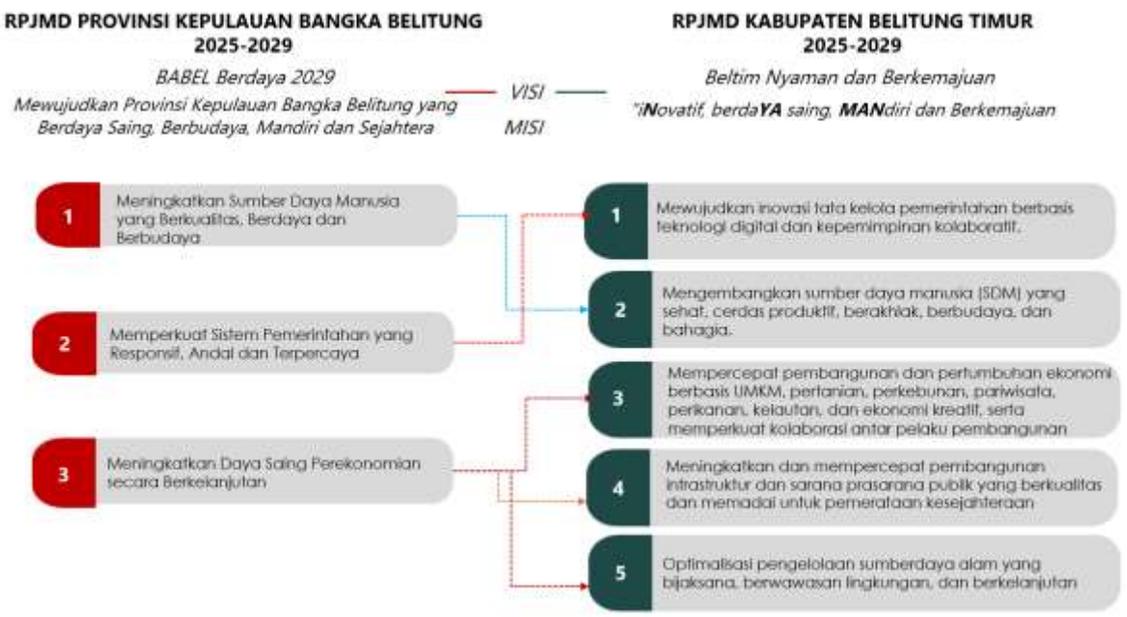

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, (diolah)

Gambar 1. 3 Hubungan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025-2029

Misi berfungsi sebagai penjabaran langkah-langkah strategis utama untuk mewujudkan visi. Analisis pemetaan menunjukkan bahwa lima misi Kabupaten Belitung Timur merupakan elaborasi yang lebih rinci dan operasional dari tiga misi besar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keselarasan Misi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Matriks Penyelarasan Misi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten

Misi		Analisis Penyelarasan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025-2029	**Kabupaten Belitung Timur 2025-2029**	
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya.	**2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas Produktif, Berakhlak, Berbudaya, dan Bahagia.**	**Sinergis.** Misi kabupaten mengelaborasi konsep "berkualitas" menjadi atribut yang lebih spesifik (sehat, cerdas, produktif, berakhlak, bahagia), memberikan panduan yang lebih jelas untuk perumusan program di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya.
2. Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya.	**1. Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif.**	**Komplementer.** Misi kabupaten secara spesifik menunjuk "teknologi digital" dan "kepemimpinan kolaboratif" sebagai instrumen utama untuk mencapai pemerintahan yang responsif dan andal, sejalan dengan arah reformasi birokrasi nasional.
3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan.	**3. Mempercepat Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Perkebunan, Pariwisata, Perikanan, dan Ekonomi Kreatif, Serta Memperkuat Kolaborasi Antar Pelaku Pembangunan.** **4. Meningkatkan dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Publik Yang Berkualitas dan Memadai Untuk Pemerataan Kesejahteraan.** **5. Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Bijaksana, Berwawasan Lingkungan, dan Berkelanjutan.**	**Sinergis dan Elaboratif.** Tiga misi kabupaten ini secara kolektif menjabarkan strategi untuk mencapai daya saing ekonomi provinsi. Misi 3 Beltim mendefinisikan sektor-sektor unggulan. Misi 4 Beltim mengidentifikasi infrastruktur sebagai prasyarat utama (*enabler*). Misi 5 Beltim menetapkan prinsip keberlanjutan lingkungan sebagai koridor pembangunan ekonomi, sejalan dengan konsep ekonomi biru dan hijau.

Matriks di atas menunjukkan bahwa secara konseptual, misi-misi Kabupaten Belitung Timur tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai strategi implementasi yang lebih terperinci untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh provinsi.

I.3.C Hubungan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045

Perumusan isu strategis dan permasalahan pada RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 dapat diselaraskan dengan RPJPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045. Sebagaimana termuat dalam Visi RPJPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 yang dijadikan pedoman RPJMD Kabupaten Belitung Timur selama 20 tahun, yaitu: Belitung Timur Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Untuk Indonesia Emas 2045.

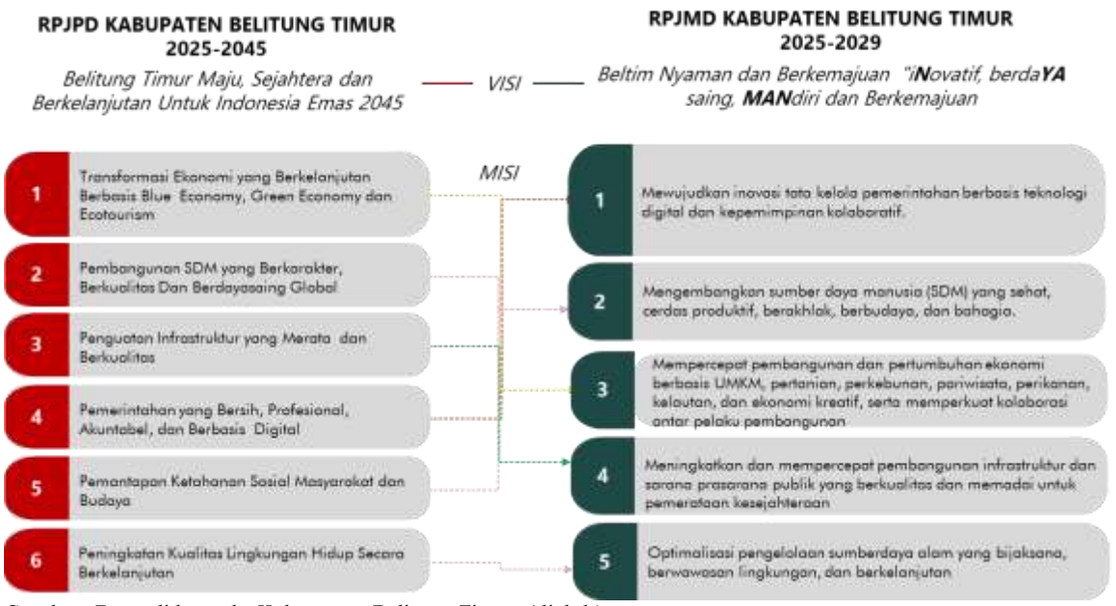

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, (diolah)

Gambar 1. 4 Hubungan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045

Tahapan pertama arah kebijakan pembangunan (2025-2029) adalah penguatan fondasi transformasi. Pada tahapan ini, pertumbuhan ekonomi daerah diperkirakan akan mencapai 4,36. Transformasi ekonomi difokuskan pada peningkatan produktivitas serta hilirisasi sektor unggulan berbasis sumber daya lokal, tahapan awal penerapan ekonomi sirkular untuk keberlanjutan, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan dukungan permodalan UMKM, serta peningkatan investasi di sektor unggulan. Transformasi SDM dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. Transformasi tata pemerintahan difokuskan pada pemantapan sistem merit dan manajemen ASN, kelembagaan efektif dan kolaboratif, digitalisasi pelayanan publik, penegakan regulasi, dan penguatan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan Infrastruktur difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas, optimalisasi sumber daya air, pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air bersih dan air minum aman, serta peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai landasan transformasi digital pada periode berikutnya. Peningkatan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mempertimbangkan daya

dukung dan daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, serta risiko bencana. Sementara untuk ketahanan sosial masyarakat dan budaya difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.

I.3.D Hubungan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kepulauan Bangka Belitung mencakup kegiatan di Kabupaten Belitung Timur. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), Kabupaten Belitung Timur dijadikan bagian dari pengembangan kawasan di Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa daerah di Kabupaten Belitung Timur yang menjadi fokus pengembangan antara lain:

1. Pelabuhan Manggar dijadikan sebagai pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan dan/atau pembangunan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan pengumpan.
2. Pelabuhan Dendang dan Teluk Asam sebagai pelabuhan pengumpan.
3. Pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan alur pelayaran melalui pelabuhan Manggar.
4. Pelabuhan Manggar menjadi pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan alur pelayaran.
5. Pembangunan pembangkit listrik daerah Padang dan Mempaya.
6. Pembangunan jaringan transmisi saluran udara tegangan menengah dari Pegantungan-PLTD Pilang-Perbatasan Belitung Timur.
7. Sistem jaringan irigasi I Selingsing dan Meranti dengan luas kurang lebih 6.000 (enam ribu) hektar di Kabupaten Belitung Timur.
8. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 45.874 (empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat) Hektar untuk kawasan hutan lindung.
9. Taman wisata alam laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Taman Alam Laut Perairan Belitung, Perairan Belitung Timur, dan Perairan Bangka Selatan sebagai kawasan suaka alam, pelestarian alam, situs, dan kawasan cagar budaya.
10. Kabupaten Belitung Timur dijadikan sebagai kawasan hutan produksi, tanaman pertanian, hortikultura, perkebunan besar, perkebunan rakyat, peternakan, pertambangan.
11. Kawasan pariwisata bahari yang berupa kawasan pantai dan lautnya yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang ada di Kabupaten/Kota, serta kawasan pariwisata pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur.
12. Kawasan budaya Laskar Pelangi di Kabupaten Belitung Timur.

13. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, Kabupaten Belitung Timur kawasan terpadu mandiri (Kecamatan Gantung), kawasan pelabuhan ASDP Manggar, kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK).
14. Kabupaten Belitung Timur dijadikan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dan perwujudan kawasan strategis bidang lingkungan.

I.3.E Hubungan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 dengan RTRW Belitung Timur

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung Timur merupakan salah satu acuan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kedua dokumen tersebut perlu diselaraskan untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan tidak hanya sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang, tetapi juga mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung ruang wilayah. Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur berjumlah 7 (tujuh) kecamatan di antaranya:

1. Kecamatan Manggar
2. Kecamatan Gantung
3. Kecamatan Kelapa Kampit
4. Kecamatan Dendang
5. Kecamatan Simpang Renggiang
6. Kecamatan Simpang Pesak
7. Kecamatan Damar

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Belitung Timur meliputi:

1. Pengembangan sistem pusat permukiman yang mandiri dan terintegrasi dengan jaringan prasarana wilayah yang aman dan nyaman, dengan menerapkan prinsip mitigasi dan adaptasi terhadap bencana.
2. Pengembangan kuantitas dan kualitas jaringan transportasi wilayah yang terintegrasi dan andal.
3. Pengembangan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung sistem pusat permukiman dan kawasan budidaya.
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan prasarana pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman.
5. Pelestarian kawasan yang memiliki fungsi lindung.
6. Pengembangan taman bumi (*geopark*) yang berkelanjutan dan memiliki karakteristik lokal Kabupaten Belitung Timur.
7. Pengembangan kawasan pertanian sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
8. Pengembangan kawasan perikanan sesuai dengan potensi lestarinya.
9. Pengembangan industri pengolahan hijau untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
10. Pengembangan kawasan budi daya lainnya dalam rangka peningkatan ekonomi wilayah.
11. Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Dengan demikian, hubungan antara RPJMD dan RTRW bersifat saling mendukung, di mana arah pembangunan jangka menengah yang dirumuskan dalam RPJMD disesuaikan dengan struktur dan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW. Hal ini dilakukan guna menciptakan pembangunan yang selaras antara aspek spasial dan aspek sektoral, sekaligus mendorong terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Belitung Timur.

I.3.F Hubungan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 dengan KLHS Kabupaten Belitung Timur

Penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 dilaksanakan dengan memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai dasar untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam setiap misi dan arah kebijakan pembangunan daerah. KLHS memberikan identifikasi isu-isu strategis yang relevan, seperti kualitas lingkungan hidup, perubahan iklim, dan penguatan kelembagaan, yang kemudian menjadi pertimbangan dalam perumusan tujuan dan sasaran RPJMD agar sejalan dengan upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

TABEL 1. 1 HUBUNGAN RPJMD KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029 DENGAN KLHS KABUPATEN BELITUNG TIMUR

MISI	ISU STRATEGIS (KLHS)
Misi 1: Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif.	Penciptaan *Good Governance* dan Kelembagaan yang Kondusif
	Pelayanan publik berbasis *Smart Governance*
Misi 2: Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas produktif, berakhlak, berbudaya, dan bahagia.	Peningkatan Kesehatan dan Pendidikan
Misi 3: Menciptakan percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM, pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, kelautan, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan	Penguatan ekonomi lokal dalam peningkatan investasi dan daya saing daerah
Misi 4: Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas dan memadai untuk pemerataan kesejahteraan	Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah
Misi 5: Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Ancaman Keanekaragaman Hayati
	Pengelolaan Sampah Berbasis *Smart Environment*
	Kebencanaan dan Perubahan Iklim
	Kerentanan Kualitas Lingkungan Hidup
	Alih Fungsi Lahan

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2024 (diolah)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan yang memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program, termasuk dalam penyusunan RPJMD. KLHS dalam konteks RPJMD berfungsi mengidentifikasi isu-isu strategis yang berdampak terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan, serta memastikan bahwa setiap misi pembangunan mempertimbangkan risiko dan potensi dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.

Setiap misi dalam RPJMD Kabupaten atau Provinsi dihubungkan secara langsung dengan isu strategis yang diidentifikasi dalam KLHS. Misalnya, Misi 1 tentang inovasi tata kelola pemerintahan dikaitkan dengan isu *Good Governance* dan pelayanan publik berbasis *Smart Governance*. Misi 2 mengenai pengembangan SDM relevan dengan isu peningkatan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan ekonomi lokal. Misi 3 dan 4, yang fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur, berkaitan dengan isu aksesibilitas wilayah serta investasi. Sementara itu, Misi 5 sangat erat kaitannya dengan isu-isu lingkungan seperti keanekaragaman hayati, pengelolaan sampah, perubahan iklim, dan alih fungsi lahan. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa misi pembangunan dalam RPJMD tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan lingkungan dan sosial, yang merupakan inti dari prinsip pembangunan berkelanjutan yang diusung KLHS.

I.4 Maksud dan Tujuan

I.4.A Maksud

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 menyediakan pedoman strategis bagi pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan pembangunan selama periode lima tahun. RPJMD disusun untuk Kepala Daerah terpilih dalam menyusun Visi, Misi, Strategi, Arah dan Kebijakan agar dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan pembangunan dan isu strategis secara objektif selama periode terpilih.

I.4.B Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 adalah:

1. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan secara komprehensif, meliputi data ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur yang berkaitan dengan kondisi dan kebutuhan di Kabupaten Belitung Timur;
2. Menganalisis kondisi umum berbagai sumber daya pembangunan di Kabupaten, yang meliputi kondisi geografis dan sumber daya alam, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya dan sumber daya manusia, kondisi prasarana dan sarana serta kondisi pemerintahan dan pelayanan umum;
3. Menganalisis permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Belitung Timur yang akan ditangani dalam 5 tahun ke depan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan;
4. Memberikan rekomendasi kebijakan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur.

I.5 Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang dari penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Belitung Timur, dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, hubungan antar dokumen serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum kondisi daerah yang meliputi gambaran umum kondisi daerah, keuangan daerah, serta permasalahan dan isu strategis. Sub bab gambaran umum kondisi daerah berisi pembahasan mengenai aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta pelayanan umum. Selanjutnya, sub bab gambaran keuangan daerah berisi pembahasan mengenai realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 serta proyeksi APBD Tahun Anggaran 2025-2029. Terakhir, sub bab permasalahan dan isu strategis berisi pembahasan mengenai permasalahan pembangunan daerah serta isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan, disertai indikator kinerja dan targetnya. Selain itu, bab ini juga menguraikan strategi yang disusun dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program prioritas pembangunan daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan organisasi perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Selain itu, bab ini juga memuat penetapan indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah, dan indikator kinerja kunci.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II.1 Aspek Geografi dan Demografi

II.1.A Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Belitung Timur terletak di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung dengan ibukota terletak di Kecamatan Manggar. Kabupaten Belitung Timur dibentuk pada tahun 2003 sebagai wilayah hasil pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003. Wilayahnya sendiri memiliki luas sebesar 17.967,93 km^2 yang terdiri dari luas darat 2.506,90 km^2 dan luas wilayah laut 15.461,03 km^2. Kabupaten Belitung Timur termasuk kedalam wilayah kepulauan dengan 149 pulau besar dan kecil yang secara administratif terbagi menjadi tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Manggar, Kecamatan Damar, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan Simpang Pesak, dan Kecamatan Dendang dengan total 39 desa. Adapun batas-batas geografis Kabupaten Belitung Timur seperti pada **Gambar 2. 1**.

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2020

Gambar 2. 1 Wilayah Administrasi Kabupaten Belitung Timur

Selain itu, pengembangan lokasi-lokasi wisata baru pada kawasan pesisir maupun eks tambang juga mendukung proses pengembangan wilayah baik secara fisik maupun non-fisik. Hal ini juga berpotensi menjadikan Kabupaten Belitung Timur sebagai destinasi wisata baru berkontribusi positif dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Kondisi geografis wilayah yang cenderung datar dengan akses serta konektivitas yang baik nantinya akan memperlancar proses pembangunan fisik yang dilaksanakan.

II.1.B Potensi Sumber Daya Alam

1. Klimatologi

Klimatologi Kabupaten Belitung Timur memiliki kondisi yang sama seperti halnya daerah-daerah di Indonesia umumnya dengan pergantian dua musim di sepanjang tahun yakni musim kemarau dan penghujan. Bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara-Barat Laut menciptakan musim hujan dengan membawa banyak uap air dan hujan, dengan lebih dari 80 persen dari curah hujan tahunan turun pada periode ini. Perubahan arah angin ini juga mempengaruhi kondisi iklim, termasuk suhu udara di Kabupaten Belitung Timur. Berikut merupakan rata-rata suhu yang tercatat dalam Stasiun Meteorologi Tanjungpandan dalam kurun lima tahun terakhir:

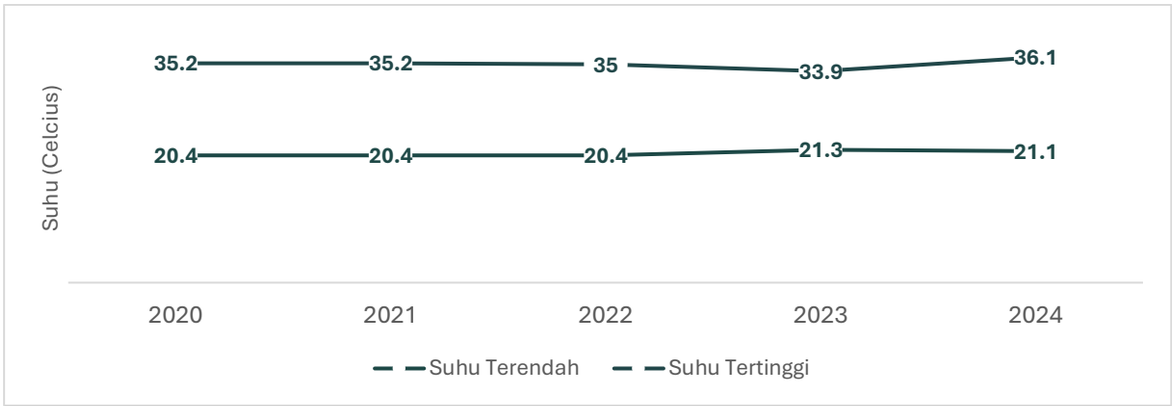

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, 2020-2024

Gambar 2. 2 Kondisi Klimatologi Kabupaten Belitung Timur 2020-2024

Berdasarkan grafik diatas, rata-rata suhu tertinggi yang tercatat di Kabupaten Belitung Timur mengalami kenaikan selama dua tahun terakhir, begitu juga rata-rata suhu terendahnya. Tren kenaikan ini kemungkinan akan berlanjut karena beberapa faktor salah satunya pemanasan global yang terjadi. Tren kenaikan suhu ini juga membawa dampak yang membahayakan bagi lingkungan dan juga masyarakat Kabupaten Belitung Timur antara lain potensi kekeringan, kebakaran hutan, dan krisis air bersih yang bertambah.

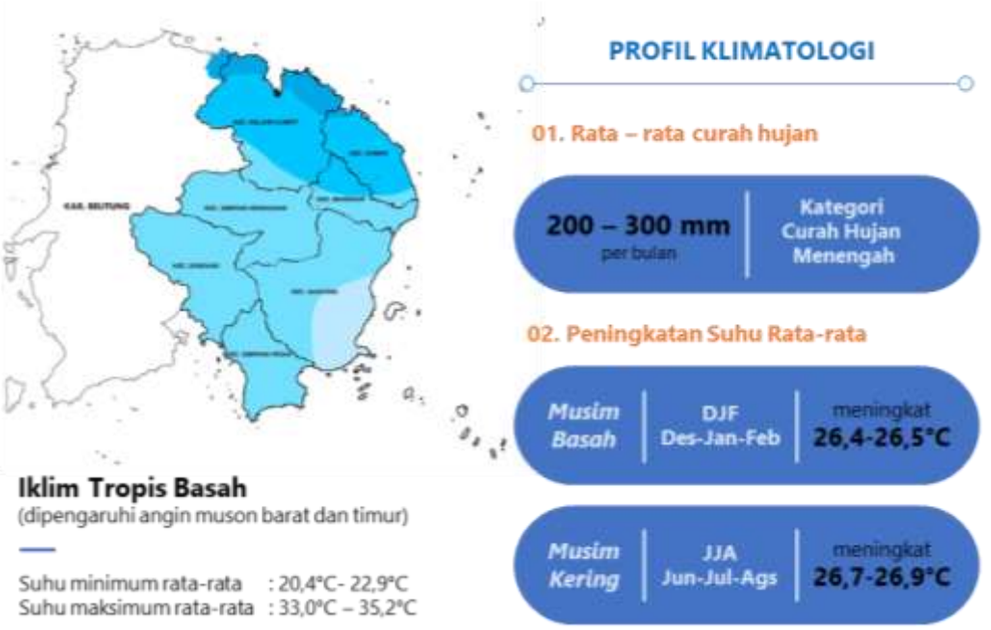

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2020 dan BPS Kabupaten Belitung Timur, 2024

Gambar 2. 3 Kondisi Klimatologi Kabupaten Belitung Timur

Sementara itu, untuk detail tahun 2020, suhu minimum rata-rata yang diukur di Stasiun Meteorologi Tanjungpandan menunjukkan kondisi yang selalu berubah dari 22,6°C pada Bulan Januari ke 20,4°C pada bulan September dan suhu maksimum rata-rata berubah dari 31,8 °C ke 35,2 °C. Kelembaban relatif bulanan rata-rata berubah-ubah dari maksimum 90 persen pada bulan Februari ke minimum 79 persen pada bulan September. Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun Meteorologi Tanjungpandan mencatat perubahan dari maksimum 7 m/s pada Bulan Januari sampai minimum 2 m/s pada November.

2. Geologi

Keadaan tanah di Kabupaten Belitung Timur banyak mengandung mineral biji timah dan bahan galian seperti pasir, pasir kuarsa, batu granit, dan lain-lain seperti yang dapat dilihat pada **Gambar 2.4** terkait formasi batuan.

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2020

Gambar 2.4 Kondisi Geologi Kabupaten Belitung Timur

Pesisir Kabupaten Belitung Timur memiliki jenis tanah didominasi oleh endapan aluvial yaitu endapan sekunder yang terkumpul dalam jumlah dan kadar yang tinggi melalui suatu proses konsentrasi alam yang letaknya sudah jauh dari batuan induknya dan sudah sempat diangkut oleh sungai dan ombak laut. Tekstur tanah Kabupaten Belitung Timur yang didominasi oleh partikel bertekstur sedang (lempung). Komposisi partikel bertekstur sedang (lempung) mencapai 48,45 persen, tekstur kasar 27,48 persen dan sisanya 24,12 persen bertekstur halus (debu).

3. Topografi

Keadaan alam Kabupaten Belitung Timur sebagian besar merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0-100 m di atas permukaan laut dan sisanya sebagian kecil merupakan pegunungan dan perbukitan. Keadaan topografi yang paling dominan ditemukan adalah ketinggian 25-100 m yaitu sebesar 68 persen dari luas wilayah. Kondisi topografi tersebut banyak ditemukan di Kecamatan Gantung dan Simpang Renggiang. Sementara itu, untuk Kecamatan Damar, Kelapa Kampit, Manggar didominasi oleh ketinggian tanah 0-10 m atau khas topografi pesisir pada umumnya. Pusat pemerintahan, perdagangan, dan juga pusat kota dengan segala fasilitasnya juga terletak pada kondisi ketinggian tanah tersebut. Kondisi wilayah yang cenderung homogen datar sangat menguntungkan bagi beberapa aktivitas seperti pengembangan kawasan pertanian, permukiman, dan lain sebagainya

karena tidak adanya bentang alam yang membatasi perluasan aktivitas pembangunan.

4. Hidrologi

Kabupaten Belitung Timur memiliki potensi yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan air meliputi kebutuhan air domestik, pertanian, dan perikanan. Hasil olah data menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Belitung Timur adalah 143.804.940 mm^3/tahun, padahal kebutuhannya sudah mencapai 203.302.400 m^3/tahun. Membandingkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa status daya dukung air Kabupaten Belitung Timur adalah terlampaui atau defisit dengan nilai koefisien daya dukung airnya adalah 0,71.

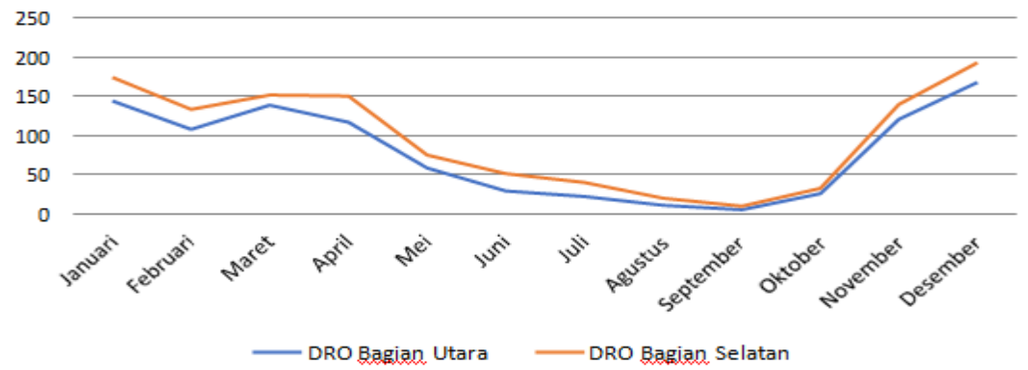

Sumber: Neraca Sumber Daya Alam Daerah Kab. Belitung Timur, 2020

Gambar 2.5 Grafik Debit Run-off Belitung Timur Tahun 2020

Gambar 2.5 menunjukan neraca air bagian utara, terjadi surplus pada Bulan Januari-April dan Bulan Oktober-Desember. Nilai surplus tertinggi terjadi pada bulan Desember dan Januari sebesar 216 mm dan 181 mm, sedangkan nilai defisit terbesar terjadi pada Bulan Agustus sebesar 7 mm. Sementara itu, untuk bagian selatan, surplus terjadi pada Bulan Januari-April dan Oktober-Desember. Nilai surplus terbesar dicapai pada Bulan Desember dan Januari yaitu 247 mm dan 225 mm.

5. Indeks Kualitas Air

Sub bab ini akan diproksikan dengan indeks kualitas air yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKA sebagai indeks gabungan dari beberapa parameter kualitas dalam bentuk skor. Gambaran tentang kualitas air di suatu daerah dapat dihitung melalui Indeks Kualitas Air. Skor IKA dengan berbagai rentang diantaranya: Sangat Baik: IKA >= 80; Baik: IKA >= 65 < 80; Sedang: IKA >= 50 < 65; Cukup: IKA >= 35 < 50 dan Buruk: IKA < 35. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa indeks kualitas air terus meningkat. Peningkatan indeks ini mengindikasikan perbaikan kualitas air yang semakin baik. Secara umum, indeks kualitas air di Kabupaten Belitung Timur diklasifikasikan kelompok sedang dengan tingkat pencemaran yang ringan. Pencemaran air di Kabupaten Belitung Timur mengalami tren menurun.

TABEL 2. 1 INDEKS KUALITAS AIR KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Indeks Kualitas Air	Nilai	50	59,52	59,09	61,56	54

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur

6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Belitung Timur terbagi menjadi beberapa jenis ditinjau dari kondisi tutupan lahannya, penggunaan lahan terluas adalah semak belukar dengan luas 61.177,95 Ha atau 23,58% dari keseluruhan luas wilayah, Penggunaan lahan terluas kedua berupa Hutan dengan luas 52.820,69 Ha atau 20,35% dari keseluruhan luas wilayah. Penggunaan lahan terluas berikutnya adalah Kebun sawit dengan luas 51.368,12 Ha atau 19,79% dari keseluruhan luas wilayah dan Pertambangan dengan luas 49.439,17 Ha atau 19,05% dari keseluruhan luas wilayah. Sementara itu, untuk lahan terbangun yang ada hanya seluas 3.416,76 Ha atau 1,31% dari keseluruhan luas wilayah, dan didominasi oleh permukiman penduduk dengan pola linier mengikuti alur jalan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

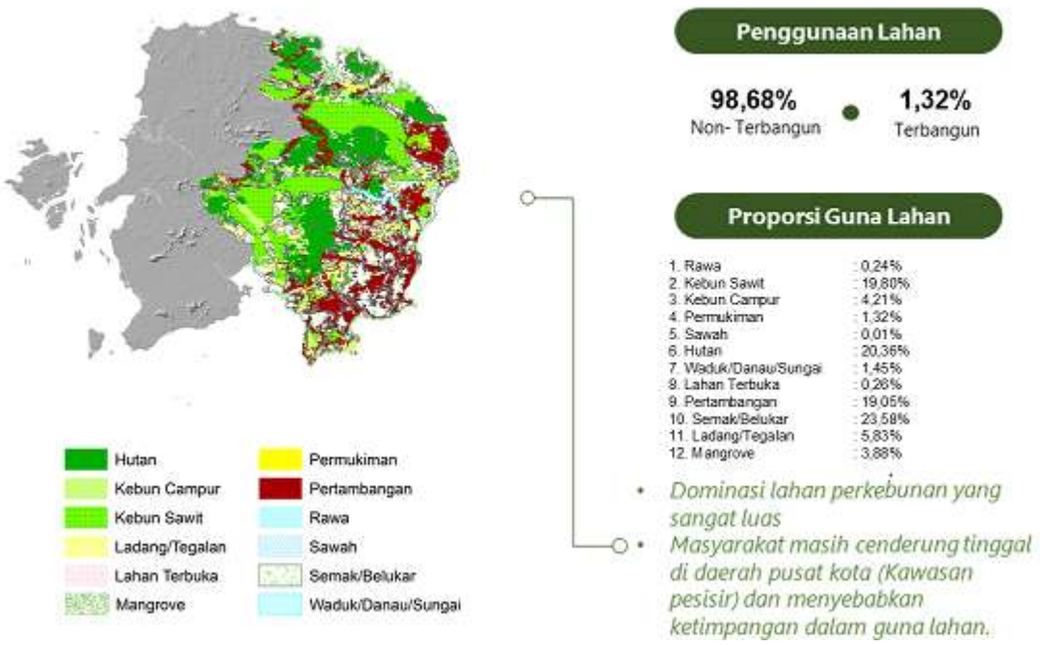

Sumber Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2020

Gambar 2.6 Kondisi Penggunaan Lahan Kabupaten Belitung Timur

7. Indeks Kualitas Lahan

Indeks Kualitas Lahan (IKL) salah satu indeks yang menunjukkan kualitas tutupan lahan di suatu wilayah dihitung berdasarkan kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Perhitungan IKL terdapat beberapa klasifikasi yaitu kategori sangat baik: IKL >= 90, kategori baik: IKL >= 70 < 90, kategori sedang: IKL >= 50 < 70, kategori kurang: IKL >= 25 < 50 dan kategori sangat kurang: IKL < 25. Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) Kabupaten Belitung Timur menunjukkan variasi selama beberapa tahun terakhir.

TABEL 2. 2 INDEKS KUALITAS LAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Indeks Kualitas Lahan	Nilai	57,19	43,18	43,18	43,89	45,95

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur, 2025

Pada tahun 2020-2021 IKL dikategorikan sebagai sedang. Namun, pada tahun 2022 – 2024, IKL mengalami penurunan menjadi kategori kurang. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur perlu merancang program-program yang lebih efektif dengan fokus pada pelestarian hutan, peningkatan kualitas lahan, dan pengurangan kerusakan lingkungan.

8. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah indeks yang menunjukkan kualitas tutupan lahan berdasarkan kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Klasifikasi penilaian IKTL sama dengan Indeks Kualitas Lahan dengan kategori sangat baik, baik, sedang, kurang dan sangat kurang.

TABEL 2. 3 INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

INDEKS	SATUAN	TAHUN				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	58,2	43,18	43,18	43,89	45,95

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur, 2025

IKTL Kabupaten Belitung Timur tahun 2020 menunjukkan kategori sedang, namun setelah tahun 2020 menunjukkan penurunan menjadi kategori kurang. Penurunan ini terlihat dari indeks kualitas tutupan lahan yang menurun signifikan dari angka 58,2 pada tahun 2020 menjadi 43,18 pada tahun 2021 dan 2022. Meskipun terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2023 dan data tahun 2024 yang menunjukkan angka 45,95, nilai tersebut masih berada dalam kategori kurang, sehingga menggambarkan adanya penurunan kualitas tutupan lahan yang konsisten sejak tahun 2021. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya perbaikan dan pemulihan tutupan lahan secara berkelanjutan di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

9. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Belitung Timur khususnya terkait tata ruang memiliki tujuan umum yaitu untuk mewujudkan kemakmuran dan kemandirian daerah dengan pembangunan yang disesuaikan pada ciri kabupaten kepulauan dan bahari serta segala potensi yang dimiliki seperti perikanan, industri, dan pariwisata. Detail penjelasan terkait pengembangan wilayah mengacu pada Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 – 2034 sebagai berikut:

1) Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi:

Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang

keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi;
- Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan
- Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah tersebut selanjutnya diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pusat pelayanan. Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung Timur tahun 2014 – 2034 dan rancangan RTRW tahun 2022-2042, rencana pengembangan sistem pelayanan Kabupaten Belitung Timur, meliputi satu kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dua kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan empat kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

2) Rencana Pola Ruang

Selain pengembangan struktur ruang, Kabupaten Belitung Timur juga memiliki rencana pola pemanfaatan ruang. Rencana pemanfaatan pola ruang dimaksudkan untuk mengatur alokasi dan lokasi pemanfaatan ruang untuk kepentingan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya. Kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan lainnya.

a) Kawasan hutan lindung

Rencana kawasan hutan lindung di Kabupaten Belitung Timur meliputi lahan seluas kurang lebih 43.247 ha, meliputi :

- HL Gunung Bantan di Desa Nyuruk;
- HL Sungai Pala di Desa Balok dan Dendang;
- HL Senunsur Sembulu I di Desa Lalang, Padang, Selinsing dan Gantung;
- HL Senunsur Sembulu II di Desa Batu Penyu, Jangkar Asam, Limbungan dan Lilangan;
- HL Senunsur Sembulu (IIB, III, & IV) di Desa Batu Itam, Tanjung Kelumpang,Dukong, Simpang Pesak, Dendang dan Lilangan;
- HL Bringsing Pepapuyu di Desa Nyuruk dan Simpang Tiga;
- HL Gunung Sepang di Desa Buding, Mentawak, Mayang, Senyubuk, Desa Simpang Tiga, Desa Kelubi, Renggiang, dan Air Madu;
- HL Gunung Kikarak di Desa Mentawak, Mayang dan Senyubuk;
- HL Buding Barat di Desa Cendil dan Buding;
- HL Buding Timur di Desa Buding, Pembaharuan, Senyubuk, Mentawak dan Mayang;
- HL Pantai Teluk Pring / Bukit Nayo di Desa Mempaya, Mengkubang, Burung Mandi, Mayang dan Air Kelik; dan
- HL Burung Mandi di Desa Sukamandi, Desa Baru, dan Mekarjaya.

b) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya
Pengembangan kawasan ini diarahkan pada fungsi perlindungan wilayah atau yang memiliki keterkaitan kuat dengan fungsi hidrologis. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya seperti kawasan resapan air. Kawasan resapan air di kawasan perencanaan tersebar di tersebar di seluruh kecamatan, terutama di Kota Manggar.

c) Kawasan perlindungan setempat
Kawasan perlindungan setempat meliputi daerah sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan waduk, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau.

- Kawasan sempadan pantai tersebar di wilayah pantai selatan dan timur Kabupaten Belitung Timur, berjarak minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- Kawasan sempadan sungai, ditetapkan kawasan sempadan sungai adalah melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai. Adapun kriteria kawasan sempadan sungai adalah sekurang- kurangnya (atau sesuai peraturan yang berlaku):
  i. Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditentukan:
     - Garis sempadan paling sedikit berjarak sepuluh meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan tiga meter;
     - Garis sempadan paling sedikit berjarak lima belas meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari tiga meter sampai dengan dua puluh meter; dan
     - Garis sempadan paling sedikit berjarak tiga puluh meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari dua puluh meter.
  ii. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, terdiri atas:
     - Garis sempadan untuk sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 kilometer persegi ditentukan paling sedikit berjarak 100 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
     - Garis sempadan untuk sungai besar dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 kilometer persegi ditentukan paling sedikit berjarak 50 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
     - Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak tiga meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
     - Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak lima meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- Kawasan sempadan kolong, kolong yang masuk kawasan lindung adalah kawasan sejauh 50-100 meter dari bibir kolong. Rencana perlindungan kawasan sekitar kolong tersebar di seluruh kecamatan.
- Kawasan sekitar mata air, ditetapkan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik dengan

jari-jari 200 meter di sekitar mata air. Kawasan sekitar danau/situ/waduk, kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air, seperti halnya kawasan resapan air, pemanfaatannya dapat berupa kawasan budidaya hutan, pertanian lahan kering dan perkebunan/tanaman tahunan.

- Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan terletak di Kecamatan Manggar, Kelapa Kampit, dan Gantung.
- Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, meliputi kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, dan kawasan cagar budaya meliputi:
  i. Kawasan pelestarian alam
     Kawasan pelestarian alam di Kabupaten Belitung Timur meliputi objek wisata alam yang perlu dilindungi, seperti Kecamatan Dendang (Gunung Mangkro dan Gunung Badau di Desa Nyuruk, dan pulau – pulau kecil); Kecamatan Dendang; Kecamatan Gantung (Pulau – pulau kecil); Kecamatan Kelapa Kampit (Gunung Lematang Panjang di Desa Air Kelik – Senyubuk, dan pulau- pulau kecil); serta Kecamatan Manggar (Gunung Malang Lepau di Desa Burung Mandi, dan pulau – pulau kecil).
  ii. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya
     Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya terdapat di seluruh wilayah pesisir dan perairan laut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan terumbu karang dengan tingkat penutupan karang hidup yang tinggi. Wilayah suaka alam laut dan perairan lainnya di Kabupaten Belitung Timur tersebar pada seluruh pesisir laut wilayah Kabupaten Belitung Timur dan wilayah pulau-pulau kecil.
  iii. Kawasan pantai berhutan bakau
     Kawasan perlindungan hutan bakau dimaksudkan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut, di samping sebagai pelindung pantai, air pasang dan pengikisan air laut (abrasi) serta sebagai pelindung usaha budidaya di belakangnya. Kawasan pantai berhutan bakau tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Belitung Timur, kecuali Kecamatan Simpang Renggiang.
  iv. Kawasan cagar budaya
     Kawasan ini merupakan kawasan non hutan yang berfungsi untuk melindungi permukiman dan budaya tradisional setempat, meliputi Gosong Cina di Kecamatan Gantung dan Gunung Samak dan Kecamatan Manggar.

d) Kawasan peruntukan hutan produksi

Rencana kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Belitung Timur memiliki luas 55.444 ha, meliputi:

- HP Sungai Pala di Desa Nyuruk, Jangkang, dan Balok;
- HP Gunung Duren di Desa Nyuruk, Jangkang, Balok, Dendang, Simpang Pesak, Lilangan, Limbongan, Jangkar Asam, Lintang, Renggiang, dan Simpang Tiga;
- HP Senunsur Sembulu di Desa Tanjung Kelumpang, Tanjung Batu Itam, Dukong, Simpang Pesak, Lilangan, Limbongan, Jangkar Asam, Batu Penyu, dan Gantung;
- HP Buding Barat di Desa Cendil dan Buding; dan

- HP Buding Timur di Desa Mentawak, Senyubuk, Pembaharuan, dan Mayang.

e) Kawasan Perkebunan Rakyat
Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 Hektar, penutupan tajuk tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar. Rencana Kawasan Perkebunan Rakyat Kabupaten Belitung Timur Berada di Kecamatan Dendang dengan luas 7 (tujuh) hektar.

f) Kawasan peruntukan pertanian
Kawasan budidaya pertanian adalah kawasan dengan fungsi utama pertanian, didasarkan pada kondisi alami, manusia, dan buatan. Pemanfaatan lahan untuk pertanian dikelompokkan pada peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Rencana pengembangan kawasan budidaya pertanian Kabupaten Belitung Timur, meliputi:
- Kawasan pertanian tanaman pangan seluas 4.513 ha yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Belitung Timur.
- Kawasan pertanian hortikultura seluas 50.999 ha yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Belitung Timur.
- Kawasan perkebunan seluas 44.442 ha yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Belitung Timur.
- Kawasan peternakan tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Belitung Timur.
- Kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung seluas 662 ha berada di Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Damar, dan Kecamatan Simpang Renggiang yang juga ditetapkan sebagai zona tunda (*holding zone*).

g) Kawasan peruntukan perikanan
Kawasan perikanan yang dialokasikan di Kabupaten Belitung Timur meliputi kawasan peruntukan perikanan tangkap, dan kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan dilengkapi dengan sarana penunjang berupa terminal khusus (pelabuhan) perikanan dan tempat pelelangan ikan. Rencana Kawasan Perikanan tangkap di Kabupaten Belitung Timur ditetapkan di badan air pada seluruh wilayah kecamatan. Kawasan Perikanan budidaya ditetapkan di Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Simpang Pesak dengan luas 2.180 (dua ribu seratus delapan puluh) hektar.

h) Kawasan peruntukan pertambangan
Kegiatan penambangan terdiri dari kawasan pertambangan mineral logam, kawasan pertambangan mineral bukan logam, dan kawasan peruntukan pertambangan batuan. kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Belitung Timur tersebar di sebagian besar wilayah Kabupaten Belitung Timur. Kawasan pertambangan diarahkan (sesuai dengan Kuasa Pertambangan/KP dan Surat Izin Penambangan Daerah/SIPD) pada seluruh kecamatan. Luas rencana kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Belitung Timur seluas 33.707 hektar,

i) Kawasan peruntukan permukiman

Rencana pengembangan kawasan permukiman mencapai 14.802 hektar yang terdiri atas peruntukan pengembangan permukiman kawasan perkotaan dan pengembangan permukiman kawasan perdesaan. Pengembangan permukiman kawasan perkotaan diarahkan pada wilayah-wilayah yang secara eksisting sudah menjadi permukiman (permukiman swadaya) secara linear mengikuti perkembangan jaringan jalan dan tidak mengarah pada wilayah sempadan pantai dan tidak mengekspansi hutan lindung. Rencana pengembangan permukiman kawasan perkotaan di Kabupaten Belitung Timur diarahkan pada PKW Manggar pada Kecamatan Manggar dan Kecamatan Damar, PKL Kelapa Kampit pada Kecamatan Kelapa Kampit, PKL Gantung pada Kecamatan Gantung, dan PPK Dendang pada Kecamatan Dendang.

Sementara itu, pengembangan permukiman kawasan pedesaan di Kabupaten Belitung Timur diarahkan pada kawasan-kawasan yang sudah ada atau sudah terbangun dan pada kawasan baru yang tumbuh secara linier dengan tetap memperhatikan keseimbangan kawasan peruntukan lainnya seperti sawah dan kawasan lindung. Rencana kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Belitung Timur ditetapkan di Desa Buku Limau, Desa Kelubi, Desa Bentaian Jaya, Desa Buding, Desa Cendil, Desa Jangkar Asam, Desa Limbongan, Desa Batu Penyu, Desa Selinsing, Desa Lilangan, Desa Jangkang, Desa Dendang, Desa Balok, Desa Nyuruk, Desa Mengkubang, Desa Air Kelik, Desa Sukamandi, Desa Burung Mandi, Desa Mempaya, Desa Renggiang, Desa Simpang Tiga, Desa Lintang, Desa Air Madu, Desa Simpang Pesak, Desa Dukong, Desa Tanjung Kelumpang, dan Desa Tanjung Batu Itam. Perluasan areal permukiman tetap diperbolehkan dengan tetap memperhatikan kelestarian kawasan pertanian yang merupakan peruntukan dominan di pedesaan.

j) Kawasan peruntukan pariwisata

Rencana Kawasan pariwisata di Kabupaten Belitung Timur memiliki luas kurang lebih 1.791 (seribu tujuh ratus sembilan puluh satu) hektar ditetapkan di Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggiang, dan Kecamatan Simpang Pesak. Selain Kawasan Pariwisata Terdapat daya tarik atau atraksi wisata terdiri atas :

a. Air Terjun Dam II dan Bukit Sengkelut di Kecamatan Damar
b. Pulau Ayam, Bendungan Pice, Gunung Setiong, Kelenteng Sun Li San, Kampoeng FiFI, Kawasan Wisata Sastra dan Budaya Selinsing, Klenteng Fuk Tet Che, Kolam Renang Desa Lenggang, Museum Kata Andrea Hirata, dan Situs Batu Penyu Di Kecamatan Gantung
c. Kulong Cinte, Jeramba Surge, Bukit Pangkuan, Pantai Sengaran, Open Pit Nam Salu, dan Stoven, Geosite Hutan Kerangas, Geosite Pantai Batu Pulas, Geosite Pulau Keran, Pemandian AIr Panas, Agrowista Duren Montong, Museum Istiqamah Buding, Kelenteng Pu de ce, Kelenteng Pak Kung di Kecamatan Kelapa Kampit
d. Kulong MInyak, Pulau Siadong, Batu Begalang, Pulau Penanas, Pulau Memperak, Wisata kolong Bandung, Pulau Buku Limau, Bukit Samak A1, Galeri Maritim, Water Boom Mekar Jaya di Kecamatan Manggar

e. Pantai Tanjung Tiram, Pulau Pipit, Kolam Renang Aik Lubang di Kecamatan Simpang Pesak, dan
f. Air Terjun Gurok Tindongan, Galeri Kampung Seni Bangek, dan Kawasan Persawahan Eks Jepang di Kecamatan Simpang Renggiang

k) Kawasan peruntukan industri

Rencana kawasan peruntukan industri (KPI) memiliki luas kurang lebih 959 (sembilan ratus lima puluh sembilan) hektar, ditetapkan di Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Damar, dan Kecamatan Simpang Renggiang. Ketentuan mengenai penataan ruang kawasan peruntukan industri diatur dengan peraturan Bupati tentang rencana detail tata ruang.

l) Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi merupakan penggambaran simpul lalu lintas dan angkutan jalan. Simpul transportasi meliputi terminal, pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, pelabuhan laut, dan atau bandar udara. Rencana kawasan transportasi memiliki luas kurang lebih 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hektar ditetapkan di Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Damar dan Kecamatan Simpang Pesak

m) Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan merupakan kawasan dengan karakteristik untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara. Rencana kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Belitung Timur memiliki luas kurang lebih 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) hektar terdiri dari

a. Daerah latihan Militer, Daerah Uji Coba Persenjataan Militer, dan Daerah Disposal Amunisi *Area Weapon Range* Buding di Kecamatan Kelapa Kampit.
b. Komando Rayon Militer (Koramil) 414-02 Manggar dan Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Belitung Timur di Kecamatan Manggar
c. Koramil 414-03 Gantung di Kecamatan Gantung;
d. Koramil 414-05 Kelapa Kampit di Kecamatan Kelapa Kampit
e. Polisi Resor Belitung Timur dan Polisi Sektor Manggar di Kecamatan Manggar
f. Polisi Sektor Dendang di Kecamatan Dendang
g. Polisi Sektor Kelapa Kampit di Kecamatan Kelapa Kampit

n) Kawasan strategis

Kawasan strategis dalam hal ini dimaksudkan sebagai kawasan yang mendapatkan peran dan fungsi khusus untuk mendukung pembangunan Kabupaten Belitung Timur. Kawasan strategis Kabupaten Belitung Timur terdiri dari kawasan strategis kepentingan ekonomi dan kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi
  a. Kawasan Perkotaan Manggar di Kecamatan Manggar dan Kecamatan Damar
  b. Kawasan Perkotaan Gantung di Kecamatan Gantung
  c. Kawasan Industri Aik Kelik di Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Damar.
  d. Geopark dan Kawasan Pariwisata Burung Mandi di Kecamatan Damar
  e. Geopark dan Kawasan Pariwisata Pantai Punai di Kecamatan Simpang Pesak
  f. Kawasan Pariwisata Pantai Kuale Tambak di Kecamatan Damar
- Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas :
  a. Geopark Open Pit Nam Salu dan Geopark Pantai Batu Pulas di Kecamatan Kelapa Kampit
  b. Geopark Textile Gurumerdang di Kecamatan Damar
  c. Kawasan Gunung Badau dan Gunung Mangkro di Kecamatan Dendang
  d. Kawasan Gunung Kematang Panjang di Kecamatan Kelapa Kampit

II.1.C **Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**

1. Batasan Wilayah Kajian

Kabupaten Belitung Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Belitung pada bagian barat, Laut Natuna pada bagian utara, Selat Karimata pada bagian timur dan Laut Jawa pada bagian selatan. Wilayah kajian mempunyai tujuh kecamatan dengan 39 desa.

Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Belitung Timur meliputi Kecamatan Manggar, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Gantung, Kecamatan Damar, Kecamatan Dendang, Kecamatan Simpang Renggiang dan Kecamatan Simpang Pesak. Total luas wilayah kajian sebesar 250.691 Ha dimana Kecamatan Gantung mempunyai luasan terbesar yakni 54.630 Ha. Sementara itu, Kecamatan Manggar mempunyai luasan terendah yakni 22.900 Ha.

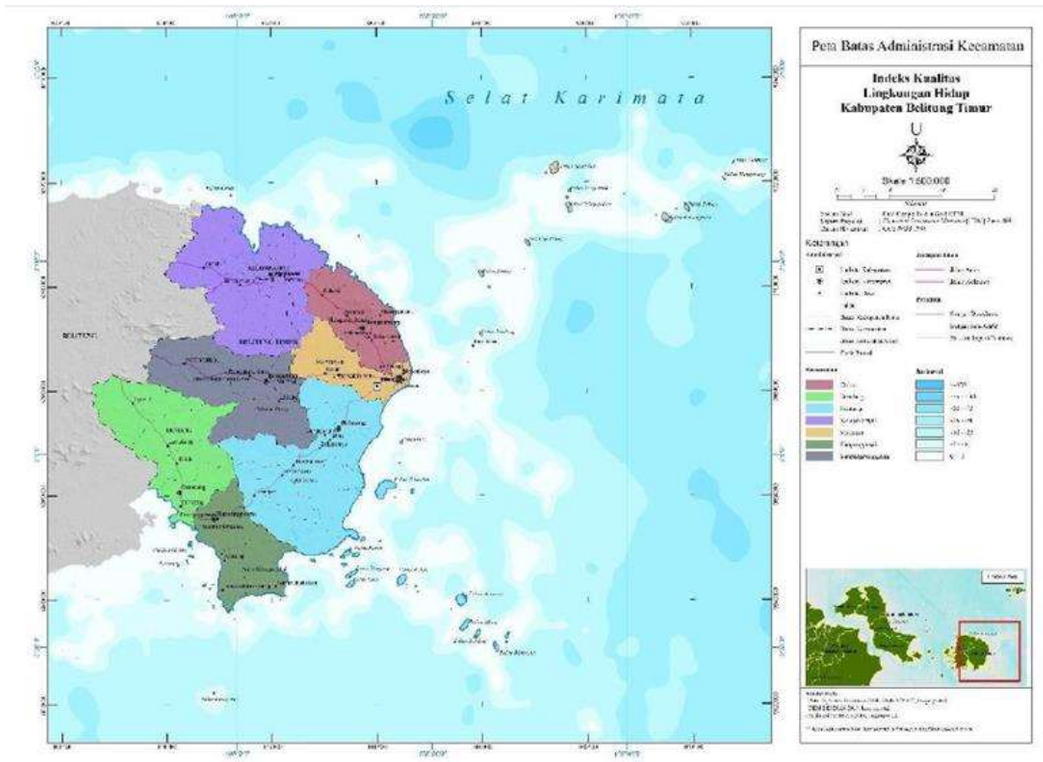

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur

Gambar 2. 8 Peta Wilayah Perencanaan Administrasi

Peta batasan fungsional di Kabupaten Belitung Timur diambil dari dua pertimbangan utama, yaitu kondisi DAS dan batas laut. Batasan fungsional wilayah laut diambil dengan jarak 12 mil dari pulau utama Belitung Timur. Secara lebih jelas, peta wilayah fungsional dapat diamati pada gambar berikut ini.

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur

Gambar 2. 9 Peta Wilayah Fungsional

2. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kapasitas daya dukung lingkungan hidup KLHS RPJM Kabupaten Belitung Timur mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun

2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah. Dalam perencanaan pembangunan, pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menjadi acuan penting untuk mengetahui batasan maksimal kapasitas lingkungan terhadap pemanfaatan ruang serta mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia atau penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Besarnya kapasitas tersebut di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan.

1) Daya Dukung Lingkungan

Daya dukung lingkungan hidup terbatas pada kapasitas penyediaan sumber daya alam, terutama berkaitan dengan kemampuan lahan serta ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dalam suatu ruang atau wilayah. Dalam identifikasi kapasitas daya dukung lingkungan hidup, dilakukan beberapa tahapan analisis yang dilakukan untuk mengetahui alokasi pemanfaatan ruang yang dilakukan berdasarkan 2 (dua) pendekatan, yaitu:

- Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan;
- Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air.

Perhitungan daya dukung lingkungan hidup selain mengacu pada Permen LH 17 Tahun 2009 juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan lain yaitu:

- Perhitungan Daya Dukung Pangan
  Perhitungan daya dukung pangan dilakukan dengan pendekatan perhitungan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan dan perhitungan daya dukung lahan pertanian padi (Fuad, et al, yang termuat dalam makalah Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI: 255-266).
- Perhitungan Daya Dukung Lahan Untuk Permukiman
  Perhitungan daya dukung lahan untuk permukiman dalam Penyusunan KLHS RPJM Kabupaten Belitung Timur dilakukan dengan pendekatan permukiman (bangunan) berdasarkan Dr. Ing Ir. Widodo Brontowiyono, M.Sc (KLHS untuk RTRW dengan pendekatan Daya Dukung Lingkungan Tahun 2016).
- Perhitungan Daya Tampung Wilayah
  Perhitungan daya tampung wilayah dilakukan dengan pendekatan berdasarkan Dr. Lutfi Muta'ali, S.Si.MSP (Daya Dukung Lingkungan Untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah).

2) Perbandingan Antara Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan (Beras)

Analisis perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan dalam hal ini kebutuhan padi/beras dihitung mengacu pada pendapat pakar Fuad, et, al, yang termuat dalam makalah Seminar nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI: 255-266. Perhitungan ketersediaan dan kebutuhan pangan dihitung berdasarkan laju pertumbuhan penduduk pada tahun rencana.

a) Dari Sisi Permintaan (*Demand*)
   - Menghitung laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Belitung Timur per tahun. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Belitung Timur berdasarkan data rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2016-2022 sebesar 0,0184.

- Menghitung jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur tahun 2025-2029 berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk sampai dengan tahun 2025 dan tahun 2029. Jumlah penduduk tahun 2025: 140.065 jiwa (hasil perhitungan proyeksi penduduk). Jumlah penduduk tahun 2026: 142.466 jiwa (hasil perhitungan proyeksi penduduk). Jumlah penduduk tahun 2027: 144.866 jiwa (hasil perhitungan proyeksi penduduk). Jumlah penduduk tahun 2028: 147.267 jiwa (hasil perhitungan proyeksi penduduk). Jumlah penduduk tahun 2029: 149.667 jiwa (hasil perhitungan proyeksi penduduk).
- Menentukan indeks konsumsi beras per tahun. Dalam hal ini, indeks konsumsi beras per tahun ditentukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 16/Permentan/HK.140/4/2014 tentang Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2015 dan mengacu juga pada Direktorat Pangan dan Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar 124,89 kg/kapita/tahun. Berikut adalah tabel kebutuhan beras Kabupaten Belitung Timur tahun 2025-2029.

TABEL 2. 5 KEBUTUHAN BERAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	INDEKS KONSUMSI BERAS (KG/KAP/TH)	KEBUTUHAN BERAS (TON)	KEBUTUHAN PADI/GKG (TON)	KEBUTUHAN LUAS PANEN (HA)
2025	140.065	124,89	17.492.727,44	27.400.888,85	6.227.474,739
2026	142.466	124,89	17.792.528,28	27.870.501,70	6.334.204,932
2027	144.866	124,89	18.092.329,13	28.340.114,55	6.440.935,125
2028	147.267	124,89	18.392.129,97	28.809.727,40	6.547.665,317
2029	149.667	124,89	18.691.930,81	29.279.340,25	6.654.395,510

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJM Kabupaten Belitung Timur

b) Dari Sisi Ketersediaan (*Supply*)

i. Menghitung produksi padi di Kabupaten Belitung Timur dengan pendekatan:
Total produksi padi (ton) = luas lahan padi sawah (ha) x IP x Produktivitas padi (ton/ha) dengan hasil IP pada tahun perencanaan 2025 hingga 2029 diasumsikan sama, yaitu:

IP = 812,3/3042 = 0,27
(catatan: luas panen sawah pada tahun 2025-2029 diasumsikan tetap 812,3 ha)

ii. Hasil perhitungan produksi beras di Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 2. 6 PRODUKSI BERAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR

TAHUN	LUAS BAKU SAWAH (HA)	PRODUKSI PADI/GKG (TON)	INDEKS KONVERSI BERAS (KG)	PRODUKSI BERAS (TON)
2025	3.042	10.358,08	0,6384	6.612,598
2026	3.042	10.358,08	0,6384	6.612,598
2027	3.042	10.358,08	0,6384	6.612,598
2028	3.042	10.358,08	0,6384	6.612,598
2029	3.042	10.358,08	0,6384	6.612,598

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJM Kabupaten Belitung Timur

iii. Menunjukkan tingkat produktivitas lahan sawah dalam pemenuhan beras penduduk di Kabupaten Belitung Timur.

TABEL 2. 7 PRODUKTIVITAS LAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	PRODUKSI BERAS (TON)	KONSUMSI FISIK BERAS MINIMUM/TAHUN (TON)	TINGKAT PRODUKTIVITAS LAHAN SAWAH/SUPPLY BERAS (TON/ORANG/TAHUN)	KETERANGAN
2025	140.065	10.358,08	0,12	0,0476	Defisit
2026	142.466	10.358,08	0,12	0,0469	Defisit
2027	144.866	10.358,08	0,12	0,0462	Defisit
2028	147.267	10.358,08	0,12	0,0455	Defisit
2029	149.667	10.358,08	0,12	0,0448	Defisit

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Timur

Tingkat produktivitas lahan sawah pada tahun 2025 sebesar 0,0476 ton/orang/tahun dan terus turun hingga tahun 2029 menjadi 0,0448 ton/orang/tahun. Produktivitas lahan untuk pemenuhan pangan (beras) Kabupaten Belitung Timur tahun 2025-2029 mempunyai nilai lebih kecil dari 0,12 ton/orang/tahun sehingga dapat disimpulkan bahwa kebutuhan pangan (beras) di Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi defisit.

iv. Tabel perhitungan daya dukung lahan pertanian padi di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

TABEL 2. 8 DAYA DUKUNG LAHAN SAWAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

TAHUN	LUAS LAHAN YANG TERSEDIA (X)	LUAS LAHAN YANG DIPERLUKAN (K)	DAYA DUKUNG LAHAN (Ɗ)	KETERANGAN
2025	0,006	0,072	0,083	Ɗ < 1
2026	0,006	0,072	0,083	Ɗ < 1
2027	0,006	0,072	0,083	Ɗ < 1
2028	0,006	0,072	0,083	Ɗ < 1
2029	0,005	0,072	0,069	Ɗ < 1

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJM Kabupaten Belitung Timur

Perhitungan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kabupaten Belitung Timur, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Belitung Timur di akhir tahun perencanaan 2025-2029 mempunyai kondisi tidak mampu swasembada pangan dalam arti jumlah penduduknya di atas jumlah penduduk optimal dalam pemenuhan kebutuhan pangan (beras) masyarakat, di mana dari hasil perhitungan dapat diketahui nilai daya dukung lahan (Ɗ) mempunyai nilai < 1. Kondisi tersebut berarti bahwa Kabupaten Belitung Timur tidak mampu swasembada pangan. Perbandingan Antara Ketersediaan dan Kebutuhan Air. Perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan air dalam penyusunan KLHS RPJM/RPJP Kabupaten Belitung Timur dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

v. Koefisien limpasan

Untuk memudahkan, perhitungan koefisien limpasan dihitung berdasarkan tata guna lahan yang masing-masing wilayah. Koefisien limpasan tiap jenis tata guna lahan sebagai berikut.

TABEL 2. 9 KOEFISIEN LIMPASAN TIAP JENIS LAHAN

NO.	DESKRIPSI JENIS PERMUKAAN/GUNA LAHAN	KOEFISIEN LIMPASAN	KOEFISIEN LIMPASAN PENGGUNAAN LAHAN (CI)
1.	Kota, Jalan Aspal, Atap Genteng	0,7-0,9	0,3-0,1
2.	Kawasan industri	0,5-0,9	0,5-0,1
3.	Permukiman multi unit, pertokoan	0,6-0,7	0,4-0,3
4.	Kompleks perumahan	0,4-0,6	0,6-0,4
5.	Taman, pemakaman	0,3-0,5	0,7-0,5
6.	Pekarangan tanah berat		
	• > 7%	0,25-0,35	0,75-0,65
	• 2-7%	0,18-0,22	0,2-0,78
	• < 2%	0,13-0,17	0,87-0.83
7.	Pekarangan ringan		
	• > 7%	0,15-0,2	0,85-0,8
	• 2-7%	0,10-0,15	0,9-0,85
	• < 2%	0,05-0,10	0,95-0,99
8.	Lahan berat	0,40	0,6
9.	Padang rumput	0,35	0,65
10.	Lahan budidaya pertanian	0,30	0,7
11.	Hutan produksi	0,18	0,82
12.	Hutan tropis basah	0,03	0,97
13.	Semak belukar	0,07	0,93
14.	Sawah-sawah	0,15	0,85
15.	Daerah pertanian	0,40	0,6
16.	Daerah permukiman	0,70	0,3
17.	Bangunan padat	0,70-0,90	0,3-0,1
18.	Bangunan terpencar	0,30-0,90	0,7-0,1
19.	Jalan aspal	0,95	0,05
20.	Jalan tanah	0,13-0,50	0,87-0,5
21.	Lapir keras kerikil batu pecah	0,35-0,70	0,65-0,3
22.	Lapis keras beton	0,70-0,90	0,31-0,1
23.	Taman, halaman	0,05-0,25	0,95-0,75
24.	Tanah, lapang	0,10-0,30	0,9-0,7
25.	Kebun, ladang	0,00-0,20	1-0,8

Sumber: PermenLH No.17 Tahun 2009, Muta'ali, 2012, diolah

vi. Ketersediaan Air Tahun 2025-2029 (SA)
Perhitungan ketersediaan air tahun 2025-2029 menggunakan koefisien limpasan tertimbang berikut.

TABEL 2. 10 PERHITUNGAN KOEFISIEN LIMPASAN TERTIMBANG PADA TUTUPAN LAHAN

NO.	DESKRIPSI JENIS PERMUKAAN/GUNA LAHAN	KOEFISIEN LIMPASAN PENGGUNAAN LAHAN (CI)	LUAS HA (AI)	CI X AI
1.	Kawasan Lindung	0,97	46.033	44.652,01
2.	Kawasan Hutan Produksi	0,82	57.539	47.181,98
2.	Kawasan peruntukan pertanian	0,70	98.483	68.938,1
4.	Kawasan peruntukan perikanan	0,90	10	9

NO.	DESKRIPSI JENIS PERMUKAAN/GUNA LAHAN	KOEFISIEN LIMPASAN PENGGUNAAN LAHAN (CI)	LUAS HA (AI)	CI X AI
5.	Kawasan pertambangan	0,70	33.707	23.594,9
6.	Kawasan peruntukan industri	0,30	1.532	459,6
7.	Kawasan permukiman	0,30	14.802	4.440,6
8.	Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan	0,70	309	216,3
	Jumlah		252.415	189.492,5

Sumber: RTRW Kabupaten Belitung Timur 2014-2034 dan KLHS RPJM Kabupaten Belitung Timur, 2024

Hasil perhitungan ketersediaan air untuk wilayah Kabupaten Belitung Timur dihitung dengan persamaan rasional berikut (PermenLH No. 17 Tahun 2009) 70.375.230.975 m^3/tahun.

vii. Ketersediaan air di Kabupaten Belitung Timur juga mempertimbangkan ketersediaan air baku yang berasal dari sungai. Potensi ketersediaan air baku tersebut disajikan pada tabel di bawah ini.

TABEL 2. 11 PERHITUNGAN POTENSI AIR BAKU

NO.	SUMBER AIR BAKU	DEBIT (M3 PER TAHUN)
1.	Kulong Hutan Kota Manggar	87.310
2.	Kulong Pam Manggar	451.680
3.	Kulong Nek Tini	124.805
4.	Kulong Kero	90.860
5.	Kulong Tebat Gadong	912.115
6.	Kulong A Limbongan	17.620
7.	Kulong D Lilangan	17.125
8.	Sungai Lenggang	9.278.000.000
9.	Sungai Manggar	26.256.000.000
	Jumlah	**35.535.576.710**

Sumber: IKPLHD Kabupaten Belitung Timur, 2022 dan KLHS RPJM Kabupaten Belitung Timur, 2024

Debit sumber air baku di kabupaten Belitung Timur adalah sebesar 35.535.576.710 m3/tahun dengan sumber terbesar dari Sungai Manggar sebesar 26.256.000.000 m3/tahun dan yang terkecil bersumber dari Kulong D Lilangan sebesar 17.125 m3/tahun. Potensi ketersediaan air merupakan total jumlah potensi limpasan air maksimal dan potensi air baku sebesar 105.910.807.685 m3/tahun. Ketersediaan air total Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2025 hingga 2029 diasumsikan sama yaitu sebesar 105.910.807.685 m3/tahun yang diuraikan pada tabel berikut:

TABEL 2. 12 PERHITUNGAN KETERSEDIAAN AIR KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

NO.	POTENSI KETERSEDIAAN AIR TAHUN 2025-2029	DEBIT (M^3/TAHUN)
1.	Potensi ketersediaan air berdasarkan hasil perhitungan koefisien limpasan (SA)	7.434.324.592
2.	Potensi ketersediaan air baku	35.535.576.710
	Jumlah	**42.969.901.302**

Sumber: KLHS RPJM Kabupaten Belitung Timur, 2024

viii. Perhitungan Kebutuhan (*Demand*) Air (DA)

Secara lebih detail, kebutuhan air total didasarkan pada perhitungan kebutuhan air penduduk dari sisi domestik dan non-

domestik dengan dilakukan proyeksi dari tahun 2025-2029. Selain itu, perhitungan kebutuhan air juga didasarkan kebutuhan air lahan dan keperluan air peternakan. Hasil perhitungan tersebut dapat diamati pada tabel berikut.

TABEL 2. 13 PERHITUNGAN KEBUTUHAN AIR DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

URAIAN	JUMLAH PENDUDUK	SATUAN	KEBUTUHAN AIR (LITER/ORANG/ HARI)	TOTAL HARI/ TAHUN	KEBUTUHAN AIR DOMESTIK (M^3/TAHUN)
Tahun 2025	138.842	orang	120	365	6.081.276,86
Tahun 2026	141.019	orang	120	365	6.176.651,55
Tahun 2027	143.231	orang	120	365	6.273.522,03
Tahun 2028	145.477	orang	120	365	6.371.911,77
Tahun 2029	147.759	orang	120	365	6.471.844,59

URAIAN	KEBUTUHAN AIR DOMESTIK (M3/TAHUN)	KEBUTUHAN AIR NON DOMESTIK	KEBUTUHAN AIR (M3/TAHUN)
Tahun 2025	6.081.277	0,3	1.824.383,06
Tahun 2026	6.176.652	0,3	1.852.995,46
Tahun 2027	6.273.522	0,3	1.882.056,61
Tahun 2028	6.371.912	0,3	1.911.573,53
Tahun 2029	6.471.845	0,3	1.941.553,38

URAIAN	BESARAN LUAS LAHAN	SATUAN	KEBUTUHAN AIR (LITER/DETIK/HA)	TOTAL HARI/TAHUN	KEBUTUHAN AIR (M^3/TAHUN)
Kebun	56.938,16	Ha	0,7	365	1.256.921.269,63
Sawah	587,87	Ha	1	365	18.539.068,32
Ladang	53.541,72	Ha	0,7	365	1.181.944.177,34

URAIAN	JUMLAH TERNAK	SATUAN	KEBUTUHAN AIR (LITER/TERNAK /HARI)	TOTAL HARI/ TAHUN	KEBUTUHAN AIR (M^3/TAHUN)
Sapi	1961	ekor	40	365	28.631
Kerbau	108	ekor	40	365	1.577
Kuda	3	ekor	40	365	44
Kambing	296	ekor	5	365	540
Babi	313	ekor	6	365	685
Unggas	333.332	ekor	0,6	365	73.000
Total Kebutuhan Air tahun 2025					**2.465.414.651,79**
Total Kebutuhan Air tahun 2026					**2.465.538.638,89**
Total Kebutuhan Air tahun 2027					**2.465.664.570,52**
Total Kebutuhan Air tahun 2028					**2.465.792.477,18**
Total Kebutuhan Air tahun 2029					**2.465.922.389,84**

Sumber: KLHS RPJM Kabupaten Belitung Timur, 2024

Kebutuhan total air di Kabupaten Belitung Timur untuk pemenuhan kebutuhan penduduk, kebutuhan non domestik, kegiatan pertanian, dan kegiatan peternakan sebesar 2.465.414.651,79 m3/tahun pada tahun 2025, pada tahun 2026 sebesar 2.465.538.638,89 m3/tahun, pada tahun 2027 sebesar 2.465.664.570,52 m3/tahun, pada tahun 2028 sebesar 2.465.792.477,18 m3/tahun, serta tahun 2029 sebesar 2.465.922.389,84 m3/tahun. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan air tahun 2025 hingga 2029 meningkat setiap tahunnya. Total kebutuhan air lebih kecil

dari ketersediaan air tahun 2025 hingga 2029 (42.969.901.302 m3/tahun).

ix. Penentuan Status Daya Dukung Air

Hasil perhitungan daya dukung lahan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 didapatkan bahwa sampai dengan tahun 2029 dalam kondisi surplus karena nilai SA > DA. hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan supply air setempat masih dapat mencukupi kebutuhan air di wilayah tersebut. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi koefisien limpasan menjadi besar seperti berkurangnya area peresapan air tanah, pertambahan lahan terbangun, terdapat lahan dengan tingkat erosi yang tinggi sehingga mengurangi volume air yang tersimpan ke dalam tanah, serta kondisi geologis wilayah seperti wilayah yang termasuk dalam bagian Pegunungan Kendeng yang cenderung kering dan tandus.

Penyediaan kebutuhan air secara keseluruhan dilakukan melalui upaya pemanfaatan sumber daya air dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, mempertahankan kontinuitas, meningkatkan potensi ketersediaan air melalui peningkatan areal resapan air seperti ruang terbuka hijau, peningkatan fungsi kawasan lindung, pemanenan air melalui pembuatan sumur resapan, biopori, dan pembuatan embung atau waduk.

x. Perhitungan Daya Dukung Lahan untuk Permukiman

Nilai daya dukung lahan untuk bangunan (DDLB) Kabupaten Belitung Timur berdasarkan hasil analisis di atas sebesar 9,1. Kondisi tersebut menggambarkan daya dukung lahan permukiman di Kabupaten Belitung Timur termasuk dalam kategori daya dukung lahan permukiman baik berarti Kabupaten Belitung Timur masih mampu menampung rencana pengembangan lahan terbangun terutama zona perumahan. Kabupaten Belitung Timur perlu menjaga kualitas lingkungan terbangun dalam pengembangannya dan harus diikuti dengan upaya menjaga kualitas lingkungan, sehingga lahan tetap mempunyai kemampuan dalam mendukung aktivitas yang ada di atasnya.

xi. Perhitungan Daya Tampung Wilayah/Demografi

Hasil perhitungan daya dukung lahan di Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 sebesar 1,80 ha/jiwa, tahun 2026 sebesar 1,77 ha/jiwa, tahun 2027 sebesar 1,74 ha/jiwa, tahun 2028 sebesar 1,71 ha/jiwa, tahun 2029 sebesar 1,68 ha/jiwa. Nilai tersebut diartikan sebagai Kabupaten Belitung Timur mempunyai daya tampung wilayah yang masih tidak mampu menampung jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun perencanaan jangka menengah pada tahun 2029.

Hasil analisis daya dukung yang telah dilakukan terhadap ketersediaan dan kebutuhan air, ketersediaan dan kebutuhan pangan serta perhitungan daya tampung wilayah dapat disimpulkan bahwa daya dukung Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi cenderung defisit atau terlampaui pada penyediaan pangan, dan surplus pada ketersediaan air dan daya dukung lahan permukiman dan daya tampung wilayah. Sehingga Kabupaten Belitung Timur tidak dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat dalam penyediaan pangan. Sedangkan Kabupaten Belitung Timur mampu memenuhi penyediaan air hingga tahun perencanaan jangka menengah pada tahun 2029.

TABEL 2. 14 KESIMPULAN HASIL ANALISIS DAYA DUKUNG LINGKUNGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	DAYA DUKUNG	KONDISI
1.	Pangan	Kabupaten Belitung Timur mengalami defisit dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang berarti tidak mampu swasembada pangan dalam arti jumlah penduduknya di atas jumlah penduduk optimal dalam pemenuhan kebutuhan pangan (beras) masyarakat.
2.	Air	Surplus, belum terlampaui. Ketersediaan supply air setempat masih dapat mencukupi kebutuhan air di wilayah.
3.	Daya dukung lahan permukiman dan daya tampung wilayah	• Nilai daya dukung lahan untuk bangunan (DDLB) sebesar 9,1, termasuk dalam kategori daya dukung lahan permukiman baik (DDLB > 3) sehingga masih mampu menampung rencana pengembangan permukiman bangunan sesuai tata ruang yang berlaku. • Daya tampung wilayah mampu menampung jumlah penduduk.

Sumber: KLHS RPJM Kabupaten Belitung Timur, 2024

xii. Kualitas Air Sungai

Kabupaten Belitung Timur merupakan kabupaten dengan pulau-pulau kecil yang memiliki banyak sungai. Kondisi topografi Pulau Belitung yang berbukit-bukit kecil dan dataran bergelombang menjadikan pola aliran sungai di Kabupaten Belitung Timur menjadi pola dendritik, yaitu pola yang berbentuk seperti cabang batang pohon, yang sebagian besar berada di daerah datar. Hal ini yang menjadikan Kabupaten Bangka Belitung memiliki potensi air sungai sebagai pemasok kebutuhan akan air bersih untuk masyarakat setempat. Berikut adalah DAS yang berada di Kabupaten Belitung Timur yang tersaji dalam di bawah ini.

TABEL 2. 15 DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) BELITUNG TIMUR

NO.	NAMA DAS	LUAS (HA)	KELILING (KM)
1	DAS Tanjung Batu Itam	738,69	14,68
2	DAS Pakem	531,16	9,78
3	DAS Kebal	6.978,12	47,18
4	DAS Tanjung Batu Air	12.346,94	87,77
5	DAS Getah	862,13	14,33
6	DAS Sekayu	8.946,10	48,47
7	DAS Kripit	935,69	15,00
8	DAS Keladi	1.672,81	22,50
9	DAS Buding	57.292,00	148,07
10	DAS Sagu	10.751,23	70,88
11	DAS Tanjung Asem	2.483,60	28,38
12	DAS Mang	694,48	12,38
13	DAS Nayo	825,83	12,75
14	DAS Cerucuk	55.177,18	132,44
15	DAS Burung Mandi	1.743,34	1.743,34
16	DAS Manggar	27.951,22	91,39
17	DAS Ngarawan	4.916,73	37,20
18	DAS Linggang	81.620,46	175,30
19	DAS Ungu	32.703,97	113,73
20	DAS Dendang	1.963,18	26,96
21	DAS Limbungan	15.433,61	87,79
22	DAS Pesak	7.425,78	49,32
23	DAS Oma Tengka	1.914,82	30,98
24	DAS Kelumpang	1.023,94	14,77
25	DAS Langir	888,11	14,44
26	DAS Sapei	22.340,14	76,99

Sumber: RTRW Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 – 2034

Air sungai selain menjadi sumber air bersih untuk kebutuhan domestik juga digunakan untuk kegiatan industri, pertanian dan perikanan. Karena memiliki fungsi tersebut, maka sangat layak jika air sungai menjadi indikator kualitas lingkungan hidup disamping kegiatan pembangunan khususnya penggunaan lahan di sekitar sungai sebagai sumber air yang semakin pesat dan tentunya akan berdampak pada kualitas air sungai tersebut (IKTLH Beltim 2020). Ada empat jejaring sungai utama yang ada di Belitung Timur yaitu pada tabel berikut.

TABEL 2. 16 SUNGAI DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	NAMA SUNGAI	KETERANGAN
1	Sungai Buding	Di bagian utara
2	Sungai Manggar	Di timur laut
3	Sungai Gantung	Di timur
4	Sungai Dendang	Di selatan

Sumber: RTRW Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 – 2034

Kondisi sungai di Kabupaten Belitung Timur yang pusat pemerintahannya di Kota Manggar, sejak tahun 2016 mulai terdegradasi akibat aktivitas perkebunan skala besar dan tambang timah liar. Banyak hutan dan lahan yang dibuka dan digali yang berakibat terjadinya banjir besar pada Juli 2017 dengan ketinggian air berkisar 2-3 meter. Banjir ini kali pertama terjadi di Kabupaten Belitung Timur (Ismi N, 2020 ; dalam berita yang diunggah di Mongabay dengan judul “Ketika Sungai-sungai di Belitung Rusak”).

Penurunan kualitas air sungai di Kabupaten Belitung Timur disebabkan antara lain karena proses pencemaran sebagai akibat masuknya air limbah ke sungai, baik berasal dari limbah pertambangan maupun limbah domestik rumah tangga. Tingkat pencemaran menjadi semakin tinggi dan kompleks dengan meningkatnya jumlah beban pencemar limbah yang masuk ke sungai dan atau dengan menurunnya debit aliran mantap air sungai yang bersangkutan.

Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun akan meningkatkan kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Air bersih merupakan salah satu penunjang kebutuhan bagi manusia yaitu sebagai air minum. Sumber air bersih di wilayah Kabupaten Belitung Timur sebagian besar berasal dari air tanah, yang berupa sumur gali maupun sumur dalam dan sebagian lagi menggunakan air dari PDAM yang bersumber dari air permukaan. Pertambahan penduduk juga menyebabkan semakin bertambahnya limbah, mulai dari limbah rumah tangga dan industri. Limbah domestik yang berasal dari permukiman dan industri kecil/rumah tangga yang dibuang langsung ke sungai dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada air sungai. Kegiatan di sektor perkebunan, pertanian dan industri juga menimbulkan dampak terjadinya penurunan kualitas air. Sungai yang ada Belitung Timur dalam pengamatan nampak bahwa secara fisik air telah terjadi perubahan warna. Warna air yang dulunya jernih menjadi keputihan dan keruh. Perubahan warna tersebut mengindikasikan telah terjadi pencemaran.

xiii. Kualitas Udara

Kualitas udara di suatu lokasi atau wilayah sangat tergantung dari aktivitas beberapa kegiatan terutama kegiatan industri dan transportasi yang mengeluarkan emisi gas yang mempengaruhi udara ambien. Pencemaran udara pada umumnya terjadi sebagai akibat kegiatan (1) transportasi, (2) industri, (3) rumah tangga atau pemukiman, (4) persampahan. Parameter pengukuran kualitas udara dilakukan pada parameter kunci berkontribusi terhadap pencemaran udara atau yang bisa menggambarkan kondisi kualitas udara di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Parameter yang diukur secara langsung sebagai hasil pengukuran lapangan antara lain temperatur, kelembaban, arah angin dominan, kecepatan angin rata-rata, dan keadaan cuaca. Sedangkan beberapa parameter yang diukur dan memerlukan analisis laboratorium yaitu Sulfur Dioksida (SO2), Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Dioksida (NO2), Oksidan (O3), Debu (TSP), Timbal (Pb), Amonia (NH3), dan Hidrogen Sulfida (H2S).

Meningkatnya kegiatan industri dan penggunaan kendaraan bermotor di Belitung Timur yang menghasilkan sisa emisi yang menyebabkan pencemaran udara. Kualitas udara dikatakan baik mengandung komponen gas nitrogen 78% dan oksigen 21% serta karbondioksida 0,035%. Menurut Kementrian Lingkungan Hidup dalam Buku IKLH Nasional 2016 menyebutkan bahwa, Indonesia mengalami kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota dalam beberapa dekade terakhir yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya partikel (PM10, PM2,5) dan oksidan/ozon (O3) yang semakin meningkat. Hal ini menyebabkan pentingnya penyusunan dan perhitungan indeks kualitas lingkungan sebagai informasi bagi masyarakat tentang kondisi kualitas udara dan sebagai dasar penyusunan kebijakan pengelolaan kualitas udara untuk melindungi manusia dan ekosistem (IKTLH Beltim 2020).

Kualitas udara di wilayah Belitung Timur masih tergolong baik. Namun demikian, aktivitas masyarakat seperti mobilitas/transportasi, penggunaan bahan bakar, cerobong asap pabrik serta pembakaran hutan dan lahan bukan tidak berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Aktivitas – aktivitas tersebut menghasilkan gas buang berupa karbon monoksida (CO), Sulfur Dioksida (SO2) dan Oksida Nitrogen (NO2). Kebakaran hutan yang juga sering terjadi menjadi pemicu pencemaran udara karena melepaskan asap dan emisi gas karbon dioksida (CO2). Meskipun secara keseluruhan kualitas udara ambien di Kabupaten Belitung Timur masih dalam batas normal atau belum mengalami pencemaran udara yang begitu berat atau permanen, namun terjadinya penurunan kualitas udara ambien terjadi akibat akumulasi buangan limbah gas dari kegiatan industri dan gas buangan dari kendaraan bermotor yang bercampur dengan udara atmosfer yang ada di lingkungan tidak dapat dihindari.

Kualitas udara ambien di Kabupaten Belitung Timur tahun 2019 untuk parameter CO2, CO, NO2, HC, SO2, PM10 menunjukan

hasil dalam kategori baik, karena seluruh parameter lebih rendah dibandingkan nilai baku mutu udara ambien. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Belitung Timur tahun 2019 yang dipantau dengan metode passive sampler untuk parameter NO2 dan SO2 menghasilkan IKU pada kriteria sangat baik dengan nilai IKU sebesar 96,50 (IKTLH Beltim 2020).

xv. Kondisi Limbah

Kabupaten Belitung Timur sebagai wilayah yang struktur geologinya banyak mengandung batuan granit (kaolin dan timah), batuan aluvial pasir (pasir kali), serta batuan kuarsa dan pasir pada tahun 2005 telah berkembang berbagai jenis usaha pertambangan bahan galian golongan C. Pertambangan timah di Belitung dilakukan dengan sistem terbuka (*open pit*), dengan membongkar lapisan tanah atas (*top soil*) untuk mengambil endapan timah aluvial yang muncul sebagai cassiterite (SnO2). Bijih timah tersebut dipisahkan melalui proses pencucian dan sebagian besar hasil pemisahan tersebut berupa tanah dan lempung dengan tekstur berpasir yang dikenal tanah limbah tambang timah (*tin tailings soil*) (Widhiyatna et al. 2006).

Selain limbah hasil tambang, peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Belitung Timur tentunya akan menghasilkan sampah domestik atau sampah rumah tangga yang lebih banyak. Sebagai upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah sampah di Belitung Timur melalui Peraturan Daerah No 8 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain :

- Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang menggunakan sistem *sanitary landfill* di Desa Sukamandi Kecamatan Damar.
- Pembangunan Tempat Pemrosesan Sementara (TPS) yang tersebar di tiap kecamatan di seluruh wilayah kabupaten.
- Pembangunan Sistem Peralihan Angkut (SPA) kecamatan di Kecamatan Kelapa Kampit dan Gantung.
- Pola penanganan persampahan 3R (*reduce - reuse - recycle*).
- Sosialisasi tentang pengelolaan sampah dan kesadaran kebersihan
- Peningkatan anggaran untuk pengelolaan persampahan.
- Pengelolaan sampah organik dengan menggunakan larva *Black Soldier Fly* (BSF)

3. Perkiraan Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan di Kabupaten Belitung Timur perlu dilakukan identifikasi untuk mendapatkan data yang spesifik dan akurat. Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh beberapa faktor dan dapat diindikasikan dari lahan kritis dan alih fungsi lahan. Secara rinci kondisi lahan kritis dan alih fungsi lahan sebagai berikut.

1) Lahan Kritis

Lahan kritis adalah lahan yang mengalami proses kerusakan fisik, kimia dan biologi karena tidak sesuai penggunaan dan kemampuannya, yang dapat membahayakan fungsi hidrologis, orologis, produksi pertanian, permukiman dan kehidupan sosial ekonomi dan lingkungan (Puslittanak, 1997). Lahan kritis merupakan lahan tidak produktif karena pengelolaan dan penggunaan tanah yang tidak atau kurang memperhatikan syarat-

syarat konservasi tanah dan air, sehingga lahan mengalami kerusakan, kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada batas yang telah ditentukan atau diharapkan (Romenah, dkk., 2010). Secara umum lahan kritis merupakan salah satu indikator adanya degradasi lingkungan sebagai dampak dari berbagai jenis pemanfaatan sumber daya lahan yang kurang bijaksana (Nugroho dan Prayogo, 2008).

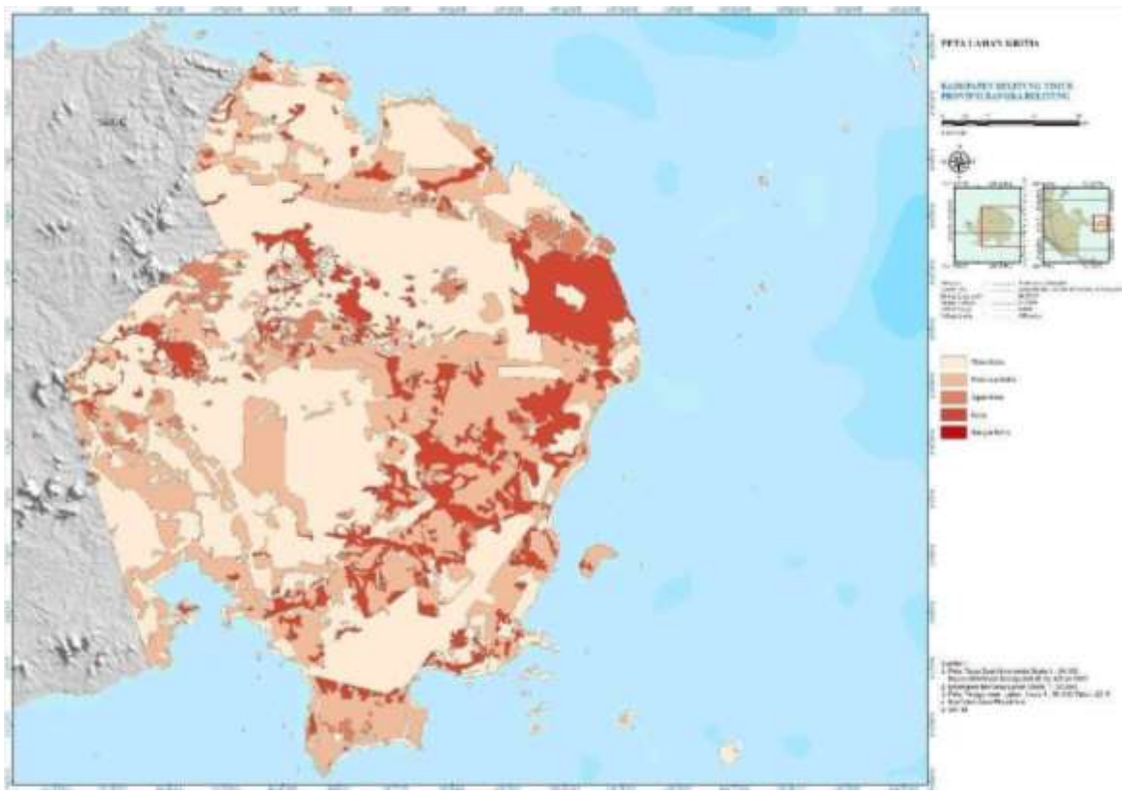

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2021

Gambar 2. 10 Peta Lahan Kritis Kabupaten Belitung Timur

Pulau Belitung dikenal sebagai pulau timah, di mana aktivitas penambangan timah telah dimulai sejak tahun 1852, sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang. Permasalahan penambangan timah adalah lahan bekas penambangan timah yang banyak ditinggalkan begitu saja sehingga lahan menjadi rusak, terbuka bahkan banyak yang menjadi kolong. Hal ini diperparah dengan bertambahnya pembukaan lahan baru area pertambangan setiap tahunnya. Oleh karenanya, kondisi tersebut merupakan indikasi bahwa lahan kritis telah terjadi di seluruh Pulau Belitung. Adapun lahan sangat kritis dan lahan kritis tersebar di Kabupaten Belitung Timur secara berurutan seluas 34,44 Ha dan 42.205,23 Ha. Sementara itu, lahan potensial kritis dan lahan agak kritis secara berurutan memiliki luas sebesar 95.426,15 Ha dan 8.910,97 Ha. Berikut adalah distribusi luasan lahan kritis di Kabupaten Belitung Timur tersaji pada tabel dan gambar berikut ini.

TABEL 2. 17 KONDISI LAHAN DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KONDISI LAHAN	LUAS LAHAN (HA)	PERSENTASE (%)
Agak Kritis	8.910,97	3,55
Kritis	42.205,23	16,84
Potensial Kritis	95.426,15	38,07
Sangat Kritis	34,44	0,01
Tidak Kritis	104.114,22	41,53
Belitung Timur	**250.691,00**	**100,00**

Sumber: DIKPLHD Belitung Timur, 2022

2) Alih Fungsi Lahan

Meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Belitung Timur dari tahun ke tahun menyebabkan tingginya kebutuhan akan lahan untuk pembangunan di berbagai sektor. Perubahan penggunaan lahan terjadi karena tingginya kebutuhan atas tempat tinggal, lahan pertanian, perkebunan, kawasan industri, kawasan perdagangan dan sarana publik. Alih fungsi lahan dapat menimbulkan dampak negatif secara ekonomi, sosial dan lingkungan apabila tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Penggunaan lahan untuk aktivitas manusia memenuhi kebutuhan ekonomi menjadi faktor pendorong perubahan lahan yang terjadi, khususnya pertambangan dan perkebunan besar menjadi permasalahan yang umum di sebagian besar daerah. Penggunaan lahan perkebunan dan pertambangan di daerah Kabupaten Belitung Timur menunjukkan terjadi kondisi yang kontradiktif antara lahan tambang dan hutan dengan lahan perkebunan. Kondisi luasan lahan hutan mengalami penurunan, sedangkan luasan lahan perkebunan mengalami peningkatan. Perubahan penggunaan lahan dari vegetasi ke non vegetasi secara ekologis berdampak pada punahnya keanekaragaman hayati, peningkatan suhu udara, berkurangnya sumber air bersih dan lainnya. Dalam segi ekonomi dan budaya akan meningkatkan resiko bencana alam seperti kekeringan dan banjir. Serta mengubah pola hidup dan juga mata pencaharian penduduk lainnya. Berikut merupakan perbedaan penggunaan lahan di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2017/2018 dan 2021/2022 yang tersaji dalam tabel berikut.

TABEL 2. 18 PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN TAHUN 2017/2018 DAN 2021/2022 DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (HA)		SELISIH (-/+)
		2017/2018	2021/2022	
1	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	29.946,84	29.860,48	-86,36
2	Hutan mangrove primer	2.634,59	1.992,26	-642,33
3	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	5.279,92	6.273,86	993,94
4	Hutan rawa sekunder/ bekas tebangan	3.012,97	3.705,79	692,82
5	Lahan terbuka	6.416,10	1.813,62	-4.602,48
6	Perkebunan / Kebun	49.653,19	53.850,39	4.197,21
7	Permukiman / Lahan terbangun	5.505,62	7.635,22	2.129,60
8	Pertambangan	37.667,95	36.346,19	-1.321,76
9	Pertanian lahan kering	3.146,80	3.452,73	305,93
10	Pertanian lahan kering campur semak/ kebun campur	51.110,69	47.185,41	-3.925,28
11	Rawa	3.771,06	4.375,67	604,61
12	Savana / Padang rumput	2.487,45	4.416,33	1.928,88
13	Sawah	565,11	555,99	-9,12
14	Semak belukar	34.386,97	36.111,38	1.724,41
15	Semak belukar rawa	12.007,52	11.890,97	-116,55
16	Transmisi	2.321,53	354,04	-1.967,49
17	Tubuh air	776,70	870,67	93,97

Sumber: DIKPLHD Belitung Timur, 2022

Perubahan penggunaan lahan pada kawasan hutan yang berubah menjadi lahan tambang dan perkebunan ataupun bentuk lainnya dapat mengganggu kualitas lingkungan hidup. Maraknya penambangan timah secara ilegal yang membuka lahan di sembarang tempat menjadi ancaman karena dapat mengakibatkan kerugian. Berdasarkan lampiran Kepmen ESDM 1827K/30/MEM/2018 mengatur lubang bekas tambang yang tidak ditimbun kembali, yaitu: stabilitas lereng, pengamanan lubang bekas tambang, pemulihan dan pemantauan kualitas air serta pengelolaan air dalam lubang bekas tambang sesuai dengan peruntukannya dan pemeliharaan lubang bekas tambang.

Penambangan liar yang banyak dilakukan di wilayah Kabupaten Belitung Timur menjadi permasalahan yang banyak menimbulkan dampak negatif pada isu lingkungan hidup. Selain lahan bekas tambang akan menjadi gersang dan meninggalkan bekas galian lubang (void) juga berdampak terjadinya banjir dan menyebabkan penurunan kualitas air sungai. Tambang timah yang ada di daerah Kabupaten Belitung Timur merupakan tambang timah masyarakat yang hampir sebagian besar masyarakat banyak yang membuka tambang timah. Masyarakat banyak membuka lahan tambang timah di kawasan hutan yang awalnya masih hijau ditumbuhi pohon-pohon atau semak-semak, tetapi sekarang berubah menjadi lahan tambang timah masyarakat. Salah satu persoalan kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari adanya tambang timah adalah adanya lubang bekas tambang yang tidak diikuti dengan kegiatan reklamasi. Berdasarkan Pasal 1 butir 23 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali untuk peruntukannya, sedangkan berdasarkan Pasal 1 butir 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Kegiatan reklamasi dan pascatambang merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang bagi pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang (Oktaferanti, 2021).

4. Kerawanan Resiko Bencana

1) Resiko Kesehatan dan Keselamatan

Kabupaten Belitung Timur merupakan salah satu wilayah penghasil timah. Jejak penambangan timah tersebut dapat dilihat di Open Pit Kelapa Kampit. Opet Pit dahulunya merupakan penambangaan timah terbuka terbesar di Asia Tenggara. Penambangan Timah tidak hanya dilakukan oleh PT Timah (Persero) Tbk, namun oleh smelter swasta dan tambang inkonvensional (TI). Penambangan ini meninggalkan bekas-bekas penambangan yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak yang ditimbulkan pasca penambangan meninggalkan banyak warisan yang memiliki potensi bahaya dalam jangka panjang, antara lain : a) Lubang Tambang (Pit), lubang-lubang bekas galian tambang timah (kolong) berisi air bersifat asam dan sangat berbahaya; b) Air asam tambang, air asam tambang mengandung logam-logam berat berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dalam jangka panjang, di mana air

asam tambang berpotensi mencemari air permukaan dan air tanah; c) Tailing, tailing mengandung logam-logam berat dalam kadar yang cukup mengkhawatirkan, ketika masuk kedalam tubuh makhluk hidup logam-logam berat tersebut akan terakumulasi di dalam jaringan tubuh dan dapat menimbulkan efek yang membahayakan kesehatan (Nurani Fajri, 2014).

Sumber sampah di Kabupaten Belitung Timur umumnya berasal dari sampah rumah tangga, sampah pasar dan sampah industri. Timbulan sampah yang terus menerus bertambah dari waktu ke waktu menjadi masalah yang serius terhadap kondisi lingkungan, sampah yang menumpuk juga dapat menimbulkan sumber penyakit bagi kesehatan. Dampak dari kondisi lingkungan yang kurang sehat dapat menyebabkan penyakit seperti diare, asma, infeksi saluran pernapasan, tuberkulosis, demam berdarah akibat lokasi daerah yang banyak genangan air, dan penyakit penginfeksi lainnya. Kebutuhan akan kesehatan di suatu daerah tentu sangat penting tercukupinya fasilitas kesehatan yang mumpuni. Minimnya fasilitas kesehatan di Kabupaten Belitung Timur dapat menghambat penanganan kesehatan masyarakat. Terbatasnya jumlah rumah sakit menjadi kendala apabila fasilitas pendukung seperti puskesmas tidak dapat menangani dengan maksimal. Berikut adalah daftar fasilitas kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Belitung Timur.

TABEL 2. 19 FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	FASILITAS ESEHATAN	JUMLAH	LOKASI (KECAMATAN)
1	Rumah sakit	1	Manggar
2	Rumah sakit bersalin	0	-
3	Poliklinik	7	Dendang, Manggar, Kelapa Kampit
4	Puskesmas	7	Seluruh kecamatan
5	Puskesmas pembantu	15	Seluruh kecamatan
6	Apotek	27	Simpang Pesak, Gantung, Manggar, Damar, Kelapa Kampit

Sumber: Dinas Kesehatan Belitung Timur, 2025

TABEL 2. 20 JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	TENAGA KESEHATAN	JUMLAH	LOKASI (KECAMATAN)
1	Dokter	65	Seluruh kecamatan
2	Perawat	376	Seluruh kecamatan
3	Bidan	154	Seluruh kecamatan
4	Farmasi	37	Seluruh kecamatan
5	Ahli Gizi	22	Seluruh kecamatan

Sumber: Dinas Kesehatan Belitung Timur, 2025

2) Limbah dan Persampahan

Tahun 2019 Kabupaten Belitung Timur mendapat penghargaan piala adipura yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Adipura merupakan penghargaan karena berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Penghargaan Adipura tersebut diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan lingkungan serta bersama-sama menjaga kebersihan.

a) Limbah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah penghasil timah terbesar di Indonesia dan nomor dua di dunia yang diproses dari bijih timah. Selain menghasilkan timah, dari bijih timah ini dihasilkan logam lain seperti zircon, ilmenite, xenotim, monasit, dan lain-lain. Bijih timah mengandung zat radioaktif alam yang konsentrasinya cukup tinggi sehingga kegiatan dalam pertambangan timah perlu memperhatikan masalah keselamatan radiasinya. Zat Radioaktif alam yang meningkat jumlahnya karena ada peran manusia disebut TENORM (*Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials*).

Pemrosesan bijih timah akan diikuti juga dengan penyebaran zat radioaktif dari hasil ikutannya yang konsentrasinya cukup tinggi.

b) Timbulan Sampah

Tingkat timbulan sampah di Kabupaten Belitung Timur dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk. Jenis sampah yang dihasilkan terdiri dari sampah jenis organik, plastik, kayu, kertas, kain, karet, logam, kaca, dan lainnya. Sampah tersebut bersumber dari aktivitas perumahan, perdagangan, dan sumber lain. Perkiraan timbulan sampah setiap harinya mencapai 50.396,4 kg/hari yang terdiri dari Kecamatan Manggar (15.762,8 kg/hari) Kecamatan Gantung (11.268,8 kg/hari) Kecamatan Damar (7.570 kg/hari) Kecamatan Kelapa Kampit (4.231,6 kg/hari) Kecamatan Dendang (5.219,2 kg/hari) Kecamatan Simpang Renggiang (3.367,6 kg/hari) dan Kecamatan Simpang Renggiang (3.367,600 kg/hari). Terjadi peningkatan volume sampah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 perkiraan timbulan sampah sebesar 49.631 Kg/hari dan tahun 2019 timbulan sampah 49.907,2 kg/hari atau mengalami kenaikan 0,9%. Sedangkan tahun 2020 jumlah timbulan sampah naik menjadi 50.396 kg/hari.

Berdasarkan data jumlah timbulan sampah yang dihasilkan tiap kecamatan perharinya kecamatan Manggar menghasilkan timbulan sampah paling banyak yaitu 15.762,8 kg/hari dengan jumlah penduduk kecamatan Manggar 39.353 jiwa, maka perkiraan produksi sampah per orang di kecamatan Manggar 0,4 kilogram per hari. Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang dihasilkan berakibat daya tampung TPA yang ada di Belitung Timur akan penuh.

c) Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

Sarana penampungan sampah di Kabupaten Belitung Timur sangat bervariasi di setiap kecamatan antara lain menggunakan tong/bak sampah dan truk pengangkut sampah. Kabupaten Belitung Timur memiliki TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Trafo Mayang yang berada di Desa Sukamandi Kecamatan Damar seluas 12 hektar dan volume eksisting 31189.76 M^3 menggunakan sistem lahan urug atau *Controlled Landfill*.

Di wilayah Belitung Timur terdapat lima bank sampah dengan jumlah penabung mencapai 200 orang. Personil Bidang persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur berjumlah 100 orang. Sarana dan Prasarana Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur terdapat pada tabel berikut.

TABEL 2. 21 JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
Dump Truck	7
Truck Amrol	4
Kendaraan Roda Tiga	6
Back Hoe Loader	1
Excavator	2
Pick Up	2
Bulldozer	1
Kontainer	26
Tong Kuning	100
Terpilah	50
Bin sedang	2
TPA Trafo Mayang	1
TPS3R	2
Bank Sampah	2

Sumber: DLH Kabupaten Belitung Timur, 2025

d) Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten Belitung Timur
Timbulan sampah menurut SNI 19- 2454 tahun 2002 adalah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita per hari, atau per luas bangunan atau perpanjang jalan. Menghitung prediksi jumlah timbulan sampah berdasarkan hasil proyeksi penduduk dan standarisasi besaran timbulan sampah berdasarkan klasifikasi kota/Kabupaten. Menghitung volume timbulan sampah di Kabupaten Belitung Timur yang masuk dalam klasifikasi kota sedang, digunakan satuan 2,75 liter/orang/hari.(SNI 19-3983-1995). Timbulan sampah (kg/orang/hari) dikalikan jumlah populasi yang dilayani oleh tempat pengolahan sampah di perkotaan tersebut merupakan jumlah sampah per hari yang harus dipilah, digunakan kembali, daur ulang dan diolah oleh tempat pengolahan sampah skala kawasan. Berdasarkan rumusan tersebut didapatkan proyeksi timbulan sampah Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan tabel berikut ini.

TABEL 2. 22 PROYEKSI TIMBULAN SAMPAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	VOLUME TIMBULAN SAMPAH KOTA SEDANG (KG/ORANG/HARI)	PROYEKSI TIMBULAN SAMPAH (KG/HARI)
2025	138.841	2,75	381.812,75
2026	141.021	2,75	387.807,21
2027	143.235	2,75	393.895,78
2028	145.484	2,75	400.079.95
2029	147.759	2,75	406.337,25

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Timur, 2024

5. Kinerja dan Perubahan Layanan atau Jasa Ekosistem

Jasa Ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumber daya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem. Jasa ekosistem dikategorikan menjadi empat, yaitu meliputi jasa penyediaan/provisioning, jasa pengaturan/regulating, jasa budaya/cultural, dan jasa pendukung/supporting (MA, 2005). Berdasarkan empat kategori ini dikelaskan pada 23 kelas klasifikasi jasa ekosistem, yaitu (De Groots, 2002) :

- Jasa penyediaan : (1) bahan makanan, (2) air bersih, (3) serat, bahan bakar dan bahan dasar lainnya, (4) materi genetik, (5) bahan obat dan biokimia, (6) spesies hias.
- Jasa pengaturan : (7) pengaturan kualitas udara, (8) pengaturan iklim, (9) pencegahan gangguan, (10) pengaturan air, (11) pengolahan limbah, (12) perlindungan tanah, (13) penyerbukan, (14) pengaturan biologis, (15) pembentukan tanah.
- Budaya : (16) estetika, (17) rekreasi, (18) warisan dan identitas budaya, (20) spiritual dan keagamaan, (21) pendidikan.
- Pendukung : (22) habitat berkembang biak, (23) perlindungan plasma nutfah.

TABEL 2. 23 DAFTAR KLASIFIKASI JASA EKOSISTEM

KLASIFIKASI LAYANAN EKOSISTEM	DEFINISI OPERASIONAL
Fungsi Penyediaan (*Provisioning*)	
Pangan	Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian & perkebunan untuk pangan, hasil peternakan
Air bersih	Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari permukaan
Serat (*fiber*)	Hasil hutan,hasil laut,hasil pertanian,dan perkebunan untuk material
Bahan bakar (*fuel*)	Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar dari fosil
Sumberdaya genetik	Penyediaan Sumberdaya Genetik termasuk flora dan fauna

KLASIFIKASI LAYANAN EKOSISTEM	DEFINISI OPERASIONAL
Fungsi Pengaturan (*Regulating*)	
Pengaturan iklim	Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan,pengendalian gas rumah kaca & karbon
Pengaturan tata aliran air & banjir	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air
Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami
Pemurnian air	Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar
Pengolahan dan penguraian limbah	Kapasitas lokasi dalam menetralisir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah
Pemeliharaan kualitas udara	Kapasitas mengatur sistem kimia udara
Pengaturan penyerbukan alami (*pollination*)	Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami
Pengendalian hama dan penyakit	Distribusi habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit
Fungsi Budaya (*Cultural*)	
Tempat tinggal dan ruang hidup (*sense of place*)	Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, jangkar "kampung halaman" yang punya nilai sentimental
Rekreasi dan *ecotourism*	Fitur lanskap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata
Estetika	Keindahan alam yang memiliki nilai jual
Fungsi Pendukung (*Supporting*)	
Pembentukan lapisan tanah pemeliharaan kesuburan	Kesuburan tanah
Siklus hara (*nutrient*)	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian
Produksi primer	Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies
Biodiversitas	Keanekaragaman Hayati

Sumber: Millenium Ecosystem Assessment, 2005

Jasa ekosistem dinilai secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan expert judgement (penilaian ahli) untuk mempermudah melakukan analisis hingga penentuan kebijakan. Nilai untuk setiap jasa ekosistem selanjutnya disebut sebagai Indeks Jasa Ekosistem (IJE). Jenis jasa ekosistem yang dikaji dalam penyusunan KLHS RPJPD meliputi jasa ekosistem penyedia air, pencegahan dan perlindungan dari bencana, pengaturan pemeliharaan kuantitas udara dan jasa ekosistem bahan pangan. Selanjutnya dilakukan perhitungan IJE dan Jasa Ekosistem Dominan dilakukan berdasarkan beberapa tahap berikut.

1) Penyusunan Peta Indeks Jasa Ekosistem Per Ekoregion Kabupaten Belitung Timur

a) Kondisi Ekoregion

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara eksplisit mengamanatkan pentingnya penggunaan ekoregion sebagai asas dalam pengelolaan lingkungan. Sebaliknya dalam UU Penataan Ruang juga menegaskan pentingnya penggunaan ekoregion sebagai dasar penyusunan tata ruang wilayah. UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan definisi ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Ekoregion adalah bentuk metode perwilayahan untuk manajemen pembangunan yang mendasarkan pada batasan dan karakteristik tertentu (deliniasi ruang). Penetapan ekoregion menghasilkan batas (*boundary*) sebagai satuan unit analisis dengan mempertimbangkan ekosistem pada sistem yang lebih

besar. Penetapan ekoregion menjadi dasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam melihat keterkaitan, interaksi, interdependensi dan dinamika pemanfaatan berbagai sumber daya alam antar ekosistem di wilayah ekoregion. Pendekatan ekoregion juga bertujuan untuk memperkuat dan memastikan terjadinya koordinasi horizontal antar wilayah administrasi yang saling bergantung (hulu-hilir) dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengandung persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun permasalahan lingkungan hidup. Kondisi ekoregion di Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada peta berikut.

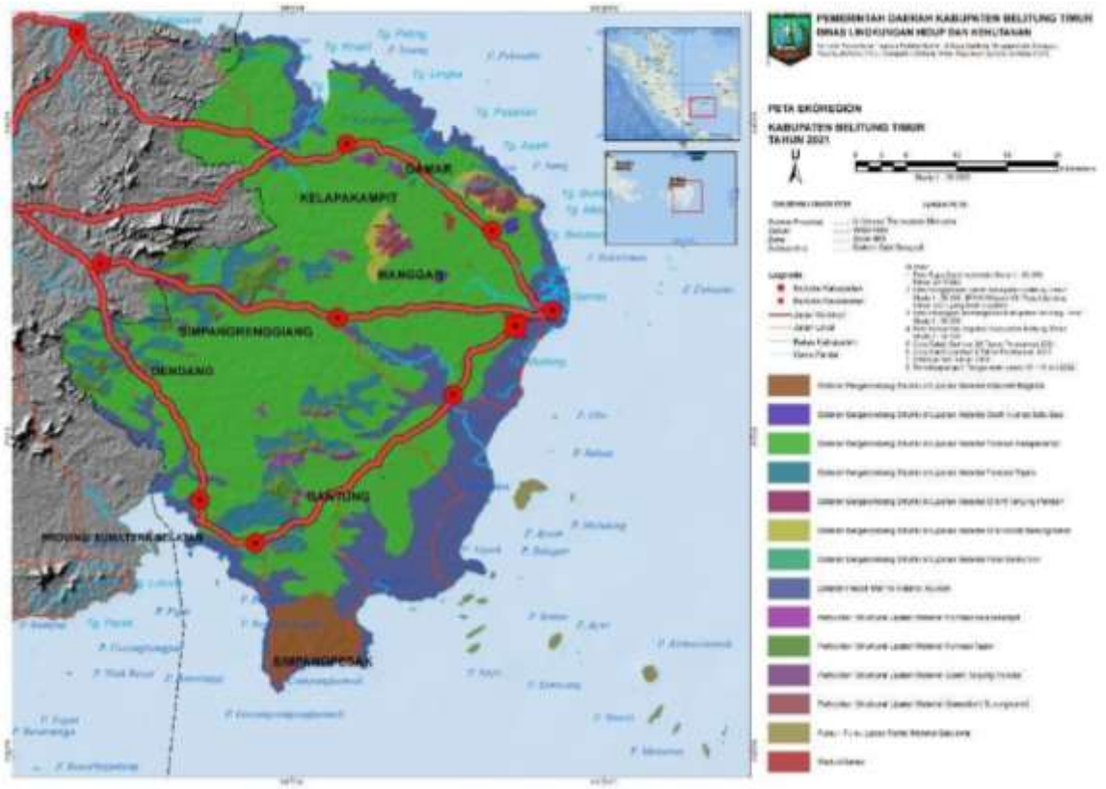

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belitung Timur, 2024

Gambar 2. 11 Peta Ekoregion Kabupaten Belitung Timur

b) Kondisi Bentang Alam

Bentang alam Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 11 (sebelas) jenis, yaitu dataran fluvial bermaterial aluvium, dataran fluvio marin bermaterial aluvium, dataran marin berpasir bermaterial aluvium, dataran organik bermaterial gambut, dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan metamorfik, dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat, dataran struktural plutonik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku dalam, lembah sungai bermaterial aluvium, perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat, perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat, dan perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam. Dataran struktural lipatan (berombak-bergelombang) bermaterial sedimen non karbonat merupakan bentang alam yang mendominasi dengan luasan mencapai 179.879,03 Ha atau 69,47% dari luas kabupaten. Bentang alam ini mempunyai potensi sumber daya alam (SDA) non hayati yang bervariasi, dengan keanekaragaman hayati tinggi, karena kaya dengan flora dan fauna.

TABEL 2. 24 KONDISI BENTANG ALAM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BENTANG ALAM	KECAMATAN							TOTAL (HA)
	DAMAR	DENDANG	GANTUNG	KELAPA KAMPIT	MANGGAR	SIMPANG PESAK	SIMPANG RENGGANG	
Dataran fluvial Bermaterial aluvium	1.438,80	255,82	12.706,20	582,94	2.88,97	2.377,08		20.242,80
Dataran fluvio marin bermaterial aluvium	1.298,14	641,78	9.071,47	5.250,88		4.728,93		20.991,20
Dataran marin berpasir bermaterial aluvium			29,47					729,47
Dataran organic bermaterial gambut			806,5					806,57
Dataran struktural lipatan berombak- bergelombang bermaterial batuan metamorfik				4.967,68		176,67		5.144,36
Dataran struktural lipatan berombak- bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	17.702,59	27.840,15	33.389,64	39.392,40	17.346,21	10.366,43	33.841,60	179.879,03
Dataran struktural plutonik berombak- bergelombang bermaterial Batuan beku dalam						98,31		398,31
Lembah sungai bermaterial aluvium				783,07				783,07
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat		124,64	1.606,95			280,86		2.012,46
Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat	23,29	12.452,97	945,87	960,80	810,63	88,15	3.666,92	8.948,62
Perbukitan struktural plutonik beraterial batuan beku dalam	1.993,46			991,88	12,44	5.985,43		8.983,20
Total (Ha)	**22.456,28**	**41.315,35**	**59.256,18**	**52.929,64**	**21.051,25**	**24.401,85**	**37.508,52**	**258.919,08**

Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Belitung Timur, 2022

c) Kondisi Vegetasi Alami

Vegetasi alami adalah mosaik komunitas tumbuhan dalam lanskap yang belum dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Vegetasi alami bukan hanya sebagai komponen keanekaragaman hayati yang menyediakan sumberdaya alam, melainkan juga sebagai komponen dari keanekaragaman hayati yang memiliki peran dalam hidrologi dan perbaikan iklim. Kabupaten Belitung Timur memiliki 8 (delapan) vegetasi alami, yaitu:

- Vegetasi hutan dipterokarpa pamah

  Vegetasi hutan pamah merupakan vegetasi yang terdapat di hutan hujan dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 1000 mdpl. Vegetasi ini memiliki komunitas pohon dengan ukuran tinggi, kanopinya lebat dan permukaan atasnya tidak rata. Pohon-pohon memiliki bentuk hidup *(life form)* utama yang berdaun lebar dan sedang serta selalu berpenampakan hijau. Kanopi utama hutan mencapai 30–45 m, dengan pohon yang mencuat tingginya hingga 60 m. biasanya batangnya panjang, lurus dan relatif ramping. Spesies yang mendominasi wilayah ini dari family *Dipterocarpaceae.*
- Vegetasi hutan gambut

  Vegetasi hutan gambut merupakan vegetasi yang tumbuh pada substrat yang berupa gambut . Tanahnya berupa lempung mengandung sulfida dan garam dengan konsentrasi tinggi sehingga merupakan racun bagi mikroorganisme yang biasanya merombak bahan organik. Oleh karena itu, serasah dan bagian dari kayu dan cabang pohon yang mati tidak terdekomposisi dengan baik. Kanopi hutan gambut ini pada umumnya terbuka dan tingginya seragam hingga 30 meter, pohon tinggi mencuat tidak banyak. Pulau Sumatera memiliki kondisi hutan yang membentuk zonasi dari tepi sungai sampai ke hutan jauh dari sungai. Spesiesnya terdiri dari pohon-pohon kecil, pendek dan jarang, sampai pohon ukuran relatif besar seperti di hutan hujan pamah kering. Jenis-jenis pohon yang umum terdapat adalah *Alstonia scholaris, Combretocarpus rotundatus, Dactylocladus stenostachys, Ganua pierrei, Gonystylus bancanus, Palaquium cochlear folium, Tetramerista glabra, Tristania maingayi, Tristania obovata.* Beberapa kelompok dipterokarpa yang terdapat di wilayah ini adalah *Anisoptera marginata, Dipterocarpus coriacea, Dryobalanops rappa, Shorea balangeran, Shorea foraminifera, Shorea inaequalateralis, Shorea macrantha, Shorea pachyphylla, Shorea platycarpa, Shorea teysmanniana,* dan *Shorea uliginosa.*
- Vegetasi hutan kerangas pamah

  Vegetasi hutan kerangas pamah merupakan vegetasi yang tumbuh pada elevasi di bawah 1000 mdpl dengan substrat berupa tanah podsol (spodosol) yang berasal dari bahan induk silika bertekstur kasar yang sangat masam sangat mudah menyerap air dan berdrainase baik. Meskipun kadang-kadang tergenang air karena lapisan bawahnya padat. Vegetasi ini memiliki lapisan humus kasar berwarna kelabu tua berpasir, bahan organiknya belum (tidak) terdekomposisi dengan baik dan dipenuhi oleh akar-akar tetumbuhan halus seperti serabut. Tanah biasanya sangat miskin akan hara dan sangat masam. Vegetasinya selain perdu, semak dan paku pakuan beberapa spesies dapat ditemukan seperti tegakan pohon seperti *Baeckea frutescens, Casuarina nobilis, Cotylelobium spp., Combretocarpus rotundatus, Dactylocladus*

stenostachys,Dacrydium elatum, Tristania obovata, dan *Whiteodendron moultonianum.* Kelompok *Dipterocarpaceae* tumbuh di beberapa tempat, kelompok yang dimaksud seperti *Shorea balangeran, Shorea coriacea,* dan *Shorea havilandii.*

- Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)
  Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)merupakan komunitas vegetasi dengan tegakan pohon-pohon tinggi 30–45 meter, batangnya lurus dan relatif ramping, tajuknya lebat berdaun kecil, sedang sampai lebar dan selalu hijau, tumbuh pada tanah pada tanah podsolik merah kuning dan gugus tanah yang beraneka (kompleks) pada elevasi 0 - 1000 m. Bergantung kepada wilayah dan iklimnya dominasi spesies pada komunitas ini adalah bukan dari kelompok *Dipterocarpaceae*. Vegetasi di sini merupakan hutan campuran yang tersusun oleh pohon-pohon tinggi dan besar dengan kerapatan yang tinggi. Tinggi pohon tidak sama sehingga dari udara kanopi hutan tampak tidak rata.
- Vegetasi hutan pantai
  Vegetasi hutan pantai merupakan vegetasi dengan komunitas vegetasi di sepanjang pantai di belakang pantai pasir yang ditumbuhi komunitas pes-caprae, di mana berkembang spesies semak atau komunitas perdu dan pohon kecil. Komposisi floristik hutan pantai seragam di seluruh Indonesia, baik yang terdapat di kawasan beriklim basah maupun beriklim kering musiman. Spesies karakteristik wilayah ini adalah *Ardisia elliptica, Caesalpina bonduc, Clerodendron inerme, Colubrina asiatica, Cycas rumphii, Desmodium umbellatum, Dodonaea viscosa, Erythrina variegata, Messerschmid argentea, Pemphis acidula, Pluchea indica, Premna corymbosa, Scaevola taccada, Sophora tomentosa,*dan *Tacca leontopetaloides.*
- Vegetasi mangrove
  Vegetasi mangrove merupakan vegetasi yang terdapat pada komunitas hutan yang tumbuh dan berkembang pada habitat basah dan masin di sepanjang pantai, terutama pantai berlumpur dan pada muara-muara sungai besar/kecil, dan dapat membentang sepanjang sungai besar jauh sampai ke pedalaman. Keragaman hutan mangrove secara umum relatif rendah jika dibandingkan dengan hutan alam tipe lainnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi lahan hutan mangrove yang mempunyai salinitas tinggi dan berpengaruh terhadap keberadaan jenisnya. Jenis yang dapat tumbuh pada ekosistem mangrove adalah halofit, yaitu jenis-jenis tegakan yang mampu bertahan pada tanah yang mengandung garam dari genangan air laut.
- Vegetasi terna rawa gambut
  Vegetasi terna rawa gambut merupakan vegetasi yang tumbuh pada substrat yang berupa gambut yang tanahnya berupa lempung mengandung sulfida dan garam dengan konsentrasi tinggi sehingga merupakan racun bagi mikroorganisme yang biasanya merombak bahan organik. Umumnya didominasi oleh kelompok rerumputan (*Echinochloa, Ischaemum, Leersia, Brachiaria mutica, Panicum) teki-tekian seperti Cyperus spp., Eleocharis, Scleria, Scirpus spp.,* beberapa spesies paku pakuan seperti *Stenochlaena, Nephrolepis, Ceratopteris, Ampelopteris*, dan *Cyclosorus interruptus*.
- Vegetasi terna tepian sungai payau
  Vegetasi terna tepian sungai payau merupakan vegetasi yang membentuk suatu komunitas terna (tumbuhan yang batangnya tidak berkayu keras atau tidak berbatang) yang tumbuh terutama

vegetasi terna tepian sungai payau adalah vegetasi yang membentuk suatu komunitas terna (tumbuhan yang batangnya tidak berkayu keras atau tidak berbatang) yang tumbuh terutama vegetasi hutan kerangas pamah merupakan vegetasi alami terluas yang ada di Kabupaten Belitung Timur dengan luas 209.199,80 Ha atau 80,80% dari luas kabupaten. Tipe vegetasi ini tersebar di semua kecamatan dengan wilayah terluas berada pada Kecamatan Kelapa Kampit dengan luas 44.785,29 Ha, diikuti dengan Kecamatan Gantung dengan luas 36.746,55 Ha, dan Kecamatan Dendang dengan luas 36.327,02 Ha. Tipe vegetasi alami terluas berikutnya adalah vegetasi mangrove dengan luas 20.437,88 Ha atau 7,89% dari luas kabupaten. Kecamatan Gantung memiliki vegetasi mangrove terluas yaitu 9.071,47 Ha. Vegetasi hutan gambut merupakan tipe vegetasi alami dengan luasan terkecil yaitu 553,32 Ha atau 0,21% dari luas kabupaten dan hanya berada pada Kecamatan Simpang Pesak.

TABEL 2. 25 VEGETASI ALAMI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

VEGETASI ALAMI	KECAMATAN							TOTAL (HA)
	DAMAR	DENDANG	GANTUNG	KELAPA KAMPIT	MANGGAR	SIMPANG PESAK	SIMPANG RENGGANG	
Vegetasi hutan dipterokarpa pamah		4.090,74		535,59			3.666,92	8.293,24
Vegetasi hutan gambut						553,32		553,32
Vegetasi hutan kerangas pamah	19.164,68	36.327,02	36.746,55	44.785,29	21.038,81	17.295,85	33.841,60	209.199,80
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	1.993,46			991,88	12,44			2.97,78
Vegetasi hutan Pantai			729,47					729,47
Vegetasi mangrove	1.298,14	641,78	9.071,47	5.250,88		4.175,61		20.437,88
Vegetasi ternak rawa gambut			1.940,23	783,07				2.723,31
Vegetasi terna tepian sungai payau		255,82	10.768,45	582,94		2.377,08		13.984,29
Total (Ha)	**22.456,28**	**41.315,35**	**59.256,18**	**52.929,64**	**21.051,25**	**24.401,85**	**37.508,52**	**258.919,08**

Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Belitung Timur, 2022

d) Penyusunan Peta Indeks Ekosistem per Ekoregion

Peta Indeks Jasa Ekosistem dibuat dengan pendekatan land cover based proxy yang menggunakan penilaian ahli (*expert judgement*) dari multi-disiplin ilmu untuk mendapatkan penilaian yang komprehensif (Cowling et al., 2008; MA, 2005; dan SCBD, 2004 dalam Maynard et al., 2010). Penilaian para ahli secara kualitatif dapat dianggap sebagai data sehingga digunakan sebagai bobot berbagai kelas lahan berbeda. Berikut tahapan penyusunan Peta Indeks Jasa Ekosistem.

- Identifikasi Jasa Ekosistem

  Jasa ekosistem dibandingkan tingkat kepentingannya terhadap tiap kelas ekoregion dan penutup lahan. Hasil perbandingan selanjutnya digunakan untuk menentukan bobot masing-masing jasa ekosistem.

- Penilaian Jasa Ekosistem

  Data yang digunakan untuk perhitungan bobot menggunakan metode Pairwise Comparison ini diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh beberapa responden. Adapun kuesioner yang disusun terkait dengan kegiatan penentuan nilai bobot jasa ekosistem terhadap ekoregion dan penutup lahan. Responden yang berpartisipasi dalam pengisian kuisioner ini, antara lain pakar geomorfologi, pakar kehutanan, pakar biologi, pakar perencanaan wilayah, dan pakar lingkungan. Kuesioner yang disebarkan ini berisikan tabel yang menggambarkan perbandingan skala penilaian jasa ekosistem terhadap setiap kelas penutup lahan dan ekoregion. Pengisian daftar pertanyaan dilakukan berdasarkan teori dan pengetahuan, pengamatan dan pengalaman yang dimiliki oleh pengisi kuisioner terhadap kondisi faktual.

  Mengingat keragaman fenomena bentang lahan dan penutup lahan di wilayah pengamatan, maka dilakukan prinsip generalisasi sesuai dengan kedalaman skala pengamatan. Proses transformasi data dari bentang lahan dan penutup lahan menjadi nilai jasa ekosistem dilakukan dengan menjawab sejumlah pertanyaan tentang kepentingan dan peran bentang lahan dan penutup lahan terhadap besar kecilnya nilai jasa ekosistem. Prinsipnya adalah perbandingan tingkat kepentingan atau peran jenis-jenis bentang lahan dan penutup lahan terhadap jenis-jenis jasa ekosistem (prinsip relativitas).
- Penentuan Nilai Bobot Jasa Ekosistem

  Setelah dilakukan pengisian kuesioner oleh para responden, selanjutnya dilakukan perhitungan bobot untuk setiap jasa ekosistem pada 2 komponen penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan hasil kuisioner yang diperoleh. Terdapat beberapa prosedur dalam proses perhitungan hasil kuesioner dengan menggunakan metode *pairwise comparison*, yaitu:

  Membangun matriks *pairwise comparison* untuk setiap jenis jasa ekosistem,

  Normalisasi matriks *pairwise comparison*,

  Menghitung nilai rata-rata setiap baris matriks untuk mendapatkan tingkat kecocokan,

  Menghitung dan mengecek rasio konsistensi atau *consistency ratio* (CR).
- Analisis Spasial Jasa Ekosistem

  Analisis spasial jasa ekosistem merupakan proses *overlay* data spasial dengan nilai indeks jasa ekosistem. Tahap pertama yaitu analisis data spasial ekoregion dan penutup lahan dengan operasi spasial *overlay* (*intersect*). Metode ini menghasilkan unsur spasial baru dari irisan unsur spasial ekoregion dan tutupan lahan. Tahap kedua yaitu proses overlay data geospasial dengan nilai indeks jasa ekosistem (JE). Pada proses ini, nilai indeks JE dari kajian sebelumnya dimasukkan ke dalam tabel atribut dari data spasial hasil interseksi antara ekoregion dan penutup lahan.

  Analisis *overlay* (*intersect*) dilakukan menggunakan data ekoregion dan penutup lahan yang sudah berisi nilai bobot JE. Hasil analisis yaitu berupa data spasial interseksi yang berisi nilai-nilai bobot JE untuk kedua unit analisis. Data hasil analisis spasial jasa ekosistem ini kemudian digunakan untuk perhitungan indeks daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

- Perhitungan Indeks Daya Dukung Lingkungan Hidup
  Kapasitas daya dukung lingkungan hidup terhadap jasa ekosistem tertentu direpresentasikan dalam bentuk indeks daya dukung lingkungan hidup. Indeks daya dukung LH dihitung dengan melibatkan nilai bobot jasa ekosistem terhadap ekoregion dan penutup lahan. Indek Jasa Ekosistem adalah variasi nilai Koefisien Jasa Ekosistem yang dibobot dengan luas poligon (area). Nilai indeks jasa ekosistem berkisar antara 0 (kecil)– 1 (besar), yang ditampilkan menurut unit analisis wilayah administrasi (Provinsi) dan ekoregion, untuk membandingkan secara relatif nilai jasa ekosistem antar ekoregion dan antar wilayah administrasi. Secara singkat dirumuskan sebagai berikut:

$$IJE_{i.x} = (KJE_{i.a} \times LP_a)+(KJE_{i.b} \times LP_b)+(KJE_{i.c} \times LP_c)\ldots\ldots\ldots(KJE_{i.n} \times LP_n)+ LA_{tot}$$

Keterangan :

$IJE_{i.x}$ = Nilai Indek Jasa Ekosistem Jenis i (misal pangan) di wilayah x (misal Provinsi atau ekoregion tertentu

$KJE_{i.x}$ = Koefisien Jasa Ekosistem Jenis i (misal pangan) di poligon a

LP_a = Luas poligon dengan nilai KJE_a

LA_{tot} = Luas poligon total

2) Penyusunan Peta Jasa Ekosistem Kabupaten Belitung Timur

a) Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Daya Dukung dan daya tampung lingkungan berbasis jasa ekosistem penyedia pangan (P1) memiliki keterkaitan dengan kemampuan ekosistem yang secara alami mampu menyediakan kebutuhan terhadap pangan bagi manusia. Kebutuhan pangan yang dapat disediakan oleh ekosistem untuk manusia meliputi seluruh jenis bahan pangan yang berasal dari sumber hayati seperti tumbuh tumbuhan dan hewan, baik hewan yang hidup di wilayah daratan maupun wilayah perairan. Faktor utama yang mempengaruhi kemampuan ekosistem dalam menyediakan kebutuhan pangan adalah kondisi ekoregion bentang lahan dan tutupan lahan. Ekoregion yang mampu memberikan dukungan terhadap penyediaan pangan adalah wilayah dengan kondisi tanah yang subur seperti dataran aluvial di mana pada wilayah ini dapat menyediakan pangan yang tinggi. selain itu, tutupan lahan berupa vegetasi juga memberikan pengaruh terhadap tingkat jasa ekosistem penyedia pangan. Semakin rapat tutupan lahan vegetasi, maka semakin tinggi pula potensi jasa penyedia pangan di wilayah tersebut. Hal ini diakibatkan oleh keberadaan berbagai jenus tumbuhan yang merupakan sumber bahan pangan. Berikut adalah tabel dan grafik yang menguraikan luasan dan persentase luasan kelas kelas jasa ekosistem penyedia pangan di Kabupaten Belitung Timur.

TABEL 2. 26 LUAS KELAS JASA EKOSISTEM PENYEDIA PANGAN

KECAMATAN	LUAS KELAS KINERJA JASA EKOSISTEM PENYEDIA PANGAN (HA)					TOTAL
	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI	
Damar	8.231,30	1.926,63	4.715,91	6.464,36	208,56	21.546,77
Dendang	4.440,51	4.100,32	13.904,27	16.416,09	1.331,92	40.193,12
Gantung	8.937,02	21.711,73	19.535,51	6.395,29	1.429,82	58.009,37
Kelapa Kampit	1.839,71	2.455,34	23.339,59	23.063,68	887,89	51.586,21
Manggar	1.812,49	1.560,14	9.284,22	4.135,07	-	16.791,92
Simpang Pesak	4.796,64	10.085,15	4.459,39	3.846,65	339,36	23.527,19

KECAMATAN	LUAS KELAS KINERJA JASA EKOSISTEM PENYEDIA PANGAN (HA)					TOTAL
	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI	
Simpang Renggiang	3.653,31	8.198,26	16.258,81	10.855,81	70,24	39.036,42
Total	**33.710,99**	**50.037,58**	**91.497,70**	**71.176,94**	**4.267,79**	**250.691,00**

Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Belitung Timur, 2022

Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Belitung Timur, 2022

Gambar 2. 12 Persentase Luas Kelas Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Kelas jasa ekosistem penyedia pangan di Kabupaten Belitung Timur cenderung didominasi oleh kelas sedang dengan total luas wilayah seluas 91.497,70 Ha. Kelas sedang pada kinerja jasa ekosistem penyedia bahan pangan cenderung dominan di wilayah Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Gantung. Luasan kelas jasa ekosistem penyedia pangan yang memiliki luasan paling besar berikutnya yaitu jasa ekosistem kelas tinggi dengan total luas 71.176,94 Ha. Kelas tinggi pada kinerja jasa ekosistem penyedia pangan cenderung dominan di wilayah Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Dendang.

Daerah kecamatan dengan luas kelas jasa ekosistem penyedia bahan pangan kelas sangat rendah dominan berada di Kecamatan Damar dengan luas 8.541,03 Ha atau hampir 40% dari total luas wilayah kecamatan. Kemudian kelas rendah dominan yaitu terdapat Kecamatan Simpang Pesak dengan luasan sebesar 10.464,63 Ha. Kelas Sedang dominan terdapat di Kecamatan Manggar dengan luasan sebesar 9.633,57 Ha. Kelas Tinggi dominan terdapat di Kecamatan Kelapa Kampit dengan luasan sebesar 23.931,52 Ha. Sedangkan untuk kelas sangat tinggi dominan terdapat di Kecamatan Dendang dengan luasan sebesar 1.382,04 Ha.

Persebaran kelas sangat rendah pada jasa ekosistem penyedia bahan pangan di Kabupaten Belitung Timur tersebar secara merata di seluruh kabupaten, namun dominan berada di wilayah Kecamatan Gantung. Sementara itu, kelas sangat tinggi tidak menyebar secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Kecamatan Manggar tidak memiliki kelas sangat tinggi, sedangkan Kecamatan Gantung menjadi wilayah dengan kelas sangat tinggi paling dominan dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Belitung Timur. Berikut merupakan gambaran persebaran kelas jasa ekosistem penyedia pangan di Kabupaten Belitung Timur.

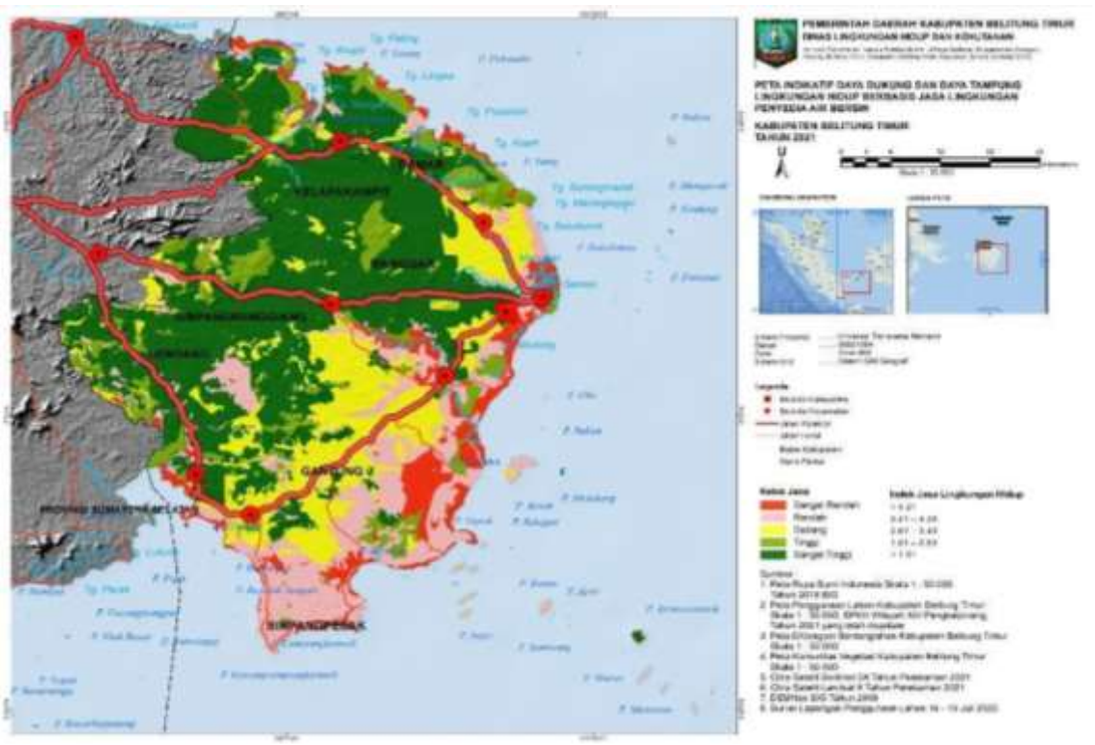

Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Belitung Timur, 2022

Gambar 2. 13 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

b) Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem penyedia air bersih (P2) berkaitan dengan potensi penyediaan sumber daya air bersih baik yang berasal dari air permukaan, air tanah maupun air hujan yang digunakan untuk kelangsungan hidup manusia. Potensi jasa ekosistem penyedia air bersih dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah curah hujan, jenis tanah yang mampu menyimpan air, jenis tutupan lahan dan kerapatan vegetasi. Tutupan lahan berupa vegetasi memiliki kemampuan yang tinggi untuk menyimpan air yang mana semakin rapat tutupan vegetasi, maka potensi jasa ekosistem penyedia air bersih menjadi semakin tinggi karena memungkinkan ekosistem untuk menyimpan cadangan air bersih dalam jumlah yang besar. Berikut adalah tabel yang menguraikan luasan kelas jasa ekosistem penyedia air bersih per kecamatan di Kabupaten Belitung Timur.

TABEL 2. 27 LUAS KELAS JASA EKOSISTEM PENYEDIA AIR BERSIH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KECAMATAN	LUAS KELAS KINERJA JASA EKOSISTEM PENYEDIA AIR BERSIH (HA)					TOTAL
	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI	
Damar	1.440,90	3.057,73	7.000,55	3.817,84	6.229,73	21.546,77
Dendang	1.338,35	4.953,66	4.534,19	4.268,37	25.098,54	40.193,12
Gantung	9.411,67	18.472,62	15.966,95	5.017,15	9.140,97	58.009,37
Kelapa Kampit	2.404,39	1.825,96	3.080,19	6.104,37	38.171,29	51.586,21
Manggar	1.734,31	1.234,76	1.880,36	606,50	11.336,01	16.791,92
Simpang Pesak	2.545,17	11.627,38	6.115,85	774,78	2.464,02	23.527,19
Simpang Renggiang	426,40	3.138,09	8.338,00	4.192,36	22.941,57	39.036,42
Total	**19.301,19**	**44.310,21**	**46.916,09**	**24.781,37**	**115.382,14**	**250.691,00**

Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Belitung Timur, 2022

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Belitung Timur memiliki potensi penyediaan air bersih yang tinggi. Hal ini ditunjukkan pada luasan kelas jasa ekosistem penyedia air bersih sangat tinggi memiliki luasan sebesar 115.382,14 Ha atau dapat dikatakan paling dominan di Kabupaten Belitung Timur. Kemudian diikuti dengan kelas jasa ekosistem penyedia air bersih kelas sedang dengan luasan sebesar 46.916,09 Ha. Sedangkan kelas jasa ekosistem penyedia air bersih yang memiliki luasan paling sedikit di Kabupaten Belitung Timur yaitu kelas sangat rendah dengan luasan sebesar 19.301,19 Ha.

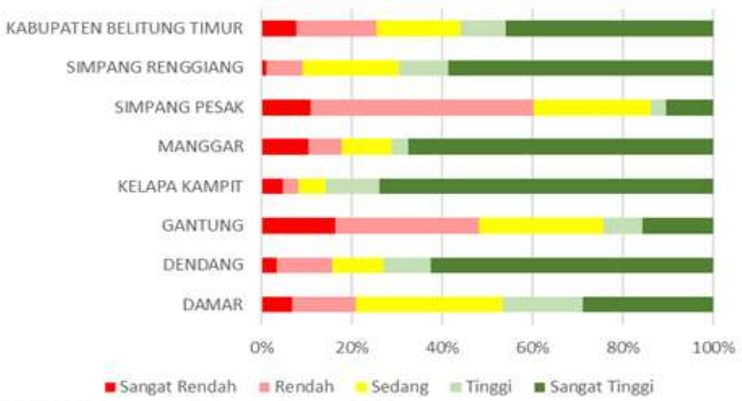

Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Belitung Timur, 2022

Gambar 2. 14 Persentase Kelas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

Kecamatan Kelapa Kampit menjadi kecamatan dengan kelas sangat tinggi yang paling dominan dari total luas wilayah kecamatan yaitu sebesar 39.607,60 Ha. Kemudian untuk kelas rendah yang dominan terdapat di Kecamatan Simpang Pesak yaitu sebesar 12.064,89 Ha. Sedangkan untuk kelas sangat rendah, Kecamatan Gantung menjadi wilayah dengan proporsi kelas sangat rendah paling tinggi terhadap total luas wilayah kecamatan dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya.

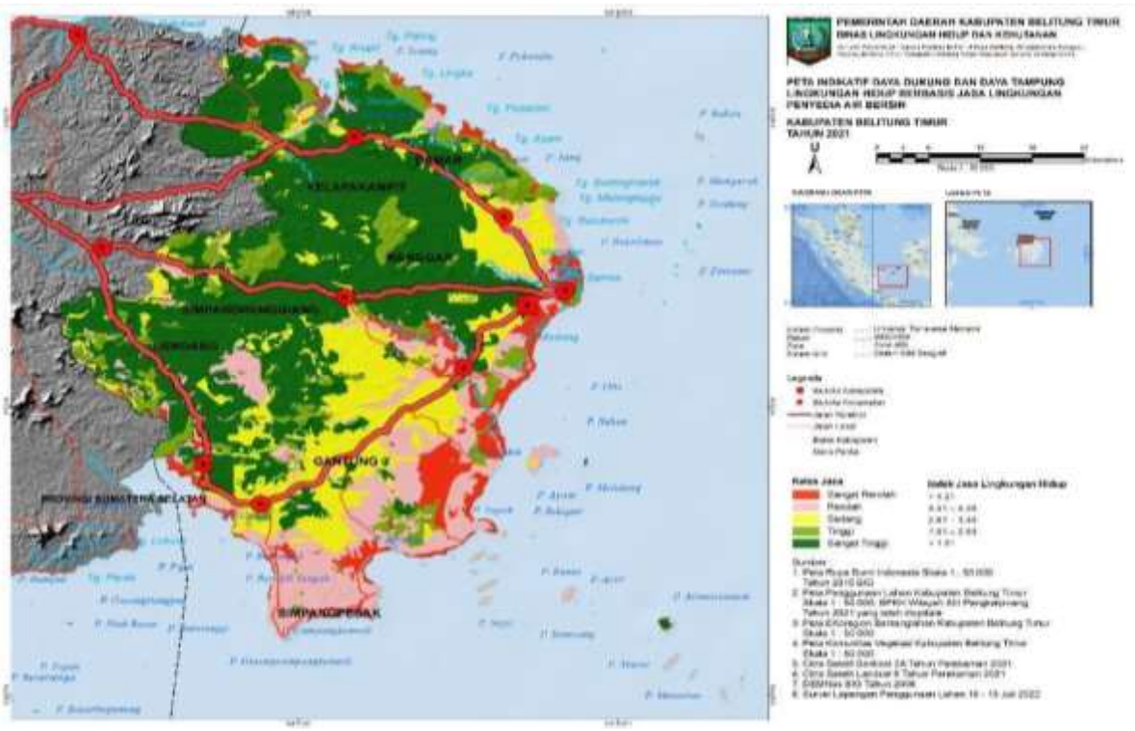

Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Belitung Timur, 2022

Gambar 2. 15 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

Persebaran kelas jasa ekosistem penyedia air bersih di Kabupaten Belitung Timur apabila ditinjau berdasarkan spasial dapat diidentifikasi bahwa secara umum menjelaskan bahwa setiap kecamatan di Kabupaten Belitung Timur memiliki seluruh kelas mulai dari sangat rendah hingga sangat tinggi pada masing-masing wilayah kecamatan. Berikut merupakan gambaran persebaran kelas jasa ekosistem penyedia air bersih di Kabupaten Belitung Timur.

c) Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah

Ekosistem secara alami memiliki kemampuan untuk menetralisir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah dengan menetralkan zat organik yang ada pada air limbah. Alam memiliki agen berupa mikroba (aerob) yang terdiri atas bakteri, jamur, protozoa dan ganggang yang bertugas untuk menguraikan zat organik yang ada pada air limbah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan. Kondisi lingkungan yang mampu memberikan jasa pengaturan pengolahan dan penguraian limbah yang baik pada umumnya berada di wilayah dengan elevasi tinggi seperti wilayah gunung api, pegunungan dan perbukitan serta lembah lembah gunung api yang tersusun atas material piroklastik atau batuan gunung api tua yang mampu menyerap, menyaring dan mengalirkan air tanah dengan baik.Kabupaten Belitung Timur memiliki potensi pengolahan dan penguraian limbah yang sangat tinggi. Hal ini dapat terlihat pada luas kelas sangat tinggi pada jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah sebesar 74.992,57 Ha dari total luas wilayah Kabupaten Belitung Timur. Kemudian diikuti oleh kelas tinggi yang memiliki luas 66.180,76 Ha pada keseluruhan wilayah Kabupaten Belitung Timur. Berikut adalah tabel yang menguraikan luas kelas jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah per kecamatan yang terdapat di Kabupaten Belitung Timur.

TABEL 2. 28 LUAS KELAS JASA EKOSISTEM PENGOLAHAN DAN PENGURAIAN LIMBAH

KECAMATAN	LUAS KELAS KINERJA JASA EKOSISTEM PENGOLAHAN DAN PENGURAIAN LIMBAH (HA)					TOTAL
	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI	
Damar	4.707,93	8.806,45	473,52	4.010,44	3.548,42	21.546,77
Dendang	3.066,09	6.071,05	4.980,49	12.803,27	13.272,21	40.193,12
Gantung	15.991,84	14.924,11	5.996,48	8.342,95	12.754,00	58.009,37
Kelapa Kampit	5.730,90	10.926,73	1.244,77	18.466,14	15.217,66	51.586,21
Manggar	2.441,72	4.841,12	-	3.736,13	5.772,96	16.791,92
Simpang Pesak	2.818,35	4.635,90	1.982,44	5.788,66	8.301,84	23.527,19
Simpang Renggiang	5.156,22	6.656,68	3.184,29	10.633,24	13.405,98	39.036,42
Total	**39.913,05**	**56.862,04**	**17.861,99**	**63.780,83**	**72.273,07**	**250.691**

Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Belitung Timur, 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, kelas sangat tinggi pada jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah dominan di Kecamatan Kelapa Kampit dengan luasan sebesar 15.217,66 Ha.

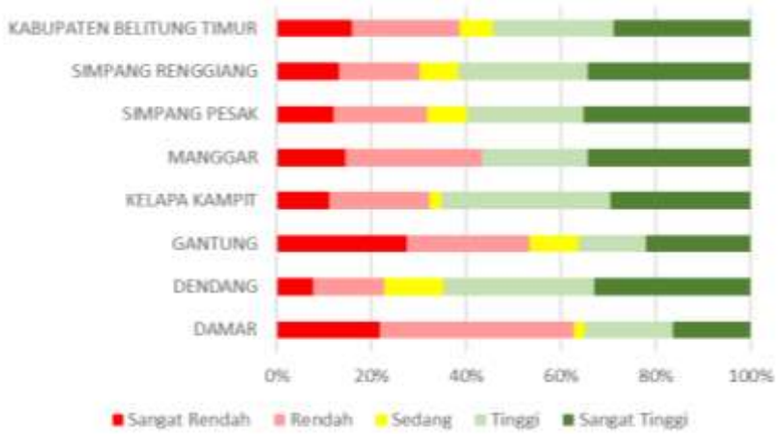

Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Belitung Timur, 2022

Gambar 2. 16 Persentase Kelas Jasa Ekosistem Pengolahan dan Penguraian Limbah

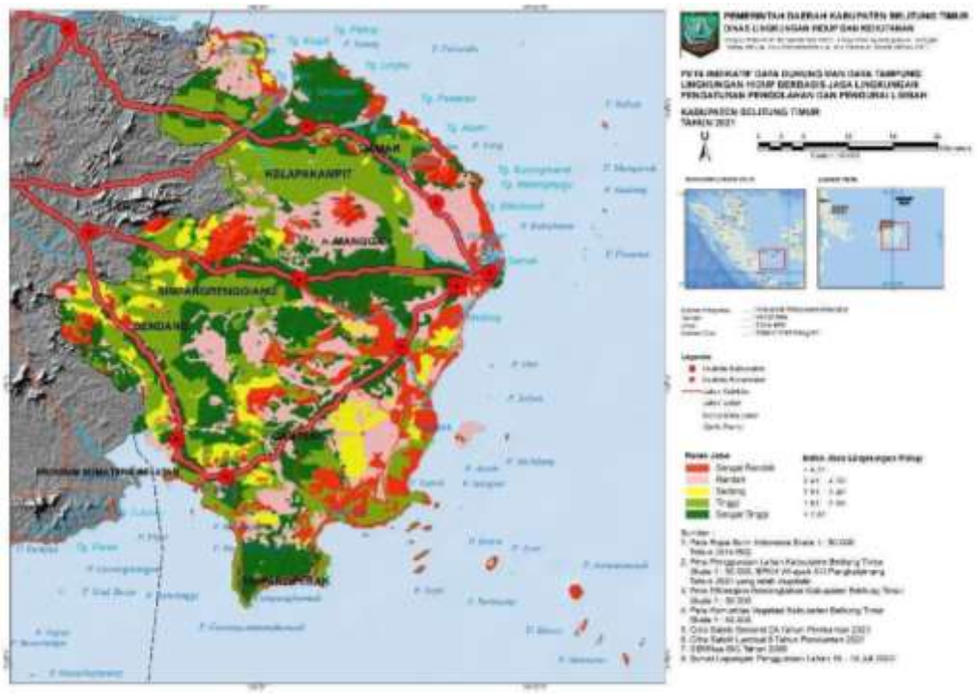

Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Belitung Timur, 2022

Gambar 2. 17 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Berbasis Jasa Ekosistem Pengolahan dan Penguraian Limbah

Sementara itu pada kelas tinggi jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah dominan berada pada Kecamatan Kelapa Kampit dengan luas wilayah sebesar 18.466,14 Ha. Berikut adalah grafik yang menggambarkan distribusi persentase luas kelas jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah per kecamatan di Kabupaten Belitung Timur.

Kelas jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah Kabupaten Belitung Timur dapat dianalisis sebarannya secara spasial. Kelas sangat tinggi secara visual dapat diidentifikasi tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Belitung Timur. Selain itu kelas tinggi juga dapat terlihat tersebar secara merata di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Belitung Timur. Berikut adalah peta yang menggambarkan sebaran kelas jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah di Kabupaten Belitung Timur.

d) Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Jasa ekosistem pengaturan iklim adalah jasa ekosistem yang secara alami digunakan untuk mengukur potensi suhu, kelembaban udara,

presipitasi, angin, pengendalian gas rumah kaca dan penyerapan karbon di udara. Berbagai faktor yang mempengaruhi jasa ekosistem pengaturan iklim antara lain adalah kerapatan vegetasi, elevasi wilayah dan jenis bentuk lahan. Wilayah dengan tutupan lahan berupa vegetasi yang rapat di wilayah dengan elevasi tinggi cenderung memiliki kelas jasa ekosistem yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah dengan tutupan vegetasi yang rendah di lahan dengan elevasi yang rendah.

Kabupaten Belitung Timur memiliki pengaturan iklim yang masih perlu untuk ditingkatkan kembali. Hal ini dapat terlihat pada luas kelas rendah pada jasa ekosistem pengaturan iklim yang memiliki luas 90.907,64 Ha. Kemudian diikuti oleh kelas tinggi dengan luas 85.381,65. Tinggi rendahnya kelas jasa ekosistem pengaturan iklim di Kabupaten Belitung Timur dapat dipengaruhi oleh faktor kerusakan lingkungan yang mempengaruhi fungsi konservasi di suatu wilayah. Berikut merupakan tabel yang menguraikan luas kelas jasa ekosistem pengaturan iklim pada tiap kecamatan di Kabupaten Belitung Timur.

TABEL 2. 29 LUAS KELAS JASA EKOSISTEM PENGATURAN IKLIM

KECAMATAN	LUAS KELAS KINERJA JASA EKOSISTEM PENGATURAN IKLIM (HA)					TOTAL
	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI	
Damar	1.064,80	9.338,20	2.986,35	6.340,59	1.816,83	21.546,77
Dendang	3.818,11	5.440,59	11.340,25	17.307,28	2.286,89	40.193,12
Gantung	585,67	40.514,91	6.808,05	8.253,49	1.847,26	58.009,37
Kelapa Kampit	705,86	4.423,72	14.953,25	28.853,09	2.650,29	51.586,21
Manggar	1.386,81	3.116,16	5.198,98	6.515,45	574,54	16.791,92
Simpang Pesak	1.251,96	16.992,83	1.510,36	3.505,35	266,70	23.527,19
Simpang Renggiang	621,75	11.081,23	9.309,52	14.606,40	3.417,52	39.036,42
Total	**9.434,96**	**90.907,64**	**52.106,76**	**85.381,65**	**12.860,02**	**250.691**

Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Belitung Timur, 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, kelas rendah pada jasa ekosistem pengaturan iklim dominan di Kecamatan Gantung dengan luasan sebesar 40.514,91 Ha. Sementara itu pada kelas tinggi jasa ekosistem pengaturan iklim dominan berada pada Kecamatan Kelapa Kampit dengan luas wilayah sebesar 28.853,09 Ha. Berikut adalah grafik yang menggambarkan distribusi persentase luas kelas jasa ekosistem pengaturan iklim per kecamatan di Kabupaten Belitung Timur.

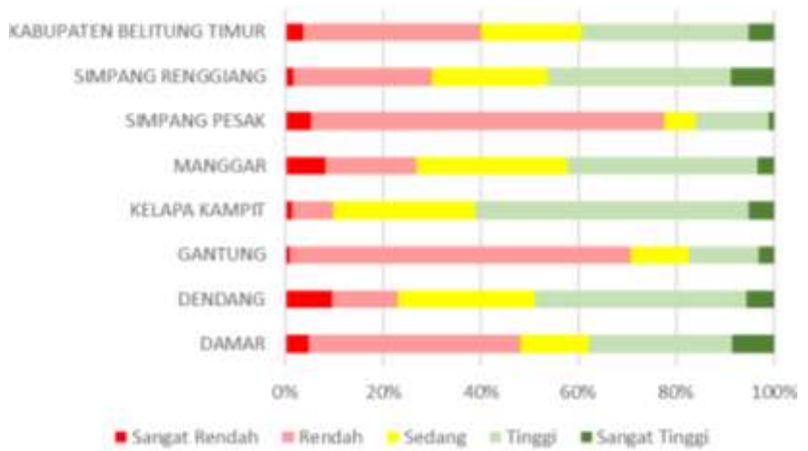

Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Belitung Timur, 2022

Gambar 2. 18 Persentase Luas Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Kelas jasa ekosistem pengaturan iklim Kabupaten Belitung Timur dapat dianalisis sebarannya secara spasial. Kelas rendah secara visual dapat diidentifikasi tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Belitung Timur. Selain itu kelas tinggi juga dapat terlihat tersebar secara merata di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Belitung Timur. Berikut adalah peta yang menggambarkan sebaran kelas jasa ekosistem pengaturan iklim di Kabupaten Belitung Timur.

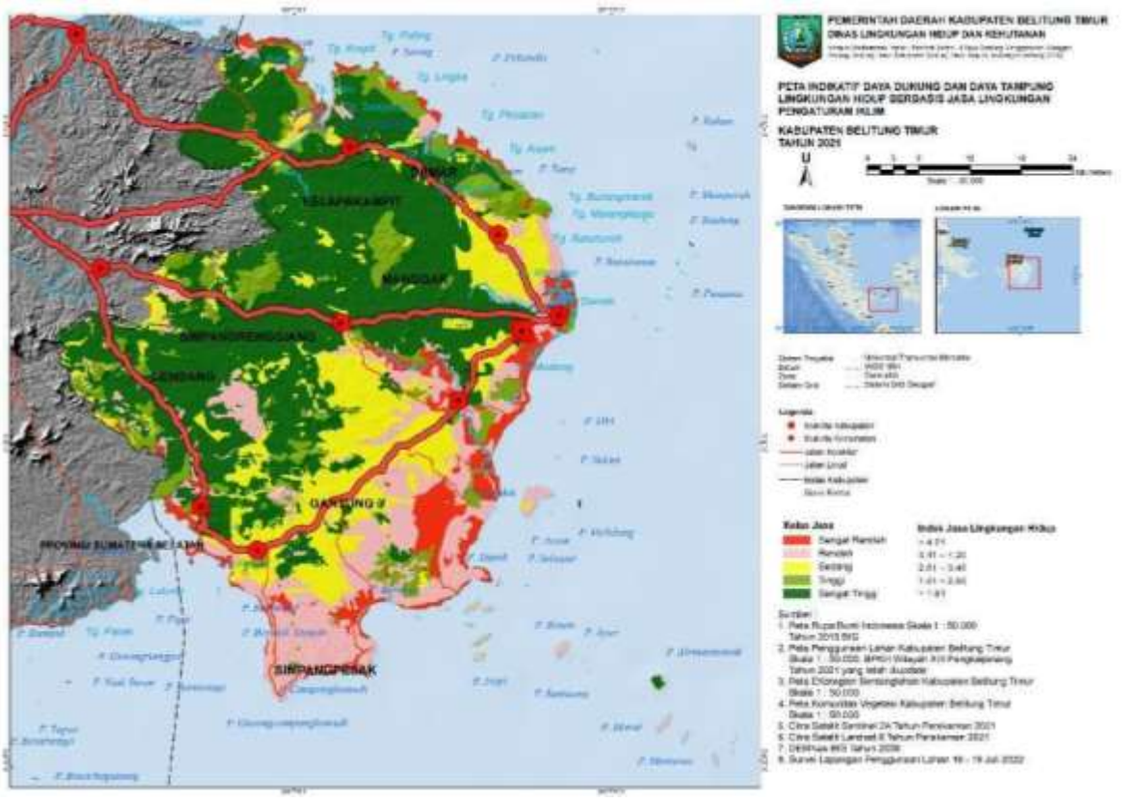

Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Belitung Timur, 2022

Gambar 2. 19 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

e) Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara

Kualitas udara di suatu wilayah ditentukan oleh interaksi antar faktor-faktor meteorologis yaitu angin, suhu udara, curah hujan dan intensitas penyinaran matahari serta jumlah polutan yang dilepaskan ke udara. Pada jasa ekosistem pengaturan kualitas udara, luas dan kerapatan tutupan vegetasi memiliki peran yang besar dalam penentuan kelas jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara. Semakin luas dan rapat tutupan lahan vegetasi, maka akan semakin baik jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara suatu wilayah, namun apabila pemanfaatan ruang berupa lahan terbangun semakin luas dan rapat sebagai akibat dari tingginya aktivitas manusia, maka jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara akan menurun di wilayah tersebut. Selain itu, elevasi wilayah juga menentukan kualitas udara yang mana pada wilayah dengan elevasi yang lebih tinggi, kualitas udara pada wilayah tersebut akan semakin baik demikian pula sebaliknya.

Kabupaten Belitung Timur cenderung memiliki jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara yang sangat tinggi. Hal ini dapat terlihat dari dominasi kelas jasa sangat tinggi yang memiliki luas 85.394,09 Ha. Kemudian diikuti oleh kelas jasa sedang yang memiliki luas sebesar 66.860,35 Ha. Dominasi kelas jasa sangat

tinggi tersebut menunjukkan bahwa kondisi jasa ekosistem pengaturan kualitas udara di Kabupaten Belitung Timur masih sangat baik dan memiliki tingkat pencemaran udara yang masih sangat rendah. Berikut adalah tabel yang menguraikan luas kelas jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara per kecamatan di Kabupaten Belitung Timur.

TABEL 2. 30 LUAS KELAS JASA EKOSISTEM PENGATURAN KUALITAS UDARA

KECAMATAN	LUAS KELAS KINERJA JASA EKOSISTEM PENGATURAN KUALITAS UDARA (HA)					TOTAL
	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI	
Damar	131,63	2.962,61	8.150,46	3.846,19	6.455,88	21.546,77
Dendang	198,02	4.804,56	6.369,06	10.738,22	18.083,26	40.193,12
Gantung	2.957,64	18.588,18	21.332,71	10.567,33	4.563,50	58.009,37
Kelapa Kampit	147,63	1.969,42	5.745,40	14.419,46	29.304,30	51.586,21
Manggar	982,78	2.009,03	1.855,28	5.311,35	6.633,48	16.791,92
Simpang Pesak	291,64	5.592,84	13.116,51	1.948,87	2.577,32	23.527,19
Simpang Renggiang	371,52	1.875,07	10.290,93	8.722,55	17.776,34	39.036,42
Total	**5.080,85**	**37.801,73**	**66.860,35**	**55.553,97**	**85.394,09**	**250.691**

Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Belitung Timur, 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, kelas sangat tinggi pada jasa ekosistem pengaturan kualitas udara dominan di Kecamatan Kelapa Kampit dengan luasan sebesar 29.304,30 Ha. Sementara itu pada kelas sedang jasa ekosistem pengaturan kualitas udara dominan berada pada Kecamatan Gantung dengan luas wilayah sebesar 21.332,71 Ha. Berikut adalah grafik yang menggambarkan distribusi persentase luas kelas jasa ekosistem pengaturan kualitas udara per kecamatan di Kabupaten Belitung Timur.

f) Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam

Salah satu fungsi dari ekosistem yaitu mencegah dan memberikan perlindungan terhadap bencana alam, baik berupa bencana kebakaran lahan, erosi, longsor, badai hingga tsunami. Jenis bentang lahan secara spesifik memiliki kaitan yang erat dengan jenis kejadian bencana alam. Kondisi tutupan lahan di suatu wilayah mampu mengendalikan kejadian bencana alam yang terjadi. Misalnya bencana tanah longsor di wilayah yang curam dengan tingkat erodibilitas yang tinggi dengan tutupan lahan berupa hutan yang memiliki kerapatan vegetasi yang tinggi mampu menahan laju air hujan sehingga erosi tanah dapat dikendalikan.

Kabupaten Belitung Timur cenderung memiliki potensi pencegahan dan perlindungan bencana yang sangat tinggi. Hal ini dapat terlihat pada luas kelas jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana kelas sangat tinggi memiliki luasan 96.332,24 Ha. Kemudian kelas tinggi pada jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana memiliki luas 58.534,56 Ha. Berikut adalah tabel yang menguraikan luas kelas jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana di Kabupaten Belitung Timur.

TABEL 2. 31 LUAS KELAS JASA EKOSISTEM PENGATURAN PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN BENCANA ALAM

KECAMATAN	LUAS KELAS KINERJA JASA EKOSISTEM PENGATURAN PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN BENCANA ALAM (HA)					TOTAL
	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI	
Damar	486,04	9.159,20	936,57	3.286,75	7.678,21	21.546,77
Dendang		4.687,81	5.012,46	11.017,18	19.475,68	40.193,12
Gantung	77,20	15.582,99	21.591,94	10.539,43	10.217,81	58.009,37
Kelapa Kampit		2.729,83	1.320,64	16.041,96	31.493,77	51.586,21
Manggar	46,59	3.174,83	1.211,04	5.670,70	6.688,76	16.791,92
Simpang Pesak	1.682,12	9.446,01	7.591,81	1.388,20	3.419,07	23.527,19
Simpang Renggiang	63,71	3.995,46	7.027,96	10.590,34	17.358,95	39.036,42
Total	**2.355,65**	**48.776,13**	**44.692,42**	**58.534,56**	**96.332,24**	**250.691**

Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Belitung Timur, 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, kelas sangat tinggi pada jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana alam dominan di Kecamatan Kelapa Kampit dengan luasan sebesar 31.493,77 Ha. Sementara itu, pada kelas tinggi jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana alam dominan berada pada Kecamatan Kelapa Kampit dengan luas wilayah sebesar 16.041,96 Ha. Berikut adalah grafik yang menggambarkan distribusi persentase luas kelas jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana alam per kecamatan di Kabupaten Belitung Timur.

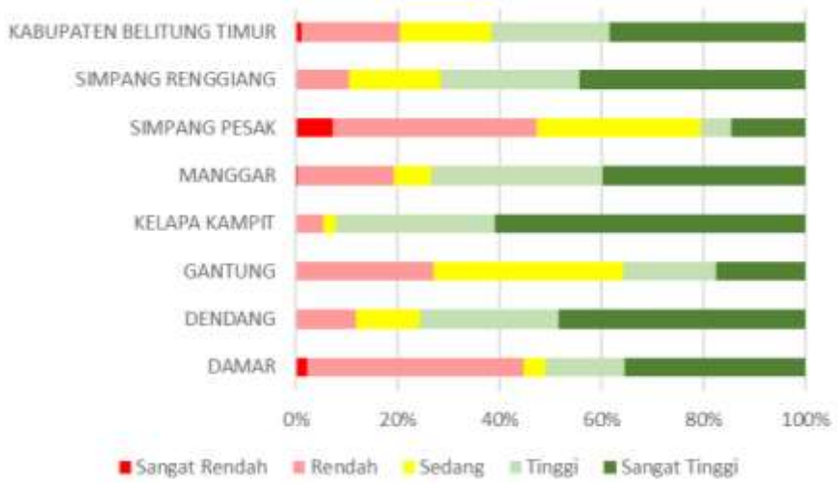

Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Belitung Timur, 2022

Gambar 2. 20 Persentase Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam

Kelas jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana alam di Kabupaten Belitung Timur dapat dianalisis sebarannya secara spasial. Kelas sangat tinggi secara visual dapat diidentifikasi tersebar merata dan dominan di seluruh wilayah Kabupaten Belitung Timur. Selain itu kelas tinggi juga dapat terlihat tersebar secara merata di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Belitung Timur. Berikut adalah peta yang menggambarkan sebaran kelas jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana alam di Kabupaten Belitung Timur.

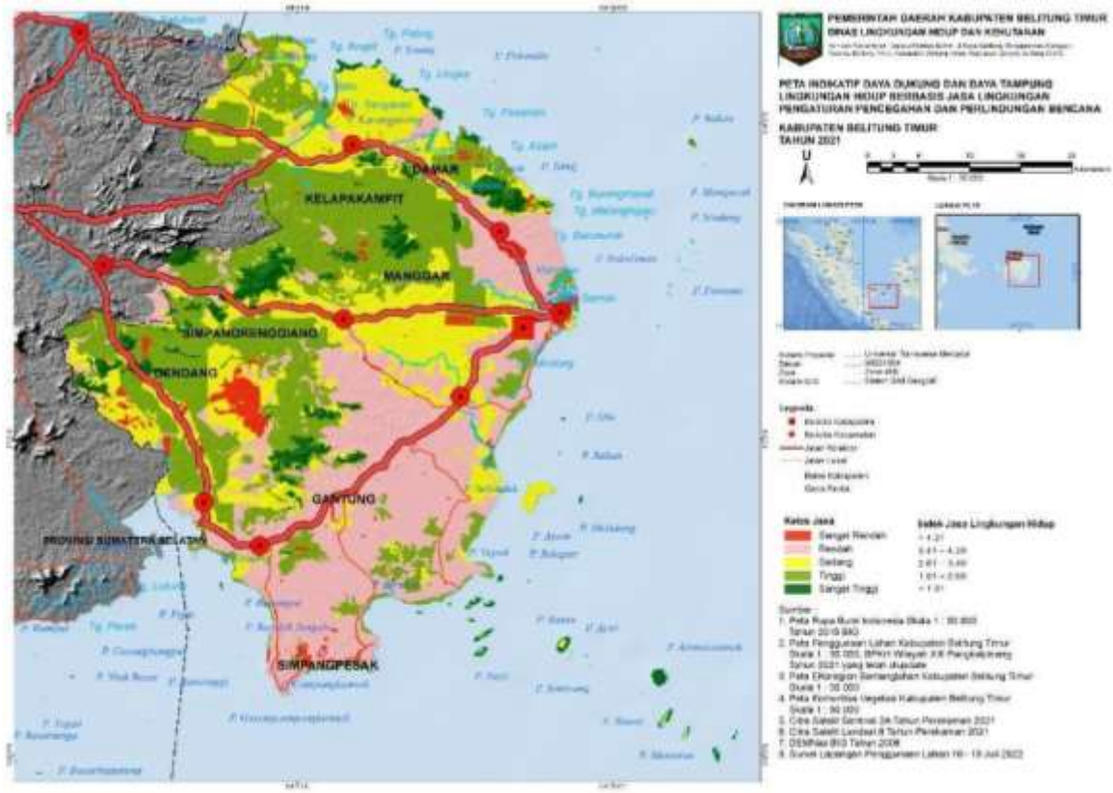

Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Belitung Timur, 2022

Gambar 2. 21 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Berbasis jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam

g) Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas

Kondisi ekoregion yang masih alami seperti pada lereng gunung api, perbukitan, pegunungan struktural dan perbukitan karst mampu menjadi habitat bagi makhluk hidup, baik flora dan fauna untuk tumbuh, berkembang dan berkembang biak sehingga memungkinkan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati di suatu wilayah. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan. Setiap ekoregion memiliki perbedaan dalam keanekaragaman flora dan fauna. Jasa ekosistem keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh faktor endogen dan eksogen yaitu kondisi ekoregion dan penutup lahan di suatu wilayah. Ekoregion merupakan definisi suatu wilayah yang didasarkan pada kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Keberadaan ekoregion akan mengindikasikan tingkat endemisitas suatu spesies yang dimiliki suatu wilayah. Tingkat endemisitas yang tinggi akan mempengaruhi keanekaragaman hayati yang tinggi. Sementara itu, penutup lahan merupakan tutupan biofisik pada permukaan bumi yang akan mengandung biota, tanah, topografi, air, tanah, dan permukaan yang akan mempengaruhi keberlanjutan keanekaragaman hayati.

Kabupaten Belitung Timur cenderung memiliki kemampuan biodiversitas yang dominan tinggi. Hal ini dapat terlihat pada luas kelas tinggi jasa ekosistem pendukung biodiversitas memiliki luas 85.953,68 Ha. Kemudian kelas sangat rendah juga cukup dominan di Kabupaten Belitung Timur dengan luasan sebesar 58.323,16 Ha. Berikut merupakan tabel yang menguraikan luas kelas jasa ekosistem pendukung biodiversitas di Kabupaten Belitung Timur.

TABEL 2. 32 LUAS KELAS JASA EKOSISTEM PENDUKUNG BIODIVERSITAS

KECAMATAN	LUAS KELAS KINERJA JASA EKOSISTEM PENDUKUNG BIODIVERSITAS (HA)					TOTAL
	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI	
Damar	1.617,69	8.815,00	2.956,67	6.340,59	1.816,83	21.546,77
Dendang	8.391,50	1.306,29	10.901,17	17.307,28	2.286,89	40.193,12
Gantung	22.671,29	17.816,05	6.857,78	8.816,99	1.847,26	58.009,37
Kelapa Kampit	1.980,31	1.998,49	16.104,04	28.853,09	2.650,29	51.586,21
Manggar	2.644,28	1.858,67	5.198,98	6.515,45	574,54	16.791,92
Simpang Pesak	13.557,29	5.103,13	1.094,73	3.505,35	266,70	23.527,19
Simpang Renggiang	7.460,81	4.369,08	9.174,08	14.614,93	3.417,52	39.036,42
Total	**58.323,16**	**41.266,71**	**52.287,44**	**85.953,68**	**12.860,02**	**250.691**

Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Belitung Timur, 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, kelas tinggi pada jasa ekosistem pendukung biodiversitas dominan di Kecamatan Kelapa Kampit dengan luasan sebesar 28.853,09 Ha. Sementara itu pada kelas sangat rendah jasa ekosistem pendukung biodiversitas dominan berada pada Kecamatan Gantung dengan luas wilayah sebesar 22.671,29 Ha. Berikut adalah grafik yang menggambarkan distribusi persentase luas kelas jasa ekosistem pendukung biodiversitas per kecamatan di Kabupaten Belitung Timur.

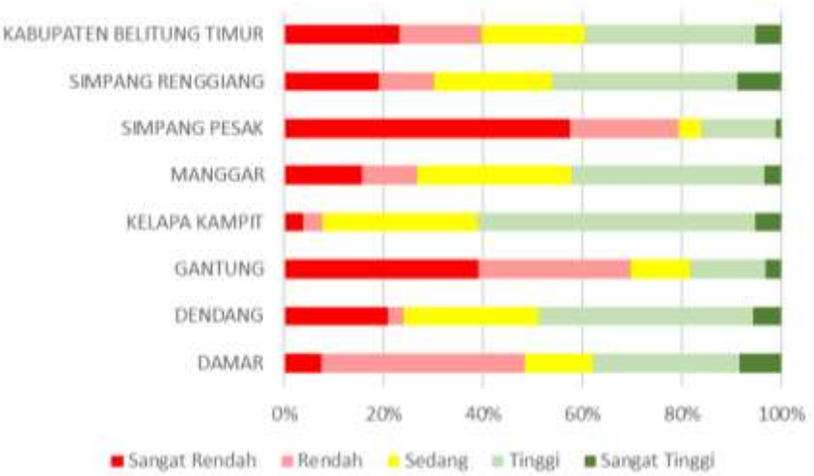

Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Belitung Timur, 2022

Gambar 2. 22 Persentase Kelas Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas

Kelas jasa ekosistem pendukung biodiversitas di Kabupaten Belitung Timur dapat dianalisis sebarannya secara spasial. Kelas tinggi secara visual dapat diidentifikasi tersebar merata dan dominan di seluruh wilayah Kabupaten Belitung Timur. Selain itu kelas sangat rendah juga dapat terlihat tersebar secara merata di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Belitung Timur. Berikut adalah peta yang menggambarkan sebaran kelas jasa ekosistem pendukung biodiversitas di Kabupaten Belitung Timur.

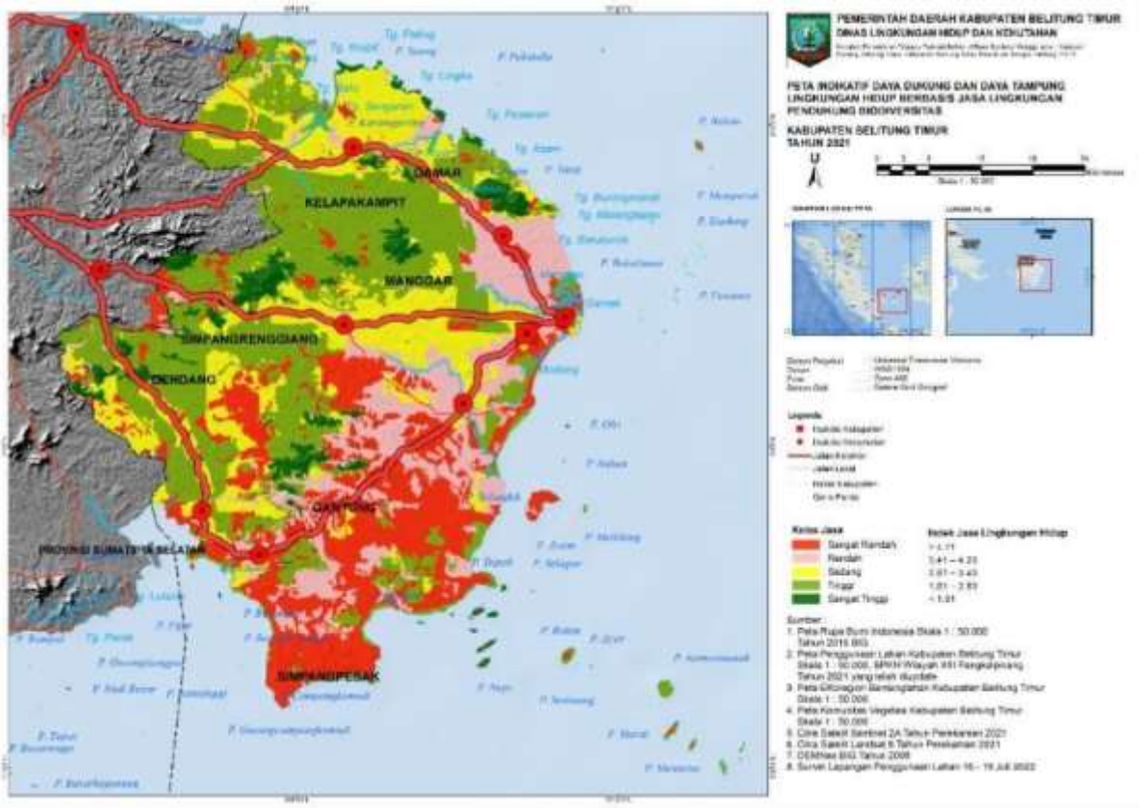

Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Belitung Timur, 2022

Gambar 2. 23 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Berbasis Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas

h) Jasa Budaya Pendukung Permukiman dan Ruang Hidup

Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia khususnya ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera. Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Jasa ekosistem sebagai tempat tinggal dan ruang hidup (*sense of place*) secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar. Kondisi ekoregion bentanglahan yang dapat mendukung fungsi tempat tinggal dan ruang hidup umumnya wilayah dengan tingkat kerawanan bencana relatif rendah, wilayah bertopografi landai hingga datar dan wilayah dengan ketersediaan akuifer sumber air permukaan untuk dapat memenuhi kebutuhan air bersih.

Kabupaten Belitung Timur cenderung memiliki kemampuan pendukung permukiman dan ruang hidup yang dominan tinggi. Hal ini dapat terlihat pada luas kelas sangat tinggi jasa budaya pendukung permukiman dan ruang hidup memiliki luas 87.895,78 Ha. Kemudian kelas rendah juga cukup dominan di Kabupaten Belitung Timur dengan luasan sebesar 68.359,01 Ha. Berikut merupakan tabel yang menguraikan luas kelas jasa budaya pendukung permukiman dan ruang hidup di Kabupaten Belitung Timur.

TABEL 2. 33 LUAS KELAS JASA BUDAYA PENDUKUNG PERMUKIMAN DAN RUANG HIDUP

KECAMATAN	LUAS KELAS KINERJA JASA BUDAYA PENDUKUNG PERMUKIMAN DAN RUANG HIDUP (HA)					TOTAL
	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI	
Damar	2.346,45	10.149,07	564,70	4.756,23	3.730,31	21.546,77
Dendang	1.493,49	3.433,73	1.800,49	15.256,56	18.208,84	40.193,12
Gantung	2.474,80	23.765,66	8.381,56	4.002,29	19.385,07	58.009,37
Kelapa Kampit	2.718,89	13.372,88	628,09	18.636,99	16.229,37	51.586,21
Manggar	961,01	4.695,30	927,57	3.695,40	6.512,65	16.791,92
Simpang Pesak	1.236,24	4.899,98	1.414,07	7.638,92	8.337,97	23.527,19
Simpang Renggiang	3.121,15	8.042,40	1.243,56	11.137,74	15.491,57	39.036,42
Total	**14.352,03**	**68.359,01**	**14.960,04**	**65.124,13**	**87.895,78**	**250.691**

Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Belitung Timur, 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, kelas sangat tinggi pada jasa budaya pendukung permukiman dan ruang hidup dominan di Kecamatan Gantung dengan luasan sebesar 19.385,07 Ha. Sementara itu pada kelas rendah jasa budaya pendukung permukiman dan ruang hidup dominan berada pada Kecamatan Gantung dengan luas wilayah sebesar 23.765,66 Ha. Berikut adalah grafik yang menggambarkan distribusi persentase luas kelas jasa budaya pendukung permukiman dan ruang hidup per kecamatan di Kabupaten Belitung Timur.

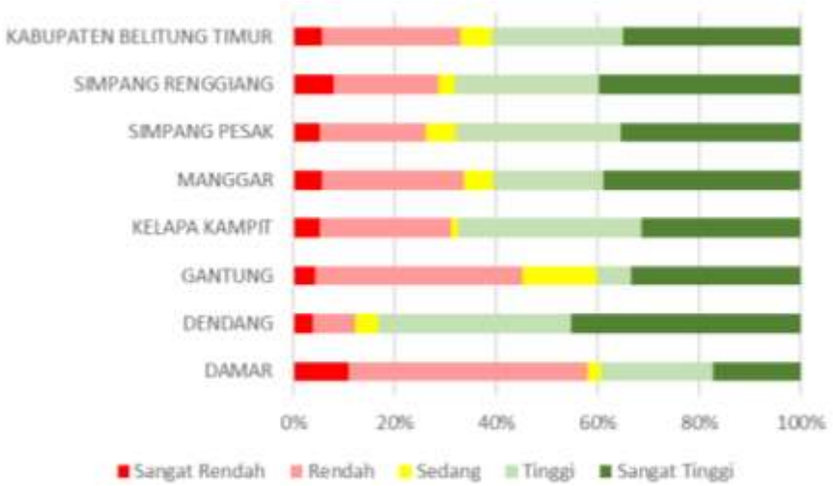

Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Belitung Timur, 2022

Gambar 2. 24 Persentase Kelas Jasa Budaya Pendukung Permukiman dan Ruang Hidup

Kelas jasa budaya pendukung permukiman dan ruang hidup di Kabupaten Belitung Timur dapat dianalisis sebarannya secara spasial. Kelas sangat tinggi secara visual dapat diidentifikasi tersebar merata dan dominan di seluruh wilayah Kabupaten Belitung Timur. Selain itu kelas rendah juga dapat terlihat tersebar secara merata di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Belitung Timur. Berikut adalah peta yang menggambarkan sebaran kelas jasa budaya pengaturan pendukung permukiman dan ruang hidup di Kabupaten Belitung Timur.

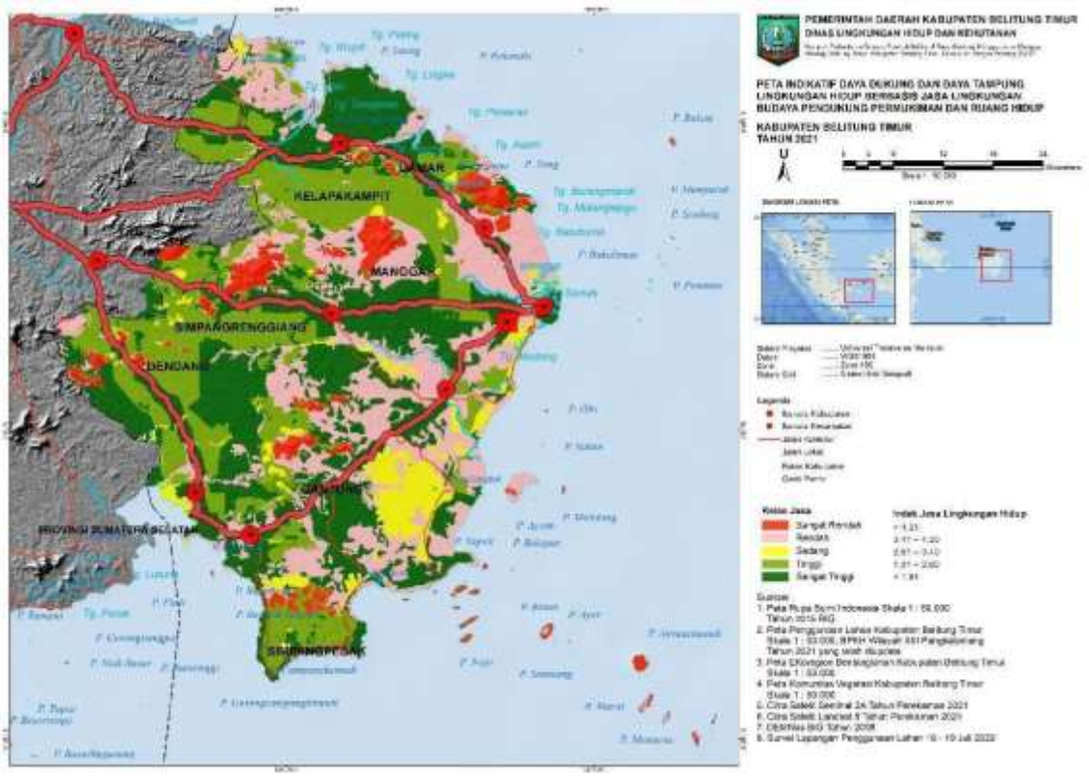

Sumber: Dokumen DDDTLH Kabupaten Belitung Timur, 2022

Gambar 2. 25 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Berbasis Jasa Budaya Pendukung Permukiman dan Ruang Hidup

6. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

1) Sumber Daya Air

Air mempunyai peran penting dalam berbagai hal kehidupan antara lain untuk kegiatan rumah tangga, pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri. Kebutuhan air memang akan selalu meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan terjadinya peningkatan terhadap jumlah penduduk dan intensitas pemakaian yang dilakukan. Sumber air bersih di wilayah Kabupaten Belitung Timur sebagian besar berasal dari air tanah yang berupa sumur gali maupun sumur dalam dan sebagian lagi menggunakan air dari PDAM yang bersumber dari air permukaan. Kabupaten Belitung Timur memiliki beberapa sungai yang mengalir, yaitu: Sungai Manggar di Kecamatan Manggar, Sungai Buding di Kecamatan Kelapa Kampit, Sungai Lenggang di Kecamatan Gantung dan Sungai Pala di Kecamatan Dendang. Sementara itu, sumber air di Kabupaten Belitung Timur juga dapat berasal dari danau/kolong. Jumlah danau di Belitung Timur sangat banyak yang tersebar di setiap wilayah. Berdasarkan data dari Inventarisasi dan Model Pemanfaatan Danau Di Bangka Belitung jumlah danau yang ada di wilayah Belitung Timur mencapai 1.426 danau. Danau dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber air untuk mandi, mencuci, budidaya perikanan dan bahkan beberapa danau dijadikan sumber air baku PDAM, adapun pada tahun 2020 pengguna PDAM di Kabupaten Belitung Timur yaitu sebanyak 3.686, dan produksi air yang disalurkan sebanyak 946.055 m^3.

Kondisi ketersediaan air di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan perhitungan pada tabel di sub bab sebelumnya adalah sebesar 105.910.807.685 m^3/tahun, dan untuk kebutuhan airnya tercatat bahwa sampai pada tahun 2050 adalah sebesar 24.858.721,44 m^3/tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka di Kabupaten Belitung timur menunjukkan bahwa keseimbangan antara ketersediaan lahan dan

permintaan lahan karena status daya dukung air yang dinyatakan surplus. Adapun berikut upaya efisiensi sumber daya air antara lain:

- Pembuatan sumur-sumur resapan;
- Pengendalian hutan dan tegakan tinggi pada wilayah-wilayah hulu;
- Pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air;
- Pengelolaan sempadan sungai dengan melarang alih fungsi lahan dan penataan kawasan tepian sungai;
- Perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan sumber air dan pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran terhadap erosi air.

2) Sumber Daya Lahan

Kabupaten Belitung Timur memiliki luas wilayah 250.691 Ha yang terbagi dalam 7 kecamatan dan 39 desa. Kecamatan Gantung memiliki luas wilayah terbesar seluas 54.630 Ha dan Kecamatan Kelapa Kampit dengan luas 49.851 Ha. Luas kawasan di Kabupaten Belitung Timur terdiri kawasan lindung (luas hutan lindung 16,59% dan kawasan perlindungan setempat sebesar 4,19 %) dan kawasan budidaya sebesar 79,22%.

TABEL 2. 34 POLA RUANG BERDASARKAN RTRW KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KAWASAN	LUAS (HA)
Hutan Produksi	57.539
Hutan Lindung	46.033
Tanaman Pangan	3.042
Hortikultura	50.999
Perkebunan	44.442
Pertambangan	33.707
Pemukiman	14.802
Industri	1.532
Kawasan Strategis	1.116
Kawasan Militer	309

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Belitung Timur tahun 2014-2034

Berdasarkan Dokumen RTRW Kabupaten Belitung Timur tahun 2014-2034, penggunaan lahan utama di Kabupaten Belitung Timur adalah hutan produksi dengan luas 57.539 Ha. Sedangkan penggunaan lahan paling kecil adalah peruntukan kawasan militer dengan luas 309 Ha. Berdasarkan kondisi eksisting tahun 2021, Kabupaten Belitung Timur terdiri dari luas lahan non pertanian seluas 106.967,4 Ha, Luas lahan sawah 2.831,41 Ha dan luas lahan perkebunan 12.675,96 Ha.

Pada umumnya, penetapan penggunaan lahan didasarkan pada karakteristik lahan dan daya dukung lingkungannya. Bentuk penggunaan lahan yang ada dapat dikaji melalui proses evaluasi sumber daya lahan, sehingga dapat diketahui potensi sumber daya lahan untuk berbagai penggunaannya. Pengelolaan lahan yang ramah lingkungan dan penyusunan tata ruang yang tepat, dapat mengurangi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan antara lain banjir, kekeringan dan longsor. Berdasarkan hal tersebut maka untuk melakukan upaya efisiensi dalam rangka melestarikan sumber daya lahan diantaranya :

- Pencegahan terjadinya penurunan kesuburan tanah dari aspek kimiawi, fisik, dan biologis tanah
- Pemeliharaan dan peningkatan fungsi resapan air di wilayah hulu dan pencegahan bahaya banjir

- Pencegahan perusakan fisik lahan akibat tanah longsor, penimbunan pasir, kondisi tergenang, drainase tanah buruk, atau cekaman kekeringan
- Pencegahan perusakan lahan akibat timbunan sampah anorganik, dan limbah industri yang meracuni tanaman, mempengaruhi reaksi kimia tanah, salinitas, senyawa meracun, dan sebagainya

3) Sumber Daya Hutan

Hutan memiliki beberapa fungsi penting dalam ekosistem, mulai dari penjaga tata air, mencegah terjadinya erosi, sumber ekonomi, habitat flora dan fauna sampai pada hutan sebagai paru paru dunia. Maka dari itu penting bagi setiap daerah untuk memiliki sumber daya berupa hutan karena manfaat yang tinggi dari adanya hutan itu sendiri, selain itu adanya komposisi hutan yang seimbang akan mendorong tingginya kualitas udara dan air pada suatu daerah. Berdasarkan dokumen IKPLHD Kabupaten Belitung Timur tahun 2022, sesuai dengan fungsinya hutan di Kabupaten Belitung Timur terdiri dari hutan produksi yang memiliki luas sebesar 57.539 Ha dan untuk hutan lindung sebesar 46.033. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 2. 35 LUAS HUTAN BERDASARKAN FUNGSI DAN STATUS

NO.	FUNGSI HUTAN	LUAS (HA)
A.	Berdasarkan Fungsi Hutan	
1.	Hutan Produksi	57.539
2.	Hutan Lindung	46.033
3.	Taman Nasional	0,00
4.	Taman Wisata Alam	0,00
5.	Taman Buru	0,00
6.	Cagar ALam	0,00
7.	Suaka Margasatwa	0,00
8.	Taman Hutan Raya	0,00
B.	Berdasarkan Status Hutan	
1.	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	0,00
2.	Hutan Hak/Hutan Rakyat	0,00
3.	Hutan Kota	47,76
4.	Taman Hutan Raya	0,00
5.	Taman Keanekaragaman Hayati	20,00

Sumber: IKPLHD Kabupaten Belitung Timur tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, apabila dipersentasekan sesuai dengan fungsi hutan, 44,4% memiliki fungsi hutan lindung dan 55,6% memiliki fungsi hutan produksi, hal tersebut menjadi hal yang baik bagi Kabupaten Belitung Timur karena proporsi antara hutan produksi dan hutan lindung yang tidak berbeda jauh, karena fungsi hutan lindung sangat besar dalam kebutuhan, konversi, pelestarian, dan perlindungan habitat Sementara itu, tipikal hutan produksi disebut tidak mampu melindungi atau memberikan peran signifikan pada konservasi karena tingginya rasio kerusakan dan dianggap tidak produktif.

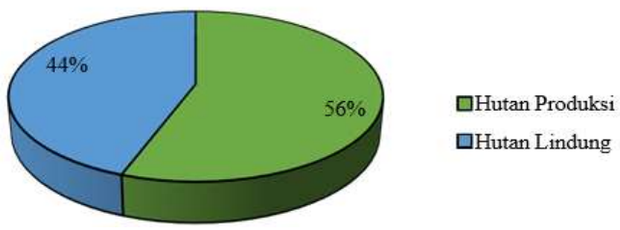

Sumber : Dokumen DDDTLH Kabupaten Belitung Timur, 2022

Gambar 2. 26 Grafik Luas Hutan Berdasarkan Fungsi Hutan di Kabupaten Belitung Timur

Di Kabupaten Belitung Timur, untuk luas hutan sesuai dengan status hutannya, hanya terdiri dari hutan kota dengan luas 47,76 Ha. Hutan Kota ini memiliki peran penting khususnya dalam pengalokasian RTH (Ruang Terbuka Hijau) pada daerah perkotaan di Kabupaten Belitung Timur. Selain itu, adanya hutan kota ini juga mendorong kualitas udara dan iklim yang baik pada daerah perkotaan. Secara umum, kondisi hutan di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan data diatas memiliki kemampuan dalam keberlanjutan pemanfaatan sumber daya hutan. Adapun berikut merupakan efisiensi sumber daya hutan yang dapat dilakukan di Kabupaten Belitung Timur, diantaranya.

- Meningkatkan pemanfaatan semua tipe hutan secara efisien dan rasional
- Meningkatkan efisiensi dalam perencanaan dan pengelolaan hutan;
- Meningkatkan pengembangan dan produktivitas pada kawasan hutan untuk menjaga flora dan fauna yang ada didalamnya; dan peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan dengan pengelolaan hutan bersama masyarakat dan pembentukan lembaga masyarakat desa hutan.

4) Sumber Daya Bahan Tambang

Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah yang potensial di bidang pertambangan, karena terdapat banyak tanah yang mengandung mineral bijih timah dan bahan galian lain, seperti pasir kuarsa, pasir bangunan, kaolin, batu gunung, tanah liat dan granit yang menyebar secara merata diseluruh wilayah. Sebanyak 52% hasil produksi timah Babel dipergunakan untuk membentuk papan sirkuit dan komponen smartphone, tablet dan laptop yang diproduksi di seluruh dunia saat ini.

Pertambangan timah merupakan salah satu komoditi terbesar dan potensial di wilayah Belitung Timur. Mineral timah merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resources*) dan memiliki manfaat yang besar dalam penggerak perekonomian dan perkembangan di Belitung Timur. Berdasarkan data PDRB ADHB kontribusi pertambangan dan penggalian terhadap perekonomian adalah sebesar 17,60%. Berdasarkan data BPS tahun 2020, masyarakat Belitung Timur yang bekerja di sektor pertambangan timah sebanyak 25 ribu orang atau 16,01% dari jumlah penduduk.

Kawasan peruntukkan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang baik di darat maupun perairan. Potensi kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Belitung Timur hampir tersebar di sebagian besar wilayah di Kabupaten Belitung Timur. Kawasan pertambangan diarahkan (sesuai dengan Kuasa Pertambangan/KP dan Surat Izin Penambangan Daerah/SIPD) pada seluruh kecamatan. Dalam Perda Kabupaten Belitung Timur tentang RTRW kawasan peruntukan pertambangan dengan luas kurang lebih 33.707 hektar yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Belitung Timur. Kabupaten Belitung Timur sendiri pada saat ini masih memiliki potensi tambang timah yang melimpah, adapun masih ada KP timah laut yang belum digarap dan memiliki potensi yang cukup menjanjikan. Selain itu, berdasarkan data Bappeda Kepulauan Bangka Belitung, potensi nilai ekonomi bijih timah di laut

Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Babel mencapai lebih Rp100 triliun, yang tidak hanya terdiri dari timah tetapi juga bahan galian ikutannya, seperti zirkon, logam tanah jarang (*rare earth elements*) yang bernilai sangat tinggi.

Peranan petambangan di Belitung timur sangat berpengaruh terhadap perekonomian dan pertumbuhan daerah tersebut, selain kebutuhan bahan tambang yang terus bertambah, resistensi masyarakat terhadap aktivitas penambangan juga meningkat. Maka dari itu perlu adanya upaya dalam meningkatkan produktivitas pertambangan di Kabupaten Belitung Timur dengan memperhatikan lingkungan dan dampaknya, berikut upaya efisiensi sumber daya bahan tambang di Kabupaten Belitung Timur, diantaranya;

- Pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi/reklamasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, dengan melakukan penimbunan tanah subur dan/atau bahan-bahan lainnya, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
- Pemberlakuan aturan terkait petambangan ilegal secara lebih ketat sebagai upaya dalam potensi ancaman keseimbangan fungsi kelestarian lingkungan;
- Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
- Menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, sekaligus disertai pengendalian yang ketat; dan
- Pemanfaatan lahan bekas tambang yang optimal dalam rangka pencegahan kerusakan bekas penambangan

7. Tingkat Kerentanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Pulau Belitung, juga memiliki keanekaragaman flora/tumbuhan daerah setempat. Tumbuhan yang tumbuh di Belitung Timur amat beragam, tersebar pada vegetasi kerangas, vegetasi mangrove, vegetasi pantai dan vegetasi hutan tropis dataran rendah. Tiap vegetasi tersebut memiliki jenis tumbuhan yang berbeda. Sementara itu, Kabupaten Belitung Timur yang merupakan salah satu daerah beriklim tropis mempunyai banyak fauna yang sampai saat ini belum terinventarisasi dengan utuh sehingga belum ada data informasi mengenai kekayaan fauna yang dapat menjadi aset pengetahuan, kebudayaan dan pencirian daerah secara endemik. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya identifikasi secara keseluruhan terkait flora dan fauna khususnya yang ada di Kabupaten Belitung timur. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah adanya perburuan liar pada flora dan fauna yang seharusnya dijaga atau dilindungi karena kurangnya inventarisasi yang utuh terhadap data flora dan fauna.

Pada dasarnya flora dan fauna di Kabupaten Belitung Timur berada di kawasan hutan yang sebagian besarnya berada di hutan produksi karena memiliki luas paling tinggi diantara jenis hutan lainnya. Karena hutan produksi memiliki salah satu ciri yaitu produktivitas yang rendah, maka perlu adanya pelestarian dan pengkajian lebih mendalam terkait hal tersebut. Secara lengkapnya, kondisi flora dan fauna di Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 2. 37 JENIS FLORA DAN FAUNA DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	GOLONGAN	NAMA SPESIES		STATUS			
		NAMA LATIN	NAMA LOKAL	ENDEMIK	TERANCAM	DILINDUNGI	TIDAK DILINDUNGI
1.	Mamalia	*Trachypithecus cristatus*	Lutung kelabu	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
		Muntiacus muntjak	Kijang muncak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
		Tarsius bancanus	Mentilin	Ya	Tidak	Ya	Tidak
		Axis kuhlii	Rusa bawean	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
		Dolphinidae	Lumba-lumba air laut	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
		Dugong dugon	Duyung	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
		Manis javanica	Trenggiling	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
		Tragulus kanchil	Pelanduk kecil	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
		Nycticebus Coucang	Kukang	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
		Prionodon linsang	Musang lingsang	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
2.	Aves	*Psittacula alexandri*	Burung betet	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
		Alcedinidae	Burung udang, Raja udang	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
		Falconidae	Burung alapalap, Elang	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
		Caprimulgus concretus	Cabak kolong	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
		Eurostopodus diabolicus	Taktarau iblis	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
		Psilopogon rafflesii	Takur tutut	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
		Pittidae	Burung paok, Burung cacing	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
		Chloropsis moluccensis	Cica daun sayap birusumatera	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
		Chloropsis venusta	Cica daun sumatera	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
		Anthreptes rhodolaemus	Burung madu leher merah	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
		Pitta sordida	Paok hijau	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
		Loriculus galgulus	Serindit melayu	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
		Otus angelinae	Burung hantu	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

NO.	GOLONGAN	NAMA SPESIES		STATUS			
		NAMA LATIN	NAMA LOKAL	ENDEMIK	TERANCAM	DILINDUNGI	TIDAK DILINDUNGI
		Gracula religiosa	Tiong emas	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
		Aethopyga siparaja	Burung madu sepah-raja	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
		Anthracoceros malayanus	Kangkareng hitam.	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
3.	Reptil	*Crocodylus porosus*	Buaya muara	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
		Chelonia mydas	Penyu hijau	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
		Eretmochelys imbricate	Penyu sisik	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
		Lepidochelys olivacea	Penyu ridel	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
		Varanus salvator	Biawak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
4.	Kerang	*Cassis cornuta*	Kepala kambing	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
		Charonoa tritonis	Triton terompet	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
		Hippopus hippopus	Kima tapak kuda, Kima kuku beruang	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
		Hippopus parcellanus	Kima cina	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
		Nautilus pompillius	Nautilus berongga	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
5.	Flora	*Nephentes spp*	Kantong Semar	Ya	Tidak	Ya	Tidak
		Rhodomyrtus tomentosa	Keremuntingan	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
		Dillenia eximia Miq	Simpor laki	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
		Shorea balangeran Burck	Belangeran	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
		Tristaniopsi merguensis	Pelawan	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
		Shorea ovalis	Meranti	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
		Rhodamia cinerea	Jemang	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
		Grammatophyllum speciosum	Nibong palai	Ya	Tidak	Tidak	Ya

Sumber: IKPLHD Kabupaten Belitung Timur tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas terdapat satu fauna yang tergolong endemic yaitu Mentilin (*Tarcius bantanus*) yang berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor 522.53-958/2010, hewan tersebut merupakan fauna identitas di Provinsi Bangka Belitung. Sementara itu untuk semua jenis flora yang ada di Kabupaten Belitung Timur termasuk kedalam flora endemic dan hanya satu flora yang dilindungi yaitu Kantong semar (*Nephentes spp*), hal tersebut karena kantong semar merupakan flora yang langka di Indonesia sehingga

jumlah yang tersedia harus dilindungi agar terhindar dari kepunahan. Pada dasarnya di Kabupaten Belitung timur, tidak terdapat flora dan fauna yang terancam, sementara itu terdapat satu flora dan satu fauna yang tidak dilindungi diantaranya Biawak (*Varanus salvator*) yang termasuk hewan liar dan Nibong palai (*Grammatophyllum speciosum*).

II.1.D **Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan**

Ketahanan energi dalam bagian ini diukur menggunakan Indikator aksesibilitas energi, daya terpasang, dan ketersediaan produksi energi listrik. Daya terpasang adalah indikator yang digunakan untuk menilai aksesibilitas energi di suatu wilayah, dihitung berdasarkan total kapasitas daya listrik yang tersedia, diukur dalam megawatt (MW). Semakin tinggi daya terpasang, semakin besar kapasitas energi yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri. Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan daya terpasang dari tahun ke tahun. Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, kebutuhan energi listrik di Kabupaten Belitung Timur juga meningkat.

Produksi listrik adalah indikator lain yang mengukur ketersediaan energi di suatu wilayah. Semakin tinggi produksi listrik, semakin banyak energi yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri. Produksi listrik di Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan pada tahun 2020-2021, dan peningkatan lebih lanjut terjadi pada tahun 2022-2023. Produksi listrik yang cukup tinggi, Kabupaten Belitung Timur dapat memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat dan industri dengan memadai.

TABEL 2. 38 INDIKATOR KETAHANAN ENERGI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Daya Terpasang Listrik PT. PLN	KW	69.461.300	78.199.050	92.783.650	98.652.050	98.652.050
Produksi Listrik PT. PLN	KWh	89.580.000	26.383.553	112.430.520	134.988.262	134.988.262

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur, 2025

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) untuk mengukur tingkat ketahanan pangan di suatu wilayah. Perhitungan IKP dengan menggabungkan indikator-indikator ketahanan pangan dalam bentuk indeks komposit sehingga nilai IKP menjadi satu skor. Nilai IKP digunakan untuk menunjukkan situasi ketahanan pangan di suatu wilayah tertentu. IKP ditujukkan untuk mengindentifikasi masalah rawan pangan dan melacak kemajuan daerah dari kurang pangan. Rentang skor dari Indeks Ketahanan Pangan sebagai berikut: Sangat Baik: IKP >= 80; Baik: IKP >= 65 < 80; Sedang: IKP >= 50 < 60; Cukup: IKP >= 35 < 50; Buruk: IKP < 35. Secara umum Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur berkategori Sedang, dalam hal ini perlu evaluasi dari pemerintah mengenai ketersedian pangan bagi daerah yang rawan pangan. Selain itu perlu melacak ketahanan pangan setiap tahun melalui program ketahanan pangan yang efektif.

TABEL 2. 39 INDEKS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	60,94	66,52	60,5	62,02	62,09

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, 2025

II.1.E Lingkungan Hidup Berkualitas

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH menggabungkan beberapa parameter lingkungan hidup seperti kualitas udara, kualitas air, keberlanjutan sumber daya alam, dan kebersihan lingkungan, serta faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Nilai IKLH berupa skor yang sudah dijadikan indeks komposit dari beberapa parameter lingkungan. Skor IKLH diklasifikasikan dengan beberapa kategori sebagai berikut: Sangat Baik: IKLH >= 80; Baik: IKLH >= 65 < 80; Sedang: IKLH >= 50 < 65; Cukup: IKLH >= 35 < 50; Buruk: IKLH < 35. Berdasarkan tabel di bawah ini, IKLH Kabupaten Belitung Timur selama tahun 2020 – 2023 berkategori baik. Secara umum IKLH Kabupaten Belitung Timur menunjukkan kualitas lingkungan hidup yang baik.

TABEL 2. 40 INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	70,51	70,37	69,95	71,33	67,76

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur, 2025

2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses terhadap layanan sanitasi yang dikelola secara aman merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menjaga kualitas lingkungan. Data menunjukkan bahwa persentase rumah tangga di Kabupaten Belitung Timur yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman masih sangat rendah dan berfluktuasi selama periode 2020-2024, dengan capaian tertinggi hanya sebesar 6,78% pada tahun 2022 dan terendah 5,29% pada 2021. Kondisi ini mencerminkan masih besarnya tantangan dalam penyediaan sanitasi layak dan aman bagi masyarakat, baik dari sisi infrastruktur, perilaku, maupun pendampingan kebijakan. Rendahnya angka ini juga mengindikasikan perlunya intervensi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan agar target peningkatan kualitas sanitasi, sebagaimana tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dapat tercapai secara bertahap di tingkat lokal.

TABEL 2. 41 RUMAH TANGGA DENGAN AKSES SANITASI AMAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020-2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Persentase Rumah Tangga Menggunakan Layanan Sanitasi yang Dikelola Secara Aman	Persen	6,74	5,29	6,78	6,12	6,51

Sumber: Dinas PUPRPPRKP Kabupaten Belitung Timur, 2025

3. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Kondisi timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Belitung Timur mengalami tren menurun. Timbulan sampah terbanyak pada tahun 2022 hingga mencapai 293,66 kg, sedangkan timbulan sampah paling sedikit pada tahun 2020 dan 2024 sebanyak 142,46 kg. Detil timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 2. 42 TIMBULAN SAMPAH TEROLAH DI FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020-2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/orang	142,46	144,83	293,66	145,03	142,46

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur, 2025

4. Cakupan Pelayanan Persampahan

Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Belitung Timur dapat direpresentasikan dengan penanganan sampah. Penanganan sampah di Kabupaten Belitung Timur di tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif. Penurunan terjadi pada tahun 2022 dan 2024 dengan besaran masing-masing 156,01 ton dari tahun 2020 serta 112.585,83 ton.

TABEL 2. 43 TABEL PENANGANAN SAMPAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020-2024

URAIAN	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Penanganan Sampah (Ton)	12.098,81	-	11.942,80	12.1822,31	9.236,48

Sumber: SIPSN, 2025

5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai komitmen dan efektivitas suatu daerah dalam mengatasi perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Kondisi di Kabupaten Belitung Timur, data penurunan emisi GRK selama tiga tahun terakhir memberikan gambaran mengenai capaian daerah dalam mengurangi dampak aktivitas manusia terhadap atmosfer.

TABEL 2. 44 PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020-2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	-	-	26,87	-	-

Sumber: Bappelitbangda Kab. Belitung Timur (diolah), 2025

Pada tahun 2022, persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Belitung Timur tercatat sebesar 26,87%. Sementara itu, untuk tahun 2020, 2021, 2023, dan 2024, data tidak tersedia karena belum dilakukan perhitungan. Capaian pada tahun 2022 mencerminkan adanya langkah awal dalam upaya pengurangan emisi GRK di tingkat daerah, meskipun keberlanjutan dan konsistensinya belum dapat dievaluasi secara menyeluruh karena keterbatasan data. Upaya pengurangan emisi GRK perlu lebih diperkuat dan distabilkan, baik melalui kebijakan yang berkelanjutan maupun peningkatan kapasitas teknis dan kelembagaan di tingkat daerah.

6. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana adalah upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat

kabupaten/kota dan provinsi. Penanggulangan bencana perlu dilakukan dengan cara antisipasi dari munculnya bencana yang banyak memberikan kerugian materi maupun non materi bagi lingkungan dan masyarakat. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Belitung Timur berkategori tinggi.

TABEL 2. 45 INDEKS RISIKO BENCANA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

INDEKS	SATUAN	TAHUN				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Indeks Risiko Bencana	Nilai	NA	168,4	168,4	155,61	152,06

Sumber: BNPB, 2025

a) Kawasan Rawan Abrasi dan Gelombang Pasang

Adapun arahan kawasan rawan gelombang pasang di Kabupaten Belitung Timur tersebar di pantai selatan dan timur, meliputi Kecamatan Kelapa Kampit (Desa Cendil, Air Kelik, Mayang, dan Desa Pembaharuan); Kecamatan Dendang (Desa Batu Itam, Dendang, Simpang Pesak, dan Desa Tanjung Kelumpang); Kecamatan Gantung (Desa Gantung, Jangkar Asam, Lilangan, dan Desa Selingsing); dan Kecamatan Manggar (Desa Buku Limau, Kurnia Jaya, Lalang, Lalang Jaya, Mempaya, Mengkubang, Padang, Desa Sukamandi). Sedangkan kawasan dengan potensi terjadi abrasi meliputi seluruh kawasan pantai di Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan dokumen Pengurangan Risiko Bencana (PRB) menyebutkan bahwa tingkat abrasi yang ada di Kabupaten Belitung Timur terkategorikan "Sedang". Oleh karena itu, proteksi kawasan pantai harus dilakukan melalui penanaman bakau atau tanaman pantai lainnya untuk mengurangi laju abrasi.

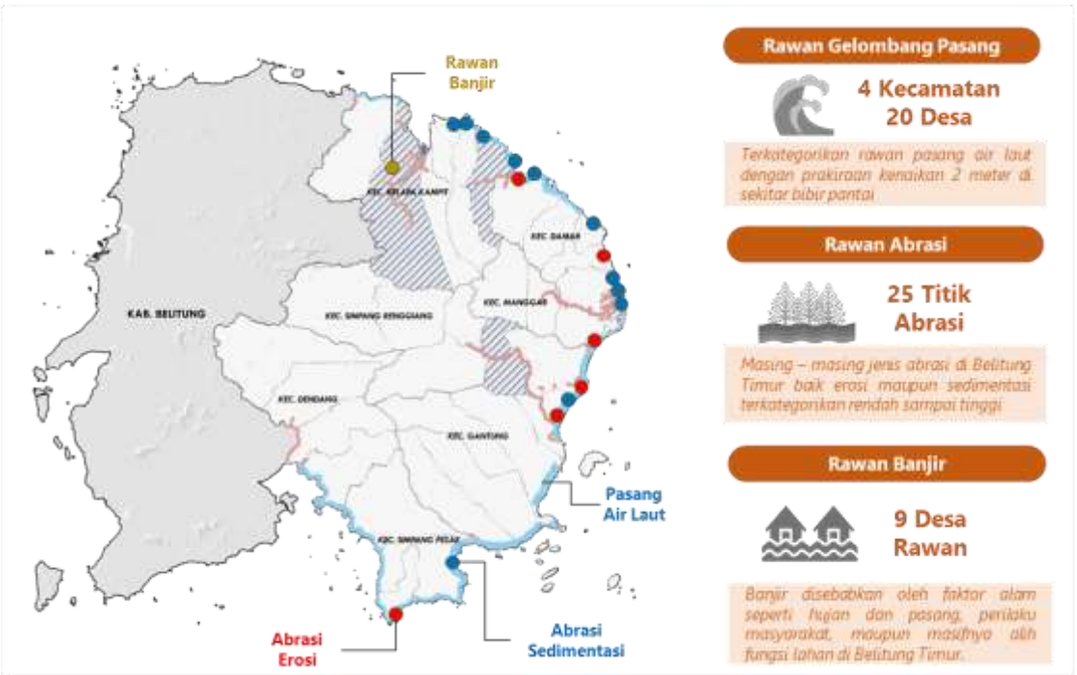

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2020

Gambar 2.27 Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Belitung Timur

b) Kawasan Rawan Banjir

Bencana banjir merupakan salah satu masalah di Kabupaten Belitung Timur. Titik lokasi genangan dan banjir diketahui bahwa terdapat di enam titik kawasan rawan banjir meliputi kawasan Desa Baru, Kurnia Jaya, Mekar Jaya, Buding, Mayang, dan Lenggang. Beberapa faktor penyebab terjadinya genangan yang teridentifikasi adalah faktor alamiah karena

tingginya gelombang pasang air laut dan debit hujan yang turun; faktor pola perilaku masyarakat yang membuang sampah ke dalam saluran drainase dan pembangunan fisik sehingga menyebabkan penyumbatan dan kerusakan saluran drainase; serta adanya pengembangan wilayah kota yang mengubah tata guna lahan, mengakibatkan bertambahnya debit air di saluran.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bahwa bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam dan atau non alam maupun manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana yang terjadi di Kabupaten Belitung Timur dalam laporan INARISK tahun 2020 adalah pada tabel berikut.

TABEL 2. 46 BENCANA DI BELITUNG TIMUR TAHUN 2020

BENCANA	LUAS BAHAYA (HA)	JIWA TERPAPAR	FISIK (RP. MILIAR)	EKONOMI (RP. MILIAR)	LINGKUNGAN (HA)
Banjir	97,085	66,828	428.397	481.642	7,537
Tanah Longsor	7,071	92	10.298	7.617	1,371
Kebakaran Hutan & Lahan	190,005	0	0	1,292.579	14,927
Kekeringan	250,690	126,939	0	1,024.357	30,051
Cuaca Ekstrim	207,896	125,767	1,472.209	1,263.839	0
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	86,313	64,044	409.386	387.376	7,082
Covid-19	5,136	59,656	0	0	0

Sumber : Inarisk, 2020

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Belitung Timur meliputi:

- **Tanah Longsor**
  Kegiatan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur banyak pada sektor tambang. Kegiatan tambang timah banyak yang dilakukan langsung oleh masyarakat secara tradisional. Terdapat juga perusahaan besar yang bergerak di pertambangan timah Kabupaten Belitung Timur. Pertambangan timah dalam pelaksanaannya tentu membutuhkan K3 untuk kesesuaian prosedur agar pelaksanaannya tetap aman, namun hal tersebut tidak memungkiri adanya resiko bencana seperti tanah longsor. Hal tersebut terjadi di tahun 2019, 2021, maupun 2023 di mana terjadi longsor di tambang timah yang mengakibatkan jatuhnya korban.

- **Banjir**
  Selama 17 tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbentuk, kejadian bencana banjir besar untuk pertama kalinya terjadi di Pulau Belitung Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 14- 16 Juli 2017 dengan ketinggian genangan banjir mencapai 2-3 m. Bencana banjir ini merupakan rangkaian dari kejadian bencana banjir yang sebelumnya telah terjadi di Pulau Bangka. Banjir disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor alam dan faktor perilaku manusia. Faktor alam yang dominan adalah akibat dari curah hujan yang sangat ekstrim yang dipicu oleh tropical storm , adanya pasang/rob air laut, kondisi sungai, dan karakteristik DAS. Sedangkan penyebab dari faktor perilaku manusia yaitu adanya perubahan signifikan pada tutupan lahan dan penggunaan lahan dari kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan serta banyaknya

sebaran kolong/eks tambang sehingga membuat aliran normal sungai terganggu.

Bencana banjir pada Kabupaten Belitung terjadi pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Pandan, Kecamatan Membalong, dan Kecamatan Badau. Sedangkan pada Kabupaten Belitung Timur terjadi pada enam kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Renggiang, Kelapa Kampit, Dendang, Damar, Gantung dan Manggar. Bencana banjir Belitung Timur telah mengakibatkan warga meninggal dunia, infrastruktur mengalami kerusakan (jalan, jembatan, tiang listrik, dan lainnya), kerusakan tempat tinggal masyarakat, dan lain sebagainya.

Aktivitas penambangan yang menyebabkan dampak lingkungan adalah memburuknya kondisi tanah dan lingkungan. Dampak nyata yang telah dirasakan di Kecamatan Kelapa Kampit adalah terjadinya banjir. Sebelumnya daerah ini tidak pernah merasakan bencana banjir, namun karena perubahan kondisi dan struktur tanah mengakibatkan tanah tidak produktif lagi dalam menjalankan fungsinya sebagai penyerap air dan penahan air. Menurut salah satu informan banjir di Kecamatan Kelapa Kampit dari tahun ke tahun terjadi peningkatan ketinggian air (Rahmawati dan Purwanto, 2018).

- **Gelombang Pasang**
  Kawasan rawan gelombang pasang di Kabupaten Belitung Timur tersebar di pantai selatan dan timur. Cuaca ekstrem seperti angin kencang, hujan lebat dan gelombang tinggi dipengaruhi dinamika atmosfer yang dipicu oleh fenomena monsun Asia. Potensi tersebut erat sekali kaitannya dengan kondisi cuaca sehingga menyebabkan bencana hidrometeorologi. Adapun arahan kawasan rawan gelombang pasang di Kabupaten Belitung Timur meliputi Kecamatan Kelapa Kampit (Desa Cendil, Air Kelik, Mayang, dan Desa Pembaharuan); Kecamatan Dendang (Desa Batu Itam, Dendang, Simpang Pesak, dan Desa Tanjung Kelumpang); Kecamatan Gantung (Desa Gantung, Jangkar Asam, Lilangan, dan Desa Selingsing); dan Kecamatan Manggar (Desa Buku Limau, Kurnia Jaya, Lalang, Lalang Jaya, Mempaya, Mengkubang, Padang, Desa Sukamandi).

- **Abrasi**
  Kawasan pantai di Kabupaten Belitung Timur mempunyai potensi abrasi. Oleh karena itu kawasan pantai harus diproteksi dengan mangrove dan tanaman pantai lainnya sehingga tidak menyebabkan abrasi. Lokasi rawan abrasi tersebar di seluruh pantai di Kabupaten Belitung Timur. Dokumen pengurangan risiko bencana (PRB) Provinsi Bangka Belitung yang disusun oleh BNPB pada tahun 2015 menyebutkan bahwa tingkat abrasi yang terjadi di kabupaten Belitung timur termasuk dalam kategori sedang. Kawasan dengan potensi terjadi abrasi meliputi seluruh kawasan pantai di Kabupaten Belitung Timur. Upaya pencegahan terjadinya abrasi dapat diproteksi melalui penanaman bakau atau tanaman pantai lainnya di kawasan pantai.

- **Kebakaran Hutan**
  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang 2018 mencatat sekitar sembilan kejadian kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Kabupaten Belitung Timur rata-rata akibat ulah manusia yang sengaja membakar hutan untuk membuka lahan perkebunan namun menjalar ke kawasan hutan. Pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi kepada warga dan memasang papan larangan membakar hutan di beberapa titik yang dianggap rawan terbakar.

- **Pandemi Covid-19**
  Pandemi COVID 19 yang disebabkan oleh virus corona terjadi di tahun 2020. Virus ini dapat menular dengan cepat melalui udara dan kontak erat dengan penderita covid 19. Infeksi virus corona diketahui melalui gejala dan pemeriksaan fisik yang dikeluhkan pasien dan melakukan pemeriksaan berupa : *rapid test* dan *swab test* atau tes PCR (*Polymerase Chain Reaction*). Meningkatnya kasus Covid 19 yang disebabkan virus corona di Belitung Timur tahun 2020 dengan jumlah penderita terkonfirmasi positif berjumlah 35 orang, kasus susfek 55 dan kontak erat 874 orang. Penularan virus corona terjadi melalui droplet dari penderita dan kontak erat dengan penderita. Pencegahan virus corona dapat dilakukan dengan mentaati protokol kesehatan dan vaksin.

II.1.F Demografi

1. Komposisi Penduduk

Kondisi demografi merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah. Penduduk merupakan sumber daya yang partisipasinya sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi demografi daerah umumnya menyangkut jumlah dan persebaran, pertumbuhan, dinamika serta komposisi lainnya. Jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur selalu meningkat dalam kurun waktu 2020-2024. Total rata-rata pertumbuhan penduduk juga tercatat turun sebesar 5,45 persen per tahun. Sebagai wilayah kepulauan, jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur tercatat sebanyak 132.355 jiwa pada tahun 2023 dengan kepadatan penduduk sebesar 60 jiwa per km^2. Jumlah tersebut merupakan kepadatan paling rendah di antara kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apabila dirinci maka terdapat sebanyak 1.892 jiwa dari tahun sebelumnya yang tersebar di tujuh kecamatan.

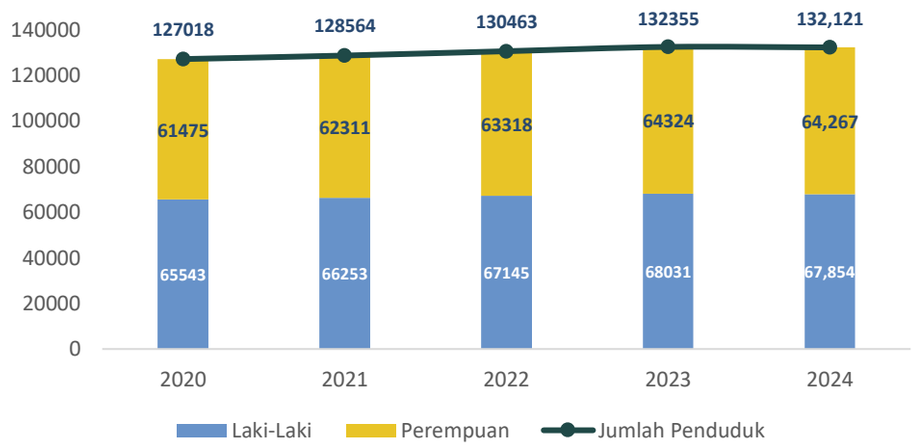

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2025

Gambar 2. 28 Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh penduduk laki-laki dengan angka *sex ratio* sebesar 107 pada tahun 2020. Sedangkan jika dilihat dari persebaran penduduk di setiap kecamatan, wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Manggar, sementara wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Simpang Renggiang.

TABEL 2. 47 JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020-2024

KECAMATAN	LUAS WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)					KEPADATAN PENDUD				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
BELITUNG TIMUR	2.506,91	127.018	128.564	130.463	132.355	132.121	50,67	51,28	52,04	52,8	52,7
DENDANG	362,2	11.007	11.141	11.306	11.469	11.012	30,39	30,76	31,21	31,66	45,26
SIMPANG PESAK	243,3	8.434	8.537	8.663	8.788	8.738	34,67	35,09	35,61	36,12	24,12
GANTUNG	546,3	28.349	28.694	29.118	29.540	30.839	51,89	52,52	53,3	54,07	56,45
SIMPANG RENGGIANG	390,7	7.512	7.603	7.716	7.828	7.712	19,23	19,46	19,75	20,04	19,74
MANGGAR	229	39.135	39.611	40.196	40.780	40.488	170,9	172,97	175,53	178,08	176,8
DAMAR	236,9	13.214	13.375	13.572	13.769	13.792	55,78	56,46	57,29	58,12	58,22
KELAPA KAMPIT	498,51	19.367	19.603	19.892	20.181	19.540	38,85	39,32	39,9	40,48	39,2

Sumber: BTDA, BPS Kabupaten Belitung Timur, 2025

Berdasarkan informasi di atas, tiap kecamatan mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2020 hingga 2024. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Manggar, sementara yang terendah adalah Simpang Renggiang. Luas wilayah terbesar terdapat di Kecamatan Gantung, sedangkan yang terkecil ada di Kecamatan Manggar. Peningkatan jumlah penduduk umumnya disebabkan oleh peningkatan kesehatan penduduk, migrasi yang tinggi, dan tingkat kesejahteraan yang membaik. Kepadatan penduduk dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk dengan luas wilayah.

Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan kepadatan penduduk karena pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Kepadatan penduduk akan lebih tinggi di kecamatan dengan jumlah penduduk tinggi dan luas wilayah yang relatif kecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Manggar memiliki kepadatan penduduk tertinggi karena pertumbuhan penduduk yang cepat dengan luas wilayah yang lebih kecil dibandingkan kecamatan lainnya. Kepadatan penduduk terendah terdapat di kecamatan Simpang Renggiang, yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang lebih rendah dibandingkan kecamatan lain.

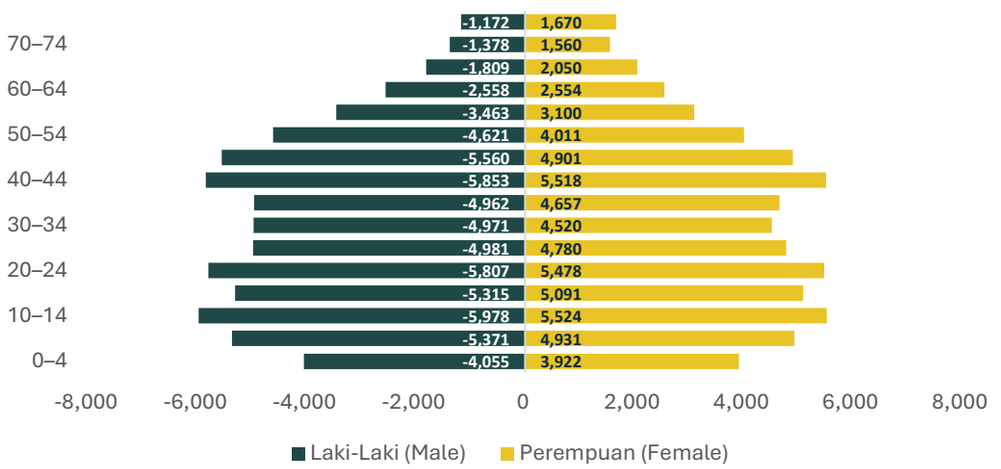

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2025

Gambar 2. 29 Piramida Penduduk Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin masih didominasi oleh penduduk laki-laki, dengan sex ratio yang terbentuk sebesar 105,6. Artinya, dalam setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Belitung Timur, terdapat sekitar 106 penduduk laki-laki. Jika dikelompokkan berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Belitung Timur masih didominasi oleh

penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan porsi sebesar 72,85 persen atau sebanyak 96.148 jiwa, disusul oleh penduduk usia muda (0-14 tahun) sebesar 29,63 persen atau 39.781 jiwa, dan penduduk usia tua (65+) sebesar 7,52 persen atau 9.923 jiwa.

2. Angka Ketergantungan

Berdasarkan proporsi penduduk Kabupaten Belitung Timur, angka *dependency ratio* yang terbentuk adalah 37,2 persen, yang berarti setiap 100 orang usia kerja (produktif) memiliki tanggungan sekitar 37 orang yang belum atau tidak lagi produktif. Kondisi ini menguntungkan bagi wilayah karena jumlah penduduk produktif yang berlimpah dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan, yang membutuhkan dukungan sumber daya manusia dalam jumlah besar.

3. Proyeksi Kependudukan

Proyeksi kependudukan mencakup estimasi jumlah total penduduk, struktur usia produktif dan non-produktif, serta komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Proyeksi kependudukan bertujuan untuk menyajikan data yang menggambarkan gambaran jumlah, struktur, dan komposisi penduduk di masa mendatang sebagai dasar dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Data proyeksi kependudukan tersaji dalam tabel di bawah ini, yang memperkirakan peningkatan jumlah penduduk hingga tahun 2045. Penduduk usia produktif diperkirakan akan mengalami pertumbuhan lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Selanjutnya, proyeksi angka ketergantungan (*Dependency Ratio*) digunakan untuk memprediksi seberapa besar beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non-produktif. Proyeksi angka ketergantungan ini penting untuk mengantisipasi kebutuhan lapangan kerja, kesehatan, pendidikan, serta pengeluaran pemerintah di masa yang akan datang. Berdasarkan tabel proyeksi di bawah ini, angka ketergantungan diproyeksikan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk usia produktif dan non-produktif, serta peningkatan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hingga tahun 2045.

TABEL 2. 48 PROYEKSI KEPENDUDUKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2045

INDIKATOR	SATUAN	EKSISTING	TAHUN PROYEKSI				
		2023	**2025**	**2030**	**2035**	**2040**	**2045**
Jumlah Penduduk	Ribu jiwa	131	134	141,589	147,841	152,969	157,092
Usia Produktif	Ribu jiwa	93	95	98,122	100,487	101,895	102,612
Usia Non Produktif	Ribu jiwa	38	40	43,467	47,354	51,074	54,48
Angka Ketergantungan	Persen	41	42	44,3	47,12	50,12	53,09
Jumlah Penduduk Laki laki	Ribu jiwa	68	69	72,82	75,8	78,14	79,93
Jumlah Penduduk Perempuan	Ribu jiwa	64	65	68,77	72,04	74,83	77,16

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2023

II.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

II.2.A Kesejahteraan Ekonomi

II.2.A.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sejak tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung cenderung mengalami penurunan di mana pada tahun 2020 semakin diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi negatif. Pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung turut mengalami kontraksi, bahkan pertumbuhan ekonomi provinsi terkontraksi cukup dalam yaitu sebesar -2,29 persen. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional mengalami sedikit perlambatan. Hal ini dipengaruhi oleh perlambatan pada lapangan usaha yang kontribusinya besar terhadap perekonomian seperti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

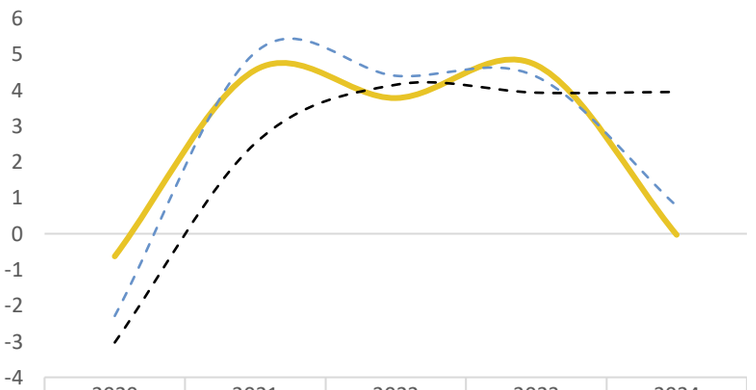

	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Belitung Timur	-0.63	4.56	3.78	4.7	-0.03
Provinsi Bangka Belitung	-2.29	5.05	4.4	4.38	0.77
Nasional	-3.03	2.52	4.15	3.93	3.95

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur

Gambar 2. 30 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 – 2024

Dari 17 sektor atau lapangan usaha yang ada, laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2020 dicapai oleh sektor informasi dan komunikasi 10,12 persen dan diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 5,82 persen. Sementara empat kategori usaha lain yang mengalami pertumbuhan meskipun rendah adalah pengadaan listrik dan gas; jasa keuangan asuransi; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta *real estate.* Sektor Informasi dan komunikasi masih bisa tumbuh sebesar 10,12 persen disebabkan perubahan perilaku masyarakat selama pandemi Covid-19 dimana kegiatan *Work From Home* (WFH) bagi pekerja dan belajar dari rumah secara daring bagi pelajar menyebabkan permintaan pada sektor ini mengalami peningkatan signifikan. Sementara sebagian besar sub sektor mengalami perlambatan dikarenakan kebijakan *physical* dan *social distancing* yang berimbas pada operasional sektor-sektor tersebut.

II.2.A.2 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah persoalan yang rumit dan melibatkan banyak dimensi, karena ada banyak pendekatan untuk menggambarkan kondisi yang disebut sebagai kemiskinan, maka ada banyak definisi yang berbeda-beda tentang kemiskinan. Menurut Bank Dunia (2000), secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi "kekurangan" dalam "kesejahteraan". Badan

Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai situasi di mana standar kehidupan yang "layak" tidak tercapai. Dalam menetapkan standar kehidupan yang "layak", BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, yang menganggap kemiskinan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan bukan makanan. Persentase kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan setelah tahun 2021, yang menunjukkan bahwa beberapa penduduk di Kabupaten Belitung Timur sudah mencapai standar hidup yang layak.

TABEL 2. 49 ANGKA KEMISKINAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2020 – 2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Angka Kemiskinan	Angka	6,52	7,2	6,49	6,73	6,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2025

II.2.A.3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan

PDRB merupakan produksi yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu satu tahun yang berada di daerah atau regional tertentu. Nilai PDRB Kabupaten Belitung Timur atas dasar-dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 7,85 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan 1,79 persen atau sebesar 0,13 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 7,71 triliun rupiah. Perubahan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan, dari 5,50 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 5,46 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020, Belitung Timur mengalami kontraksi sebesar -0,66 persen atau berkurang sebesar 0,04 triliun rupiah. Penurunan terbesar terjadi pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yaitu sebesar 19 miliar dikarenakan berhentinya proses pelayanan akibat pandemi Covid–19. Sementara itu, pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur sebesar 4,72 melampaui Provinsi Bangka Belitung yang mencapai 4,38.

Hampir semua sektor lapangan kerja di Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan kinerja (kontraksi), tak terkecuali sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan yang selama ini memberikan kontribusi besar bagi perekonomian. Berkurangnya operasional pabrik-pabrik di Jawa maupun daerah lain yang membutuhkan timah sebagai bahan baku juga berpengaruh terhadap berkurangnya permintaan timah dari Kabupaten Belitung Timur. Fenomena ini jelas mengganggu keberlangsungan aktivitas pertambangan dan industri pengolahan yang juga disertai penurunan harga timah dunia.

Dilihat dari perkembangan ekonomi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung masih berada di bawah laju pertumbuhan nasional baik secara rata-rata maupun capaian setiap tahunnya, namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan dan di atas Provinsi Belitung Timur. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan diartikan sebagai pertambahan jumlah barang

dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu satu tahun tertentu.

TABEL 2.50 NILAI DAN LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020-2024 (MILIAR RUPIAH)

NO.	LAPANGAN USAHA	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.407,55	25,75	1.426,66	24,96	1.447,93	24,41	1.520,08	24,48	1.617,56	26,06
B	Pertambangan dan Penggalian	959,66	17,56	996,21	17,43	994,83	16,77	976,11	15,72	961,17	15,48
C	Industri Pengolahan	1.083,66	19,83	1.163,93	20,37	1.233,19	20,79	1.278,84	20,59	1.066,58	17,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,61	0,07	4,05	0,07	3,95	0,07	4,09	0,07	4,36	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,01	0,02	1,04	0,02	1,09	0,02	1,09	0,02	1,14	0,02
F	Konstruksi	401,23	7,34	415,43	7,27	416,06	7,01	457,27	7,36	474,37	7,64
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	527,72	9,66	565,73	9,90	634,50	10,70	665,92	10,72	666,85	10,74
H	Transportasi dan Pergudangan	104,57	1,91	110,24	1,93	121,50	2,05	128,02	2,06	134,85	2,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	125,33	2,29	135,40	2,37	153,11	2,58	171,17	2,76	181,32	2,92
J	Informasi dan Komunikasi	87,74	1,61	92,15	1,61	99,09	1,67	113,09	1,82	124,40	2,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	24,01	0,44	26,04	0,46	27,76	0,47	31,78	0,51	32,51	0,52
L	Real Estate	160,25	2,93	166,39	2,91	176,18	2,97	186,13	3,00	194,68	3,14
M,N	Jasa Perusahaan	14,22	0,26	15,09	0,26	16,46	0,28	17,77	0,29	19,18	0,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	322,55	5,90	340,53	5,96	341,55	5,76	371,64	5,98	419,11	6,75
P	Jasa Pendidikan	134,75	2,47	138,74	2,43	142,22	2,40	154,80	2,49	172,42	2,78
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	79,09	1,45	87,41	1,53	89,61	1,51	97,91	1,58	100,37	1,62
R,S,T	Jasa lainnya	28,54	0,52	29,76	0,52	32,07	0,54	34,20	0,55	36,91	0,59
	PDRB	5.465,46		1.426,66		5.931,09		6.209,89		6.207,80	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Hampir semua sektor lapangan kerja di Kabupaten Belitung Timur mengalami kenaikan kinerja, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta industri pengolahan adalah penyumbang PDRB terbesar. Perubahan fokus pemerintah pusat untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan efek yang baik bagi pertumbuhan sektor tersebut. Selain itu terdapat kebijakan pemerintah pusat yang fokus terhadap hilirisasi yang membuat industri pengolahan semakin besar.

Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2024 dicapai oleh sektor jasa pendidikan dengan 11,8 persen dan diikuti oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial sebesar 11,5 persen. Hampir seluruh sektor tumbuh di Tahun 2024, dengan pengecualian sektor industri pengolahan yang turun hingga 8 persen.

II.2.A.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan perbandingan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin besar angka TPT di suatu daerah maka angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja semakin tinggi. Besaran tingkat pengangguran terbuka akan mengurangi kesejahteraan yang dilihat dari PDRB perkapita. Kondisi pengangguran yang diproksikan dengan TPT dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan pada tahun 2020-2021. Adanya Covid-19 membuat perusahaan secara umum menghentikan produksi berdampak pemutusan kerja sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat. Setelah tahun 2021, pengangguran di Kabupaten Belitung Timur terjadi penurunan yang disebabkan banyak perusahaan beroperasi kembali setelah Covid-19. Penurunan pengangguran membuktikan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Belitung Timur telah memberikan hasil yang positif bagi daerah di samping kekurangan-kekurangan yang masih harus diperbaiki.

TABEL 2. 51 Tingkat Pengangguran Terbuka KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2020 – 2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,93	3,78	2,5	2,41	2,63

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2025

II.2.A.5 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan suatu ukuran umum untuk menunjukkan seberapa merata pendapatan atau kekayaan yang didistribusikan dalam suatu daerah secara menyeluruh. Indeks gini memiliki nilai berkisar antara 0 sampai 1. Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan tingkat distribusi yang sangat merata, sedangkan koefisien gini bernilai 1 menunjukkan distribusi yang sangat tidak merata atau ketimpangan yang terjadi secara sempurna.

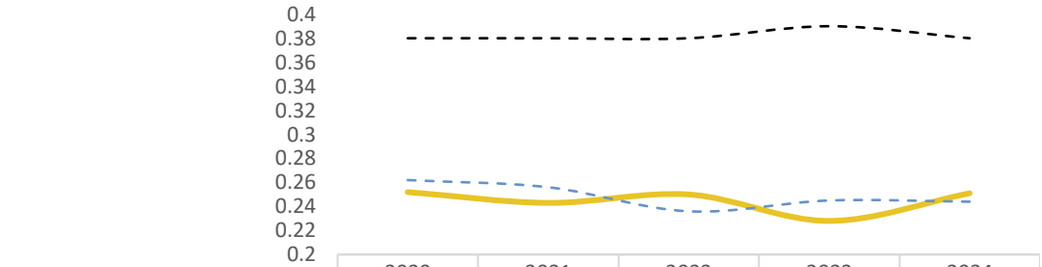

	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Belitung Timur	0.252	0.243	0.25	0.228	0.251
Provinsi Bangka Belitung	0.262	0.256	0.236	0.245	0.244
Nasional	0.38	0.38	0.38	0.39	0.38

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2025

Gambar 2. 31 Indeks Gini Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 – 2024

II.2.A.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan kondisi kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia berdasarkan sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai penilaian terhadap kualitas hidup, IPM dibentuk melalui tiga dimensi pokok. Dimensi tersebut mencakup harapan hidup yang panjang dan sehat; tingkat pendidikan; dan standar hidup yang layak. Terdapat empat kriteria untuk hasil IPM: IPM >80 menunjukkan kategori sangat tinggi, IPM 70-79 adalah kategori tinggi, IPM 60-69 adalah kategori sedang. Berdasarkan kriteria ini, nilai IPM Kabupaten Belitung Timur selama lima tahun terakhir berada dalam kategori tinggi. Ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Belitung Timur memiliki sumber daya manusia yang berkualitas.

TABEL 2. 52 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2020 – 2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	70,92	71,42	72,29	72,86	73,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2025

II.2.B **Kesehatan untuk Semua**

II.2.B.1 Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi. Usia harapan hidup mencerminkan rata-rata perkiraan umur yang akan dicapai oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi pola kematian saat ini tetap berlaku sepanjang hidupnya. Indikator ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kesehatan masyarakat, kualitas layanan kesehatan, dan tingkat kematian bayi. Berdasarkan data, usia harapan hidup di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir. Tahun 2020 angka usia harapan hidup mencapai 72,03, pada tahun 2021 meningkat ke angka 72,13. Angka usia harapan hidup terus mengalami kenaikan di tahun 2022 yang mencapai angka 72,30 tahun, pada tahun 2023 mencapai angka 72,3 dan di tahun 2024 mencapai angka 72,40. Peningkatan usia harapan hidup ini mengindikasikan bahwa kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur terus membaik, seiring dengan perbaikan fasilitas kesehatan, gizi, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat.

TABEL 2. 53 USIA Harapan Hidup KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2020 – 2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup	Tahun	72,03	72,10	72,33	72,59	72,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2025

II.2.B.2 Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. IKS digunakan untuk memonitor status kesehatan keluarga dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk status keluarga dengan membuat Indeks Kesehatan Keluarga (IKS). Adapun kriteria dalam IKS yaitu skor IKS >0.80 dikatakan sehat, IKS 0.5-0.8 (pra sehat), IKS <0.5 (tidak sehat). Hasil IKS Kabupaten Belitung Timur selama lima tahun cenderung berada di keluarga tidak sehat dengan nilai <0.5. Nilai IKS ini digunakan untuk menyadari pentingnya kesehatan dan berperilaku hidup sehat di setiap keluarga. Pemerintah daerah perlu merencanakan program dan kegiatan untuk kepentingan kesehatan keluarga. Perkembangan Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Belitung Timur selama lima tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 2. 54 INDEKS KELUARGA SEHAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2020 – 2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Keluarga Sehat	Nilai	0,23	0,25	0,28	0,3	0,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2025

II.2.B.3 Prevalensi Stunting

Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi kronis yang menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Prevalensi stunting di Kabupaten Belitung Timur dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, mencerminkan adanya kemajuan dalam intervensi gizi dan pelayanan kesehatan dasar.

TABEL 2. 55 ANGKA PREVALENSI STUNTING KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2020-2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Prevalensi Stunting	Persen	22,13	22,06	16,00	17,30	17,10

Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2025

Prevalensi stunting di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2022, yakni dari 22,13% menjadi 16%. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai intervensi gizi dan program pencegahan *stunting* yang dijalankan, baik dari sisi perbaikan pola asuh, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, maupun ketersediaan makanan bergizi. Walaupun begitu, perlu diperhatikan pada tahun 2023-2024, dimana angka prevalensi *stunting* lebih tinggi daripada tahun 2022 yaitu 17,3% dan 17,1%.

II.2.C **Pendidikan Berkualitas yang Merata**

II.2.C.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh seseorang dalam proses pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah dapat menggambarkan tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Rata Lama Sekolah di Kabupaten Belitung Timur secara umum tidak ada perubahan yang signifikan.

TABEL 2. 56 RATA-RATA LAMA SEKOLAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020-2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,22	8,47	8,67	8,9	8,99

Sumber: BPS, 2025

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Belitung Timur mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Walaupun begitu, nilai RLS di Kabupaten Belitung Timur hanya mencapai 8 tahun selama periode 2020-2024. Berdasarkan hal tersebut, masih banyak penduduk yang belum menamatkan pendidikan sekolah menengah pertama.

II.2.C.2 Harapan Lama Sekolah

Indikator yang menunjukkan jumlah tahun yang diharapkan akan dihabiskan oleh seorang anak dalam pendidikan formal selama hidupnya, mulai dari tingkat pendidikan pra-sekolah dasar hingga pendidikan tinggi. Indikator ini mencerminkan potensi pendidikan yang mungkin dicapai oleh generasi muda di masa depan berdasarkan kondisi saat ini. HLS di Kabupaten Belitung Timur secara umum menunjukkan hasil yang sama yaitu 11 tahun pada tahun 2020-2024. angka HLS di Kabupaten Belitung Timur secara rata-rata menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal selama 11 tahun lebih.

TABEL 2. 57 HARAPAN LAMA SEKOLAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020-2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,52	11,63	11,65	11,66	11,69

Sumber: BPS, 2025

II.2.C.3 Angka Literasi/Numerasi

Literasi dan numerasi memiliki peran krusial dalam pembangunan daerah, terutama melalui peningkatan kualitas pendidikan. Literasi, yang mencakup kemampuan membaca dan menulis, membantu siswa memahami informasi secara kritis dan membangun keterampilan komunikasi yang baik. Ini penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang cakap dalam menyerap pengetahuan dan berkontribusi pada kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya daerah. Sementara itu, numerasi atau kemampuan berhitung dan berpikir logis, mendorong pemecahan masalah secara efektif, yang sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang seperti teknologi, bisnis, dan industri. Literasi dan numerasi yang kuat, siswa tidak hanya lebih siap menghadapi tantangan global, tetapi juga mampu menjadi penggerak perubahan yang mendukung pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Berikut data capaian rata-rata kompetensi/ kemampuan literasi dan numerasi di Kabupaten Belitung Timur.

TABEL 2. 58 RATA-RATA KOMPETENSI LITERASI DAN NUMERASI DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

INDIKATOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Literasi SD	NA	53,58%	56,16%	61,04%	76,21%
Numerasi SD	NA	35,62%	39,99%	44,35%	62,07%
Literasi SMP	NA	66,79%	69,06%	70,47%	79,18%
Numerasi SMP	NA	55,17%	57,01%	60,75%	67,68%

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, 2025

Data capaian rata-rata kemampuan literasi dan numerasi baik di jenjang pendidikan SD dan SMP selama 4 (empat) tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Capaian pada tahun 2024 untuk literasi SD dengan nilai 76,21% dengan kategori capaian baik, di mana sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca, sedangkan untuk numerasi SD dengan nilai 62,07% dengan kategori capaian sedang, di mana sebanyak 40% - 70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Sementara untuk capaian literasi SMP dengan nilai 79,18% dengan kategori baik, di mana Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Sedangkan capaian numerasi SMP tahun 2024 sebesar 67,68% dengan kategori sedang di mana sebanyak 40% - 70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum

II.2.C.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks yang mengukur tingkat kemajuan dalam membangun budaya literasi di suatu wilayah. Perhitungan IPLM berdasarkan data tentang kegemaran membaca, kemampuan membaca, ketersediaan bahan bacaan, dan infrastruktur penunjang literasi. Nilai IPLM antara 0 dan 100. Semakin tinggi nilai IPLM, semakin tinggi pula tingkat literasi masyarakat di wilayah tersebut. Rentang nilai IPLM yaitu IPLM rendah (0-39,9): IPLM sedang (40-59,9) dan IPLM tinggi (60-100). Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Belitung Timur menunjukkan kategori rendah, menandakan bahwa budaya literasi di masyarakat belum kuat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengawasi perkembangan program-program literasi dan mengidentifikasi daerah-daerah yang masih memiliki tingkat literasi rendah.

TABEL 2. 59 INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	23,21	23,25	23,02	17,44	84,09

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur, 2025

II.2.D **Perlindungan Sosial yang Adaptif**

II.2.D.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja merupakan indikator penting dalam mencerminkan perlindungan bagi pekerja terhadap risiko kerja, kehilangan pendapatan, serta jaminan hari tua. Kondisi di Kabupaten Belitung Timur, data dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi

yang mencerminkan dinamika dalam perluasan dan keberlanjutan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

TABEL 2. 60 CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Angka	84,7	98,37	78,43	79,6	80,67

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

Pada tahun 2020, cakupan kepesertaan mencapai 84,7, lalu meningkat tajam menjadi 98,37 pada tahun 2021. Namun, setelah itu terjadi penurunan signifikan ke angka 78,43 pada tahun 2022, dan cakupan relatif stagnan pada dua tahun berikutnya yaitu 79,6 (2023) dan 80,67 (2024). Tahun 2021 merupakan masa krisis akibat lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, termasuk di Kabupaten Belitung Timur, yang terdampak oleh penyebaran varian Delta. Pemerintah menerapkan kebijakan PPKM dan mempercepat program vaksinasi massal sebagai respon terhadap peningkatan kasus dan tekanan terhadap sistem kesehatan. Dampak pandemi sangat dirasakan di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal dan pelaku usaha kecil, sehingga turut memengaruhi dinamika indikator sosial seperti kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja. Meski pada tahun tersebut tercatat lonjakan angka kepesertaan (mencapai 98,37), hal ini kemungkinan dipicu oleh intervensi pemerintah melalui program perlindungan sosial sementara, bukan peningkatan struktural yang berkelanjutan.

II.2.E Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

II.2.E.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan indeks yang menunjukkan sikap toleransi antarumat beragama di Indonesia. Indeks ini mulai diterbitkan oleh Kementerian Agama sejak tahun 2018. Namun demikian, penggunaan pada RPJMD baru dilakukan setelah diterbitkannya Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025. Terdapat tiga indikator utama penyusun Indeks Kerukunan Umat Beragama yaitu sebagai berikut.

1) Toleransi : Mengukur sejauh mana masyarakat saling menghormati perbedaan agama.
2) Kesetaraan: Menilai kesetaraan hak dalam menjalankan agama masing-masing.
3) Kerjasama: Menggambarkan tingkat kolaborasi antar umat beragama dalam berbagai aspek kehidupan sosial.

Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mencapai angka 76,47, mencerminkan kondisi kehidupan antar umat beragama yang harmonis, saling menghormati, dan toleran di wilayah tersebut. Capaian ini menunjukkan bahwa hubungan sosial lintas agama di Belitung Timur cukup terjaga, didukung oleh peran aktif tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjaga dialog dan mencegah potensi konflik. Adapun, Indeks Kerukunan Umat Beragama tercantum dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan kondisi yang relatif baik dengan angka 73,12. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Belitung Timur memiliki toleransi yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Bangka Belitung.

II.2.E.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang

dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

Indeks ini sudah mulai diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019, namun penggunaan pada RPJMD baru dilakukan setelah diterbitkannya Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ini terdiri dari 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam 7 dimensi. Ketujuh dimensi tersebut yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, kebebasan ekspresi budaya, budaya literasi, serta gender. Berikut merupakan rincian indikator penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mencapai angka 59,28. Capaian ini mencerminkan upaya yang terus dilakukan dalam pembangunan sektor kebudayaan, termasuk pelestarian warisan budaya, pengembangan ekspresi seni, peningkatan literasi budaya, serta penguatan peran lembaga budaya lokal. Nilai tersebut menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan, arah kebijakan dan program yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi terhadap kemajuan kebudayaan di daerah. Adapun, Indeks Pembangunan Kebudayaan dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan kondisi yang fluktuatif dengan angka 57,99 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Belitung Timur memiliki tingkat pelestarian kebudayaan yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Bangka Belitung.

II.2.F Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

II.2.F.1 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender mengukur capaian-capaian pembangunan berbasis gender. Indeks ini menunjukkan tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan 3 (tiga) dimensi, antara lain: kesehatan reproduksi, pemberdayaan gender, dan pasar tenaga kerja. Rentang besaran indeks adalah 0-1, di mana jika nilai mendekati 1 berarti ketimpangan gender di suatu wilayah semakin besar. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Belitung Timur mengalami tren naik. Terdapat penurunan pada tahun 2020-2021, hal ini diakibatkan dengan adanya pandemi COVID-19. Walaupun begitu, IKG Kab. Belitung Timur mengalami kenaikan pada Tahun 2022-2024.

TABEL 2. 61 INDEKS KETIMPANGAN GENDER KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020-2024

Indikator	SATUAN	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,479	0,364	0,414	0,477	0,7

Sumber: BPS, 2024

II.2.F.2 Indeks Pembangunan Gender

Gender merupakan suatu pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Konsep gender secara umum bukan diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin, namun perbedaan peran sosial, ekonomi, dan politik antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) alat untuk menghitung pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan

ketimpangan gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sering digunakan untuk mengukur keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. Namun IPG lebih diarahkan untuk menjelaskan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, meskipun pembangunan perempuan di Kabupaten Belitung Timur selama lima tahun masih berada di bawah pembangunan laki-laki.

TABEL 2. 62 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2020 – 2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender	Nilai	86,37	72,10	72,33	72,59	87,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2025

II.2.F.3 Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan pemuda dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, partisipasi, dan kesejahteraan. IPP menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana pemuda sebagai generasi penerus bangsa diberdayakan dan dikembangkan potensinya.

Berdasarkan data, Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir. IPP mencapai angka 55,33 pada tahun 2020 dan mencapai angka 56,5 di tahun 2021. Tren positif ini berlanjut dengan pencapaian 58,17 pada tahun 2023, dan diproyeksikan mencapai 57,67 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan pemuda di Kabupaten Belitung Timur, yang mencerminkan perhatian pemerintah daerah terhadap pemberdayaan, pendidikan, kesehatan, serta partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah.

TABEL 2. 63 INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2020 – 2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	55,33	56,5	56,5	58,17	52,67

Sumber: Bappelitbangda, diolah, 2025

II.3 Aspek Daya Saing Daerah

II.1.A **Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penggerak utama dan penentu daya saing perekonomian daerah. Pembangunan SDM yang unggul menjadi fondasi bagi transformasi ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas, serta penciptaan inovasi. Analisis daya saing SDM Kabupaten Belitung Timur ditinjau melalui berbagai indikator kunci yang mencakup aspek demografi, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

Secara demografis, Kabupaten Belitung Timur diuntungkan dengan struktur penduduk yang didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun), yang pada tahun 2024 mencapai 72,85% dari total populasi. Kondisi ini menciptakan bonus demografi yang menjadi modal strategis bagi pembangunan. Potensi ini diperkuat oleh Angka Ketergantungan (AK) yang tergolong rendah, di mana pada tahun 2024 tercatat sebesar 40,9%. Angka

ini mengindikasikan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 41 penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Beban tanggungan yang relatif ringan ini memberikan ruang fiskal dan sosial yang lebih besar bagi penduduk usia produktif untuk berinvestasi pada peningkatan kualitas diri, tabungan, dan partisipasi ekonomi.

TABEL 2. 64 ANGKA KETERGANTUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024 (%)

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Angka Ketergantungan	Angka	40,9	40,8	40,8	40,9	40,9

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2025

Gambaran umum kualitas SDM tercermin pada capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang secara konsisten menunjukkan tren positif dan berada dalam kategori "Tinggi". Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Belitung Timur mencapai 73,62, meningkat dari 70,92 pada tahun 2020. Capaian ini menandakan adanya kemajuan dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

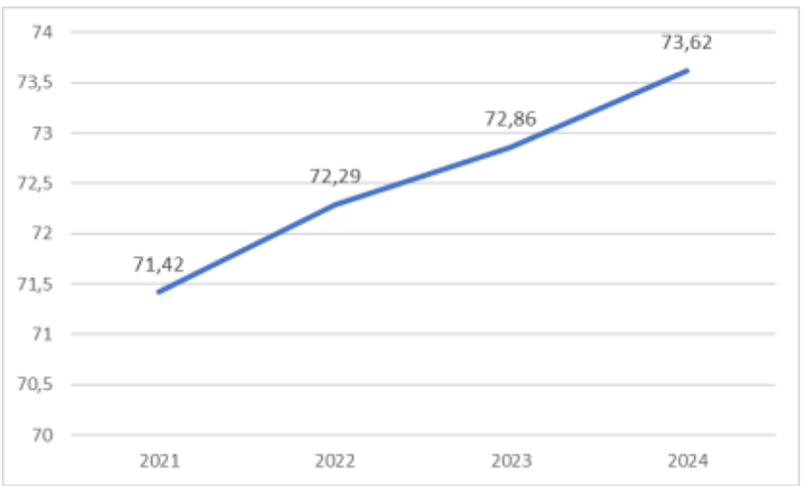

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2025

Gambar 2. 31 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 – 2024

Meskipun IPM menunjukkan capaian yang baik, analisis lebih mendalam pada setiap dimensinya mengidentifikasi sejumlah tantangan yang mempengaruhi daya saing SDM secara keseluruhan.

II.1.A.1 Dimensi Pendidikan

Pada dimensi pendidikan, terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mencapai 11,69 tahun, yang mengindikasikan bahwa anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang SMA.1 Namun, realitanya, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas pada tahun yang sama baru mencapai 8,99 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk dewasa belum menamatkan pendidikan hingga jenjang SMP, yang menjadi kendala dalam penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan menengah ke atas. Tantangan lainnya adalah penurunan persentase guru yang bersertifikat pendidik, dari 62,47% pada tahun 2022 menjadi 47,83% pada tahun 2023, yang berpotensi mempengaruhi kualitas pengajaran.

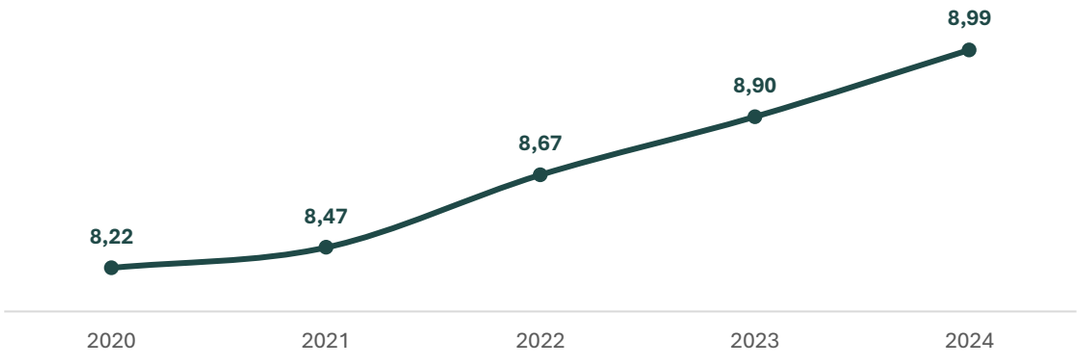

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2025

Gambar 2. 32 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 – 2024

Peningkatan IPM juga dipengaruhi oleh Harapan Lama Sekolah (HLS), yang mengindikasikan lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak pada usia tertentu di masa depan. Anggapan dasarnya adalah bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada usia-usia berikutnya, sebagaimana halnya dengan peluang penduduk secara keseluruhan untuk bersekolah pada usia yang sama saat ini.

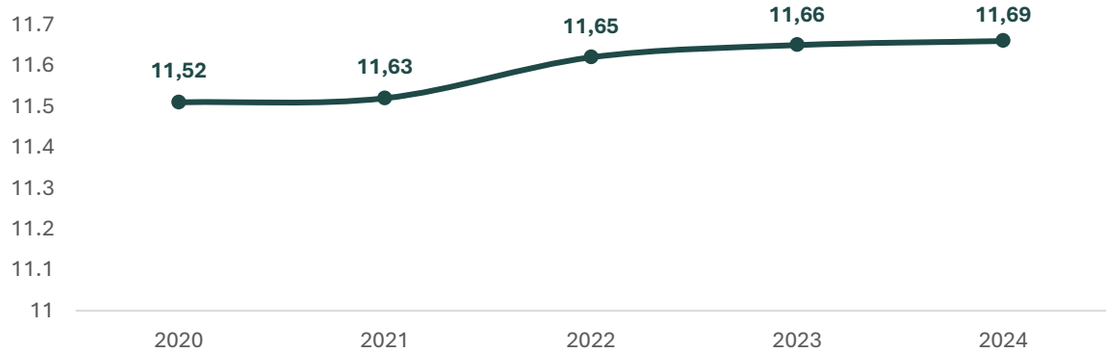

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2025

Gambar 2. 33 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 – 2024

HLS digunakan untuk mengukur perkembangan sistem pendidikan di berbagai tingkatan, yang tercermin dalam lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Penghitungan HLS berlaku untuk usia 7 tahun ke atas, sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang wajib belajar. Gambaran kondisi Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Belitung Timur, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, menunjukkan bahwa rata- rata HLS menegaskan bahwa anak-anak usia 7 tahun ke atas memiliki peluang untuk mengenyam pendidikan formal selama lebih dari 11 tahun.

II.1.A.2 Dimensi Kesehatan

Dimensi kesehatan menunjukkan capaian yang solid, ditandai dengan Angka Harapan Hidup (AHH) yang terus meningkat hingga mencapai 72,89 tahun pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan perbaikan akses dan kualitas layanan kesehatan secara umum. Namun, tantangan signifikan masih dihadapi dalam penanganan gizi, khususnya prevalensi stunting pada balita. Meskipun menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, angka stunting pada tahun 2024 masih berada di level 17,1%.1 Kondisi ini berisiko menghambat perkembangan kognitif dan fisik generasi mendatang,

yang pada gilirannya akan mempengaruhi produktivitas dan daya saing angkatan kerja di masa depan.

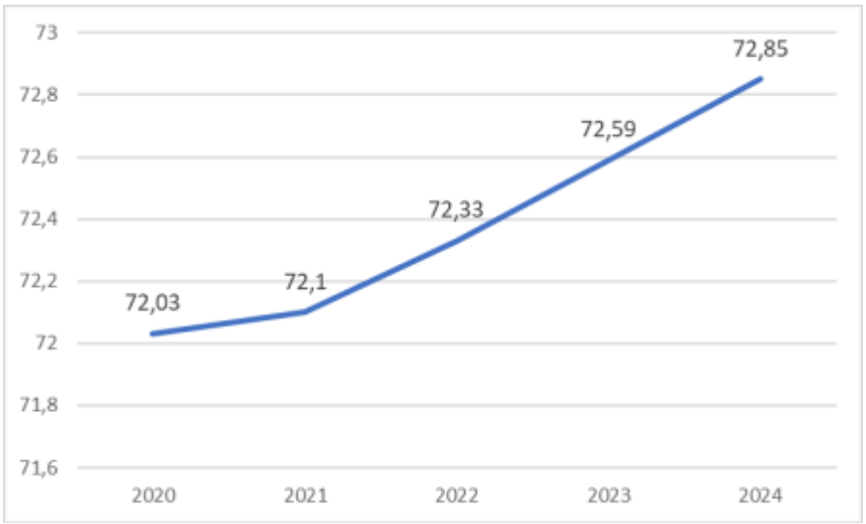

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2025

Gambar 2. 34 Angka Harapan Hidup Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 – 2024

II.1.A.3 Dimensi Ketenagakerjaan

Dari sisi ketenagakerjaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2024 mencapai 70,56%, menunjukkan tingginya partisipasi penduduk usia kerja dalam pasar tenaga kerja.1 Angka ini didukung oleh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang relatif rendah, yaitu sebesar 2,63% pada tahun 2024.1 Kondisi ini mengindikasikan bahwa pasar kerja di Kabupaten Belitung Timur mampu menyerap sebagian besar angkatan kerja.

Meskipun demikian, daya saing tenaga kerja masih menjadi isu utama. Hal ini terlihat dari rendahnya persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi yang terserap, yang pada tahun 2023 hanya sebesar 2,57%, meskipun sedikit meningkat menjadi 3,72% pada tahun 2024. Rendahnya penyerapan tenaga kerja terampil ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) antara kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan industri. Hal ini sejalan dengan temuan pada dimensi pendidikan, dimana tingkat pendidikan formal rata-rata penduduk masih relatif rendah.

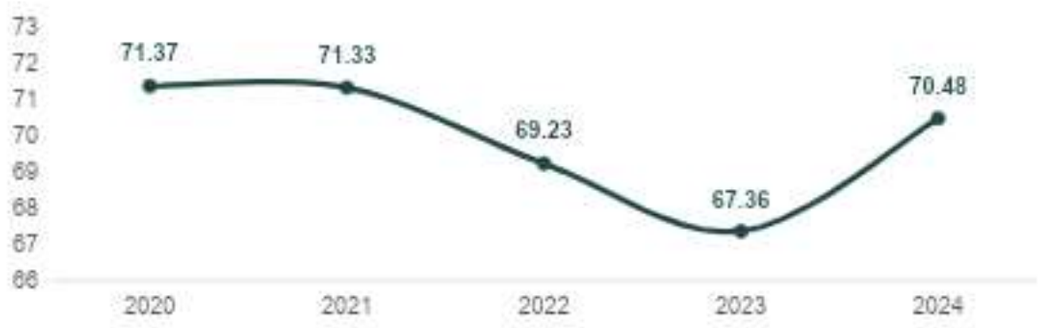

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur

Gambar 2. 35 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 – 2024 (%)

Secara keseluruhan, daya saing sumber daya manusia Kabupaten Belitung Timur memiliki modal dasar yang kuat berupa bonus demografi dan IPM kategori tinggi. Namun, untuk mentransformasi potensi tersebut menjadi

kekuatan ekonomi, diperlukan intervensi kebijakan yang fokus pada peningkatan rata-rata lama sekolah, percepatan penurunan stunting, serta penguatan pendidikan vokasi dan sertifikasi kompetensi yang selaras dengan kebutuhan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah.

II.1.B IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta penguatan ekosistem inovasi merupakan pilar fundamental untuk mendorong produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur perekonomian daerah dalam jangka panjang. Bagi Kabupaten Belitung Timur, yang tengah berupaya melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sektor pertambangan menuju ekonomi yang lebih terdiversifikasi dan berkelanjutan, peran Iptek dan inovasi menjadi sangat strategis. Analisis ini menguraikan kondisi produktivitas ekonomi, kewirausahaan, dan kapasitas inovasi daerah berdasarkan indikator-indikator kunci.

Produktivitas angkatan kerja merupakan salah satu cerminan dari daya saing ekonomi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan resiliensi yang baik. Setelah mengalami penurunan pada periode pandemi COVID-19, TPAK kembali meningkat dan mencapai 70,48% pada tahun 2024. Angka ini mengindikasikan tingginya partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi, yang menjadi modal dasar untuk mendorong produktivitas. Meskipun partisipasi angkatan kerja tinggi, tantangan utama terletak pada peningkatan produktivitas di sektor-sektor ekonomi unggulan. Analisis terhadap kontribusi sektor-sektor kunci terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan gambaran mengenai pergeseran struktur dan produktivitas ekonomi daerah.

II.1.B.1 Produktivitas Sektor Unggulan

Selama tahun 2020-2024 kategori Industri Pengolahan selalu menjadi kontributor terbesar kedua bagi pembentukan PDRB Kabupaten Belitung Timur. Total nilai tambah atas dasar harga berlaku yang dihasilkan lapangan usaha ini mencapai 2,29 triliun rupiah. Dalam kurun waktu 2020-2022 peranannya terus mengalami peningkatan tetapi terus menurun dari tahun 2023 sampai tahun 2024. Pada tahun 2023, peranannya sebesar 23,41 persen dan pada tahun 2024 peranannya turun mencapai 20,83 persen.

Komoditas utama pada Industri Pengolahan yaitu Minyak Kelapa Sawit (CPO) dan Kernel (inti sawit), serta pengolahan logam timah. Pada tahun 2022, sub kategori Industri makan minum yang mencakup pengolahan CPO ini mengalami pertumbuhan produksi serta ada kenaikan harga jual CPO. Sementara itu, 2024 industri logam timah mengalami penurunan akibat smelter timah yang tidak beroperasi lagi sehingga tidak ada lagi produksi logam timah yang dihasilkan.

TABEL 2. 70 KONTRIBUSI PDRB INDUSTRI PENGOLAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020-2024

KATEGORI PDRB	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Industri Pengolahan	Persen	20,26	21,87	23,73	23,41	20,83

Sumber: BPS 2025

Di sisi lain, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, yang merupakan proksi bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, menunjukkan

tren pertumbuhan kontribusi yang konsisten. Pada tahun 2024, kontribusinya mencapai 2,88%. Pertumbuhan yang stabil ini menandakan bahwa sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan, didukung oleh status Geopark Belitong yang diakui UNESCO.

Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum di Kabupaten Belitung Timur mengalami tren naik. Kondisi rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum mengalami penurunan tahun 2021, namun kembali naik di Tahun 2022-2024. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

TABEL 2. 71 KONTRIBUSI PDRB AKOMODASI MAKAN DAN MINUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020-2024

KATEGORI PDRB	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	2,49	2,45	2,6	2,75	2,88

Sumber: BPS, 2025

II.1.B.2 Kewirausahaan dan Inovasi Daerah

Untuk mempercepat transformasi ekonomi, penguatan kewirausahaan dan inovasi menjadi kunci. Rasio kewirausahaan menunjukkan tingkat partisipasi bisnis dalam ekonomi. Data yang digunakan pada penentuan rasio ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pekerja dengan status pekerjaan utama berusaha sendiri dibandingkan dengan jumlah total pekerja. Pada tahun 2020-2023, rasio kewirausahaan di Kabupaten Belitung Timur mengalami kenaikan. Namun demikian, pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,3. Untuk itu, perlu adanya optimalisasi peningkatan pekerja berusaha mandiri guna menstabilkan sektor kewirausahaan di Kabupaten Belitung Timur.

TABEL 2. 72 RASIO KEWIRAUSAHAAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020-2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pekerja Berusaha Sendiri (Jiwa)	15.048	15 389	21 458	22 843	21 257
Jumlah Total Pekerja (Jiwa)	67 580	66 713	66 821	70 386	71 254
Rasio Kewirausahaan	0,22	0,23	0,32	0,33	0,30

Sumber: BPS, 2025

Dari sisi inovasi, Kabupaten Belitung Timur menunjukkan kemajuan yang signifikan. Indeks Inovasi Daerah (IID) mengalami kenaikan secara konsisten, dari skor 30,3 pada tahun 2020 menjadi 55,38 pada tahun 2024. Peningkatan skor ini mencerminkan adanya penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menciptakan dan mengimplementasikan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Capaian ini menjadi modal penting untuk membangun ekosistem yang mendukung kreativitas dan penerapan teknologi di berbagai sektor.

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi suatu daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada periode tertentu. Skor yang dihasilkan dari rangkaian kegiatan penginputan Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Belitung Timur, pada tahun 2024 adalah sebesar 60,31 dengan total inovasi daerah ter-submit sebanyak 26 (dua puluh enam). Skor tersebut mengalami kenaikan dibandingkan skor indeks inovasi daerah pada tahun 2020 hingga 2023.

TABEL 2. 73 INDEKS INOVASI DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah	Skor	30,3	34,98	54,98	53,69	55,38

Sumber: BPS, 2025

Secara keseluruhan, analisis daya saing dari aspek Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi menunjukkan bahwa Kabupaten Belitung Timur berada pada fase transisi. Terdapat potensi besar pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung oleh peningkatan kapasitas inovasi pemerintah daerah. Namun, tantangan utama adalah mengatasi kerentanan pada sektor industri pengolahan tradisional dan menstabilkan pertumbuhan kewirausahaan. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan ke depan perlu difokuskan pada penguatan ekosistem inovasi yang menghubungkan lembaga riset, pelaku usaha, dan pemerintah, serta mendorong adopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di semua sektor ekonomi unggulan.

II.1.C Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

II.1.C.1 Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau dalam sub bab ini diproksikan oleh Indikator Lingkungan; Produktivitas Lahan Perkebunan; Luas Areal Tanaman Perkebunan; Produksi Tanaman Perkebunan, Indikator Lingkungan; Share Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang terhadap PDRB ADHK dan Indikator Sosial; Angka Harapan Hidup. Produktivitas lahan perkebunan menjadi salah satu indikator untuk mengukur kinerja sektor perkebunan dan efektivitas pengelolaan lahan. Produktivitas lahan perkebunan dilihat dari perhitungan jumlah hasil panen per satuan luas lahan dalam kurun waktu tertentu. Produktivitas lahan perkebunan di Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan, menunjukkan efektivitas program pertanian. Luas areal tanaman perkebunan menjadi indikator kinerja dan potensi produksi tanaman tersebut. Semakin luas tanaman perkebunan, diharapkan produktivitasnya meningkat. Luas perkebunan di Kabupaten Belitung Timur relatif stabil, dengan peningkatan signifikan hanya terjadi pada tahun 2023 karena ekspansi lahan kelapa sawit. Produksi tanaman perkebunan mengalami fluktuasi di Kabupaten Belitung Timur. Kontribusi dari pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang terhadap PDRB ADHK tidak signifikan terhadap output perekonomian Kabupaten Belitung Timur. Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan rata-rata usia yang diharapkan bagi penduduk yang lahir pada tahun tertentu. Semakin tinggi AHH, semakin baik tingkat kesehatan di wilayah tersebut. Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Belitung Timur mencapai rata- rata 72 tahun, mencerminkan tingkat kesehatan yang memadai di wilayah tersebut.

TABEL 2. 74 PEMBENTUK INDEKS EKONOMI HIJAU KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktivitas Lahan Perkebunan	Ton/Ha	0,7882	0,7569	0,7960	0,7825	0,8041
Luas Areal Tanaman Perkebunan	Ha	12.737, 59	12.755, 38	12.763, 88	12.918, 81	12.936, 52

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	10.039,72	9.654,49	10.159,98	10.109,32	10.403
Share Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang terhadap PDRB ADHK	Persen	0,0183	0,0181	0,0184	0,0184	0,0184
Angka Harapan Hidup	Tahun	72,03	72,1	72,33	72,59	72,59

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2025

II.1.C.2 Indeks Ekonomi Biru Indonesia

Ekonomi biru merupakan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan untuk kepentingan ekonomi, perbaikan hidup masyarakat, dan kesehatan ekosistem laut. Indeks ekonomi biru digunakan untuk menghitung kinerja ekonomi biru. Kinerja ekonomi biru di Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2024 adalah 26,49, sedangkan nilai IBI nasional di Tahun 2023 adalah 43,98.

II.1.C.3 Porsi EBT Dalam Bauran Energi Primer

EBT (Energi Baru dan Terbarukan) merupakan pengelolaan energi dan proses alam yang berkelanjutan yang selanjutnya menjadi energi alternatif ramah lingkungan. Hal ini berkaitan dengan keadaan Indonesia yang proporsi energi fosil mencapai 90% (LCDI, 2024), sehingga perlu adanya dekarbonisasi melalui EBT. Kondisi di Kabupaten Belitung Timur, menurut dokumen RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) tingkat porsi EBT dalam bauran energi primer mencapai 19,5 %. Hasil ini lebih tinggi dari capaian nasional yaitu pada angka 13,4%.

II.1.D **Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**

II.1.D.1 Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Belitung Timur bersifat fluktuatif. Perbandingan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional, nilainya lebih tinggi. Walaupun begitu, pada tahun 2023 Kabupaten Belitung Timur dapat menurunkan tingkat inflasi di bawah Provinsi dan Nasional, sedangkan di tahun 2024 berhasil menurunkan tingkat inflasi di bawah nilai Nasional.

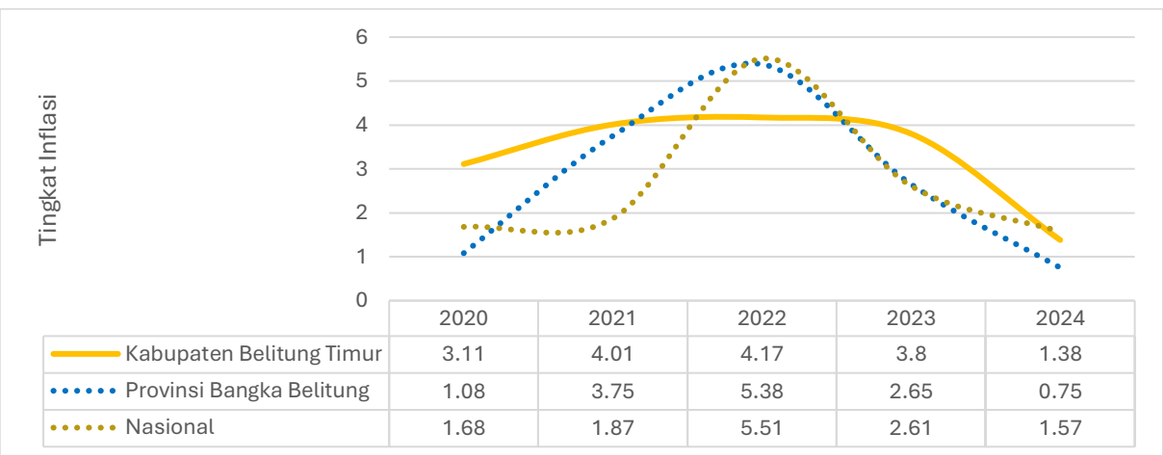

Sumber: BPS, 2024

Gambar 2. 36 Tingkat Inflasi Kabupaten Belitung Timur

II.1.D.2 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah indikator yang menggambarkan investasi ekonomi dalam bentuk aset tetap seperti pembangunan gedung, infrastruktur, dan alat produksi. PMTB menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan tingkat

aktivitas investasi di suatu wilayah. Berdasarkan data, nilai PMTB di Kabupaten Belitung Timur mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, PMTB tercatat sebesar 2.373,51 miliar rupiah dan meningkat menjadi 2.501,13 miliar rupiah di tahun 2021. PMTB melonjak signifikan menjadi 2.814,86 miliar rupiah di tahun 2022. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai sebesar 3.064,29 miliar rupiah. Peningkatan ini menunjukkan dinamika investasi di Kabupaten Belitung Timur yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi global, kebijakan daerah, serta upaya pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Secara keseluruhan, tren kenaikan dalam 5 tahun terakhir mengindikasikan bahwa kegiatan investasi di daerah ini menunjukkan pertumbuhan yang positif.

TABEL 2. 75 Pembentukan Modal Tetap Bruto KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2020 - 2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto	Miliar/rupiah	2.373,51	2.501,13	2.814,86	3.064,29	3.064,29

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2025

II.1.D.3 Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja perekonomian daerah, karena mencerminkan sejauh mana produk dan layanan lokal mampu bersaing di pasar luar daerah maupun internasional. Nilai ekspor yang positif menunjukkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara nilai negatif menunjukkan adanya ketergantungan impor atau defisit perdagangan. Berdasarkan data, kinerja ekspor barang dan jasa Kabupaten Belitung Timur mengalami perkembangan yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai ekspor tercatat sebesar -720,88 miliar rupiah, menunjukkan defisit yang cukup besar. Defisit ini berkurang pada tahun 2020 menjadi -281,77 miliar rupiah. Pada tahun 2021, terjadi perbaikan dengan nilai ekspor berbalik positif sebesar 311,77 miliar rupiah. Tren positif ini terus berlanjut dengan peningkatan menjadi 522,01 miliar rupiah pada tahun 2022 dan 608,60 miliar rupiah pada tahun 2023. Perkembangan ini mencerminkan adanya peningkatan daya saing produk dan jasa lokal Kabupaten Belitung Timur di pasar yang lebih luas, serta menunjukkan perbaikan struktur ekonomi daerah yang semakin berorientasi pada produksi dan perdagangan yang kompetitif.

TABEL 2. 76 Ekspor Barang dan Jasa KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2020 - 2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ekspor Barang dan Jasa	Miliar/rupiah	-281,77	311,77	522,01	608,60	608,60

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2025

II.1.E Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

II.1.E.1 Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur Wilayah menggambarkan tingkat ketersediaan dan kualitas prasarana dasar yang mendukung konektivitas, pelayanan publik, dan kegiatan ekonomi di suatu daerah.

TABEL 2. 77 INDEKS INFRASTRUKTUR WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2020 - 2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Infrastruktur Wilayah	Nilai	61,97	64,95	67,79	72,87	73,53

Sumber: Dinas PUPRPPRKP, Kabupaten Belitung Timur, 2025

Indeks Infrastruktur Wilayah Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan signifikan dari 61,97 pada tahun 2020 menjadi 72,87 pada tahun 2023, dan tetap stabil di angka yang sama pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, dan fasilitas publik lainnya. Lonjakan tertinggi terjadi antara tahun 2022 dan 2023, mengindikasikan adanya dorongan pembangunan besar di awal periode tersebut, yang kemungkinan dilanjutkan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Stabilnya nilai indeks pada 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa pembangunan telah mencapai tahap konsolidasi, namun tetap perlu didorong agar tidak stagnan dan bisa menjangkau wilayah-wilayah yang infrastrukturnya masih tertinggal.

II.1.E.2 Persentase Desa Mandiri

Persentase desa mandiri di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam empat tahun terakhir, dari hanya 20,51% pada tahun 2021 dan 2022, melonjak menjadi 53,85% pada 2023, dan terus meningkat hingga 71,79% pada 2024. Lonjakan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan desa melalui optimalisasi Dana Desa, penguatan kapasitas kelembagaan desa, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar dan ekonomi. Stabilnya angka pada dua tahun pertama menunjukkan adanya masa konsolidasi, sementara peningkatan tajam di dua tahun terakhir mengindikasikan terobosan kebijakan atau pendampingan yang lebih efektif dalam mendorong transformasi desa ke arah yang lebih mandiri dan berdaya saing.

TABEL 2. 78 PERSENTASE DESA MANDIRI KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2021 - 2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
Persentase Desa Mandiri	Persen	20,51	20,51	53,85	71,79

Sumber: Kemendes, 2024

II.1.F Stabilitas Ekonomi Makro

II.1.F.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total nilai tambah ekonomi wilayah, serta efektivitas fiskal daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah. Pada tahun 2020, rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Belitung Timur tercatat sebesar 0,75% dan naik menjadi 0,79% pada tahun 2021, lalu mengalami tren penurunan pada tahun 2022-2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak terhadap total output ekonomi daerah mengalami penyusutan, yang bisa mengindikasikan belum optimalnya pemungutan pajak atau melemahnya aktivitas ekonomi di sektor-sektor yang menjadi basis penerimaan daerah

TABEL 2. 79 RASIO PAJAK DAERAH TERHADAP PDRB KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2020 - 2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,75	0,79	0,59	0,52	0,41

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024, diolah

II.1.F.2 Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Beberapa faktor yang mempengaruhi inflasi diantaranya meningkatnya konsumsi, daya tarik masyarakat terhadap barang, ketersediaan stok. Pada tahun 2022, angka inflasi provinsi dan nasional masing-masing pada angka 5,38 dan 5,51, sedangkan Belitung Timur berada pada angka 4,17. Tingkat inflasi pada tahun 2023 Kabupaten Belitung Timur mengalami inflasi sebesar 3,80 persen, angka ini turun dari tahun sebelumnya. Sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional mengalami inflasi sebesar 2,65 dan 2,61, angka ini juga menurun dari tahun sebelumnya. Tren angka menurun dipengaruhi andil inflasi gabungan 2 kota di Bangka Belitung yang utamanya disumbang oleh komoditas bensin, rokok kretek filter, cabai merah, angkutan udara, dan cabai.

TABEL 2. 80 TINGKAT INFLASI KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2020 - 2024

TAHUN	KABUPATEN BELITUNG TIMUR (%)	PROVINSI KEP. BABEL (%)	NASIONAL (%)
2020	3,11	1,08	1,68
2021	4,01	3,75	1,87
2022	4,17	5,38	5,51
2023	3,80	2,65	2,61
2024	1,38	0,75	1,57

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024, diolah

II.2 Aspek Pelayanan Umum

II.1.A Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

II.1.A.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah ukuran untuk menilai tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di instansi pemerintah. Indeks SPBE bertujuan untuk mengukur sejauh mana penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan administrasi dan layanan. mendorong efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan dasar pembinaan dan perbaikan di sektor digital pemerintahan. Pada tahun 2020, Indeks SPBE Kabupaten Belitung Timur ada di angka 3,15 (kategori baik). Capaian Indeks SPBE selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2. 81 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 - 2024

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka Indeks	3,15	2,15	2,70	3,56	4,16

Sumber: Diskominfo SP Kabupaten Belitung Timur, 2025

Namun perkembangan saat ini, dalam arah kebijakan nasional Transformasi Tata Kelola dilaksanakan dengan strategi Transformasi Digital Pemerintah (TDP), dengan indikator Indeks SPBE di tahun 2045 sebesar 5,00 (skala 5). Pelaksanaan Transformasi Tata Kelola pada periode tahun 2025-2029 difokuskan untuk pencapaian Asta Cita, dimana pelaksanaan TDP berupa penerapan Pemerintah Digital (Pemdi) dengan aspek berupa: 1) Penguatan tata kelola Pemdi, 2) Penguatan teknologi Pemdi, 3) Pengembangan budaya dan kompetensi digital ASN, 4) Transformasi digital layanan publik prioritas, dan 5) Penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data. Target peran Pemdi sebagai pengungkit pembangunan 2025-2029, secara umum meliputi: 1) Mendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan tata kelola data pemerintah yang terpadu, 2) Menciptakan iklim usaha yang kondusif berbasis teknologi, 3) Mewujudkan administrasi pemerintahan berbasis teknologi, seperti sistem pengadaan, sistem layanan aparatur negara, sistem kearsipan, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, 4) Modernisasi teknologi sistem penerimaan negara, serta 5) Transformasi layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di setiap tahap kehidupan (layanan siklus hidup). Berdasarkan hal tersebut, maka **Indeks SPBE** akan dilakukan penguatan kebijakan menjadi **Indeks Pemdi**, dengan kerangka indikator baru.

II.1.A.2 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah ukuran yang menilai kualitas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. IPP bertujuan untuk mendorong terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik, memberi gambaran mengenai kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat, dan menjadi dasar pembinaan dan penghargaan instansi yang mampu memberikan layanan baik. Pada tahun 2022, IPP Kabupaten Belitung timur mencapai angka 3,35.

TABEL 2. 82 INDEKS PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 - 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	53,12	53,12	55,00	58,00	61,00
2.	Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks	NA	3,20	3,35	3,50	4,01

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur, 2025

II.1.A.3 Indeks Integritas Nasional

Indeks integritas nasional merupakan penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur. Indeks integritas nasional pada Belitung Timur mengalami kenaikan tiap tahunnya. Angka tertinggi dicapai pada Tahun 2024 pada angka 78,9%.

TABEL 2. 83 INDEKS INTEGRITAS NASIONAL KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2020-2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Integritas Nasional	Persen	N/A	69,23	69,4	74,82	78,9

Sumber: KPK, 2024

Gambar berikut menampilkan skor agregat, internal, eksternal dan eksper dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada SPI tahun 2024.

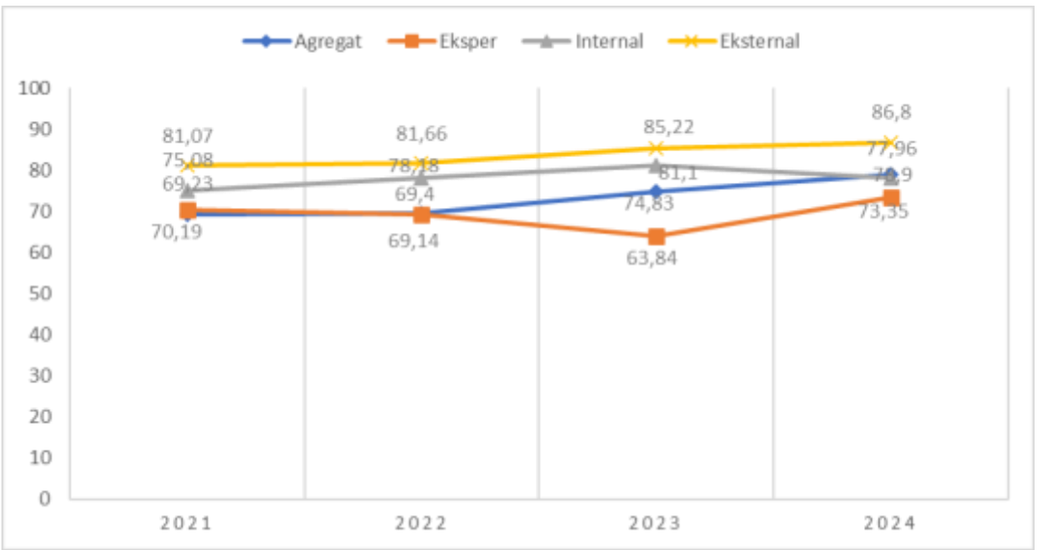

Gambar 2. 37 Ringkasan Indeks SPI 2024 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

Gambar tersebut menampilkan perubahan skor SPI yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, indeks SPI dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berada pada angka 69,23. Kemudian, terjadi peningkatan yang sangat minor di tahun 2022 menjadi 69,4. Berikutnya, pada tahun 2023, indeks SPI dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berada pada angka 74,83. Kemudian, terjadi peningkatan yang moderat di tahun 2024 menjadi 78,9.

Responden internal yang merupakan pegawai di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memberikan penilaian yang berubah antarwaktu. Di tahun 2021, Nilai indeks SPI dari responden internal Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berada pada angka 75,08. Kemudian, terjadi peningkatan yang moderat di tahun 2022 menjadi 78,18. Berikutnya, pada tahun 2023, indeks SPI internal dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berada pada angka 81,1. Kemudian, terjadi penurunan yang moderat di tahun 2024 menjadi 77,96.

Hal serupa juga bisa diamati dari indeks eksternal yang dihasilkan dari survei terhadap pengguna layanan. Nilai indeks SPI dari responden eksternal Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berada pada angka 81,07. Kemudian, terjadi peningkatan yang sangat minor di tahun 2022 menjadi 81,66. Berikutnya, pada tahun 2023, indeks SPI eksternal dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berada pada angka 85,22. Kemudian, terjadi peningkatan yang minor di tahun 2024 menjadi 86,8.

Opini responden eksper juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Nilai indeks SPI dari responden eksper Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berada pada angka 70.19. Kemudian, terjadi penurunan yang minor di tahun 2022 menjadi 69,14. Berikutnya, pada tahun 2023, indeks SPI eksper dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berada pada angka 63,84. Kemudian, terjadi peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2024 menjadi 75,35.

II.1.B Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

II.1.B.1 Persentase Penegakan Perda

Capaian indikator kinerja persentase penegakan perda dihitung berdasarkan jumlah penyelesaian penegakan perda dibagi jumlah pelanggaran perda dikali 100 persen. Pada tahun 2020, capaian indikator tersebut adalah sebesar 43,75 persen, tidak berubah sejak tahun 2019. Saat ini, Satpol PP Kabupaten Belitung Timur hanya dapat melakukan tindakan non yustisi, untuk melakukan penindakan diperlukan pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Capaian tersebut dapat dilihat pada tabel capaian indikator kinerja urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Kabupaten Belitung Timur tahun 2020-2024 sebagai berikut:

TABEL 2. 84 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase penegakan PERDA	Persen	43,75	43,75	100	100	100
2.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	Kali	75	75	720	360	328

Sumber: Satpol PP Kabupaten Belitung Timur, 2025

II.1.B.2 Persentase Capaian Aksi HAM

Persentase capaian aksi HAM Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 adalah sebesar 80%, angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar rencana aksi Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditetapkan telah berhasil dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Capaian ini mencerminkan komitmen yang cukup kuat dalam mengarusutamakan prinsip-prinsip HAM ke dalam kebijakan, program, dan pelayanan publik. Namun demikian, angka 80% juga mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang perbaikan sebesar 20% yang perlu diperhatikan, baik dari sisi implementasi, pemantauan, maupun pelibatan kelompok rentan dalam proses pembangunan yang adil dan inklusif.

II.1.B.3 Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Indeks ketentraman dan ketertiban mengukur kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Indeks ketentraman dan ketertiban Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2019-2024 memiliki capaian yang sama yaitu di angka 100.

TABEL 2. 85 INDEKS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP Kabupaten Belitung Timur, 2025

II.1.C Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

II.1.C.1 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan sebuah ukuran untuk menggambarkan tingkat kompetitif suatu provinsi atau kabupaten/kota dibandingkan daerah lain dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. IDSD bertujuan untuk mengukur kekuatan dan kelemahan daerah dalam berbagai aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur, menjadi bahan perbaikan kebijakan pembangunan daerah, dan menarik investasi dan mendorong pertumbuhan

ekonomi daerah. Berikut ini adalah tabel IDSD untuk Kabupaten Belitung Timur:

TABEL 2. 87 INDEKS DAYA SAING DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NAMA KAB/ KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM			PASAR			EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	PILAR 1	PILAR 2	PILAR 3	PILAR 4	PILAR 5	PILAR 6	PILAR 7	PILAR 8	PILAR 9	PILAR 10	PILAR 11	PILAR 12	
Kab. Belitung Timur	4,67	3,01	4,63	3,72	3,97	4,32	2,65	4,69	1,62	3,89	3,44	1,62	3,52

Sumber: BRIN, 2024

II.1.D Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

II.1.D.1 Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek pelayanan dasar yang harus ditingkatkan untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi pembangunan daerah. Pembangunan pendidikan berpotensi meningkatkan kualitas SDM dengan memperbaiki keahlian dan keterampilan. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berkomitmen untuk meningkatkan layanan pendidikan, baik dalam bentuk formal maupun non-formal, melalui berbagai program pembangunan.

TABEL 2. 88 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,22	8,47	8,67	8,9	8,99
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,52	11,63	11,65	11,66	11,69
3	Persentase guru yang bersertifikat pendidik	Persen	68.8	86.81	62.47	47,83	47,83
4	Persentase guru yang berpendidikan D-IV/S-1	Persen	85,83	88,82	87,53	87,45	92,81
5	Sekolah yang terakreditasi minimal B pada semua jenjang pendidikan	Persen	99,23	99,23	99,22	98,45	98,45
6	APK PAUD	Persen	55.42	56,3	82,14	84,56	86,47
7	APM PAUD	Persen	55.42	52,11	65,36	52,11	52,11
8	APK SD/MI	Persen	101,78	99,73	100,94	99,05	100
9	APS SD/MI	Persen	0.01	0,07	0,34	0,07	0,07
10	APM SD/MI	Persen	88,94	88,85	92,44	88,85	88,85
11	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	100	86,54	94,29	86,54	86,54
12	Rasio Guru dan Murid SD/MI	Rasio	14	16,62	14,37	16,61	16,61
13	Angka Kelulusan SD/MI	Persen	100	100	100	100	100
14	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	Persen	93.54	93,88	98,52	99,55	99,55
15	APK SMP/MTs	Persen	90,9	92,09	88,02	90,47	91,76
16	APS SMP/MTs	Persen	1.26	2,08	1,33	1,96	1,96
17	APM SMP/MTs	Persen	46,31	45,78	42,37	45,78	45,78
18	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	100	99,55	100	99,55	99,55
19	Rasio Guru dan Murid SMP/MTs	Rasio	15	17	14,37	17,51	17,51
20	Angka Kelulusan SMP/MTs	Persen	100	99,55	100	99,55	99,55
21	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK	Persen	99.94	99	98.77	NA	NA
22	Warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada PAUD	Persen	68.94	87,58	88,97	87,58	87,58

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
23	Warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar	Persen	96.96	88,17	94,42	88,17	88,17
24	Warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan keaksaraan	Persen	36.82	34,98	38,2	34,98	34,98

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, 2025

a) Rata-rata lama sekolah sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh seseorang dalam proses pendidikan formal. Rata Lama Sekolah di Kabupaten Belitung Timur secara umum tidak ada perubahan yang signifikan, Nilai RLS di Kabupaten Belitung Timur hanya mencapai 8 tahun selama periode 2020-2024. Berdasarkan hal tersebut, masih banyak penduduk yang belum menamatkan pendidikan sekolah menengah pertama.
b) Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang menunjukkan jumlah tahun yang diharapkan akan dihabiskan oleh seorang anak dalam pendidikan formal selama hidupnya, mulai dari tingkat pendidikan pra-sekolah dasar hingga pendidikan tinggi. Indikator ini mencerminkan potensi pendidikan yang mungkin dicapai oleh generasi muda di masa depan berdasarkan kondisi saat ini. HLS di Kabupaten Belitung Timur secara umum menunjukkan hasil yang sama yaitu 11 tahun pada tahun 2020-2024. Angka HLS di Kabupaten Belitung Timur secara rata-rata menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal selama 11 tahun lebih.
c) Persentase guru yang bersertifikat pendidik menunjukkan kualitas tenaga pendidik dalam sistem pendidikan untuk memastikan bahwa guru memiliki kompetensi yang memadai. Sertifikasi ini diberikan setelah guru mengikuti dan lulus program pendidikan dan pelatihan tertentu. Kondisi di Kabupaten Belitung Timur persentase sertifikat pendidik mengalami penurunan yang semula guru yang memiliki sertifikat sebesar 62,47% menjadi 47,83%.
d) Persentase guru yang memenuhi kualifikasi D-IV/S-1 adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas tenaga pendidik dalam sistem pendidikan. Kualifikasi ini menunjukkan bahwa guru telah menempuh pendidikan tinggi hingga tingkat sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), yang merupakan persyaratan minimum untuk mengajar di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia. Persentase kualifikasi guru secara umum sudah mencapai di atas 80%.
e) Sekolah yang terakreditasi minimal B pada semua jenjang pendidikan, akreditasi sekolah sebagai proses evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh lembaga akreditasi untuk mengevaluasi kualitas dan kelayakan suatu sekolah berdasarkan standar tertentu. Perkembangan sekolah terakreditasi di Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan yang semula sekolah yang sudah terakreditasi sebesar 99,22% menjadi 98,% di tahun 2023.
f) Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan salah satu indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk dalam suatu jenjang pendidikan tertentu. Nilai APK dalam bentuk persentase dan dihitung dengan membandingkan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk dalam kelompok usia yang sesuai untuk jenjang pendidikan tersebut. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk dalam suatu jenjang pendidikan berdasarkan kelompok usia yang sesuai. Berbeda dengan

Angka Partisipasi Kasar (APK), yang menghitung jumlah total siswa tanpa memperhatikan usia, APM hanya memperhitungkan siswa yang berada dalam rentang usia resmi untuk jenjang pendidikan tersebut. Nilai APK dari PAUD dan SD/MI mengalami penurunan pada tahun 2023. Nilai APM PAUD dan SD/MI tidak jauh berbeda dengan nilai APK yang mengalami penurunan di tahun yang sama. Kemudian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI untuk melihat sejauh mana masyarakat terlibat dalam sistem pendidikan formal di berbagai jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi mengalami penurunan. Kemudian perkembangan APK, APS, APM SMP/MTs berbeda dengan jenjang pendidikan SD/MTs. Adanya perkembangan yang positif dari APK, APS, APM SMP/MTs mengalami peningkatan persentase dari tahun 2022 ke 2023. Perkembangan angka partisipasi ini mencerminkan minat siswa dalam melanjutkan pendidikan semakin besar.

g) Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik, fasilitas sekolah untuk mendukung belajar mengajar melalui bangunan sekolah yang dilengkapi dengan sarana pendidikan. Kondisi bangunan baik menjadi salah satu indikator fasilitas sekolah. Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan dalam kondisi bangunan sekolah baik di tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Hal ini dilihat nilai persentase yang menurun pada tahun 2023.

h) Rasio guru dan murid SD/MI dan SMP/MTs digunakan untuk mengukur jumlah rata-rata murid yang diajar oleh seorang guru dalam suatu jenjang pendidikan. Selain itu rasio guru murid memberikan gambaran tentang beban kerja guru dan potensi kualitas interaksi antara guru dan murid di dalam kelas. Rasio guru murid di Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan rasio baik rasio di SD/MI dan SMP/MTs. Peningkatan nilai rasio ini mencerminkan minat anak untuk bersekolah semakin meningkat.

i) Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs digunakan untuk mengukur persentase siswa yang dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dengan status lulus program studi yang diikutinya. Indikator ini untuk menggambarkan efektivitas sistem pendidikan dengan siswa dapat mencapai standar yang ditetapkan untuk kelulusan. Capaian kelulusan SD/MI lebih baik dibandingkan siswa yang lulus di SMP/MTs di mana capaian lulus dari SMP/MTs terjadi penurunan.

j) Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs digunakan dalam rangka menjalankan program wajib belajar 9 tahun diupayakan siswa lulus SD/MI dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs. Secara umum terjadi peningkatan pada siswa melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs. Persentase siswa dalam melanjutkan pendidikan sebesar 99,55% di tahun 2023 yang semula hanya mencapai 98,52% (tahun 2022). Sedangkan siswa yang melanjutkan jenjang pendidikan SMA/SMK mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 98.77%.

k) Partisipasi penduduk dalam mendapatkan pendidikan formal sebagai bahan masukan pemerintah dalam membuat kebijakan dan program pendidikan. Semakin tinggi partisipasi masyarakat ingin mendapatkan pendidikan formal maka pemerintah perlu mempersiapkan sarana dan prasarana pendidikan. Partisipasi penduduk yang ingin mendapatkan pendidikan dapat dilihat berdasarkan umur 5-6 tahun jenjang PAUD, umur 7-15 tahun di jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Partisipasi penduduk usia 5-6 tahun dan 7-15 tahun dalam pendidikan formal di Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur perlu mengevaluasi program pendidikan untuk mengatasi

penurunan minat partisipasi penduduk dalam mendapatkan pendidikan formal.

l) Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum mulok terdiri dari sekolah Dikdas, PAUD dan PNF. Kondisi terkini dari persentase penerapan kurikulum mulok pada ketiga sekolah tersebut di Kabupaten Belitung Timur adalah 100 persen. Sehingga, hal tersebut perlu dijaga Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur agar kualitas pendidikan merata.
m) Kemudian jika dilihat dari data Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan Dasar/Menengah, jumlah penduduk di Kabupaten Belitung Timur yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah mengalami penurunan. Beberapa faktor yang menyebabkan penduduk belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah antara lain: Pertama, beberapa penduduk dianggap telah menyelesaikan pendidikan formal dengan lulus sehingga tidak perlu melanjutkan pendidikan dasar/menengah; Kedua, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan masih rendah, sehingga banyak penduduk yang belum menamatkan pendidikan dasar/menengah.
n) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 PAUD di tahun 2024 mencapai angka 94,81%.
o) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP di tahun 2024 mencapai angka 97,09%.
p) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan Kesetaraan di tahun 2024 mencapai angka 8,69%.
q) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B PAUD di tahun 2024 mencapai angka 75,4%.
r) Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 PAUD di tahun 2024 mencapai angka 76,53%.
s) Iklim Inklusivitas SD di tahun 2024 mencapai angka 58,46%.
t) Iklim Inklusivitas SMP di tahun 2024 mencapai angka 62,68%.
u) Iklim Keamanan SD di tahun 2024 mencapai angka 74,83%.
v) Iklim Keamanan SMP di tahun 2024 mencapai angka 74,68%.
w) Iklim Kebhinekaan SMP di tahun 2024 mencapai angka 74,32%.
x) Iklim Kebhinekaan SD di tahun 2024 mencapai angka 71,63%.

II.1.D.2 Urusan Kesehatan

Kesehatan adalah faktor utama selain pendidikan yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan, termasuk dengan menerapkan pemerataan layanan kesehatan dan memastikan tersedianya sarana prasarana kesehatan yang memadai.

TABEL 2. 89 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1.000 KH	10,92	10	11,8	9,7	189
2	Angka Kelangsungan hidup bayi	Per 1.000 KH	989,08	990	988,2	990,3	990,3
3	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	Per 1.000 KH	13,76	13,6	14,6	13,5	13,5
4	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	Per 1.000 KH	8,54	7,5	8,4	7	7

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Angka Kematian Ibu per 1.00.000 kelahiran hidup	Per 100.000 KH	189,84	130	168,44	130	189
6	Rasio Posyandu per satuan balita	Per 1.000 KH	1,28	1,25	1,89	1,2	1,2
7	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	23,89	23,5	22,7	22,9	22,9
8	Rasio Rumah sakit per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	0,8	0,8	0,78	0,79	0,79
9	Rasio Dokter (umum dan gigi) per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	50,96	49	64,54	48	48
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	66,88	65	64,54	64	64
11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	98,74	98	100,73	98	98
12	Cakupan Balita gizi buruk mendapatkan perawatan	Persen	100	100	100	100	100
13	Persentase anak usia 1 tahun yg diimunisasi campak	Persen	92,03	92	97,1	93	93
14	Non Polio AFP rate 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	0	1,48	0	1,48	1,48
15	Cakupan Balita pneumonia yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100
16	Cakupan Penemuan dan penanganan penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100
17	Penderita diare yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100
18	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Per 100.000 penduduk	1,68	1,66	0,9	1,64	0,82
19	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100	75
20	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	89,03	100	81,52	100	67,9
21	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	98,6	100	80,69	100	78,73
22	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	84,57	100	77,19
23	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	100	92,45	100	92,07
24	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	99,96	100	96,24
25	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100
26	Persentase rumah sakit terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100
27	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Persen	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
28	Proporsi pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100
29	Persentase Penggunaan Obat Rasional	Persen	87	92	95	92	92
32	Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat sesuai standar	Persen	55,17	55,3	58,81	58,54	58,54
33	Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan	Persen	96,24	96,6	97	96.7	96.7
34	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	100	100	100	100	100
35	Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	Persen	38,46	51,28	66,6	66,67	66,67
36	Persentase kelurahan/desa yang melaksanakan pembinaan posyandu aktif	Persen	66,67	89,74	99,25	NA	NA
37	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	75,66	80,16	72,70	86,83	63,96
38	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	71,30	70,02	74,35	81,99	80,37
39	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	80,54	80,08	84,77	78,37	94,93
40	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	99,37	90,58	93,78	95,29	88,92
41	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	100	100	103,32
42	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	87,09	108,63	124,75	64,35	103,09
43	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	67,01	83,09	124,41	93,81	81,19

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, 2025

Pemerintah dalam pelayanan kesehatan dapat dilihat dari hasil capaian pada indikator kinerja urusan kesehatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pelayanan kesehatan berdasarkan kesehatan dasar seperti angka kematian bayi. Angka keberlangsungan hidup bayi, angka kematian balita, angka kematian neonatal berdasarkan per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu per 1.000.000 kelahiran hidup mengalami penurunan. Secara umum keselamatan bayi dan ibu terus mengalami peningkatan di Kabupaten Belitung Timur.

b) Sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Belitung Timur beberapa indikator mengalami penurunan yaitu rasio posyandu per satuan balita dan rasio dokter per penduduk mengalami penurunan. Sedangkan rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk dan rasio tenaga medis per satuan penduduk mengalami peningkatan. Kabupaten Belitung Timur perlu mengevaluasi sarana pelayanan kesehatan untuk kebutuhan masyarakat.
c) Cakupan pelayanan kesehatan pada indikator cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan terjadi penurunan, sedangkan cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan sudah mencapai 100%.
d) Pelayanan dalam cakupan imunisasi, vaksin dan penanganan penyakit dalam perkembangannya sangat beragam di Kabupaten Belitung Timur. Indikator persentase anak usia 1 tahun yg diimunisasi campak terjadi penurunan. Sedangkan pelayanan kesehatan lainnya mengalami peningkatan atau mencapai 100% yaitu Non Polio AFP rate 100.000 penduduk, cakupan balita pneumonia yang ditangani, cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD dan penderita diare yang ditangani.
e) Rasio daya tampung rumah sakit rujukan mengalami penurunan. Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi sudah mencapai 100%.
f) Perkembangan pelayanan kesehatan oleh pemerintah dapat dilihat dari kesehatan ibu, bayi, balita dan anak. Indikator yang berkaitan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak telah mencapai pelayanan sebesar 100%.
g) Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terakreditasi sudah mencapai 100% selama lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan di tingkat dasar telah memenuhi standar yang ditetapkan. Sama halnya dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terakreditasi sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar kualitas pelayanan kesehatan yang baik.
h) Ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas mencapai 100% setiap tahunnya. Ini menandakan bahwa tidak ada kekurangan dalam distribusi obat dan vaksin di tingkat puskesmas, yang memiliki peran penting untuk penanganan dan pencegahan penyakit. Selain itu, proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas yang sesuai standar juga sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa puskesmas tidak hanya memiliki ketersediaan obat yang baik, tetapi juga melayani pasien dengan standar kefarmasian yang tinggi.
i) Persentase penggunaan obat yang rasional mengalami fluktuasi namun terjadi penurunan di tahun 2023. Penggunaan obat yang rasional sangat penting untuk mencegah resistensi obat dan memastikan pasien menerima pengobatan yang sesuai.
j) Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat sesuai standar terjadi penurunan. Kesehatan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyakit yang ditularkan melalui makanan.
k) Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan terjadi peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses yang baik terhadap obat dan vaksin yang diperlukan.
l) Cakupan desa siaga aktif tetap konsisten stabil pada 100% selama lima tahun. Hal ini menunjukkan bahwa semua desa di Kabupaten Belitung Timur memiliki kesiapsiagaan yang baik dalam menghadapi situasi darurat kesehatan.

m) Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) mengalami sedikit peningkatan. Germas merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam hidup sehat.
n) Persentase kelurahan/desa yang melaksanakan pembinaan posyandu aktif terjadi peningkatan. Posyandu aktif memiliki peran yang penting untuk mendukung kesehatan ibu dan anak di tingkat desa.
o) Persentase orang usia 15-59 tahun dan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mencapai angka 63,96% (bagi warga 15-59 tahun) dan 80,37% (bagi warga usia 60 tahun ke atas).
p) Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mencapai angka 102,99%.
q) Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mencapai angka 103,09%.
r) Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mencapai angka 81,2%.
s) Persentase pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mencapai angka 65%.
t) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mencapai angka 98,23%.
u) Persentase penilaian capaian tatanan kehidupan sehat mandiri di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mencapai angka 71%.
v) Persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mencapai angka 71%.

Selain itu, terdapat penambahan indikator terutama mengenai kondisi ibu hamil, gizi anak, kesehatan remaja putri, dan calon pengantin. Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Persentase ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan di tahun 2024 berjumlah 67,80%

Persentase ibu hamil menerima Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) sebanyak 180 butir selama masa kehamilan di tahun 2024 berjumlah 65,10%

Persentase ibu hamil menerima makanan bergizi seimbang di tahun 2024 masih 0%

Persentase ibu hamil memeriksakan kehamilannya 6 kali selama masa kehamilan di tahun 2024 mencapai angka 74%

Persentase anak baru lahir yang mendapatkan inisiasi menyusu dini di tahun 2024 mencapai angka 66,22%

Persentase anak usia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif di tahun 2024 mencapai angka 68,60%

Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MPASI) di tahun 2024 mencapai angka 60,90%

Persentase anak usia 6-23 bulan yang masih mendapat air susu ibu (ASI) di tahun 2024 mencapai angka 58,95%

Persentase anak usia 0-23 bulan gizi buruk yang mendapatkan tatalaksana gizi buruk di tahun 2024 mencapai angka 100%

Persentase anak usia 0-23 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya di tahun 2024 mencapai angka 91,92%

Persentase anak usia 0-23 bulan gizi kurang yang mendapat asupan gizi di tahun 2024 mencapai angka 65%

Persentase anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan imunisasi rutin lengkap di tahun 2024 mencapai angka 73%
Persentase anak usia 0-23 bulan diare yang mendapatkan oralit dan zinc di tahun 2024 mencapai angka 100%
Persentase anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan obat cacing di tahun 2024 mencapai angka 100%
Persentase anak usia 24-59 bulan gizi buruk yang mendapatkan pelayanan tata laksana gizi buruk di tahun 2024 mencapai angka 65%

II.1.D.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang adil dan merata terhadap infrastruktur dan perumahan yang layak dalam urusan pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan rakyat.

TABEL 2. 90 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Infrastruktur Wilayah	Nilai	61,97	64,95	67,79	72,87	73,53
2	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai	61,97	64,95	64,08	65,5	69,045
3	Persentase capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	Persen	86	92	89,89	91,94	92,76
4	Persentase penanganan drainase lingkungan dan perkotaan	Persen	20	20	33	43,05	51,78
5	Persentase penanganan jalan kabupaten	Persen	56,99	58,2	58,64	54,08	37,93
6	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir dan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur	Persen	NA	20	11	48,6	10,26
7	Persentase pengelolaan irigasi kewenangan kabupaten	Persen	25,2	28,17	30,15	36,93	52,9
8	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	Persen	0	22,96	13,54	36,32	0
9	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	0	100	64,56	64,65	0
10	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	36,97	39,90	52,89	52,89	59,85
11	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	76,13	96,24	73,21	83,93	91,03

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
12	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	89,79	85,44	0,99	92,61	71,80
13	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100
14	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	79,67	79,68	81,17	78,45	79,50
15	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	0	100	0	27,36	37,34
16	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	0	0	0	100	100

Sumber: DPUPRPPRKP Kabupaten Belitung Timur, 2025

a) Indeks infrastruktur wilayah adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kondisi dan kualitas infrastruktur di suatu wilayah tertentu, seperti kota, provinsi, atau negara. Indeks ini biasanya mencakup berbagai aspek infrastruktur yang penting untuk mendukung kegiatan ekonomi, termasuk transportasi, energi, air dan sanitasi, telekomunikasi, dan fasilitas publik. Rentang skor indeks infrastruktur wilayah adalah 0-20: Sangat Buruk; 21-40: Buruk; 41-60: Sedang; 61-80: Baik; 81-100: Sangat Baik. Indeks infrastruktur wilayah Kabupaten Belitung Timur memiliki rentang skor 61-80 berkategori sedang pada tahun 2020-2023. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur perlu memenuhi infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan penduduk.
b) Indeks infrastruktur pekerjaan umum adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas, ketersediaan, dan keunggulan infrastruktur pekerjaan umum dalam suatu wilayah seperti jalan, jembatan, sanitasi, irigasi, air bersih, dan fasilitas publik lainnya. Indeks infrastruktur pekerjaan umum di Kabupaten Belitung Timur mengalami kenaikan pada tahun 2020-2023. Perkembangan positif dari indeks ini mengindikasikan adanya kualitas, ketersediaan, dan keunggulan infrastruktur yang semakin membaik.
c) Persentase capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar 91,94%. Peningkatan capaian di mana pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah memperbaiki standar pelayanan minimum.
d) Persentase penanganan drainase lingkungan dan perkotaan meningkat sebesar 43,0% pada tahun 2023. Persentase yang meningkat di mana adanya peningkatan penanganan drainase lingkungan dan perkotaan di Kabupaten Belitung Timur. Persentase penanganan jalan kabupaten mengalami penurunan di tahun 2023, pemerintah Kabupaten Belitung Timur perlu mengevaluasi kembali kondisi jalan untuk kepentingan penduduk. Peningkatan yang cukup signifikan dari persentase luas kawasan permukiman rawan banjir dan yang terlindungi oleh infrastruktur di tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur penanganan rawan banjir dan abrasi melalui infrastruktur sudah membaik. Kemudian Persentase pengelolaan irigasi kewenangan kabupaten semakin meningkat dengan capaian 36,93% di tahun 2023. Hal ini adanya penanganan pengelolaan irigasi yang semakin besar menjadi kewenangan kabupaten.
e) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indeks yang mengukur kepuasan masyarakat terkait dengan kinerja pemerintah di bidang

pekerjaan umum dan penataan ruang. IKM terhadap pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mencapai nilai 82,67. Capaian ini tergolong baik, sehingga perlu dipertahankan.

f) Rasio luas kawasan permukiman yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di wilayah sungai (WS) kewenangan Kab/Kota sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi pada Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 mencapai nilai 37,93. Perlu adanya peningkatan infrastruktur pengamanan pantai agar meminimalisir kejadian abrasi, erosi, dan akresi.
g) Persentase irigasi dalam kondisi baik, luas irigasi yang dapat berfungsi dengan baik dan efisiensi penggunaan air irigasi Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mencapai angka 52,9%.
h) Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan di tahun 2024 belum memiliki data.
i) Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman) di tahun 2024 belum memiliki data.
j) Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik di tahun 2024 belum memiliki data.
k) Persentase dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan di tahun 2024 belum memiliki data.
l) Persentase jumlah bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya yang ditata dan dipelihara di tahun 2024 belum memiliki data.
m) Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Belitung Timur mencapai angka 79,50%. Walaupun angka ini terbilang cukup baik, namun perlu adanya peningkatan agar aksesibilitas di Kabupaten Belitung Timur meningkat.

II.1.D.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terbagi dalam 4 (empat) sub urusan. Keempat sub urusan tersebut antara lain: 1) perumahan; 2) kawasan permukiman; 3) perumahan dan kawasan permukiman kumuh; dan 4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). Sub urusan perumahan adalah bagian dari tugas pemerintah daerah dalam hal penyediaan fasilitas perumahan bagi yang terkena relokasi, rehabilitasi rumah bagi yang terkena bencana, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, serta penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG). Sub urusan kawasan permukiman memiliki tugas dalam penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, serta penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh. Sub urusan perumahan dan kawasan permukiman kumuh memiliki tugas dalam pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh. Sub urusan PSU bertugas dalam penyelenggaraan PSU perumahan.

Kinerja dari Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat terlihat dari indikator sebagai berikut: 1) persentase korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (belum memiliki data); 2) persentase permukiman yang tertata (belum memiliki data); 3) persentase luas kawasan kumuh yang ditangani (belum memiliki data); dan 4) persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (belum memiliki data). Capaian kinerja pada indikator persentase korban bencana yang memperoleh rumah layak huni pada Kabupaten Belitung Timur mencapai angka 58,24%.

TABEL 2. 91 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Nilai	66,17	71,96	53,32	65,37	65,37
2	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana, utilitas (PSU)	Persen	100	100	99,35	99,35	99,37
3	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Persen	NA	95,57	87,19	90,2	92,04
4	Rasio rumah layak huni	Persen	46,4	48	52,29	40,31	58,24
5	Rasio permukiman layak huni	Persen	NA	99,2	99,35	99,35	58,24
6	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	0	100	100	0	0
7	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	0	100	100	0	0
8	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani	Persen	100	100	100	100	9,72
9	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	48,99	47,70	61,37	59,27	41,53
10	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Unit	325	262	262	313	358

Sumber: DPUPRPPRKP Kabupaten Belitung Timur, 2025

a. Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman adalah indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas, ketersediaan, dan aksesibilitas infrastruktur yang mendukung perumahan dan permukiman suatu wilayah. Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman menunjukkan peningkatan di tahun 2023, yang artinya persediaan dan aksesibilitas infrastruktur yang dilakukan pemerintah telah meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman.
b. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana, utilitas (PSU) mengalami peningkatan dengan capaian di atas 99%.
c. Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar meningkat di tahun 2023 dengan proporsi sebesar 90,20%. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sudah memenuhi pelayanan dasar untuk kebutuhan penduduk berdasarkan rumah tangga.
d. Rasio layak huni merujuk pada ukuran atau persentase dari jumlah unit perumahan yang memenuhi standar tertentu untuk dihuni dengan aman dan nyaman. Persentase standar layak huni mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 40,31, di mana rasio layak huni di tahun 2022 sebesar 52,29. Pemerintah perlu mengevaluasi akibat menurunnya standar huni masyarakat yang aman dan nyaman.
e. Rasio permukiman layak huni untuk untuk menilai kualitas permukiman dan memastikan bahwa penduduk memiliki akses terhadap lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dasar. Permukiman layak huni di Kabupaten Belitung Timur sudah

memenuhi kondisi baik yang dilihat rasio permukiman layak huni sebesar 99% di tahun 2021-2023. Pada tahun 2024, cakupan ketersediaan rumah layak huni mencapai angka 58,24%.

II.1.D.5 Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas) adalah bagian dari tugas pemerintah daerah untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan perlindungan bagi masyarakat. Urusan ini mencakup berbagai kegiatan dan program yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai ancaman dan gangguan.

TABEL 2. 92 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penegakan PERDA	Persen	43,75	100	100	100	100
2	Cakupan patroli petugas Satpol PP	Kali	75	720	360	328	328
3	Jumlah tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, keindahan (K3) yang tertangani	Aksi/ Kasus	3	22	10	10	10
4	Jumlah petugas perlindungan masyarakat	Orang	390	390	279	279	279
5	Jumlah kendaraan patroli terpadu	Unit	5	5	5	5	5
6	Tingkat persentase pengawasan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilu	Persen	99,59	100	100	100	100
7	Tingkat persentase menurunnya kasus konflik sosial	Persen	100	100	100	100	100
8	Tingkat persentase kasus penyelenggaraan demokrasi	Persen	100	100	100	100	100
9	Tingkat persentase perubahan perilaku terhadap bahaya napza	Persen	50	89	94	98	98
10	Terselenggaranya Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana melalui Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana, Mitigasi Penanggulangan Bencana, dan Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Persen	85	85	50	100	100
11	Meningkatkan Pelayanan di Bidang Penanggulangan Bencana melalui ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai	Persen	72,96	36,05	75	100	100
12	Tersedianya logistik dan obat-obatan baik di kawasan rawan bencana maupun di kawasan tanggap darurat bencana	Persen	66,53	83,9	100	100	100
13	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100
14	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	85.950	118.281	1.773	1.458	3.288
15	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	18.287	118.281	1.180	3.376	5.594
16	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	4	10	8	0	202

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
17	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100
18	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	14	18

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur, 2025

a. Persentase penegakan PERDA
   Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) adalah indikator yang mengukur sejauh mana peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) telah diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat serta diambil tindakan tegas jika terjadi pelanggaran. Indikator ini penting untuk menilai efektivitas regulasi lokal dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Capaian penegakan ketertiban di Kabupaten Belitung Timur tahun 2021-2024 sebesar 100%. Secara umum peraturan telah diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat Kabupaten Belitung Timur.
b. Cakupan patroli petugas Satpol PP
   Cakupan Patroli Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur dengan patroli sebanyak 720 kali pada tahun 2021. Patroli petugas Satpol PP mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 360 dan 328 kali di tahun 2024.
c. Jumlah tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, keindahan (K3) yang tertangani
   Jumlah tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, keindahan (K3) yang tertangani sebagai tolak ukur efektivitas pemerintah daerah dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan keindahan lingkungan. Indikator ini untuk menilai seberapa baik pemerintah daerah mampu menegakkan aturan dan menjaga kualitas hidup masyarakat. Penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, keindahan (K3) yang tertangani Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan di tahun 2022-2024.
d. Jumlah petugas perlindungan masyarakat
   Petugas perlindungan masyarakat, untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat. Jumlah petugas perlindungan masyarakat mengalami penurunan pada tahun 2022 dan nilainya tetap hingga 2024.
e. Jumlah kendaraan patroli terpadu
   Jumlah kendaraan patroli terpadu untuk menilai kapasitas pemerintah daerah atau instansi keamanan dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum. Kendaraan patroli terpadu digunakan oleh berbagai instansi, seperti kepolisian, satuan polisi pamong praja (Satpol PP), dan dinas perhubungan, untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah tertentu. Jumlah kendaraan patroli di Kabupaten Belitung Timur tidak ada perubahan selama lima tahun.
f. Tingkat persentase pengawasan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilu
   Indikator yang mengukur sejauh mana aktivitas pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu dilakukan oleh pihak yang berwenang. Ini mencakup pengawasan terhadap proses pemilihan umum, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan dan pasca-pemilihan, untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi Kabupaten Belitung Timur terhadap

pelaksanaan pemilu umumnya berjalan 100% meskipun pada tahun 2020 terjadi sedikit penurunan dengan capaian sebesar 99,59 persen.

g. Tingkat persentase menurunnya kasus konflik sosial dan kasus penyelenggaraan demokrasi.
   Tingkat persentase menurunnya kasus konflik sosial sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana upaya pemerintah dan masyarakat berhasil dalam mengurangi jumlah konflik sosial dalam periode tertentu. Konflik sosial umumnya mencakup jenis perselisihan, termasuk konflik antar kelompok masyarakat, konflik agama, konflik etnis, dan konflik yang berhubungan dengan sumber daya alam atau kepemilikan lahan.
h. Tingkat persentase kasus penyelenggaraan demokrasi mengacu dari hasil evaluasi seberapa besar proses penyelenggaraan demokrasi berjalan dengan baik. Evaluasi penyelenggaraan demokrasi mencakup integritas pemilihan umum, partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak politik dasar. Kasus penurunan konflik sosial sudah dapat diturunkan dengan capaian 100% dan kasus penyelenggaraan demokrasi berjalan dengan baik tidak terjadi pelanggaran dengan capaian 100%.
i. Tingkat persentase perubahan perilaku terhadap bahaya napza
   Tingkat persentase perubahan perilaku terhadap bahaya narkoba (napza) untuk mengukur sejauh mana pendekatan pencegahan dan edukasi berhasil mengubah perilaku individu dan masyarakat dalam menghadapi bahaya narkotika dan zat adiktif lainnya. Perubahan perilaku ini meliputi pengurangan penggunaan, penolakan untuk mencoba, atau peningkatan kesadaran terhadap risiko dan dampak negatif dari narkoba. Perubahan perilaku bahaya narkoba Kabupaten Belitung Timur tahun 2019 menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian 100%. Namun setelah tahun 2019 capaian kinerja penanggulangan bahaya narkoba mengalami penurunan.
j. Terselenggaranya Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana melalui Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana, Mitigasi Penanggulangan Bencana, dan Penyusunan Kajian Risiko Bencana
k. Kegiatan yang dibuat pemerintah untuk mengurangi dampak bencana alam atau bencana yang terkait manusia yang dapat terjadi di suatu wilayah. Kegiatan tersebut terselenggara dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang dilihat penanganan risiko bencana dengan capaian sebesar 100% di tahun 2024.
l. Meningkatkan Pelayanan di Bidang Penanggulangan Bencana melalui ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai
m. Pelayanan pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam penanggulangan bencana sudah memadai dengan melengkapi ketersediaan sarana dan prasarana. Kesesuaian pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam penanggulangan bencana dilihat dari capaian kinerja sebesar 100%.
n. Tersedianya logistik dan obat-obatan baik di kawasan rawan bencana maupun di kawasan tanggap darurat bencana
o. Pelayanan umum yang dilakukan pemerintah Kabupaten Belitung Timur sudah menyediakan logistik dan obat-obatan sesuai SPM. Ketersediaan logistik dan obat-obatan dilihat dari capaian kinerja tahun 2022-2023 sebesar 100%.
q. Indeks kepuasan masyarakat terkait dengan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 adalah 82,9.
s. Persentase cakupan perlindungan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mencapai angka 60%.

t. Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mencapai angka 50%.
w. Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran serta cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 mencapai angka 100%.

II.1.D.6 Urusan Sosial

Urusan sosial yang dijalankan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa semua individu, terutama yang rentan dan kurang beruntung, memiliki akses ke sumber daya, layanan, dan peluang yang diperlukan untuk hidup dengan layak. Perkembangan pencapaian urusan ini di Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

TABEL 2. 93 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	96,58	98,66	60,05	103,09	103,09
2	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Persen	NA	100	100	100	100
3	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	NA	95,29	58	100	100
4	Persentase PMKS skala kabupaten/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama(KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Persen	100	0	0	0	0
5	Persentase panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	0	NA	NA	NA	NA
6	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (SPM)	Persen	100	NA	NA	NA	100
7	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (SPM)	Persen	100	NA	NA	NA	NA
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinsos PPPA Kabupaten Belitung Timur, 2025

a) Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kabupaten/kota sebesar 103,09. yang sudah memperoleh bantuan sosial dari pemerintah Kabupaten Belitung untuk memenuhi kebutuhan dasar.
b) Capaian potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan sebesar 100% dari tahun 2021-2024. Hal ini, pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mencakup berbagai aspek dari ekonomi, sosial, budaya, hingga lingkungan.
c) Capaian PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 100%. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

sudah memenuhi kebutuhan dasar berupa bantuan sosial untuk kelompok PPKS.

d) Capaian pemerintah dalam memberikan jaminan sosial terhadap penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial pada tahun 2020-2023 sebesar 100%. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah memenuhi capaian jaminan sosial untuk penyandang cacat dan lanjut usia.
e) Capaian persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), keluarga dan masyarakat yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti di Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 mencapai angka 100%
f) Capaian persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial di Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 mencapai angka 100%
g) Persentase taman makam pahlawan yang mendapat pengolahan secara baik di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mencapai angka 100%.

II.1.D.7 Fokus Urusan Non Wajib Pelayanan Dasar

Urusan pemerintah wajib non pelayanan dasar mencakup bidang urusan tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

1) Urusan Bidang Pertanahan

Berdasarkan data capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pertanahan tahun 2020–2024, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan di beberapa indikator.

TABEL 2. 94 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PERTANAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	99,37	100	0	33,66	78,19
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umumn	Persen	0	0	0	1,39	100
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Persen	0	0	0	5,78	100
4	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	0	0	0	100	0

Sumber: Dinas PUPRPPRKP Kabupaten Belitung Timur, 2025

Persentase pemanfaatan tanah sesuai peruntukan di atas izin lokasi menunjukkan capaian tinggi pada tahun 2020 (99,37%) dan 2021 (100%), namun turun drastis menjadi 0% di 2022. Setelah itu, meningkat kembali menjadi 33,66% di 2023 dan 78,19% di 2024. Hal ini mengindikasikan adanya kendala pada 2022, yang kemungkinan terkait perizinan, penertiban,

atau pendataan ulang. Persentase penetapan tanah untuk fasilitas umum stagnan di 0% pada 2020–2022, mulai menunjukkan progres pada 2023 (1,39%), dan melonjak signifikan menjadi 100% di 2024. Kenaikan ini menandakan adanya percepatan penetapan tanah fasilitas umum pada tahun terakhir periode. Tersedianya lokasi pembangunan untuk penanaman modal juga mengalami pola serupa, yakni tidak ada capaian di 2020–2022, baru mencapai 5,78% di 2023, dan meningkat drastis ke 100% di 2024. Ini mengindikasikan fokus yang lebih besar pada fasilitasi investasi di tahun terakhir.
Penanganan sengketa tanah garapan melalui mediasi hanya menunjukkan capaian pada 2023 (100%), sementara di tahun-tahun lain nihil. Hal ini menunjukkan adanya upaya penyelesaian sengketa yang masif di 2023 namun tidak berlanjut pada 2024, yang bisa jadi karena sengketa telah terselesaikan atau adanya pergeseran metode penyelesaian. Secara keseluruhan, kinerja bidang pertanahan menunjukkan capaian puncak di 2024 untuk hampir semua indikator, mengindikasikan adanya percepatan dan penyelesaian target di akhir periode, meskipun terdapat ketidakstabilan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.

2) Urusan Tenaga Kerja

Pelayanan pemerintah dalam urusan tenaga kerja mencakup rasio penduduk yang bekerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Rasio penduduk yang bekerja adalah persentase penduduk usia kerja yang memiliki pekerjaan. Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar bagian dari populasi usia kerja yang benar-benar bekerja. Selain itu, rasio penduduk bekerja mengukur seberapa baik pasar tenaga kerja dalam menyediakan pekerjaan bagi penduduk usia kerja. TPAK adalah persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. TPAK digunakan untuk mengukur partisipasi penduduk tidak hanya mereka yang bekerja tetapi juga mereka yang menganggur namun aktif mencari pekerjaan.

Berdasarkan tabel di bawah ini, Kabupaten Belitung Timur memiliki persentase besar terhadap rasio penduduk yang bekerja. Hal ini menunjukkan Kabupaten Belitung Timur memiliki persentase yang tinggi dalam menyediakan pekerjaan bagi penduduk usia kerja. Nilai persentase TPAK Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan di tahun 2023, namun tidak sebesar di tahun 2020. Angka sengketa pengusaha dan pekerja mengalami penurunan di Kabupaten Belitung Timur. Hal ini pemerintah Kabupaten Belitung Timur sudah memberikan pelayanan lebih baik sehingga hubungan pengusaha dan pekerja semakin kondusif. TPT mengukur proporsi angkatan kerja yang menganggur, yaitu orang- orang yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari pekerjaan dan siap untuk bekerja. Nilai TPT Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan yang mencerminkan penduduk yang sedang aktif mencari pekerjaan semakin berkurang. Persentase pengangguran yang setengah mengalami penurunan drastis dari tahun 2021 ke tahun 2022 dan 2023. Penurunan signifikan ini menunjukkan peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja dan pengurangan jumlah orang yang menganggur sebagian, mencerminkan stabilitas yang lebih baik dalam pasar kerja.

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami peningkatan pada tahun 2023. Peningkatan ini menandakan bahwa lebih banyak penduduk usia kerja mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan mengalami

penurunan sebesar 79,60% pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan perlunya meningkatkan kesadaran dan akses terhadap program jaminan sosial bagi tenaga kerja, sehingga mereka dapat memperoleh perlindungan sosial yang memadai.

Selanjutnya, meskipun ada upaya untuk sertifikasi kompetensi, persentase tenaga kerja yang terserap dengan sertifikasi mengalami penurunan pada tahun 2023. Walaupun pada tahun 2024 angkanya menjadi naik, Ini menunjukkan inkonsistensi penyerapan tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi, yang memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa tenaga kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi mengalami penurunan pada tahun 2023. Ini menunjukkan perlunya evaluasi dan peningkatan kembali program pelatihan berbasis kompetensi untuk memastikan tenaga kerja memperoleh keterampilan sesuai dengan tuntutan pasar kerja.Terjadi peningkatan persentase tenaga kerja formal, menandakan adanya pergeseran positif menuju pekerjaan formal yang memberikan perlindungan dan manfaat kerja yang lebih baik dibandingkan dengan pekerjaan informal. Sementara itu, persentase tenaga kerja informal di sektor pertanian tetap stabil pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan dominasi pekerjaan informal dalam sektor pertanian yang mungkin memberikan tingkat kesejahteraan dan perlindungan kerja yang rendah.

Indikator lainnya yang menjadi gambaran kinerja bidang tenaga kerja seperti: 1) indeks kepuasan masyarakat; 2) persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja; 3) persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi; 4)persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota; 5) jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial. Capaian dari indeks kepuasan masyarakat terkait kinerja bidang tenaga kerja adalah 83,25, sedangkan capaian persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja mencapai angka 88,89%. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi mencapai angka 3,72%. Capaian persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota adalah 73,33 dan jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial berjumlah 2.877 pekerja. Capaian dari indikator-indikator tersebut tergolong sudah baik, walaupun begitu perlu ditingkatkan kinerjanya.

TABEL 2. 94 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN TENAGA KERJA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	96,07	96,22	97,5	97,53	97,59
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	71,33	69,23	67,36	70,48	70,56
3	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persen	9	7	10	5	5
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,93	3,78	2,50	2,41	2,63
5	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi yang terserap	Persen	2,43	2,6	2,55	2,57	3,72
6	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Persen	84,7	84,85	84,95	79,6	80,67

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
7	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Persen	68,52	68,75	65,67	68,78	70,56
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	24,27	35	27,27	27,27	27,27
9	Persentase Tenaga Kerja Formal	Persen	49,55	50,55	49,55	50,55	52,64
10	Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian	Persen	NA	4	24,73	24,73	24,73
11	Persentase Setengah Pengangguran	Persen	NA	28,2	0,47	0,47	3,51
12	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	1,41	1,76	1,44	31,25	88,88
13	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah	80,86	85,64	88,76	86,11	57,87
14	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	37,11	34,28	34,43	33,54	2,05
15	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	persen	35	29,16	57,85	95,23	73,33

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Belitung Timur, 2025

3) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan, pencegahan, serta pelayanan bagi perempuan korban kekerasan. Selain itu upaya perlindungan anak diarahkan pada pemenuhan hak, pencegahan, pelayanan, dan penanganan masalah yang dihadapi anak.

TABEL 2. 95 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	45.37	NA	NA	NA	NA
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	54,36	NA	NA	NA	NA
3	Rasio KDRT	Persen	9 : 42.922	1 : 62.311	2 : 63.381	4 : 63.809	4 : 63.809
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	58,09	52,46	48,11	50,58	50,58
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Persen	100	100	100	100	100
6	Anugerah Parahita Ekapraya	Persen	NA	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama
7	Kabupaten Layak Anak	Persen	NA	Pratama	Madya	Madya	Madya

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
8	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	0,44	3,19	0,79	1,43	0,31
9	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	Persen	0,038	0,025	100	100	100
10	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	32,68	16,13	17,47	18,77	21,73

Sumber: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Belitung Timur, 2025

a) Perempuan aktif terlibat dalam berbagai tingkatan dan posisi di lembaga-lembaga pemerintah, termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sektor swasta memiliki angka yang lebih tinggi daripada partisipasi perempuan di sektor lembaga pemerintahan. Perempuan di Kabupaten Belitung Timur masih banyak bekerja di sektor jasa usaha dan perdagangan seperti *online shop*, usaha skala kecil dan menengah, serta pertokoan atau ritel.
b) Rasio kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menunjukkan variasi dari tahun ke tahun: terdapat 9 kasus dari 42.922 rumah tangga pada tahun 2020, kemudian mengalami penurunan menjadi 1 kasus dari 62.311 rumah tangga pada tahun 2021. Pada tahun 2022, tercatat 2 kasus dari 63.381 rumah tangga, dan empat kasus dari 63.809 rumah tangga pada tahun yang sama.
c) Partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat signifikan mencapai 50,58% pada tahun 2023. Partisipasi ini mengacu pada persentase perempuan dalam usia kerja yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik sebagai pekerja maupun dalam mencari pekerjaan. Peningkatan ini mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi yang meningkat.
d) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan mencapai 100% selama lima tahun terakhir. Kabupaten Belitung Timur didukung oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), yang dikelola oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk memastikan penanganan pengaduan perlindungan perempuan dan anak.
e) Anugerah Parahita Ekapraya di Kabupaten Belitung Timur telah memperoleh kategori "Pratama" secara berturut-turut selama tiga tahun, yaitu dari tahun 2021 hingga 2023. Prestasi ini menunjukkan konsistensi dalam usaha untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Namun, diperlukan peningkatan lebih lanjut untuk mencapai kategori yang lebih tinggi.
f) Kabupaten Belitung Timur berhasil meningkatkan status Kabupaten Layak Anak menjadi kategori "Madya" pada tahun 2022 dan 2023. Peningkatan ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Perubahan dari kategori "Pratama" ke "Madya" menunjukkan peningkatan dalam penyediaan fasilitas, kebijakan, dan program yang mendukung kesejahteraan anak- anak.

g) Rencana aksi daerah pengarusutamaan gender (RAD PUG) pada Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mencapai angka 80%.
h) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mencapai angka 100%.
i) Persentase keluarga yang terlayani terhadap layanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Kabupaten Belitung Timur di tahun 2024 mencapai angka 100%.
j) Persentase desa ramah anak pada Kabupaten Belitung Timur di tahun 2024 mencapai angka 2,56%.
k) Persentase korban kekerasan anak yang terlayani di tahun 2024 mencapai angka 100%.

4) Urusan Pangan

Pelayanan pemerintah dalam mengelola urusan pangan meliputi evaluasi ketersediaan pangan pokok, peningkatan cadangan pangan, evaluasi skor Pola Pangan Harapan (PPH), serta pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Perkembangan dalam manajemen urusan pangan di Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

a) Ketersediaan dan persentase pangan utama mengalami penurunan akan mempengaruhi kebutuhan konsumsi penduduk. Penurunan persediaan pangan dapat diakibatkan kurangnya ketersediaan pangan utama.
b) Penguatan cadangan pangan mengalami peningkatan setelah tahun 2021, pemerintah melakukan penguatan cadangan untuk menjaga pangan dalam menghadapi berbagai tantangan seperti bencana alam, perubahan iklim, gangguan pasokan, dan ketidakstabilan ekonomi.
c) Nilai PPH menunjukkan perkembangan positif yang dilihat dari skor PPH yang terus meningkat. Peningkatan skor PPH mengindikasikan terjadi peningkatan pada kualitas gizi dan keragaman konsumsi pangan di Kabupaten Belitung Timur.
d) Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah menangani daerah rawan dengan capaian 100% per tahun. Penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-program sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani. Ketahanan pangan di Kabupaten Belitung Timur dengan cara penanganan rawan pangan dan pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan di suatu wilayah sedini mungkin.
e) Skor pola pangan harapan pada Kabupaten Belitung Timur di tahun 2024 mencapai angka 85,3, jika dibandingkan dengan capaian nasional mencapai angka 93,5 dan capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 90,6, Kabupaten Belitung Timur masih berada di bawah angka nasional dan provinsi. Hal tersebut memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan skor pola pangan harapan.
f) Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan di Kabupaten Belitung Timur mencapai angka 91,86%.

TABEL 2. 96 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan pangan utama	Kg/tahun/ 1000 penduduk	100.910	4.588,97	4.078,97	1.793,99	35.452

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase ketersediaan pangan utama	Persen	37,77	41,01	36,09	NA	NA
3	Ketersediaan Energi perkapita	kkal/kapita/ hari	NA	2.637	2.549	2.596	2.708
4	Ketersediaan Protein perkapita	gram/kapita /hari	NA	130,21	149,38	150,84	155,17
5	Penguatan cadangan pangan	Ton	NA	30	40	40	40
6	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	Angka	NA	82,3	82,7	85,4	85,3
7	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	NA	95,24	97,42	86,43	91,86
8	Persentase penurunan jumlah penduduk rentan rawan pangan	Persen	NA	- 0,56	0,61	-5,12	2,54

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, 2025

5) Urusan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan urusan lingkungan hidup fokus terhadap kualitas lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan. Kondisi lingkungan hidup dapat dilihat dari persentase penanganan sampah, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan. Perkembangan lingkungan di Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut:

TABEL 2. 97 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pengelolaan sampah	Persen	65,68	62,34	71,69	74,25	67,92
2	Indeks Kualitas Air	Nilai	50	59,52	59,09	61,56	54
3	Indeks Kualitas Udara	Nilai	97,87	95,15	94,50	95,23	92,33
4	Indeks Kualitas Lahan	Nilai	57,29	43,18	43,18	43,89	45,95
5	Persentase ketersediaan data dan informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup	Persen	75	NA	NA	NA	NA
6	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha terhadap aturan lingkungan hidup	Persen	65	85	90	86	80
7	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Nilai	-	0,36	0,36	0,51	0,51

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur, 2025

a) Persentase penanganan sampah memiliki trend naik, mencerminkan peningkatan dalam upaya pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam manajemen sampah. Pengelolaan sampah oleh penduduk juga semakin berkembang, mencakup pengumpulan, pemilahan, daur ulang, pengomposan, pembakaran, dan pembuangan ke tempat pembuangan akhir (TPA). Walaupun begitu, perlu adanya perhatian dari Kabupaten Belitung Timur dikarenakan trend yang menurun pada tahun 2023-2024.
b) Indeks kualitas air menunjukkan perbaikan karena umumnya berada dalam kategori tercemar ringan di Kabupaten Belitung Timur. Pencemaran air juga menurun dari tahun ke tahun.

c) Indeks kualitas udara Kabupaten Belitung Timur selama tahun 2019-2023 diklasifikasikan sebagai sedang, dengan skor di rentang 51-100, menunjukkan kondisi udara yang moderat.
d) Indeks Kualitas Lahan (IKL) digunakan untuk menilai kondisi dan produktivitas lahan berdasarkan faktor lingkungan dan manajemen. IKL Kabupaten Belitung Timur tahun 2019-2023 mencapai kategori sedang, menggambarkan kondisi lahan yang memadai untuk mendukung pertanian, hutan, dan penggunaan lainnya.
e) Persentase kepatuhan penanggung jawab usaha terhadap aturan lingkungan hidup mengalami peningkatan pada tahun 2022, namun mengalami penurunan pada tahun 2023. Masih ada beberapa penanggung jawab usaha yang kurang memperhatikan dan mematuhi aturan lingkungan hidup.
f) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan indikator penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Indikator ini mencerminkan kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan aktivitas ekonomi tanpa mengalami kerusakan atau degradasi yang signifikan. Peningkatan nilai indikator daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada tahun 2023 menunjukkan upaya dan keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Belitung Timur.
g) Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mencapai angka 32,5%.
h) Persentase ketaatan perusahaan dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mencapai angka 90%.
i) Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan Kabupaten Belitung Timur di tahun 2024 mencapai angka 35%.
j) Terfasilitasi pendampingan pengakuan MHA pada Kabupaten Belitung Timur di tahun 2024 mencapai angka 100%
k) Persentase peningkatan pengetahuan teknis tentang lingkungan hidup bagi masyarakat di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mencapai angka 90%.
l) Persentase capaian penghargaan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 mencapai angka 100%

6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan administrasi dilakukan pemerintah Kabupaten Belitung Timur menjadi bagian bentuk tertib administrasi. Penyelenggaraan urusan pencatatan sipil untuk menata dan mengelola administrasi kependudukan. Kondisi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terdapat pada tabel di bawah ini.

TABEL 2. 98 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2019 – 2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	1,22	1,93	1,22	1,48	1,45	0,91
2	Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	98,97	96,15	100,51	101,24	103,01	99,64
3	Perekaman KTP Elektronik	Persen	97,85	99,04	100	99,63	98,92	99,27
4	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	Persen	95,62	89,47	91	91,38	91,61	92,29
5	Penerbitan akta kematian	Persen	98,22	96,46	100	89,38	100	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	Penerbitan akta perkawinan	Persen	100	100	100	100	100	100
7	Penerbitan akta perceraian	Persen	100	100	100	100	100	100
8	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	64,45	71,23	80	77,14	83,14	85,03
9	Penyajian data kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	100
10	Persentase pemanfaatan data oleh stakeholders	Persen	100	100	NA	NA	NA	100
11	Jenis inovasi pelayanan	Persen	100	100	100	100	0	0
12	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	0	0	30	52,17	52,17	0

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, 2025

a) Laju pertumbuhan penduduk (LPP) mengacu pada tingkat perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah tertentu selama periode tertentu, umumnya dinyatakan dalam persentase tahunan. Laju pertumbuhan Kabupaten Belitung Timur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan namun peningkatan tersebut berfluktuatif. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2023 yakni sebesar 1,61% dan terendah pada tahun 2020 sebesar 0,46%. Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh 4 peristiwa yaitu kelahiran, kematian, pindah masuk dan pindah keluar.
b) Pengelolaan administrasi kependudukan di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam beberapa indikator. Salah satu indikator adalah perekaman KTP Elektronik yang menunjukkan pencapaian sangat tinggi, mencapai 100% pada tahun 2021, meskipun menurun pada tahun 2022 dan 2023 namun pada tahun 2024 kembali mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk wajib KTP telah memiliki KTP Elektronik, yang penting untuk keperluan administrasi dan pelayanan publik.
c) Cakupan kepemilikan kartu keluarga sudah mencapai 100 persen yang artinya seluruh keluarga di Kabupaten Belitung Timur sudah memiliki Kartu Keluarga. Hal ini juga menunjukkan kesadaran penduduk terhadap kepemilikan kartu keluarga semakin meningkat. Begitu juga dengan akta kelahiran, pemerintah telah menyelenggarakan pembuatan akta kelahiran dan akta kematian yang terus meningkat dalam setiap tahunnya.
d) Penerbitan akta perkawinan, akta perceraian, dan penyajian data kependudukan juga menunjukkan pencapaian yang konsisten pada angka 100%. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik dari pemerintah daerah dalam mengelola administrasi kependudukan.
e) Persentase anak usia 0-16 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) terus meningkat, walaupun pada tahun 2022 sempat mengalami penurunan namun pada tahun 2023 dan 2024 kembali naik. Peningkatan ini menunjukkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan kepemilikan KIA, yang memiliki peran penting untuk memenuhi perlindungan dan hak-hak anak. Persentase kepemilikan kartu identitas anak tahun 2024 mencapai angka 85,03%.
f) Persentase pemanfaatan data oleh stakeholders untuk menggunakan data kependudukan terus terjaga di angka 100 persen. Artinya seluruh stakeholder terutama di lingkup Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

sudah menggunakan data kependudukan sebagai rujukan dalam proses perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelayanan publik.

g) Untuk mempermudah masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan, Disdukcapil telah melakukan berbagai inovasi. Sampai dengan tahun 2022 terdapat 11 inovasi yang sudah dilakukan oleh Disdukcapil, namun pada tahun 2023 dan 2024 Disdukcapil tidak melakukan inovasi tetapi fokus kepada pelaksanaan inovasi yang sudah ada.
h) Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama terjadi peningkatan pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran untuk memanfaatkan data kependudukan untuk berbagai keperluan seperti perencanaan pembangunan, penganggaran, pelayanan publik, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Namun semenjak dikeluarkannya Permendagri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, terdapat penambahan persyaratan krusial untuk akses data kependudukan yaitu kepemilikan sertifikasi ISO 27001 bagi instansi/lembaga pengguna. Persyaratan ini sangat sulit untuk dipenuhi karena selain membutuhkan anggaran yang besar, setiap instansi/lembaga juga harus menerapkan seluruh standar keamanan informasi yang disyaratkan. Dengan adanya persyaratan tersebut tidak ada lagi lembaga/instansi di Kabupaten Belitung Timur yang mengajukan permohonan akses data kependudukan.
i) Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi kependudukan Disdukcapil Kabupaten Belitung Timur di tahun 2024 mencapai nilai 92,67 yang artinya layanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Belitung Timur sudah sangat baik.
j) Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 mencapai angka 7,40%.
k) Rasio pasangan non muslim ber-akta kawin di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mencapai angka 0,82.
l) Rasio pasangan non muslim berakta cerai di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mencapai angka 0,43.
m) Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi penduduk yang meninggal di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mencapai angka 99,95%.
n) Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi anak usia 0-17 tahun di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mencapai angka 99,81%.
o) Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi penduduk yang menikah di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mencapai angka 82,12%.
p) Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi penduduk yang bercerai di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mencapai angka 43,12%.
q) Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mencapai angka 100%.
r) Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mencapai angka 100%.

7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemberdayaan ini dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat sangat berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 2. 99 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Desa yang menyusun RKPDes per tahun	Desa	39	39	39	39	39	39
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan	Kelompok	39	39	39	39	39	39
3	Jumlah PKK aktif	PKK	47	47	47	47	47	47
4	Jumlah Posyandu aktif	Posyandu	133	134	134	134	134	134
5	Persentase aparatur desa yang meningkat kapasitasnya	Persen	100	100	100	100	100	100
6	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Kelompok	39	39	39	39	39	39
7	Profil desa sesuai standar	Desa	39	39	39	39	39	39
8	Persentase penyusunan dan pengelolaan keuangan desa yang terfasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100
9	BUMDes yang terbentuk	BUMDes	37	39	39	39	39	39
10	Posyantek aktif	Kecamatan	1	1	1	2	3	3
11	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	0	0	100	100	100	100
12	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	0	0	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemdes PPKB Kabupaten Belitung Timur, 2025

8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemerintah melaksanakan pengendalian penduduk melalui pengaturan dan perencanaan keluarga berencana. Kebijakan pemerintah untuk memberi perubahan kuantitas penduduk melalui perubahan jumlah, struktur, komposisi, dan persebaran penduduk. Perubahan yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Kondisi penduduk di Kabupaten Belitung Timur menekankan pada keluarga berencana:

TABEL 2. 100 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	2	2	1,74	NA	2
2	Total Fertility Rate (TFR)	Per perempuan	2,22	2,2	1,74	1,99	2,07

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	30	30	20	30	18,18
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan)yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	6,6	6,6	6,6	6,6	12,12
5	Rasio Akseptor KB	Persen	44	43	82,68	82,68	NA
6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	Per 1.000	113	89,7	82,68	83,54	76,7
7	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 – 19) per 1.000 perempuan usia 15 – 19 tahun (ASFR 15 – 19)	Perempuan	39,83	37	30,56	31,52	37,1
8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*)	Persen	7,95	8,3	12,59	5,5	5,1
9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	13,28	15,3	15,18	13,85	18,9
10	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	88,64	62	76,07	76,07	NA
11	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	58,97	58,97	58,97	100	39
12	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100
13	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	22,59	23	21,1	19,9	20,8
14	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persentase	89,7	89,7	76,08	81,93	76,4

Sumber: Dinas Pemdes PPKB Kabupaten Belitung Timur, 2025

9) Urusan Perhubungan

Pelayanan pemerintah dalam urusan perhubungan mencakup berbagai aspek untuk menjamin kelancaran dan keselamatan transportasi serta meningkatkan infrastruktur transportasi di suatu daerah. Tindakan pemerintah yang telah diimplementasikan dalam urusan perhubungan adalah sebagai berikut:

a) Jumlah arus penumpang angkutan umum berdasarkan jumlah jiwa dalam setiap tahunnya berfluktuasi. Perkembangan penumpang angkutan umum yang belum stabil dapat diakibatkan dari penduduk memiliki kendaraan sendiri.
b) Jumlah uji KIR angkutan umum mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 72 uji KIR di tahun 2022 menjadi 423 KIR pada tahun 2023.
c) Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan darat mengalami peningkatan sampai tahun 2020 sebesar 18,53%

d) Persentase layanan angkutan darat tahun 2019 sebesar 0,02% mengalami peningkatan layanan menjadi 0,17% di tahun 2020. Namun layanan angkutan dari setelah tahun 2020-2023 mengalami penurunan.
e) Kepemilikan KIR angkutan umum mencapai angka 18 angkutan umum pada tahun 2020.
f) Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum meningkat di tahun 2023 menjadi 31,46%.
g) Lama pengujian kelayakan angkutan umum/KIR tidak mengalami perubahan masih dalam 30 menit untuk uji kelayakan.
h) Rasio konektivitas antar wilayah menunjukkan penurunan pada tahun 2022 dan 2023. Meskipun terdapat fluktuasi, peningkatan secara keseluruhan mencerminkan upaya pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur jalan dan transportasi untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah.
i) Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan berlalu lintas meningkat pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam infrastruktur jalan yang dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
j) Persentase pemenuhan infrastruktur pelayaran terjadi penurunan menjadi pada tahun 2022, dan kembali meningkat pada tahun 2023.
k) Jumlah penumpang yang melalui terminal, dermaga, atau pelabuhan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
l) Indeks kepuasan masyarakat (IKM) mencapai angka 80,2.
m) Konektivitas darat di Kabupaten Belitung Timur mencapai angka 471,5 km.
n) Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal di Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 mencapai angka 15%.
o) Konektivitas laut di Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 mencapai angka 2 unit.

TABEL 2. 101 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jiwa	8.738	13.188	67.988	18.353	18.353
2	Jumlah uji KIR angkutan umum	Angka	1181	0	72	423	423
3	Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan darat	Persen	18,53	NA	NA	NA	NA
4	Persentase layanan angkutan darat	Persen	0,17	0,13	0,03	0,02	0,02
5	Kepemilikan KIR angkutan umum	Angka	18	NA	NA	NA	NA
6	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	NA	0	5,54	31,46	31,46
7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum/KIR	Menit	30	30	30	30	30
8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Rupiah	170.000	170.000	170.000	170.000	-
9	Pemasangan rambu lalu lintas darat	Unit	427	956	1290	1110	1110
10	Persentase angkutan umum laik jalan	Persen	45,42	NA	NA	NA	NA

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
11	Persentase pembangunan pelabuhan orang dan barang	Persen	NA	33,33	33,33	33,33	33,33
12	Rasio konektivitas antar wilayah	Persen	45,9	52,2	49,5	48,5	63,1
13	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan berlalu lintas	Persen	9,93	12	14,49	14,77	14,77
14	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pelayaran	Persen	56,79	60,49	48,21	60,94	60,94
15	Jumlah penumpang yang melalui Terminal/Dermaga /Pelabuhan	Orang	8.738	9.861	20.867	22.890	22.890

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur, 2025

10) Urusan Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan pemerintah dalam urusan Komunikasi dan Informatika mencakup berbagai aspek strategis dan operasional untuk mengatur, mengembangkan, dan mengelola infrastruktur serta layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Perkembangan kinerja urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut:

a) Indeks Standar Pelaksanaan Birokrasi Elektronik (SPBE) sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penerapan sistem birokrasi elektronik di suatu negara atau lembaga pemerintah. Indeks SPBE Kabupaten Belitung Timur meningkat pada tahun 2023. Peningkatan indeks SPBE mencerminkan pemerintah atau lembaga publik telah mengadopsi dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses administratif
b) Pelayanan informasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk kebutuhan IKM mencapai 86,11% pada tahun 2023. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, artinya pelayanan pemerintah dalam informasi semakin transparan untuk kepentingan IKM.
c) Persentase digitalisasi layanan administrasi pemerintahan menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023. Capaian ini menunjukkan upaya pemerintah dalam modernisasi sistem administrasi melalui penggunaan teknologi digital, yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Serupa dengan digitalisasi layanan administrasi pemerintahan, digitalisasi layanan publik juga menunjukkan peningkatan. Digitalisasi layanan publik ini penting untuk memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah, seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, dan layanan lainnya.
d) Kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah terjadi dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas pemerintah dalam menyampaikan informasi yang relevan dan berkualitas kepada masyarakat, serta transparansi dalam menjalankan kebijakan dan program prioritas.
e) Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah di Kabupaten Belitung pada tahun 2024 mencapai angka 82,35%.

TABEL 2. 102 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks SPBE	Nilai	3,15	2,15	2,70	3,56	4,16
2	Jumlah aparatur desa dan masyarakat yang memiliki kemampuan TIK	Orang	NA	NA	NA	NA	NA
3	Persentase digitalisasi layanan administrasi pemerintahan	Persen	NA	3,125	6,25	21,21	24,24
4	Persentase digitalisasi layanan publik	Persen	NA	3,125	6,25	21,21	24,24
5	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	Persen	-	79.90	84.23	86.11	82.35
6	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100	100	100
7	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	37,5	100	100	100
8	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	952	75,05	100	76,26	100

Sumber: Dinas Kominfo SP Kabupaten Belitung Timur, 2025

11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pengelolaan urusan koperasi dan usaha mikro kecil menengah bertujuan untuk memperkuat lembaga koperasi yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi pengelolaan pemerintah terhadap urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah di Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut:

a) Perizinan usaha mikro mengalami penurunan pada tahun 2023, masih banyak pelaku usaha yang belum melakukan perizinan usaha.
b) Jumlah usaha mikro, menengah dan kecil mengalami peningkatan di tahun 2023, peningkatan ini mempengaruhi positif untuk aktivitas perekonomian di Kabupaten Belitung Timur.
c) Peningkatan yang cukup signifikan jumlah UMKM sehingga dapat menggiatkan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Jumlah UMKM yang terus meningkatkan akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur.
d) Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan mencapai 100% pada tahun 2022 dan 2023. Capaian ini menunjukkan bahwa semakin banyak koperasi yang melakukan evaluasi kesehatan usaha mereka, yang berdampak positif pada keberlanjutan dan kepercayaan anggota koperasi.
e) Pada tahun 2019 hingga 2021, persentase koperasi yang mengikuti pelatihan mencapai 100%. Namun, terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini sejalan dengan persentase jumlah anggota koperasi telah mengikuti pelatihan perkoperasian, indikator ini

menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2023.

f) Dari tahun 2019 hingga 2022, persentase koperasi yang diberikan fasilitasi dukungan kemitraan mencapai 100%. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup drastis. Hal ini menunjukkan perlu adanya peningkatan dalam program pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi.

g) Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro mengalami peningkatan. Capaian ini mencerminkan peningkatan dalam pembentukan wirausaha mikro baru. Selain itu, persentase peningkatan wirausaha baru per tahunnya menunjukkan peningkatan hingga tahun 2023.

h) Persentase usaha mikro yang diinput ke dalam sistem ODS menunjukkan peningkatan hingga tahun 2023. Capaian ini menunjukkan upaya untuk memperbaiki pencatatan dan pengelolaan data usaha mikro.

i) Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra menunjukkan penurunan hingga tahun 2023. Hal ini menandakan perlunya peningkatan dalam program kemitraan untuk usaha mikro.

j) Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran menunjukkan peningkatan hingga tahun 2022, meskipun sedikit menurun pada tahun 2023. Upaya ini cukup penting dalam pengembangan usaha mikro.

k) Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan menurun pada tahun 2023. Hal serupa terjadi pada persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendamping. Penurunan ini menunjukkan perlu adanya perluasan mengenai fasilitas pelatihan dan pendampingan kepada usaha mikro.

l) Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi di Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 mencapai angka 59,28%.

m) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan di Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 mencapai angka 32,14%.

n) Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha di Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 mencapai angka 7,58%.

o) Persentase meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha di Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 mencapai angka 25,17%.

TABEL 2. 103 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2020 – 2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase koperasi aktif	Persen	62,9	64,84	56,43	56,46	54,29
2	Persentase koperasi sehat	Persen	NA	12,19	12	NA	NA
3	Persentase usaha mikro yang naik kelas	Persen	0,086	2	13,19	7,56	0,02
4	Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha	Persen	0,087	0,5	0,5	0,5	7,58
5	Jumlah usaha mikro	Usaha	12.061	12.713	16.098	18.834	20.369
6	Jumlah usaha menengah	Usaha	21	21	35	36	36
7	Jumlah usaha kecil	Usaha	328	329	379	410	410
8	Jumlah UMKM	Usaha	12.410	13.063	16.512	19.280	20.815

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
9	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Persen	NA	73,17	100	100	100
10	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	46,43	44,9	32,14
11	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Persen	2,06	2,1	0,66	0,67	0,61
12	Persentase koperasi yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	41,5	46,43
13	Persentase koperasi yang diberikan fasilitasi dukungan kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Persen	6,45	8	42,14	41,5	46,43
14	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persen	0,087	0,1	0,09	0,14	2,12
15	Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun	Persen	NA	0,09	0,09	0,14	0,14
16	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem Online Data System (ODS)	Persen	0,083	0,04	0.09	0,14	7,58
17	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Persen	NA	0,11	0,04	0,041	0,43
18	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Persen	0,008	0,045	0,075	0,072	0,1
19	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Persen	0,043	0,086	0,05	0,015	1,01
20	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendamping	Persen	0,084	0,09	0,4	0,14	0,43
21	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	34,15	32,03	44,30	51,80	71,05

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UKM Kabupaten Belitung Timur, 2025

12) Urusan Penanaman Modal

Penyelenggaraan urusan penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian di suatu daerah. Penanaman modal baik dalam bentuk PMDN maupun PMA dapat berdampak pada peningkatan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, dan penurunan tingkat kemiskinan. Perkembangan penyelenggaraan urusan modal di Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan indikator perkembangan, dapat diamati sebagai berikut:

TABEL 2. 104 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah total investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	98	150	189	251	345
2	Jumlah total nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Juta rupiah	346.571,70	472.466,20	1.373.500,76	616.139,60	1.068.106,79
3	Jumlah penerbitan izin	Dokumen izin	873	2607	2022	3431	2718
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan PTSP	Nilai	86,23	85,67	88,01	90,33	89,07
5	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	Persen	32,43	53,06	22,67	32,8	37,45
6	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	Persen	NA	83,4	84,55	94,7	96,57
7	Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Tingkat Kepatuhan	Sedang	Sedang	Kualitas Tinggi	Kualitas Tertinggi	Kualitas Tertinggi
8	Persentase data dan Informasi Perizinan	Persen	NA	83,33	100	100	100
9	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	109,34	36,32	190,70	-55,14	73,35

Sumber: Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Belitung Timur, 2025

a) Jumlah investor berskala nasional mengalami peningkatan sebesar 251 investor di tahun 2023 yang sebelumnya hanya mencapai 189 investor di tahun 2022. Jumlah investor mengalami peningkatkan dapat disebabkan oleh iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Belitung Timur.
b) Jumlah investasi di Kabupaten Belitung Timur menurun di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Penurunan jumlah investasi dipengaruhi oleh kurangnya daya tarik investasi sehingga rendahnya investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Belitung Timur.

c) Adanya iklim investasi yang kondusif dan daya tarik investasi yang meningkat mempengaruhi peningkatan penerbitan izin investasi. Jumlah izin investasi meningkat di tahun 2023 sebesar 660 jumlah izin.
d) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah, termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). IKM di Kabupaten Belitung Timur berkembang positif sebesar 89,5 indeks di tahun 2024. Berdasarkan IKM ini, kepuasan masyarakat meningkat terhadap pelayanan pemerintah.
e) Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM mengalami peningkatan di tahun 2023 sebesar 32,80%. Adanya peluang investasi menambah investor untuk berinvestasi di Kabupaten Belitung Timur.
f) Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu mengalami peningkatan di tahun 2023 sebesar 94,70%. Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Belitung Timur mendekati 100% dalam penyelesaian tepat waktu.
g) Rata-rata tingkat kepatuhan pelayanan di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan peningkatan hingga 2023. Pada tahun 2020 dan 2021, tingkat kepatuhan berada pada kategori "Sedang." Namun, pada tahun 2022, kualitas pelayanan meningkat menjadi "Kualitas Tinggi," dan pada tahun 2023, mencapai kategori "Tinggi." Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik.
h) Persentase integrasi data dan informasi perizinan dan non perizinan juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dan mencapai 100% pada tahun 2022 dan 2023. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil mengintegrasikan data dan informasi perizinan dan non perizinan, yang berdampak positif pada efisiensi administrasi.
i) Jumlah investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) (pelaku usaha) di Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 mencapai angka 345.
j) Persentase peningkatan investor yang berinvestasi di Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 mencapai angka 1,85%.
k) Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha di Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 mencapai angka 100%.
l) Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal di Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 mencapai angka 100%.

13) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan pemuda dalam kegiatan positif demi mendukung pembangunan. Capaian dalam urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Belitung Timur mencapai 100% selama 5 tahun terakhir. Jumlah pemuda yang terlibat dalam wirausaha mengalami peningkatan sebesar 84,44% pada tahun 2023, menunjukkan tren yang meningkatnya wirausaha di kalangan pemuda Kabupaten Belitung Timur. Kondisi di bidang olahraga, pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah melaksanakan pembinaan olahraga dengan pelatih yang bersertifikasi. Pembinaan atlet muda juga telah berhasil direalisasikan dengan capaian 100%. Selain itu, terdapat tambahan indikator persentase peran serta pemuda dalam organisasi kepemudaan yang mencapai angka 24,36% di tahun 2024. Selanjutnya, persentase pembinaan cabang keolahragaan mencapai angka 100% di tahun 2024. Terakhir, persentase organisasi pramuka aktif yang mencapai angka 100%.

TABEL 2. 105 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	100	100	83,87	100	100
2	Persentase wirausaha muda	Persen	2	2	1,8	84,44	3,1
3	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	100	100	100	100	100
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	85	100	100	83.90	83.90
5	Cakupan Pembinaan atlet muda	Persen	100	100	100	100	100
6	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	1,61	1,76	1,78	1,90	3,08
7	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	46,73	47,40	48,08	38,01	24,36
8	Peningkatan Prestasi Olahraga	Persen	0	95	102	12	1

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur, 2025

14) Urusan Statistik

Penyelenggaraan pemerintah untuk urusan statistik untuk menyediakan data dan informasi dalam mendukung pembangunan daerah. Persentase ketersediaan data Statistik Sektoral di Kabupaten Belitung Timur meningkat di tahun 2023 sebesar 71,43. Dalam hal pemerintah sudah menyediakan dan melengkapi kebutuhan data statistik bagi masyarakat. Selain itu, implementasi sistem data dan statistik yang terintegrasi di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan perkembangan yang positif hingga tahun 2023. Pada tahun 2020 dan 2021, sistem data dan statistik belum terintegrasi dengan baik, ditandai dengan status "Tidak Ada". Namun, pada tahun 2022 dan 2023, sistem ini telah berhasil diintegrasikan, yang ditunjukkan dengan status "Ada". Perkembangan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data. Terdapat indikator lainnya pada urusan statistik yaitu Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang mendapat predikat “Baik” di tahun 2024.

TABEL 2. 106 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN STATISTIK KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ketersediaan data Statistik Sektoral	Persen	57,14 %	57,14 %	57,14 %	71,43 %	71,43 %
2	Sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100
4	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Diskominfo SP Kabupaten Belitung Timur, 2025

15) Urusan Persandian

Pemerintah mengelola urusan persandian untuk menjaga keamanan informasi agar tidak dapat diakses atau dimengerti oleh pihak yang tidak

berwenang. Tingkat keamanan ini tercermin dari Indeks Kematangan Keamanan Informasi, yang digunakan sebagai alat untuk menilai sejauh mana suatu organisasi menerapkan praktik dan kebijakan keamanan informasi. Tujuan penggunaan indeks ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kematangan manajemen keamanan informasi dalam sebuah organisasi. Indeks kematangan keamanan informasi di Kabupaten Belitung Timur mencapai level II pada tahun 2021-2024. Pemerintah telah mengimplementasikan kontrol dasar terhadap keamanan informasi secara konsisten. Selain itu, terdapat indikator lainnya yang menggambarkan kinerja urusan persandian yaitu, tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah yang mendapat predikat "Level III" di tahun 2024.

TABEL 2. 107 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PERSANDIAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Tingkat kematangan keamanan informasi	Level	NA	Level II	Level II	Level II	Level III

Sumber: Diskominfo SP Kabupaten Belitung Timur, 2025

16) Urusan Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan kebudayaan bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah, serta meningkatkan apresiasi terhadap kegiatan dan pelaku seni budaya. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam urusan kebudayaan, seperti berikut:

a) Jumlah event seni dan budaya mengalami kenaikan di tahun 2023 sebanyak 44 kegiatan. Pelaksanaan event ini menjadi promosi pariwisata yang ada di Kabupaten Belitung Timur.
b) Sarana penyelenggaraan seni dan budaya meningkat menjadi delapan unit, seiring permintaan event seni dan budaya juga untuk mempromosikan pariwisata terjadi penambahan sarana untuk seni dan budaya.
c) Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 1434 buah yang tahun sebelumnya hanya mencapai 1421 buah.
d) Partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan menunjukkan tingkat yang stabil hingga tahun 2023, dengan persentase tetap di angka 55%. Walaupun tidak ada peningkatan dalam persentase partisipasi, stabilitas ini mencerminkan upaya yang konsisten dari pemerintah daerah dalam mempertahankan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kebudayaan.
e) Pengelolaan Museum dan Galeri Maritim di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan perkembangan hingga tahun 2023.
f) Indeks kepuasan masyarakat terkait dengan kinerja urusan kebudayaan Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 belum memiliki data.
g) Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mencapai angka 65.
h) Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan di Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 mencapai angka 55%.
i) Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal di Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 memiliki nilai 0.
j) Persentase warisan budaya yang dilestarikan di Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 mencapai angka 65%.

k) Persentase cagar budaya dan warisan tak benda yang ditetapkan di Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 mencapai angka 65%.
l) Persentase kunjungan wisata ke museum di Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 mencapai angka 65%.

TABEL 2. 108 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah event seni dan budaya	Kegiatan	33	48	30	44	40
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	8	8	9	9	9
3	Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Buah	1.647	1.421	1.421	1.434	1.434
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan	Persen	NA	55	55	55	55
5	Terwujudnya pengelolaan Museum dan Galeri Maritim	Museum/Galeri maritim	1	2	2	2	2
6	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	88,22	93,42	100	87,067	87,067

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur, 2025

17) Urusan Perpustakaan

Penyelenggaraan perpustakaan oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur bertujuan untuk menyediakan fasilitas yang mendukung akses informasi dan minat baca masyarakat. Selama 3 tahun terakhir, jumlah perpustakaan tetap stabil. Namun, jumlah pengunjung perpustakaan meningkat menjadi 57% pada tahun 2023, sementara perpustakaan desa mencapai 63% pada tahun 2019-2020. Selain itu, tingkat kegemaran membaca masyarakat di Kabupaten Belitung Timur mengalami fluktuasi, menunjukkan perlunya upaya lebih untuk terus mempromosikan budaya membaca secara berkelanjutan.

TABEL 2. 109 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perpustakaan daerah	Unit	0	1	1	1	1
2	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	86,11	12	54	57	57
3	Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	0,72	1,81	2,99	4,21	2,83pangan
4	Jumlah perpustakaan desa	Unit	18	18	18	18	20
5	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	74,67	74,7	69,01	69,34	69,34
6	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	23,04	23,02	23,02	83,04	84,09

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur, 2025

Penambahan indikator urusan perpustakaan adalah sebagai berikut:

a) Persentase perpustakaan yang dibina mencapai 35% pada tahun 2024. Persentase ini masih terbilang kecil, sehingga perlu ditingkatkan dalam tahun-tahun mendatang.
b) Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan mencapai 20% pada tahun 2024. Persentase ini juga masih terbilang kecil, sehingga perlu ditingkatkan dalam tahun-tahun mendatang.

18) Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung pengelolaan arsip yang efektif dan efisien. Kondisi pengelolaan arsip secara baku belum mengalami perubahan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan persentase pengelolaan arsip secara baku tetap di angka 47% pada tahun 2019. Sementara itu, peningkatan SDM pengelola kearsipan meningkat menjadi 94% pada tahun 2020 dan persentase perangkat daerah yang mengelola arsip meningkat menjadi 81% pada tahun 2020. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban nasional menunjukkan peningkatan meskipun sedikit menurun pada tahun 2023. Selain itu, tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami peningkatan yang signifikan dan mencapai 100% pada tahun 2023.

TABEL 2. 110 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEARSIPAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengelolaan arsip secara baku	Persen	NA	NA	NA	NA	NA
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Persen	94	NA	NA	NA	NA
3	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	81	NA	NA	NA	NA
4	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	64,25	65	76,08	76,07	76,07
5	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	61,83	62	96,66	100	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur, 2025

Penambahan indikator urusan bidang kearsipan adalah sebagai berikut:

a) Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku mencapai angka 60% pada tahun 2024.
b) Belum tersedia data tingkat digitalisasi arsip pada tahun 2024.
c) Belum tersedia nilai pengawasan kearsipan eksternal pada tahun 2024.
d) Persentase arsip yang dilindungi dan terselamatkan mencapai angka 75,05% pada tahun 2024.
e) Persentase izin penggunaan arsip yang diterbitkan mencapai angka 67% pada tahun 2024.

19) Urusan Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Belitung Timur bertujuan untuk mendukung produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, meningkatkan tingkat konsumsi ikan, serta pengolahan hasil perikanan. Produksi perikanan di Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan sebesar 43,173.62 ton. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh meningkatnya permintaan akan produksi ikan dan konsumsi yang lebih tinggi. Kenaikan produksi perikanan ini juga sejalan dengan peningkatan permintaan dalam produksi perikanan tangkap, budidaya, serta pengolahan ikan. Selain itu, cakupan bina kelompok pelaku usaha perikanan juga

menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, namun terjadi penurunan di tahun 2023. Fluktuasi dalam cakupan bina kelompok pelaku usaha perikanan menunjukkan pentingnya upaya yang konsisten untuk mendukung pelaku usaha perikanan dalam meningkatkan kapasitas mereka.

TABEL 2. 111 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN LAUT DAN PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Produksi perikanan	Ton	40.216,99	41.182,01	40.295,68	43.173,62	43.871,09
2	Jumlah Produksi perikanan tangkap	Ton	40.079	40.983	40.010,57	41.037,72	41.242,91
3	Jumlah Produksi perikanan budidaya	Ton	137,99	199,01	285,11	2.135,89	2.628,18
4	Angka konsumsi ikan	Kg/kapita/tahun	65,47	65,8	66,34	67,18	68,54
5	Jumlah Produksi pengolahan ikan	Ton	24.741,00	39.839,10	33.807,62	52.459,28	34.240,06
6	Cakupan Bina Kelompok Pelaku Usaha Perikanan	Persen (%)	16	19	27,57	24,53	48,90

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur, 2025

Penambahan indikator urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

a) Indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur terkait urusan bidang kelautan dan perikanan mendapatkan predikat B dengan nilai 86,89 di tahun 2024.
b) Luasan kawasan konservasi di Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 mencapai angka 124.320,7 Ha.

20) Urusan Pariwisata

Penyelenggaraan urusan pariwisata di Kabupaten Belitung Timur bertujuan untuk mendukung sektor pariwisata dengan mempromosikan destinasi wisata, kawasan strategis, potensi wisata, jasa pariwisata, pelaku usaha, dan jumlah kunjungan. Jumlah destinasi unggulan sektor pariwisata mengalami peningkatan hingga tahun 2020, sementara kawasan strategis tidak mengalami perubahan. Objek wisata mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, dengan jumlah objek wisata meningkat menjadi 46 di Kabupaten Belitung Timur. Peningkatan ini juga berdampak pada peningkatan jumlah jasa usaha pariwisata sebanyak 35 objek dari tahun 2022 hingga 2023. Meskipun demikian, tidak semua pelaku usaha pariwisata telah mendapatkan binaan, yang mengakibatkan penurunan jasa usaha pariwisata pada tahun 2023. Jumlah kunjungan wisatawan meningkat pada tahun 2023 sebagai hasil dari pertambahan objek wisata. Rata-rata lamanya tinggal wisatawan hanya satu hari, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar 2,37%.

TABEL 2. 112 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah destinasi unggulan kecamatan	Destinasi	17	NA	NA	NA	NA
2	Jumlah kawasan strategis kabupaten	Kawasan	12	NA	NA	NA	NA
3	Jumlah objek wisata	Objek	43	44	46	46	46
4	Jumlah potensi wisata	Objek	29	29	35	35	41
5	Jumlah usaha pariwisata	Jasa usaha	62	136	314	958	958
6	Jumlah pelaku jasa pariwisata yang dibina	Jasa usaha	120	395	260	220	220
7	Jumlah pelaku jasa pariwisata yang bersertifikat	Jasa usaha	NA	NA	NA	NA	NA
8	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	70.420	37.282	58.600	114.497	63.699
9	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1	1	1	1	1
10	PAD sektor Pariwisata	Persen	NA	1,31	1,23	2,37	2,12
11	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	NA	NA	NA	NA	-44
12	Tingkat hunian akomodasi	Persen	10,10	3,22	41,01	24,01	26,67

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur, 2025

21) Urusan Pertanian

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dalam melaksanakan urusan pertanian, bertujuan untuk menggalakkan peningkatan produksi pertanian. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan dalam produksi sektor pertanian seperti padi sawah, padi bukan sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar. Demikian pula, produksi sektor perkebunan seperti lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri, dan jambu mete juga mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2022. Produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya per hektar juga mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Cakupan bina kelompok tani mengalami penurunan setelah tahun 2022, yang kemungkinan disebabkan oleh perpindahan sebagian petani untuk bekerja di sektor lain. Namun, produktivitas hewan ternak dan jenis lainnya mengalami peningkatan pada tahun 2023, menunjukkan adanya peningkatan permintaan terhadap hewan ternak.

TABEL 2. 113 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Sektor Pertanian (Padi sawah, padi bukan sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar)	Ton	NA	5.602,4	3.687,65	2.437,53	2.126,84
2	Produksi Sektor Perkebunan (lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri, jambu mete)	Ton	NA	9.654,5	10.161,22	10.109,32	10.403,39

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton per Hektar	NA	6,5	5,7	5,7	4,4
4	Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok Tani	NA	217	427	324	252
5	Produktivitas hewan ternak dan sejenisnya	Ekor	NA	1.806	1.958	2.085	2.181

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, 2025

22) Urusan Perdagangan

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dalam menjalankan urusan perdagangan, bertujuan untuk mendukung kinerja perdagangan ekspor, pedagang, dan bahan baku. Namun, terjadi sedikit penurunan dalam perkembangan ekspor bersih perdagangan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Penurunan ini dapat disebabkan oleh penurunan peran perdagangan internasional dan daya saing global. Kondisi di Kabupaten Belitung Timur, terdapat program pembinaan untuk meningkatkan perdagangan melalui peningkatan pengetahuan pelaku usaha. Selama periode 2019-2023, pemerintah telah memberikan pembinaan kepada tiga kelompok pelaku usaha informal. Kontribusi sektor perdagangan di Kabupaten Belitung Timur rata-rata telah mencapai 10%, yang memiliki dampak positif terhadap sektor ekonomi lainnya.

Selama tahun 2019-2023, bahan pokok strategis dengan harga terjangkau mencapai 100%. Bahan pokok ini termasuk beras, mentega, susu, jagung, gas, dan garam yodium, yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Persentase alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah mengalami penurunan dari tahun 2022-2023 sebesar 43,48%, setelah sebelumnya mencapai 100%. Persentase Barang dalam Kemasan Tertutup (BDKT) yang sesuai dengan ketentuan juga menurun di tahun 2023 sebesar 80,25%, berdasarkan jumlah BDKT yang diuji.

TABEL 2. 114 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Ekspor bersih perdagangan	US$/juta	156,02	256,25	257,00	253,28	207,18
2	Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal	Kelompok	3	3	3	3	3
3	Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	Persen	10,66	10,4	11,35	11,58	11,41
4	Persentase bahan pokok strategis dengan harga yang terjangkau	Persen	100	100	100	100	100
5	Persentase alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda terasah	Persen	62	62,42	42,41	43,48	67,79
6	Persentase Barang dalam kemasan tertutup (BDKT) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan jumlah BDKT yang diuji	Persen	79	67,86	89,47	80,25	81,86

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
7	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	41,48	87,5	88,89	100	100

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur, 2025

Penambahan indikator urusan perdagangan adalah sebagai berikut:

a) Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur memiliki persentase sebesar 0% di tahun 2024. Diharapkan, pada tahun-tahun mendatang, persentase jumlah izin usaha perdagangan yang difasilitasi dapat bertambah.
b) Nilai ekspor barang Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 mencapai 264.700.000 USD.
c) Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kabupaten Belitung Timur terhadap urusan perdagangan telah mencapai angka 88,92%. Angka ini dapat meningkat seiring dengan perbaikan kualitas layanan terhadap urusan perdagangan yang diberikan oleh pemerintah.
d) Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya telah mencapai 100% pada tahun 2024. Hal ini berarti bahwa pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah berhasil meningkatkan kualitas, baik fisik maupun layanan, dari seluruh sarana perdagangan di Kabupaten Belitung Timur.
e) Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Belitung Timur mencapai 3,44% pada tahun 2024.
f) Persentase penanganan pengaduan konsumen telah mencapai 66,71% pada tahun 2024.
g) Indeks tertib ukur pada urusan perdagangan mencapai nilai 66,71.

23) Urusan Perindustrian

Penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam urusan perindustrian bertujuan untuk menggerakkan kinerja industri dengan fokus pada peningkatan pertumbuhan, pelaku usaha, jumlah industri kecil menengah (IKM), dan tenaga kerja. Dalam skala usaha menengah, Kabupaten Belitung Timur memiliki program binaan kelompok perajin yang terus meningkat, di mana jumlah kelompok perajin yang dibina meningkat dari 20 kelompok pada tahun 2022 menjadi 54 kelompok pada tahun 2023. Kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan juga mengalami peningkatan rata-rata mencapai 20,70% dari tahun 2019 hingga 2023. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berupaya mendorong sektor industri untuk menjadi sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi daerah. Namun, penyerapan tenaga kerja oleh IKM mengalami penurunan pada tahun 2023, yang mengindikasikan adanya penggantian input produksi yang dilakukan oleh IKM.

TABEL 2. 115 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Industri	Persen	5,73	5,8	5,08	13,56	46,35
2	Cakupan bina kelompok pengrajin	Kelompok	30	41	50	54	60

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan Harga Konstan	Persen	19,85	19,87	20,79	20,59	20,83
4	Jumlah sentra IKM yang difasilitasi	Sentra	NA	1	4	2	2
5	Jumlah tenaga kerja yang terserap oleh IKM	Orang	4.700	4.807	5.004	3.763	3.913
6	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kab/Kota	Persen	5,73	4,56	5,08	129,45	-53,64
7	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri	Persen	81,78	100	81,29	100	311,92
8	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	Persen	0	100	3,85	13,99	0
9	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	Persen	0	100	100	100	100
10	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		45	45	45	45	125

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur, 2025

Penambahan indikator urusan perindustrian adalah sebagai berikut:

a) Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah di tahun 2024 bertumbuh sebesar 56,68% dari tahun sebelumnya. Angka ini merupakan angka yang cukup besar, tetapi masih bisa ditingkatkan dalam tahun-tahun mendatang.
b) Persentase izin usaha industri yang diterbitkan sudah mencapai 100% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Belitung Timur telah mampu menerbitkan semua izin usaha industri dalam rangka mendukung pertumbuhan industri kecil dan menengah.
c) Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini sudah mencapai target keberhasilan, yaitu 100%, pada tahun 2024. Hal ini berarti Kabupaten Belitung Timur telah memiliki basis data terkait industri yang ada di Kabupaten Belitung Timur secara lengkap.

II.1.D.8 Fungsi Pendukung

1) Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerah memiliki tugas untuk membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sekretaris daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah. Fungsi dari sekretariat daerah dapat dilihat melalui indikator: kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah, kebijakan kerjasama, kebijakan pembinaan keagamaan dan kesejahteraan rakyat, regulasi yang tersusun secara ideal, tepat fungsi dan tepat sasaran, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Detail dari indikator terkait dapat dilihat sebagai berikut:

a) Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur menunjukkan capaian 100%. Hal ini menunjukkan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung

Timur menjalankan kinerja dengan baik dan perlu dipertahankan kinerjanya.

b) Persentase kebijakan pemerintahan dan kerjasama yang difasilitasi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur mencapai angka 100%. Hal ini menunjukkan kinerja Sekretariat Daerah yang sudah baik dan perlu dipertahankan.
c) Persentase kebijakan pembinaan keagamaan dan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur mencapai angka 100%. Hal ini menunjukkan kinerja Sekretariat Daerah yang sudah baik dan perlu dipertahankan.
d) Persentase regulasi yang tersusun secara ideal, tepat fungsi dan tepat sasaran oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur mencapai angka 100%. Hal ini menunjukkan kinerja Sekretariat Daerah yang sudah baik dan perlu dipertahankan.
e) Persentase efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur mencapai angka 100%. Hal ini menunjukkan kinerja Sekretariat Daerah yang sudah baik dan perlu dipertahankan.
f) Persentase indeks tata kelola pengadaan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur mencapai angka 100%. Hal ini menunjukkan kinerja Sekretariat Daerah yang sudah baik dan perlu dipertahankan.

Selain indikator-indikator di atas, terdapat indikator kinerja lainnya yang merupakan indikator kinerja kunci dari kinerja fungsi penunjang, khususnya di bidang Pengadaan, dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 2. 116 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG - PENGADAAN

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	0	0	0
2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Persen	0,65	8,38	90,40	2,35	90,85
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	28,34	100	34,62	34,23	60,61
4	Penggunaan Produk Dalam Negeri dan UMKM pada Pelaksanaan PBJ Pemda	Nilai	NA	281,20	437,59	28,486	16,76

Sumber: LPPD, 2025, diolah

2) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh sekretaris DPRD memiliki tugas seperti: 1) menyelenggarakan administrasi kesekretariatan; 2) menyelenggarakan administrasi keuangan; 3) mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan 4) menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretaris DPRD melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Fungsi sekretariat DPRD dapat dilihat pada indikator-indikator yang membahas: indeks kepuasan masyarakat, ketepatan penetapan perda APBD tahun N, dan persentase rancangan perda tahun N.

Indikator kepuasan masyarakat sekretariat DPRD di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 menunjukkan nilai B. Hal ini menunjukkan ruang untuk berkembang dari sekretariat DPRD agar nilai dapat meningkat. Indikator selanjutnya terkait dengan indikator ketetapan penetapan perda APBD tahun N mencapai predikat tepat waktu dan persentase rancangan perda tahun N mencapai angka 100 %. Hal tersebut menunjukkan, sekretariat DPRD sudah menunjukkan kinerja yang baik dan perlu dipertahankan.

II.1.D.9 Fungsi Penunjang

Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pilihan mengacu pada pemberian kewenangan kepada pemerintah lokal atau daerah untuk mengatur, mengelola, dan menangani sebagian urusan pemerintahan di tingkat lokal. Fungsi penunjang yang dijelaskan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan pelatihan, penelitian dan pengembangan.

1) Fungsi Perencanaan

Peran perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang efektif dan efisien. Keberhasilan fungsi perencanaan dinilai berdasarkan beberapa indikator, termasuk indeks perencanaan, kualitas dokumen perencanaan yang dinilai baik, serta pencapaian indikator kinerja utama daerah. Indeks Perencanaan digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi tingkat perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga. Penilaian ini membantu menilai sejauh mana penyusunan dan pelaksanaan perencanaan yang efektif. Kondisi di Kabupaten Belitung Timur, indeks perencanaan mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2023, menunjukkan bahwa pemerintah telah meningkatkan perhatian terhadap kualitas dokumen perencanaan berdasarkan indikator kinerja perencanaan.

Kualitas dokumen perencanaan di Kabupaten Belitung Timur telah mencapai nilai baik sebesar 100%. Capaian indikator kinerja utama daerah dalam fungsi perencanaan juga mencatat pencapaian yang melebihi 90% pada tahun 2022 hingga 2023, menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Belitung Timur berhasil mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah atau dokumen perencanaan. Indikator-indikator ini umumnya mencakup prioritas pembangunan daerah seperti kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, lingkungan, dan lainnya.

TABEL 2. 116 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA FUNGSI PERENCANAAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Perencanaan	Persen	NA	68	89,81	91,77	91,77
2	Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan dengan Nilai Baik	Persen	100	100	100	100	100
3	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah	Persen	75,31	80,39	91,47	93,14	91,19

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2025

Penambahan indikator fungsi perencanaan di Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut:

a) Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu akan menunjukkan seberapa besar komitmen pemerintah daerah dalam menyusun laporan dan dokumen terkait pengendalian serta evaluasi, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan terukur dan terpantau. Kondisi ini diharapkan telah tercapai pada tahun 2024, dengan nilai 100 menunjukkan kesempurnaan dan kedisiplinan dalam penyusunan dokumen. Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu dengan kondisi pada tahun 2024 memiliki nilai tepat waktu
b) Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah tersusun tepat waktu akan menjadi indikator penting dalam memastikan semua rencana pembangunan disiapkan dan siap untuk dilaksanakan sesuai jadwal. Ini meliputi penyusunan dokumen seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana lainnya. Target 100 pada tahun 2024, pemerintah daerah menunjukkan keseriusan dalam perencanaan yang akurat dan sesuai kebutuhan.
c) Persentase keselarasan RPJMD ke dalam RKPD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia menunjukkan seberapa jauh rencana jangka menengah (RPJMD) telah diintegrasikan ke dalam rencana tahunan (RKPD), khususnya untuk urusan pemerintahan dan pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan sebagainya). Nilai 100 di tahun 2024 mencerminkan keselarasan penuh antara dua dokumen perencanaan ini. Persentase keselarasan RPJMD ke dalam RKPD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan kondisi pada tahun 2024 memiliki nilai 100.
d) Persentase keselarasan RPJMD ke dalam RKPD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan akan mengukur apakah perencanaan jangka menengah telah diimplementasikan secara konsisten dalam rencana tahunan untuk infrastruktur dan tata ruang. Hal ini penting agar pembangunan fisik dan tata ruang sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang. Target nilai 100 menunjukkan tidak ada celah perbedaan perencanaan.
e) Persentase keselarasan RPJMD ke dalam RKPD pada bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA) menggambarkan sejauh mana kebijakan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam dalam RPJMD telah ditindaklanjuti dalam RKPD. Hal ini menjadi penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemanfaatan SDA yang optimal. Target 100 pada tahun 2024 mencerminkan integrasi penuh dan kesesuaian kebijakan.

2) Fungsi Keuangan

Fungsi keuangan pemerintah daerah berfokus pada pengelolaan keuangan. Berikut adalah kondisi keuangan yang akan dibahas di Kabupaten Belitung Timur:

a) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah salah satu alat atau metrik yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah. IPKD memberikan gambaran tentang sejauh mana pemerintah daerah menjalankan fungsi pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek yang mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan. Nilai dari IPKD di Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan setelah tahun 2021. Penurunan IPKD ini dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan secara efektif meskipun penurunan IPKD tidak terlalu besar.

b) Penetapan rancangan peraturan daerah (RAPERDA) APBD dibuat dengan tepat waktu. Kemudian perubahan APBD melalui RAPERDA tidak mengalami keterlambatan. Capaian realisasi SP2D dengan tepat waktu sebesar 100% pada tahun 2019-2023. Laporan keuangan yang dibuat pemerintah Kabupaten Belitung Timur tepat waktu.
c) Capaian kesesuaian barang milik daerah dengan nilai aset di neraca telah mencapai 100% dalam kurun waktu lima tahun.
d) Kemandirian keuangan daerah suatu kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahannya secara mandiri, tanpa harus bergantung bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat atau sumber pendanaan eksternal lainnya. Kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Belitung Timur masih bergantung dana transfer pemerintah pusat
e) Belanja pemerintah di sektor pendidikan mengalami peningkatan pada tahun 2023. Persentase belanja pendidikan sebesar 26%, peningkatan belanja pendidikan diindikasikan adanya peningkatan daya tampung siswa, renovasi dan penambahan jumlah gedung sekolah. Kemudian belanja kesehatan di Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan. Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan menurun sebesar 34%.
f) Rasio belanja urusan pemerintah umum mengalami peningkatan di Kabupaten Belitung Timur sebesar 85% pada tahun 2023. Meningkatnya belanja pemerintah diharapkan dapat meningkatkan atau memperluas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Rasio PAD terhadap komponen pendapatan daerah berfluktuasi sehingga mengurangi kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk membiayai program-program dan layanan-layanan publik. Selain itu perkembangan PAD seharusnya dapat meningkatkan investasi dalam pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan lapangan kerja
g) Proporsi pajak terhadap total belanja mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 6%. Penurunan proporsi pajak dapat meningkatkan ketergantungan pemerintah pada sumber pendanaan lain seperti dana transfer dari pemerintah pusat.
h) Kabupaten Belitung mendapatkan nilai WTP pada opini BPK tahun 2019-2023, penilaian tersebut mencerminkan laporan keuangan memenuhi kriteria, seperti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengungkapan yang lengkap dan transparan, serta akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku.

TABEL 2. 117 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA FUNGSI KEUANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2020 – 2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	NA	76	68,13	68,79	83,45
2	Ketepatan Waktu Penetapan Raperda APBD	Angka (tepat(1)/tidak(0))	1	1	1	1	1
3	Ketepatan Waktu Penetapan Raperda Perubahan APBD	Angka (tepat(1)/ tidak(0))	1	1	1	1	1
4	Persentase Realisasi SP2D Tepat Waktu	Persen	100	95	95	95	95
5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	Angka (tepat(1)/ tidak(0))	1	1	1	1	1

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
6	Kesesuaian Barang Milik Daerah dengan Nilai Aset di Neraca	Persen	100	100	100	100	100
7	Kemandirian keuangan daerah	Persen	13,16	13,73	13	13	12
8	Persentase Belanja Pendidikan	Persen	25	≥ 20	23	26	26
9	Persentase Belanja Kesehatan	Persen	20	≥ 10	36	25	25
10	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Rasio	27	27	38,58	34	34
11	Rasio Belanja urusan Pemerintahan Umum	Rasio	81	85	72,5	85	85
12	Rasio PAD terhadap komponen pendapatan daerah	Rasio	13,16	13,73	13	13	13
13	Proporsi pajak terhadap total belanja	Persen	8	6,96	7	6	6
14	Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, 2025

Penambahan indikator fungsi keuangan di Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut:

a) Indeks kepuasan masyarakat yang mencapai nilai 93,06% pada tahun 2024 menunjukkan tingkat kepuasan warga terhadap pelayanan keuangan daerah, termasuk akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan dana publik. Angka ini mencerminkan persepsi positif dan kepercayaan masyarakat.
b) Ketepatan waktu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan predikat tepat waktu pada tahun 2024 menegaskan kesungguhan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban penyusunan dokumen anggaran, yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja setiap tahun. Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memiliki predikat tepat waktu pada tahun 2024.
c) Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan predikat tepat waktu pada tahun 2024 menunjukkan komitmen daerah dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara akurat, sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kinerja keuangan.
d) Persentase surat perintah pencairan dana (SP2D) yang diterbitkan tepat waktu dengan nilai 100% pada tahun 2024 menandakan tidak adanya keterlambatan dalam realisasi pembayaran atas kegiatan pemerintah daerah, sehingga mendukung kelancaran pembangunan dan operasional.
e) Persentase realisasi anggaran urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang mencapai 98% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa hampir seluruh anggaran telah terealisasi, sehingga kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat tercapai secara optimal.
f) Persentase data keuangan daerah yang terinput ke dalam sistem informasi secara tepat waktu dengan nilai 100% pada tahun 2024 menunjukkan tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam penggunaan sistem digital, yang menjadi dasar pemantauan dan evaluasi keuangan secara real time.

g) Persentase aset daerah yang telah bersertifikat yang mencapai 95% pada tahun 2024 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengamankan dan menertibkan status hukum aset, agar lebih tertib dan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
h) Persentase aset daerah yang tercatat dalam neraca daerah dengan angka 100% menandakan seluruh aset milik pemerintah daerah sudah tercatat rapi, menjadi dasar dalam perencanaan dan pengelolaan aset di masa depan.
i) Kemandirian keuangan daerah yang memiliki persentase 12% menunjukkan proporsi kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat.

3) Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan fungsi kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan bertujuan untuk mendukung strategi dan arah kebijakan pembangunan. Program-program yang disusun bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian. Fungsi kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan dapat dinilai dari indeks merit system dan indeks profesionalisme ASN. Indeks Merit System adalah sistem penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja berbagai aspek dalam konteks sistem penghargaan berbasis prestasi. Sistem ini umumnya diterapkan dalam organisasi, baik pemerintah maupun swasta, untuk memastikan bahwa promosi, penghargaan, dan pengakuan diberikan berdasarkan prestasi, kompetensi, dan kontribusi individu yang jelas. Nilai indeks merit system di Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023. Nilai indeks yang melebihi 100 mencerminkan kinerja yang memenuhi standar yang ditetapkan. Kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Belitung Timur menunjukkan peningkatan yang signifikan. Indeks Profesionalisme ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalisme dan kinerja ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Indeks ini digunakan untuk menilai berbagai aspek kinerja ASN, termasuk kompetensi, etika kerja, integritas, kedisiplinan, pelayanan publik, dan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi atau pemerintah. Pada tahun 2023, Indeks Profesionalisme ASN Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan yang menunjukkan peningkatan kompetensi, etika kerja, integritas, kedisiplinan, pelayanan publik, serta kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi atau pemerintah.

TABEL 2. 118 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA FUNGSI KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Merit System	Nilai 100-400	NA	102	102,5	252	252
2	Indeks Profesionalisme ASN	Skor 1-100	0	54	71,49	71,53	79,03
3	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar	Persen	75,59	75,27	82,75	83,2	84,68

Sumber: BKPSDM Kabupaten Belitung Timur, 2025

Penambahan indikator fungsi kepegawaian di Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut:

a) Indeks kepuasan masyarakat yang memiliki nilai 88,57 pada tahun 2024 menunjukkan seberapa puas masyarakat terhadap layanan aparatur sipil

negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah. Nilai yang cukup tinggi ini mencerminkan kualitas pelayanan yang dinilai baik oleh publik, termasuk dalam hal profesionalitas, kecepatan, dan ketepatan layanan.

b) Persentase pelaksanaan program pengadaan, mutasi, promosi, pengembangan kompetensi, dan evaluasi kinerja ASN yang sesuai dengan prosedur dan sasaran yang ditentukan dengan nilai 99,97% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa hampir seluruh aspek manajemen kepegawaian dilaksanakan secara disiplin, terencana, dan berlandaskan pada standar prosedur yang berlaku. Ini memastikan ASN memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugasnya, serta mendukung kinerja pemerintahan daerah yang lebih efektif.

c) Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional sebesar 8,33% menunjukkan bahwa sebagian kecil dari aparatur sipil negara di Kabupaten Belitung Timur telah mengikuti pelatihan atau kegiatan peningkatan kapasitas. Hal ini mencerminkan upaya awal pemerintah daerah untuk memastikan para ASN memiliki keterampilan dasar, kemampuan manajemen, serta keahlian khusus di bidang tugasnya masing-masing agar dapat mendukung kinerja pelayanan publik yang lebih baik.

4) Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Pemerintah kabupaten belitung timur dalam menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan bertujuan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Evaluasi kinerja fungsi penelitian dan pengembangan dapat dilihat dari persentase peningkatan pemanfaatan penelitian dan kajian oleh daerah serta persentase peningkatan pemanfaatan inovasi dan teknologi oleh daerah. Kinerja dalam peningkatan pemanfaatan penelitian dan kajian oleh daerah mencapai 57,14 persen di tahun 2024 meningkat dibandingkan 50 persen di tahun 2023. Peningkatan kinerja ini terjadi karena pada tahun 2024 terdapat satu kajian baru yang disusun dan menjadi acuan perencanaan kawasan perdesaan yaitu dokumen RPKP Kampung Andalan Mandiri Pusat Inovasi Terpadu (Kampit) di Kecamatan Kelapa Kampit. Sebelumnya di tahun 2022 dan tahun 2023 tidak terdapat dokumen kajian yang disusun karena rasionalisasi anggaran pada tahun berkenaan. Untuk kinerja pada peningkatan pemanfaatan inovasi dan teknologi oleh daerah mengalami peningkatan menjadi 54,54 persen di tahun 2024 dari sebelumnya 43,75 persen pada tahun 2023. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dengan pemanfaatan inovasi dan teknologi terhadap jumlah perangkat daerah yang ada di kabupaten belitung timur. Pada tahun 2023 jumlah perangkat daerah yang difasilitasi sebanyak 14 perangkat daerah dari 32 perangkat daerah yang ada sehingga capaian indikator adalah 43,75 persen. Sedangkan di tahun 2024, banyaknya perangkat daerah yang difasilitasi 18 dari 33 perangkat daerah yang ada sehingga capaian indikator adalah 54,54 persen. Capaian kedua indikator ini mencerminkan upaya maksimal dalam memanfaatkan hasil penelitian, inovasi, dan teknologi oleh daerah. Capaian fungsi penelitian dan pengembangan dapat dilihat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 2. 119 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Penelitian dan Kajian Oleh Daerah	Persen	NA	50	50	50	57,14
2	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi oleh Daerah	Persen	NA	31,25	50	43,75	54,54

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2025

Penambahan indikator fungsi penelitian dan pengembangan di Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut:

a) Persentase implementasi rencana kelitbangan (penelitian dan pengembangan) pada tahun 2024 menunjukkan seberapa besar rencana riset dan pengembangan telah berhasil dijalankan dalam praktik. Nilai 100 % menandakan seluruh program kelitbangan sudah dilaksanakan secara menyeluruh, sesuai rencana yang telah ditetapkan.
b) Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan pada tahun 2024 mengukur seberapa banyak temuan, inovasi, dan rekomendasi yang dihasilkan dari proses penelitian dan pengembangan benar-benar diterapkan dalam kebijakan, program, atau kegiatan pembangunan daerah. Nilai 100% menegaskan pemanfaatan optimal dari hasil riset.
c) Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dengan nilai 100% menunjukkan bahwa semua instansi pemerintah daerah mendapatkan dukungan yang cukup (misalnya bimbingan teknis, pendanaan, dan kerja sama) untuk mengaplikasikan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kelayakan intelektual memiliki nilai 100%
d) Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah menekankan pentingnya pendekatan *evidence-based policy*. Nilai 100 % di tahun 2024 menunjukkan bahwa semua kebijakan yang diambil telah mempertimbangkan hasil kajian mendalam.
e) Indeks inovasi daerah yang memiliki nilai 100% menandakan bahwa seluruh aspek inovasi termasuk kelembagaan, kebijakan, kolaborasi, dan infrastruktur pendukung telah berfungsi optimal di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024.
f) Jumlah kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar (paten) sebanyak 5.
g) Jumlah publikasi ilmiah seperti jurnal, buku ilmiah, naskah akademik, rancangan perda dan prosiding ilmiah sebanyak 10.

II.1.D.10 Unsur Pengawasan Pemerintahan

Fungsi pengawasan oleh pemerintah adalah bagian integral dari sistem pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang telah ditetapkan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan sumber daya publik. Fungsi pengawasan dapat dilihat dari Indeks Reformasi Birokrasi, maturitas SPIP, kapabilitas APIP, penyelesaian temuan dari pemeriksaan. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan metode pengukuran yang untuk mengevaluasi sejauh mana sebuah lembaga pemerintah telah melakukan reformasi atau perbaikan dalam sistem birokrasinya. Tujuan utama dari IRB adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik dalam administrasi

pemerintahan. Nilai IRB Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan dalam setiap tahun, peningkatan indeks ini mencerminkan reformasi birokrasi mengarah pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi.

Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) mengacu pada tingkat kesiapan atau kedewasaan dalam penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan. SPIP sendiri merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, serta untuk memastikan bahwa operasi-operasi tersebut berjalan sesuai dengan standar etika, kepatuhan, dan efisiensi yang diharapkan. Maturitas SPIP di Kabupaten Belitung Timur berada di level 2 pada tahun 2019-2023. Maturitas SPIP level 2 mencerminkan lembaga pemerintahan telah mengidentifikasi kebijakan dan prosedur SPIP dasar yang diterapkan secara konsisten. Langkah-langkah pengendalian intern sudah mulai diterapkan secara rutin dalam operasi sehari-hari. Evaluasi awal terhadap efektivitas pengendalian juga sudah dilakukan. Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) merujuk pada kualitas dan kemampuan dari para pengawas intern yang bertugas di lingkungan pemerintahan. APIP memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta dalam menjaga akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kapabilitas APIP berada di level 2, pada level ini pemerintah Kabupaten Belitung Timur dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan ketika melakukan audit dan pengawasan intern. Kapabilitas APIP level mengindikasikan kemampuan pemerintah dalam melakukan audit secara mandiri dan terampil dalam mengidentifikasi risiko, mengevaluasi kontrol internal, dan menyusun rekomendasi perbaikan. Penyelesaian temuan dapat diselesaikan berdasarkan rekomendasi BPK.

TABEL 2. 120 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA FUNGSI PENGAWASAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	53,12	55	58,2	76,44	76,44
2	Maturitas SPIP	Level	2	3	2	2	3
3	Kapabilitas APIP	Level	2	3	2	2	2
4	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persen	85,91	87	93,04	93,04	93,04

Sumber: Inspektorat Kabupaten Belitung Timur, 2025

Penambahan indikator unsur pengawasan urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

a) Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Urusan
   Persentase terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan merupakan indikator kinerja untuk mengukur seberapa besar kebutuhan pendukung suatu urusan pemerintahan yang telah terpenuhi, baik dalam segi sarana, prasarana, anggaran, sumber daya manusia, maupun dukungan teknis lainnya. PAda tahun 2024, persentase terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan Kabupaten Belitung Timur telah mencapai angka 80%, yang berarti bahwa kebutuhan pendukung urusan-urusan pemerintahan telah dapat terpenuhi dengan baik, tetapi perlu ditingkatkan jumlahnya.
b) Level Komponen Dukungan Pengawasan (Kapabilitas APIP).
   Level komponen dukungan pengawasan menunjukkan sejauh mana Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), misalnya Inspektorat

Daerah, memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam melaksanakan fungsi pengawasan mereka. Dalam hal ini, Kabupaten Belitung Timur telah mencapai Level 3 pada tahun 2024. Level 3 berarti APIP telah berperan dalam manajemen resiko dan memberikan konsultasi strategis.

c) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Tindak Lanjut rekomendasi BPK merupakan langkah nyata yang dilakukan oleh entitas yang diperiksa untuk menanggapi, memperbaiki, dan menindaklanjuti temuan pemeriksaan yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan dalam laporan hasil pemeriksaan. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah berhasil mencapai angka 93,54% untuk angka tindak lanjut rekomendasi BPK pada tahun 2024. Angka ini berarti pemerintah Kabupaten Belitung Timur cepat tanggap dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK dan angka ini perlu ditingkatkan dalam beberapa tahun ke depan.

d) Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP yang Ditindaklanjuti (Irban Kesra, Irban Pemerintahan, Irban Ekbang, dan Irban Investigasi)
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti merupakan ukuran kinerja mengenai seberapa besar rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah ditindaklanjuti oleh entitas yang diawasi, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh unit Inspektorat Pembantu. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah berhasil mencapai angka 82,93%, yang berarti bahwa Kabupaten Belitung Timur cepat tanggap dalam menanggapi rekomendasi dari APIP. Angka ini sudah cukup baik, tetapi perlu ditingkatkan dalam beberapa tahun ke depan.

e) Persentase Keterjadian Kasus Hukum pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa
Persentase keterjadian kasus hukum pada perangkat daerah dan pemerintah desa digunakan untuk mengukur frekuensi atau banyaknya kasus hukum yang melibatkan perangkat daerah dan pemerintah desa dalam kurun waktu tertentu, dalam hal ini adalah satu tahun. Pada tahun 2024, persentase keterjadian kasus hukum pada perangkat daerah dan pemerintah desa Kabupaten Belitung Timur mencapai angka 0. Hal ini berarti bahwa seluruh perangkat daerah dan pemerintah desa telah berhasil menjalankan kehidupan bermasyarakat dengan sebaik-baiknya dan menghindari terjadinya kasus hukum yang melibatkan mereka.

f) Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Tindak Lanjut Hasil Konsultansi
Persentase perangkat daerah yang melakukan tindak lanjut hasil konsultansi digunakan untuk mengetahui seberapa banyak perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi, saran, ataupun hasil kegiatan konsultansi dengan APIP. Kegiatan konsultansi merupakan bagian dari fungsi APIP bersifat preventif dan mendampingi. Pada tahun 2024, Kabupaten Belitung Timur mencapai angka 80% untuk persentase ini, yang berarti bahwa 80% dari total perangkat daerah yang telah melakukan kegiatan konsultansi telah melakukan tindak lanjut hasil konsultansi dengan APIP.

g) Peringkat Capaian Atas Target Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dengan KPK RI (MCSP KPKP) pada Area Pengawasan Tingkat Provinsi
Peringkat capaian atas target rencana aksi program pencegahan korupsi terintegrasi dengan KPK RI (MCSP KPKP merupakan pengukuran kinerja dan peringkat capaian pemerintah provinsi dalam melaksanakan program Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikoordinasikan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK RI). Dalam hal ini, peringkat capaian Kabupaten Belitung Timur adalah sebesar 3% di tahun 2024.

h) Persentase Perangkat Daerah ZI yang Ditingkatkan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
Persentase perangkat daerah ZI yang ditingkatkan menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) merupakan indikator kinerja reformasi birokrasi yang menunjukkan seberapa besar jumlah perangkat daerah yang telah membangun Zona Integritas dan ditingkatkan atau diusulkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi. Dalam hal ini, persentase perangkat daerah Kabupaten Belitung Timur yang telah melakukan hal tersebut adalah sebesar 2% di tahun 2024.

II.1.D.11 Unsur Kewilayahan

Penambahan indikator unsur kewilayahan adalah sebagai berikut:

a) Kecamatan Damar
- Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Damar telah mencapai tingkat keberhasilan sempurna, yaitu 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2024,
- Kecamatan Damar telah berhasil menjaga ketentraman dan ketertiban di antara masyarakat.
- Persentase peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Damar telah mencapai nilai sempurna, yaitu 100%. Hal ini berarti telah terjadi peningkatan efektivitas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Damar pada tahun 2024.
- Persentase pengendalian dan pengawasan terhadap kebijakan kepala daerah di tingkat desa di Kecamatan Damar telah mencapai persentase sempurna, yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Damar telah mampu mengendalikan dan mengawasi kebijakan kepala daerah tingkat desa di tahun 2024.
- Persentase pendukung urusan layanan penunjang di Kecamatan Damar telah mencapai angka 100%. Hal ini berarti bahwa di tahun 2024, Kecamatan Damar telah berhasil memenuhi kebutuhan akan pendukung urusan layanan penunjang pemerintahan.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Damar mencapai angka 88,47%. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Damar telah cukup puas dengan layanan yang diberikan pemerintah kepada mereka, tetapi kualitas layanan masih bisa ditingkatkan lagi.
- Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Damar telah mencapai nilai 100%. Angka ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kecamatan Damar telah berhasil menyelenggarakan dan menyelesaikan semua urusan pemerintahan di tahun 2024.

b) Kecamatan Dendang
- Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Dendang telah mencapai tingkat keberhasilan sempurna, yaitu 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2024,
- Kecamatan Dendang telah berhasil menjaga ketentraman dan ketertiban di antara masyarakat.
- Persentase peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Dendang telah mencapai nilai sempurna, yaitu 100%. Hal ini berarti telah terjadi peningkatan efektivitas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Dendang pada tahun 2024.

- Persentase pengendalian dan pengawasan terhadap kebijakan kepala daerah di tingkat desa di Kecamatan Dendang telah mencapai persentase sempurna, yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Dendang telah mampu mengendalikan dan mengawasi kebijakan kepala daerah tingkat desa di tahun 2024.
- Persentase pendukung urusan layanan penunjang di Kecamatan Dendang telah mencapai angka 100%. Hal ini berarti bahwa di tahun 2024, Kecamatan Dendang telah berhasil memenuhi kebutuhan akan pendukung urusan layanan penunjang pemerintahan.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Dendang mencapai angka 80%. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Dendang telah cukup puas dengan layanan yang diberikan pemerintah kepada mereka, tetapi kualitas layanan masih bisa ditingkatkan lagi.
- Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Dendang telah mencapai nilai 100%. Angka ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kecamatan Dendang telah berhasil menyelenggarakan dan menyelesaikan semua urusan pemerintahan di tahun 2024.

c) Kecamatan Gantung
- Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Gantung telah mencapai tingkat keberhasilan sempurna, yaitu 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2024, Kecamatan Gantung telah berhasil menjaga ketentraman dan ketertiban di antara masyarakat.
- Persentase peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Gantung telah mencapai nilai sempurna, yaitu 100%. Hal ini berarti telah terjadi peningkatan efektivitas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Gantung pada tahun 2024.
- Persentase pengendalian dan pengawasan terhadap kebijakan kepala daerah di tingkat desa di Kecamatan Gantung telah mencapai persentase sempurna, yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Gantung telah mampu mengendalikan dan mengawasi kebijakan kepala daerah tingkat desa di tahun 2024.
- Persentase pendukung urusan layanan penunjang di Kecamatan Gantung telah mencapai angka 100%. Hal ini berarti bahwa di tahun 2024, Kecamatan Gantung telah berhasil memenuhi kebutuhan akan pendukung urusan layanan penunjang pemerintahan.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Gantung mencapai angka 87,51%. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Gantung telah cukup puas dengan layanan yang diberikan pemerintah kepada mereka, tetapi kualitas layanan masih bisa ditingkatkan lagi.
- Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Gantung telah mencapai nilai 100%. Angka ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kecamatan Gantung telah berhasil menyelenggarakan dan menyelesaikan semua urusan pemerintahan di tahun 2024.

d) Kecamatan Kelapa Kampit
- Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Kelapa Kampit telah mencapai tingkat keberhasilan sempurna, yaitu 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2024, Kecamatan Damar telah berhasil menjaga ketentraman dan ketertiban di antara masyarakat.
- Persentase peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Kelapa Kampit telah mencapai nilai sempurna,

yaitu 100%. Hal ini berarti telah terjadi peningkatan efektivitas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kelapa Kampit pada tahun 2024.

- Persentase pengendalian dan pengawasan terhadap kebijakan kepala daerah di tingkat desa di Kecamatan Kelapa Kampit telah mencapai persentase sempurna, yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Kelapa Kampit telah mampu mengendalikan dan mengawasi kebijakan kepala daerah tingkat desa di tahun 2024.
- Persentase pendukung urusan layanan penunjang di Kecamatan Kelapa Kampit telah mencapai angka 100%. Hal ini berarti bahwa di tahun 2024, Kecamatan Kelapa Kampit telah berhasil memenuhi kebutuhan akan pendukung urusan layanan penunjang pemerintahan.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kelapa Kampit mencapai angka 87,60%. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Kelapa Kampit telah cukup puas dengan layanan yang diberikan pemerintah kepada mereka, tetapi kualitas layanan masih bisa ditingkatkan lagi.
- Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Kelapa Kampit telah mencapai nilai 100%. Angka ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kecamatan Kelapa Kampit telah berhasil menyelenggarakan dan menyelesaikan semua urusan pemerintahan di tahun 2024.

e) Kecamatan Manggar

- Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Manggar telah mencapai tingkat keberhasilan sempurna, yaitu 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2024, Kecamatan Damar telah berhasil menjaga ketentraman dan ketertiban di antara masyarakat.
- Persentase peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Manggar telah mencapai nilai sempurna, yaitu 100%. Hal ini berarti telah terjadi peningkatan efektivitas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Manggar pada tahun 2024.
- Persentase pengendalian dan pengawasan terhadap kebijakan kepala daerah di tingkat desa di Kecamatan Manggar telah mencapai persentase sempurna, yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Manggar telah mampu mengendalikan dan mengawasi kebijakan kepala daerah tingkat desa di tahun 2024.
- Persentase pendukung urusan layanan penunjang di Kecamatan Manggar telah mencapai angka 100%. Hal ini berarti bahwa di tahun 2024, Kecamatan Manggar telah berhasil memenuhi kebutuhan akan pendukung urusan layanan penunjang pemerintahan.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Manggar mencapai angka 91,44%. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Manggar telah cukup puas dengan layanan yang diberikan pemerintah kepada mereka, tetapi kualitas layanan masih bisa ditingkatkan lagi.
- Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Manggar telah mencapai nilai 100%. Angka ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kecamatan Manggar telah berhasil menyelenggarakan dan menyelesaikan semua urusan pemerintahan di tahun 2024.

f) Kecamatan Simpang Pesak

- Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Simpang Pesak telah mencapai tingkat keberhasilan

sempurna, yaitu 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2024, Kecamatan Simpang Pesak telah berhasil menjaga ketentraman dan ketertiban di antara masyarakat.

- Persentase peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Simpang Pesak telah mencapai nilai sempurna, yaitu 100%. Hal ini berarti telah terjadi peningkatan efektivitas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Damar pada tahun 2024.
- Persentase pengendalian dan pengawasan terhadap kebijakan kepala daerah di tingkat desa di Kecamatan Simpang Pesak telah mencapai persentase sempurna, yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Simpang Pesak telah mampu mengendalikan dan mengawasi kebijakan kepala daerah tingkat desa di tahun 2024.
- Persentase pendukung urusan layanan penunjang di Kecamatan Simpang Pesak telah mencapai angka 100%. Hal ini berarti bahwa di tahun 2024, Kecamatan Simpang Pesak telah berhasil memenuhi kebutuhan akan pendukung urusan layanan penunjang pemerintahan.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Simpang Pesak mencapai angka 82%. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Simpang Pesak telah cukup puas dengan layanan yang diberikan pemerintah kepada mereka, tetapi kualitas layanan masih bisa ditingkatkan lagi.
- Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Simpang Pesak telah mencapai nilai 100%. Angka ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kecamatan Simpang Pesak telah berhasil menyelenggarakan dan menyelesaikan semua urusan pemerintahan di tahun 2024.

g) Kecamatan Simpang Renggiang

- Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Simpang Renggiang telah mencapai tingkat keberhasilan sempurna, yaitu 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2024, Kecamatan Simpang Renggiang telah berhasil menjaga ketentraman dan ketertiban di antara masyarakat.
- Persentase peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Simpang Renggiang telah mencapai nilai sempurna, yaitu 100%. Hal ini berarti telah terjadi peningkatan efektivitas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Damar pada tahun 2024.
- Persentase pengendalian dan pengawasan terhadap kebijakan kepala daerah di tingkat desa di Kecamatan Simpang Renggiang telah mencapai persentase sempurna, yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Simpang Renggiang telah mampu mengendalikan dan mengawasi kebijakan kepala daerah tingkat desa di tahun 2024.
- Persentase pendukung urusan layanan penunjang di Kecamatan Simpang Renggiang telah mencapai angka 100%. Hal ini berarti bahwa di tahun 2024, Kecamatan Simpang Renggiang telah berhasil memenuhi kebutuhan akan pendukung urusan layanan penunjang pemerintahan.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Simpang Renggiang mencapai angka 84,05%. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Simpang Renggiang telah cukup puas dengan layanan yang diberikan pemerintah kepada mereka, tetapi kualitas layanan masih bisa ditingkatkan lagi.

- Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Simpang Renggiang telah mencapai nilai 100%. Angka ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kecamatan Simpang Renggiang telah berhasil menyelenggarakan dan menyelesaikan semua urusan pemerintahan di tahun 2024.

II.1.D.12 Unsur Pemerintahan Umum

Penambahan indikator unsur pemerintahan umum adalah sebagai berikut:

a) Indeks Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan ukuran kuantitatif untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik, dalam hal ini adalah layanan yang diberikan oleh pegawai Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik). Pada tahun 2024, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pegawai Kesbangpol Kabupaten Belitung Timur telah mencapai angka 80 dari rentang 0-100, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat Kabupaten Belitung Timur telah cukup puas dengan layanan pegawai Kesbangpol.

b) Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan merupakan suatu ruang lingkup kegiatan yang bertujuan untuk menanamkan, membumikan, dan memperkuat nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Kondisi di Kabupaten Belitung Timur, persentase dari cakupan ini telah mencapai angka 70% di tahun 2024. Hal ini berarti bahwa masyarakat Kabupaten Belitung Timur telah cukup memahami ideologi pancasila serta karakter kebangsaan dan mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan bermasyarakat.

c) Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik
Pendidikan politik perlu diberikan kepada kader partai politik supaya kader-kader yang akan terjun ke tengah masyarakat mampu menjalankan fungsi politik sesuai dengan ideologi partai dan nilai demokrasi. Tanpa adanya pendidikan politik, kader partai politik dapat kehilangan arah dan gagal menjalankan fungsi politik partai di tengah masyarakat. Pada tahun 2024, persentase pendidikan politik yang diberikan kepada kader partai politik di Kabupaten Belitung Timur telah mencapai angka 100%. Hal ini berarti bahwa kader-kader partai politik telah mampu menjalankan fungsi politik mereka dengan menerapkan pendidikan politik yang telah mereka dapatkan ke tengah masyarakat.

d) Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif
Organisasi kemasyarakatan diperlukan sebagai wadah partisipasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial di tengah masyarakat yang menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan. Organisasi kemasyarakatan yang aktif di Kabupaten Belitung Timur memiliki persentase sebesar 70% di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa telah banyak organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Kabupaten Belitung Timur.

e) Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan
Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitas kerukunan

umat beragama, dan penghayat kepercayaan di Kabupaten Belitung Timur mengukur sejauh mana program ataupun kebijakan strategis terkait bidang ketahanan nasional non-militer telah diimplementasikan. Pada tahun 2024, persentase ini telah mencapai angka 70%, yang menunjukkan bahwa kebijakan di bidang ketahanan nasional non-militer telah dapat diimplementasikan dengan cukup baik di tengah masyarakat Kabupaten Belitung Timur.

f) Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan
Persentase konflik sosial yang diselesaikan merupakan indikator pengukur sejauh mana pemerintah Kabupaten Belitung Timur menangani dan menyelesaikan konflik sosial di antara masyarakat. Indikator ini menunjukkan besaran proporsi kasus konflik sosial yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan total konflik yang terjadi dalam periode satu tahun, yaitu tahun 2024. Persentase konflik sosial yang diselesaikan di Kabupaten Belitung Timur mencapai angka 70%, yang menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah turut andil dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat dengan cukup baik, sehingga 70% dari kasus itu mampu terselesaikan.

II.1.E Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Belitung Timur

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Terdapat 6 (enam) pelayanan wajib yang perlu dipenuhi oleh Pemerintah, yaitu: 1) pendidikan; 2) kesehatan; 3) pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan 6) sosial. Berikut merupakan capaian SPM di Kabupaten Belitung Timur.

TABEL 2. 121 CAPAIAN SPM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN						RUMUS
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
A.									
1	Pendidikan Anak Usia Dini	persen	62,07	86,7	87,58	89,1	83,3	97,23	$\frac{Jumlah\ penduduk\ usia\ 5-6\ tahun\ yang\ mengikuti\ PAUD}{Jumlah\ seluruh\ penduduk\ usia\ 5-6\ tahun}$
2	Pendidikan Dasar	persen	96,94	97,76	88,17	95,09	95,08	96,11	$\frac{Jumlah\ penduduk\ usia\ 7-15\ tahun\ yang\ mengikuti\ pendidikan\ dasar}{Jumlah\ seluruh\ penduduk\ usia\ 7-15\ tahun}$
3	Pendidikan kesetaraan	persen	46,97	36,82	36,21	46,81	77,66	57,09	$\frac{Jumlah\ penduduk\ usia\ 7-18\ tahun\ yang\ mengikuti\ pendidikan\ kesetaraan}{Jumlah\ seluruh\ penduduk\ usia\ 7-18\ tahun\ yang\ wajib\ mengikuti\ pendidikan\ kesetaraan}$
B.									
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	persen	100	100	100	94,67	81,06	87,69	$\frac{Jumlah\ penyandang\ disabilitas\ terlantar\ yang\ mendapat\ pelayanan\ dasar\ rehabilitasi\ sosial\ d}{Jumlah\ penyandang\ disabilitas\ terlantar\ di\ kabupaten/\ kota\ dalam}$
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	persen	100	100	100	94,67	86	86,67	$\frac{Jumlah\ anak\ terlantar\ yang\ mendapat\ pelayanan\ dasar\ rehabilitasi\ sosial\ dasar\ anak\ terlant}{Jumlah\ anak\ terlantar\ di\ kabupaten/kota\ dalam\ kurun\ wakt}$
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	persen	100	100	100	94,67	87,27	87,69	$\frac{Jumlah\ lanjut\ usia\ terlantar\ yang\ mendapatkan\ pelayanan\ dasar\ rehabilitasi\ sosial\ dasar\ ana}{Jumlah\ lanjut\ usia\ terlantar\ di\ kabupaten\ atau\ kota\ dalam\ k}$
4	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	persen	100	100	100	84	80	64,57	$\frac{Jumlah\ warga\ negara\ yang\ menjadi\ korban\ bencana\ kabupaten\ atau\ kota\ yang\ mendapat\ perl}{Jumlah\ lanjut\ usia\ terlantar\ di\ kabupaten\ atau\ kota\ dalam\ kurur}$ $\frac{Jumlah\ warga\ negara\ yang\ menjadi\ korban\ bencana\ kabupaten\ atau\ kota\ yang\ mendapat\ perli}{Jumlah\ warga\ negara\ ya}$
C.									
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	persen	82,03	89,03	84,84	84,94	88,21	74,7	$\frac{Jumlah\ ibu\ hamil\ yang\ mendapatkan\ pelayanan\ K4\ di\ fasilitas\ pelayanan\ kesehatan\ milik\ pem}{Jumlah\ semua\ ibu\ hamil\ di\ wilayah\ kabupaten\ atau\ kota\ tersebut\ dalam\ kurung\ waktu}$

NO.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN						RUMUS
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	persen	84,36	98,6	91,22	84,55	92,03	82,6	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas k}}{\text{Jumlah semua ibu bersalin yang ada id wilayah kabupaten atau kota tersebut dalam kurun wak}}$
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	persen	87,9	102,2	94,57	87,65	95,32	80,06	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia } 0-28 \text{ hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahi}}{\text{Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten atau kota tersebut dalam kurun w}}$
4	Pelayanan kesehatan balita	persen	81,75	92,93	96,89	93,84	93,37	93,65	$\frac{\text{Jumlah balita } 0-59 \text{ bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dala}}{\text{Jumlah balita } 0-59 \text{ bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu sa}}$
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	persen	99,68	100	98,89	100	97,32	100	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining k}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 di wilayah kerja di wilayah kabupaten,}}$
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	persen	59,51	75,7	80,16	68,67	89,7	95,57	$\frac{\text{Jumlah pengunjung usia } 15-59 \text{ tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 di wilayah kerja di wilayah kabupaten,}} \times \frac{\text{Jumlah pengunjung usia } 15-59 \text{ tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standa}}{\text{Jumlah warga negara usia } 15-59 \text{ tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun wakt}}$
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	persen	71,17	71,3	70,03	79,48	89,57	85,11	$\frac{\text{Jumlah pengunjung usia 60 tahun keatas yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai}}{\text{Jumlah semua penduduk berusia 60 tahun keatas yang ada di wilayah kabupat}}$
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	persen	72,18	80,54	80,08	87,82	80,2	94,93	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai stan}}{\text{Jumlah semua penduduk berusia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah kabupaten dan kota ters}}$
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	persen	98,6	99,37	92,15	95,32	94,61	88,92	$\frac{\text{Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam ku}}$
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	persen	98,02	100	87,5	92	91,43	100	$\frac{\text{Jumlah ODGJ berat } (psikotik) \text{di wilayah kerja kabupaten dan kota yang mendapatkan pelayan}}{\text{Jumlah ODGJ berat } (psikotik) \text{yang ada di wilayah kabupaten d}}$
11	pelayanan orang terduga tuberkulosis	persen	94,67	85,96	100	100	70,42	100	$\frac{\text{Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama}}$
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko	persen	7526	67,85	75,59	100	93,05	84,96	$\frac{\text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di f}}{\text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun w}}$

NO.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN						RUMUS
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus)*								
D.									
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	91,6	91,1	100	88,15	92,22	93,99	*Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terha* / *Jumlah warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum ter*
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	persen	1,05	90,54	92,9	100	95	85	*Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana di kawasan raw* / *Jumlah warga negara yang seharusnya mendapat pelayanan informasi rawan bencana di kaw*
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	0,67	90,54	40	100	100	100	*Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhada* / *Jumlah warga negara yang seharusnya memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan te*
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	80	100	100	100	100	*Jumlah warga negara yang memperoleh layanan dasar penyelamatan dan evakuasi korb* / *Jumlah warga negara yang seharusnya memperoleh layanan dasar penyelamatan dan evakuas*
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen	5,51	81,82	25	90	95	100	*Jumlah warga negara yang memperoleh layanan dasar penyelamatan dan evakuasi korb* / *Jumlah warga negara yang seharusnya memperoleh layanan dasar penyelamatan dan evakuas*
E.									
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	persen	78,4	79,65	78,13	79,38	78	100	*Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan air minum layak* / *Jumlah masyarakat yang ada di wilayah kabupaten atau kota tersebut dalam kurun waktu satı*
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	persen	89,34	93,28	98,2	86,74	91,22	100	*Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan air limbah domestik* / *Jumlah masyarakat yang ada di wilayah kabupaten atau kota tersebut dalam kurun waktu satı*

NO.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN						RUMUS
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
F.									
	1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	persen	100	100	100	100	94,29	92,31	$\frac{Jumlah\ rumah\ korban\ bencana\ yang\ telah\ memperoleh\ rumah\ layak\ huni}{Jumlah\ rumah\ korban\ bencana\ yang\ berhak\ memperoleh\ rumah\ layak\ huni}$
	2 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	persen	100	100	100	100	100	92,31	$\frac{Jumlah\ warga\ negara\ yang\ terkena\ relokasi\ akibat\ program\ pemerintah\ daerah\ kabupaten}{Jumlah\ warga\ negara\ yang\ terkena\ relokasi\ akibat\ program\ pemerintah\ daerah\ kabupaten\ at}$

II.2 Gambaran Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah dua kali melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pengaturan pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota telah mengalami perubahan mendasar. Perubahan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, mendefinisikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang dapat dimiliki daerah terkait dengan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh aktivitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah. Proses ini dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, manfaat bagi masyarakat, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan dalam merealisasikan program-program yang direncanakan menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah mencakup manajemen sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja, dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah dapat dikatakan berhasil jika mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer, sehingga memiliki potensi untuk menjadi daerah yang maju dan mandiri.

Analisis pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini menjadi sangat penting dalam penyusunan RPJMD. Memahami sejauh mana kemampuan keuangan daerah, perlu diperhatikan kondisi kinerja keuangan daerah, termasuk kinerja keuangan di masa lalu serta kebijakan yang menjadi dasar dalam pengelolaannya.

II.1.A **Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

II.1.A.1 Gambaran Umum Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terintegrasi dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan representasi kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah, serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen ini disusun dengan struktur yang mencerminkan alokasi dana untuk mencapai berbagai tujuan, sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan riil masyarakat pada tahun tertentu. APBD berperan sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, analisis pengelolaan keuangan daerah memerlukan evaluasi pelaksanaan APBD selama lima tahun terakhir. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pendanaan untuk pembangunan daerah.

APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Sehingga, dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis objek pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Gambaran umum keuangan Kabupaten Belitung Timur secara umum disajikan melalui realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2024 sebagai dasar untuk menentukan rata-rata pertumbuhan. Proyeksi keuangan dilakukan untuk 5 tahun ke depan, yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan setiap tahun, komponen APBD terdiri atas:

TABEL 2. 122 KOMPONEN APBD

PENDAPATAN DAERAH	BELANJA DAERAH	PEMBIAYAAN DAERAH
• Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Pendapatan Transfer • Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.	• Belanja Operasi • Belanja Modal • Belanja Tidak Terduga • Belanja Transfer	• Penerimaan Pembiayaan Daerah • Pengeluaran Pembiayaan Daerah • Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan

Sumber: Perda Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2024, diolah

Pembahasan selanjutnya terkait kinerja pelaksanaan APBD dan kebijakan masa lalu dibagi dalam dua aspek utama:

TABEL 2. 123 ASPEK KINERJA PELAKSANAAN APBD DAN KEBIJAKAN PENGELUARAN DAERAH

KINERJA PENERIMAAN DAERAH	KINERJA PENGELUARAN DAERAH
• Pendapatan Daerah • Penerimaan Pembiayaan	• Belanja Daerah • Pengeluaran Pembiayaan

Sumber: Perda Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2024, diolah

Analisis ini penting untuk memahami sejauh mana kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik, serta untuk merancang strategi keuangan yang lebih efektif dan efisien di masa depan.

Berikut adalah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2020-2024:

TABEL 2. 124 REALISASI APBD TAHUN 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendapatan					
	A. Pendapatan Asli Daerah	102.159.584.856,00	116.077.337.747,00	119.032.928.248,00	107.408.045.045,00	99.803.408.919,23
	B. Pendapatan Transfer	655.882.482.878,00	702.824.869.754,00	792.063.720.025,00	797.524.959.927,00	746.071.353.252,00
	C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	18.465.098.50,006	27.420.519.859,00	7.514.824.022,00	8.412.879.414,00	482.122.013,00
	Jumlah Pendapatan	**Rp776.507.166.240,00**	**Rp846.322.727.360,00**	**Rp918.611.472.295,00**	**Rp913.345.884.386,00**	**Rp846.356.884.184,23**
2	Belanja					
	A. Belanja Operasi	Rp 577.536.945.350,00	Rp641.449.780.774,00	Rp652.310.550.765,00	Rp681.366.908.279,00	Rp713.272.450.475,00
	B. Belanja Modal	Rp83.174.500.800,00	Rp96.096.041.540,00	Rp123.645.920.737,00	Rp140.952.247.876,00	Rp114.290.547.065,30
	C. Belanja Tak Terduga	Rp11.380.110.712,00	Rp635.975.007,00	Rp249.084.207,00	Rp627.079.203,00	Rp559.132.832,00
	D. Belanja Transfer	Rp102.180.497.904,00	Rp101.817.354.137,00	Rp99.643.518.021,00	Rp106.829.591.760,00	Rp98.177.657.224,84
	Jumlah Belanja	**Rp774.272.054.766,00**	**Rp839.999.151.458,00**	**Rp875.849.073.730,00**	**Rp929.775.827.118,00**	**Rp926.299.787.597,14**
	Surplus/Defisit	**Rp2.235.111.474,00**	**Rp6.323.575.902,00**	**Rp42.762.398.565,00**	**-Rp16.429.942.732,00**	**-Rp79.942.903.412,91**
3	Pembiayaan					
	A. Penerimaan Pembiayaan (pinjaman dari pemerintah pus	Rp101.450.833.948,43	Rp104.150.078.761,00	Rp110.772.619.463,00	Rp153.680.929.458,00	Rp137.355.387.470,00
	B. Pengeluaran Pembiayaan (pembayaran pinjaman)at/lembaga keuangan/SILPA)	Rp2.599.664,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000.000,00

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Pembiayaan Netto	**Rp101.448.234.284,43**	**Rp104.150.078.761,00**	**Rp110.772.619.463,00**	**Rp153.680.929.458,00**	**Rp133.355.387.470,00**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**Rp103.683.345.758,43**	**Rp110.473.654.663,00**	**Rp153.535.018.028,00**	**Rp137.250.986.726,00**	**Rp53.412.84.057,09**

Sumber: BPKPD, 2024

II.1.A.2 Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan dan informasi mengenai fleksibilitas keuangan. Pemberian informasi tersebut merupakan upaya dan tindakan pemerintah daerah untuk menjalankan *good government governance* dan bentuk pertanggungjawaban atas posisi kekayaan daerah.

Neraca daerah menjelaskan posisi kekayaan daerah dengan menghitung nilai aset pemerintah daerah dikurangi dengan kewajiban sehingga diperoleh ekuitas (kekayaan bersih dari pemerintah daerah). Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa analisis terhadap kinerja neraca daerah yang diperlukan dalam merumuskan perencanaan keuangan daerah adalah analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas dilakukan untuk menganalisis kemampuan kas pemerintah daerah dalam memenuhi operasional pemerintahan dan hutang jangka pendeknya. Analisis solvabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan aset dan ekuitas daerah dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah di masa mendatang. Terakhir, analisis rasio aktivitas dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat piutang daerah dan persediaan dapat dikonversi menjadi kas atau pelayanan. Berikut adalah hasil analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas Pemerintah Kabupaten Belitung Timur selama 5 tahun terakhir.

Rasio likuiditas dianalisis menggunakan analisis rasio lancar (*current ratio*). Rasio lancar dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio lancar Pemerintah Kabupaten Belitung Timur positif dan cenderung membaik. Nilai rasio tersebut jauh masih di atas 1, sehingga kinerja rasio tersebut menunjukkan tidak adanya gejala tekanan keuangan (*financial distress*) yang serius dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur meski terjadi penurunan, karena jika dilihat dari informasi kewajiban jangka pendek,

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur cukup hati-hati dan tetap menjaga kondisi arus kasnya.

Sedangkan, analisis rasio solvabilitas dilakukan dengan menghitung analisis *Debt to Assets Ratio* (DAR). DAR bertujuan untuk melihat dan menganalisis kemampuan aset dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Hasil analisis DAR menunjukkan bahwa aset sangat mampu untuk memenuhi dan menutup kewajiban di masa mendatang, serta komposisi sumber pendanaan entitas hampir seluruhnya dari ekuitas. Secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dilihat dari kinerja neraca daerah, sangat sehat.

Rasio kemandirian ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan. Rasio PAD terhadap totalnya memiliki makna bahwa semakin besar angka rasio PAD maka kemandirian daerah semakin besar. Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kabupaten Belitung Timur masih rendah dam masih memiliki ketergantungan terhadap dana pusat.

TABEL 2. 125 ANALISIS RASIO LIKUIDITAS, RASIO SOLVABILITAS, DAN RASIO AKTIVITAS PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024*	RATA-RATA
Likuiditas (%)	2.181,06	1.486,69	4.586,10	2.216,70	2.216,70	3.813,83
Solvabilitas (%)	23.726,62	13.951,44	42.376,30	21.163,64	21.163,64	32.674,91
Kemandirian (%)	13,16	13,72	12,96	11,76	11,76	11,99

Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, 2024

Berikut adalah hasil analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas Pemerintah Kabupaten Belitung Timur selama 5 tahun terakhir dalam tabel Perkembangan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

TABEL 2. 126 PERKEMBANGAN NERACA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2024

URAIAN	2020 (RUPIAH)	2021 (RUPIAH)	2022 (RUPIAH)	2023 (RUPIAH)	2024 (RUPIAH)	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%) 4 TAHUN TERAKHIR
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	48.467.207.846,82	51.812.444.289,04	138.460.996.188,75	124.812.697.586,40	48.190.923.456,12	54,76
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	1.591.000,00	0,00	0,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	59.321,00	0,00	809.000,00	-
Kas di BLUD	6.482.212.712,55	7.882.909.724,36	15.031.830.650,10	11.340.085.343,42	4.587.063.789,39	29,25
Kas Dana	255.541.97	179.201.52	146.145.84	51.317.973,	0,00	(37,74)

URAIAN	2020 (RUPIAH)	2021 (RUPIAH)	2022 (RUPIAH)	2023 (RUPIAH)	2024 (RUPIAH)	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%) 4 TAHUN TERAKHIR
BOS	8,89	3,82	9,82	72		
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	561.962.782,60	728.527.120,60	150.031.786,60	1.221.647.996,60	0,00	221,50
Kas Lainnya	25.627.373,18	0,00	0,00	331.789.626,00	336.642.496,00	-
Kas Dana BOSP	0,00	0,00	0,00	0,00	29.464.927,72	
Kas Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00	0,00	778.985.059,00	
Setara Kas	48.172.393.952,00	50.122.264.798,00	0,00	0,00	0,00	-
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Piutang Pajak Daerah	9.275.474.012,00	8.460.040.002,00	8.634.074.033,00	8.013.357.890,50	8.475.188.247,50	(4,64)
Piutang Retribusi Daerah	400.149.804,66	488.536.437,66	621.873.684,66	987.169.951,66	2.536.432.810,82	36,04
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	9.821.246.700,66	26.801.246.535,55	7.777.901.400,66	11.305.614.230,66	13.797.115.820,50	49,09
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	3.290.049.872,00	761.078.930,00	0,00	0,00	0,00	-
Piutang Transfer Antar Daerah	8.709.672.303,60	1.285.233.669,00	1.518.171.124,00	9.210.217.076,00	9.385.192.675	146,52
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522.888.473	-

URAIAN	2020 (RUPIAH)	2021 (RUPIAH)	2022 (RUPIAH)	2023 (RUPIAH)	2024 (RUPIAH)	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%) 4 TAHUN TERAKHIR
Penyisihan Piutang	(5.931.122.415,08)	(6.051.894.168,53)	(9.784.073.672,81)	(9.813.617.352,77)	(10.912.776.069,10)	21,34
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Persediaan	13.770.281.903,67	29.410.670.078,07	14.131.287.049,56	18.781.524.741,64	17.634.054.428	31,51
JUMLAH ASET LANCAR	**143.300.698.827,55**	**171.880.258.939,57**	**176.689.888.415,34**	**176.241.805.063,83**		7,50
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Jangka Panjang Non Permanen						
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Deposito Jangka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

URAIAN	2020 (RUPIAH)	2021 (RUPIAH)	2022 (RUPIAH)	2023 (RUPIAH)	2024 (RUPIAH)	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%) 4 TAHUN TERAKHIR
Panjang						
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen						
Penyertaan Modal	35.872.384.289,00	35.562.263.665,00	35.106.952.179,00	37.024.413.607,00	41.524.725.887,00	1,11
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN	**35.872.384.289,00**	**35.562.263.665,00**	**35.106.952.179,00**	**37.024.413.607,00**	**41.524.725.887,00**	1,11
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**35.872.384.289,00**	**35.562.263.665,00**	**35.106.952.179,00**	**37.024.413.607,00**	**41.524.725.887,00**	1,11
						ASET TETAP
Tanah	303.048.137.301,91	300.889.741.839,91	301.304.775.580,85	301.630.431.280,85	301.621.431.280,85	(0,16)
Peralatan dan Mesin	402.465.800.343,87	433.398.568.486,87	463.912.628.084,87	489.558.814.974,79	507.635.347.831,53	6,75
Gedung dan Bangunan	657.677.754.647,06	714.006.683.195,46	739.093.057.298,61	769.446.315.855,91	793.674.401.368,73	5,40

URAIAN	2020 (RUPIAH)	2021 (RUPIAH)	2022 (RUPIAH)	2023 (RUPIAH)	2024 (RUPIAH)	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%) 4 TAHUN TERAKHIR
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.148.232.492.286,43	1.209.509.934.109,60	1.281.421.968.567,60	1.357.268.125.861,60	1.433.310.076.081,99	5,73
Aset Tetap Lainnya	24.372.805.231,39	25.460.666.266,39	26.050.767.366,39	27.508.738.722,39	29.086.725.322,39	4,13
Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.742.294.588,00	8.815.384.527,00	9.372.657.937,00	8.498.517.987,00	8.186.701.487,00	(0,72)
Akumulasi Penyusutan	(1.171.547.753.703,14)	(1.290.829.290.254,00)	(1.404.837.422.897,80)	(1.524.717.404.133,25)	(1.674.060.685.906,64)	9,18
JUMLAH ASET TETAP	1.372.991.530.695,52	1.401.251.688.171,23	1.416.318.431.937,52	1.429.193.540.549,29	1.399.453.997.465,85	1,35
					DANA CADANGAN	
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
JUMLAH DANA CADANGAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
					ASET LAINNYA	
Tagihan Jangka Panjang	2.110.004.622,44	1.815.609.856,68	2.061.999.995,28	4.568.806.133,59	3.669.889.672,59	40,40
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Aset Tidak Berwujud	1.247.757.827,66	1.727.577.077,66	5.045.263.207,00	5.244.263.207,00	5.295.763.207,00	78,15
Aset Lain-lain	4.243.791.701,17	1.575.500.307,49	1.678.545.307,49	34.882.854.258,49	7.099.021.868,57	640,61
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(874.358.762,66)	(851.494.866,66)	(4.258.821.034,00)	(4.512.276.413,00)	(4.936.073.949,00)	134,50
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00		-
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00	0,00	0,00	212.451.000,00	
JUMLAH ASET LAINNYA	**6.727.195.388,61**	**4.267.192.375,17**	**4.526.987.475,77**	**40.183.647.186,08**	**11.341.051.799,16**	252,39
JUMLAH ASET	**1.558.891.809.200,68**	**1.612.961.403.150,97**	**1.632.642.260.007,63**	**1.682.643.406.406,20**	**1.551.690.760.266,81**	2,58
KEWAJIBAN	**0**	**0**	**0**	**7.950.634.145,96**	**8.831.158.439,12**	0

URAIAN	2020 (RUPIAH)	2021 (RUPIAH)	2022 (RUPIAH)	2023 (RUPIAH)	2024 (RUPIAH)	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%) 4 TAHUN TERAKHIR
EKUITAS	1.558.891.809.200,68	1.612.961.403.150,97	1.632.642.260.007,63	1.682.643.406.406,20	1.551.690.760.266,81	

Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung Timur, 2024

II.1.B Proyeksi Keuangan Daerah

Proyeksi keuangan daerah merupakan sebuah prakiraan kondisi keuangan daerah di masa mendatang berdasarkan data historis, asumsi, kebijakan fiskal, dan rencana pembangunan. Proyeksi keuangan daerah bertujuan untuk membantu perencanaan anggaran jangka menengah dan panjang, menjaga stabilitas fiskal, serta mendukung pengambilan keputusan pembangunan yang berkelanjutan. Proyeksi keuangan daerah mencakup tiga komponen: pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah. Berikut adalah tabel proyeksi keuangan daerah Kabupaten Belitung Timur untuk lima tahun ke depan dimulai dari tahun 2026, disusun berdasarkan data tahun 2025.

Sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan, proyeksi keuangan daerah pada periode RPJMD 2026–2030 disusun dengan mempertimbangkan berbagai asumsi makro ekonomi nasional, arah kebijakan fiskal nasional, kapasitas fiskal daerah, serta proyeksi kebutuhan pendanaan pembangunan prioritas daerah. Secara umum, kapasitas fiskal daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan diproyeksikan mengalami pertumbuhan moderat, seiring dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, serta optimalisasi sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah. Proyeksi ini disusun dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal dan mempertimbangkan potensi risiko fiskal di masa mendatang.

Pendapatan Daerah diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 1–5% per tahun. Peningkatan ini terutama ditopang oleh optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan efisiensi pengelolaan aset daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan. Sementara itu, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID), diproyeksikan tetap menjadi sumber utama pendapatan daerah.

Belanja Daerah dirancang untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, terutama pada sektor-sektor prioritas pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Proyeksi belanja daerah mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Alokasi belanja modal diarahkan pada pembangunan infrastruktur strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Defisit anggaran, jika terjadi, direncanakan tetap berada dalam batas fiskal yang aman sesuai peraturan perundang-undangan, dan akan dibiayai melalui pembiayaan yang sah dan tidak memberatkan keuangan daerah di masa mendatang. Pemerintah Daerah juga berkomitmen untuk menjaga keseimbangan prioritas anggaran, meningkatkan kemampuan keuangan daerah, serta meningkatkan efisiensi belanja operasional. Proyeksi keuangan

ini akan menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang realistis dan terukur, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah selama periode RPJMD 2025–2030. Proyeksi keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 2. 127 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH TAHUN 2026-2030

KODE	URAIAN		PROYEKSI TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**794.393.787.567**	**844.452.550.530**	**862.290.092.202**	**880.302.163.554**	**898.974.656.797**	**944.756.809.617**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**127.780.018.567**	**139.642.539.310**	**143.393.880.758**	**147.038.027.881**	**151.055.238.410**	**152.465.790.794**
4.1.1	Pajak Daerah	65.042.000.000	76.094.247.847	77.586.500.000	78.971.000.000	80.728.000.000	81.435.280.000
4.1.2	Retribusi Daerah	7.914.161.192	8.100.008.416	8.285.855.640	8.471.702.864	8.657.550.088	8.744.125.589
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.523.052.522	5.578.283.047	5.634.065.878	5.690.406.537	5.747.310.602	5.804.783.708
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	49.300.804.853	49.870.000.000	51.887.459.240	53.904.918.480	55.922.377.720	56.481.601.497
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**665.364.019.000**	**704.310.011.220**	**718.396.211.444**	**732.764.135.673**	**747.419.418.387**	**791.791.018.823**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	631.614.019.000	669.885.011.220	683.282.711.444	696.948.365.673	710.887.332.987	754.893.612.569
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	33.750.000.000	34.425.000.000	35.113.500.000	35.815.770.000	36.532.085.400	36.897.406.254
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**1.249.750.000**	**500.000.000**	**500.000.000**	**500.000.000**	**500.000.000**	**500.000.000**
5	**BELANJA DAERAH**	**848.306.271.624**	**871.617.847.701**	**891.903.978.912**	**911.050.189.722**	**930.535.578.317**	**977.005.919.549**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**700.454.561.429**	**733.224.660.341**	**657.232.959.557**	**668.394.681.289**	**679.517.673.919**	**711.229.379.311**
5.1.1	Belanja Pegawai	467.300.033.269	499.520.503.065	310.000.000.000	315.000.000.000	321.200.000.000	321.800.000.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	220.559.547.357	215.212.640.665	325.722.527.780	330.784.345.195	335.606.434.464	366.616.227.461
5.1.5	Belanja Hibah	9.624.980.803	9.891.516.611	9.990.431.777	10.090.336.094	10.191.239.455	10.293.151.850
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.970.000.000	8.600.000.000	11.520.000.000	12.520.000.000	12.520.000.000	12.520.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**50.935.708.412**	**38.900.783.915**	**133.458.345.150**	**139.676.262.407**	**146.205.075.527**	**159.925.583.079**
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.583.398.936	9.569.781.219,00	22.666.909.008	23.750.254.458	24.887.767.181	27.276.543.898
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.098.046.306	6.568.770.114,00	39.296.555.409	41.061.383.179	42.914.452.338	46.805.897.572
5.2.4	Belanja Modal Jalan,	16.744.703.570	21.085.239.883,04	69.832.969.403	73.124.617.873	76.580.848.767	83.838.933.644

KODE	URAIAN	PROYEKSI TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Jaringan, dan Irigasi						
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.409.559.600	1.576.992.699	1.561.911.330	1.640.006.897	1.722.007.241	1.894.207.965
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	110.000.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**95.916.001.783**	**98.492.403.445**	**100.212.674.205**	**101.979.246.026**	**103.812.828.871**	**104.850.957.159**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	8.414.097.783	7.447.300.842	7.587.235.564	7.744.270.287	7.938.555.009	8.017.940.559
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	87.501.904.000	91.045.102.603	92.625.438.641	94.234.975.739	95.874.273.862	96.833.016.600
	SURPLUS / (DEFISIT)	**-53.912.484.057**	**-27.165.297.171**	**-29.613.886.710**	**-30.748.026.168**	**-31.560.921.520**	**-32.249.109.932**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	53.912.484.057	27.165.297.171	29.613.886.710	30.748.026.168	31.560.921.520	32.249.109.932
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	53.912.484.057	27.165.297.171	29.613.886.710	30.748.026.168	31.560.921.520	32.249.109.932
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0	0	0

Sumber: BPKPD Kabupaten Belitung timur, 2025

Di tengah kondisi menurunnya kondisi pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya wilayah Kabupaten Belitung Timur, mengutip data dari kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebutkan bahwa, "Sepanjang tahun 2024, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh 0,77%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 4,38%. Deselerasi perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seiring dengan dinamika komoditas unggulan timah yang relatif mengalami perlambatan pada tahun 2024. Secara regional di wilayah Sumatera, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi yang terendah". Namun demikian, untuk memberikan panduan dalam perencanaan pembangunan daerah, maka kerangka pendanaan disusun dengan berbagai asumsi yang akan terus dilakukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan, baik faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Beberapa asumsi yang digunakan dalam menetapkan kerangka pendanaan ini di antaranya adalah :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan potensi yang ada dengan didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan organisasi perangkat daerah yang melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Utamanya adalah menggali potensi pajak daerah dari sektor PBB dan BPHTB yang

bersumber dari tanah perkebunan masyarakat sebagai pengganti objek pajak mineral bukan logam (MBLB) yang mengalami tren penurunan realisasi pajaknya.

2. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi para aparatur, pemenuhan sarana dan prasarana untuk pemungutan dan pelayanan, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, kerja sama dengan berbagai pihak terkait, sosialisasi perpajakan dan retribusi daerah serta peningkatan kesadaran wajib pajak dan penagihan pajak terutang dan berbagai upaya lainnya. Kerja sama yang telah dilakukan saat ini adalah kerja sama dengan pihak kejaksaan negeri kabupaten belitung timur dalam rangka optimalisasi penagihan piutang pajak daerah. Selanjutnya, akan melakukan kerja sama dengan pihak lainnya dalam upaya optimalisasi pendapatan dari sektor pajak daerah.
3. Meningkatkan pelayanan badan layanan umum daerah, mengoptimalkan pengelolaan kas daerah untuk menghasilkan pendapatan giro dan deposito dan meningkatkan pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya untuk lain-lain PAD yang sah.
4. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam perolehan dana transfer pemerintah pusat dan provinsi dan terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mendapatkan penghargaan berupa dana insentif bagi pemerintah daerah.

Perhitungan proyeksi pendapatan daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2030, didasarkan pada berbagai pertimbangan dan asumsi. Pertimbangan dan asumsi tersebut di antaranya meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, potensi pendapatan, kebijakan dari pemerintah (pusat dan provinsi). Perhitungannya dilakukan secara rasional, dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Realisasi pendapatan daerah beberapa tahun terakhir serta kondisi pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha saat ini merupakan faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan proyeksi pendapatan daerah.

A. Gambaran Keuangan daerah

Pada **Tabel 2.127** dapat dilihat bahwa pendapatan daerah diprediksikan akan mengalami peningkatan. Asumsi yang digunakan terjadi peningkatan setiap tahunnya seiring periode pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional khususnya di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

B. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah

Dalam melakukan proyeksi pendapatan asli daerah (PAD), beberapa asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan antara lain pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri, inflasi serta pertumbuhan penduduk, dan juga diproyeksikan terjadi melalui beberapa strategi utama, antara lain penguatan kebijakan intensifikasi pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan basis penerimaan daerah. Ketiga asumsi tersebut menjadi dasar dalam menentukan besaran pertumbuhan untuk menghitung proyeksi PAD lima tahun yang akan datang. Secara lebih rinci, asumsi dalam menghitung proyeksi PAD dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan pajak daerah pada tahun 2025-2030 diasumsikan mengalami kenaikan. Digitalisasi sistem perpajakan menjadi faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan, dengan fokus pada peningkatan kepatuhan wajib pajak serta transparansi dalam pengelolaan pajak daerah, dimana

salah satu asumsinya adalah peningkatan potensi pada Pajak Opsen PKB dan Pajak Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Pajak PBJT-Tenaga Listrik. Hal ini telah disepakati dalam komitmen bersama dengan Pemerintah Provinsi untuk bersinergi dalam melakukan penagihan pajak, optimalisasi penerimaan pajak, melakukan pendaftaran, pendataan, pertukaran data dan informasi, pemanfaatan program, pengelolaan, pengurusan izin, pengawasan, pendampingan, dukungan kapasitas, penagihan, perluasan titik layanan pembayaran, sosialisasi dan edukasi serta penindakan di lapangan, pendanaan biaya operasional, rekonsiliasi pajak, dan sebagainya.

2) Pendapatan retribusi daerah pada tahun diasumsikan juga mengalami kenaikan dengan pertumbuhan sebesar 0-5 persen pada tahun 2025-2030. Asumsi ini didasarkan pada kondisi adanya penambahan sumber-sumber retribusi yang baru serta pengoptimalan pemanfaatan kekayaan/aset milik daerah;

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diasumsikan meningkat meskipun tidak signifikan, hal ini diasumsikan adanya penambahan penyertaan modal pada Bank Sumsel Babel sehingga akan menambah potensi dividen sahamnya;

4) Lain-lain PAD yang sah juga diproyeksikan akan mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jenis pelayanan dan meningkatnya kinerja pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam rangka meningkatkan penerimaan melalui lain-lain PAD yang sah, salah satu hal yang akan didorong adalah kemandirian BLUD sehingga diharapkan akan mengurangi ketergantungan BLUD terhadap APBD.

C. Proyeksi Pendapatan Transfer

Struktur pendapatan daerah Kabupaten Belitung Timur didominasi pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dengan persentase lebih dari 70 persen. Dalam hal ini banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah yang bersumber pendapatan transfer pemerintah pusat tersebut. Secara umum, beberapa kondisi yang dijadikan sebagai asumsi dasar dalam melakukan perhitungan proyeksi pendapatan transfer seperti adanya penambahan pegawai (ASN) serta perbaikan pelayanan dan kinerja pemerintah daerah diprediksi akan mempengaruhi penerimaan pendapatan transfer ke daerah. Adanya pengadaan atau penambahan pegawai (ASN) diprediksi meningkatkan penerimaan pendapatan transfer khususnya melalui DAU. Selain itu, peningkatan pelayanan dan kinerja yang semakin baik diprediksi dapat mendorong peningkatan penerimaan pendapatan transfer. Terkait dengan hal tersebut, diperlukan adanya sebuah *roadmap* pengembangan keuangan daerah yang dapat membantu daerah mengelola, meningkatkan serta mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Secara lebih rinci, asumsi dalam menghitung proyeksi pendapatan transfer dijelaskan sebagai berikut :

1) Pendapatan transfer yang terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer dari Pemerintah Daerah lainya diasumsikan meningkat dengan prasyarat kondisi perekonomian nasional dan daerah berangsur pulih dan menunjukkan perkembangan yang positif;

2) Dana Bagi Hasil (DBH) diproyeksikan meningkat dengan pertumbuhan sebesar 7-10 persen dengan asumsi adanya kenaikan *royalti* PT. Timah serta tata kelola niaga timah semakin membaik.

3) Dana Alokasi Umum (DAU) juga diproyeksikan meningkat dengan pertumbuhan sebesar 3-5 persen, seiring harapan adanya penambahan tenaga ASN yang baru masuk dalam perhitungan komponen DAU.
4) Dana Alokasi Khusus (DAK) diproyeksikan meningkat dengan asumsi meningkatkan kinerja dari masing-masing perangkat daerah untuk berupaya mendapatkan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik.
5) Dana Insentif Fiskal (DIF) juga diproyeksikan meningkat, dengan asumsi bahwa kinerja perangkat daerah juga harus ditingkatkan serta laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten belitung timur terus mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP).
6) Proyeksi Dana Desa tahun 2025-2030 diasumsikan meningkat 0-1 persen.
7) Pendapatan bagi hasil dari provinsi pada tahun 2025-2030 diproyeksikan meningkat dengan pertumbuhan sebesar 3-5 persen seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha yang akan menyebabkan penambahan objek-objek pajak baru untuk menambah realisasi pendapatan bagi hasil dari provinsi.

Belanja daerah pada periode RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2030 dirancang sebagai instrumen utama dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur wilayah, serta pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Selama periode lima tahun ke depan, struktur belanja daerah diharapkan mengalami perbaikan secara bertahap dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Pemerintah daerah akan berupaya mengendalikan proporsi belanja operasional agar tidak membebani fiskal daerah secara berlebihan, sekaligus meningkatkan porsi belanja modal guna mempercepat pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja prioritas tetap menjadi komponen utama dalam mendukung penyelenggaraan layanan dasar publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pelayanan pemerintahan. Namun demikian, pengendalian terhadap belanja pegawai dan optimalisasi belanja barang dan jasa akan menjadi perhatian utama, agar ruang fiskal dapat dialihkan ke belanja produktif.

Belanja modal akan diarahkan untuk memperkuat infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, air bersih, sanitasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Peningkatan belanja modal ini dimaksudkan untuk mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah, membuka akses ekonomi baru, dan meningkatkan daya saing daerah.

Di samping itu, belanja daerah juga akan dialokasikan untuk mendukung inovasi pelayanan publik, digitalisasi pemerintahan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan penanganan isu strategis seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan pengurangan risiko bencana.

Dalam pelaksanaannya, seluruh kebijakan belanja akan mengacu pada prinsip *value for money*, transparansi, akuntabilitas, serta memperhatikan kesinambungan fiskal. Pemerintah daerah akan memperkuat mekanisme perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta melakukan evaluasi

berkelanjutan untuk memastikan bahwa belanja daerah memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Perhitungan proyeksi belanja daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2030 didasarkan pada realisasi belanja beberapa tahun terakhir, termasuk rencana belanja tahun 2025. Perubahan proyeksi belanja ini juga didasarkan atas kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan untuk membiayai segala jenis belanja tersebut. Selain itu, belanja juga dihitung berdasarkan kebutuhan untuk mendanai program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Belitung Timur.

Kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Secara umum, belanja diproyeksikan mengalami peningkatan pada periode 2026-2030. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Belanja pegawai dilakukan berdasarkan persentase dengan penambahan *acress* 2,5% dan pada APBD TA. 2027 s.d 2030 mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa penganggaran belanja pegawai diwajibkan hanya sebesar 30%. Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan belanja gaji dan tunjangan di luar TPP serta DAK Non Fisik maka didapat persentase belanja pegawai maksimal sebesar 30% dari total belanja.
2. Belanja barang dan jasa bertambah berdasarkan *acress* sebesar 1% dan pada APBD Tahun Anggaran 2027 s.d 2030 merupakan peralihan dari sebagian belanja pegawai, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Belanja hibah dan bantuan sosial asumsi meningkat berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan Program Andalan Bantuan Renovasi 1.000 Rumah Warga Tak Layak Huni.
4. Belanja modal untuk belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal aset tetap lainnya diproyeksikan akan bertambah secara bertahap setiap tahun. Penambahan belanja modal ini diperlukan untuk pengadaan aset yang baru maupun rehabilitasi aset agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi aparatur dan publik dalam pelaksanaan pembangunan di Belitung Timur.
5. Belanja tidak terduga diproyeksikan tetap. Nilai belanja tidak terduga tersebut diasumsikan tetap mulai tahun 2025 sampai dengan 2030.
6. Belanja bagi hasil berdasarkan persentase sebesar 10% dari pendapatan pajak dan retribusi daerah.
7. Belanja alokasi dana desa dianggarkan sebesar 10% dari pendapatan dana alokasi khusus dan dana bagi hasil Pemerintah Pusat.
8. Belanja wajib (*mandatory spending*) meliputi: alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD, alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik pada APBD TA. 2027 minimal 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah.

II.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Penyusunan masalah pembangunan daerah dan analisis isu strategis menjadi landasan untuk disesuaikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, yang kemudian dijabarkan sebagai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan teknokratik akan merancang langkah-langkah sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan tantangan-tantangan yang perlu diatasi dalam pembangunan daerah.

II.1.A Permasalahan

Masalah pembangunan daerah mengacu pada dokumen RPJPD Kabupaten Belitung Timur 2025-2045 yang bertujuan merancang strategi untuk mengatasi berbagai tantangan. Berdasarkan evaluasi RPJPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025- 2029 dalam tahap pertama yang disebut 'Penguatan Pondasi Transformasi', serta berdasarkan kesepakatan *stakeholders* pembangunan daerah, diperoleh identifikasi beberapa masalah utama dalam pembangunan Kabupaten Belitung Timur, di antaranya:

1) **Belum Optimalnya Tata Kelola Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Berkualitas**

   Tata kelola pemerintahan pada Kabupaten Belitung Timur memiliki beberapa permasalahan yang ditemukan, seperti belum optimalnya kinerja perangkat daerah, masih rendahnya kompetensi dan profesionalisme pegawai, belum optimalnya kinerja pengawasan Pemerintah Daerah, belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa, dan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik.

2) **Masih Rendahnya Kualitas serta Daya Saing Sumber Daya Manusia**

   Permasalahan sumber daya manusia pada Kabupaten Belitung Timur adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan beberapa hal seperti: masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan pendidikan, masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, masih tingginya angka kemiskinan, masih rendahnya daya saing tenaga kerja Kabupaten Belitung Timur, dan belum stabilnya ketahanan pangan pada masyarakat. Selain itu, rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, belum optimalnya pemenuhan hak anak Kabupaten Belitung Timur, belum optimalnya indeks pembangunan literasi masyarakat, belum optimalnya layanan kepemudaan, dan belum optimalnya layanan keolahragaan juga menjadi permasalahan yang ada.

3) **Rendahnya Produktivitas serta Daya Saing Ekonomi Daerah**

   Rendahnya daya saing perekonomian daerah dan belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat minimnya kontribusi sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta belum optimalnya pengelolaan investasi dan konektivitas wilayah, diperburuk oleh kerusakan lingkungan hidup, ancaman perubahan iklim, bencana hidrometeorologis, pencemaran, serta turunnya kualitas dan perlindungan keanekaragaman hayati.

4) Belum Meratanya Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Pelayanan Dasar

Permasalahan pembangunan infrastruktur pada Kabupaten Belitung Timur adalah adalah belum meratanya pembangunan infrastruktur dan belum meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah. Selain itu, permasalahan lain yang ditemukan adalah belum optimalnya infrastruktur transportasi, untuk konektivitas antar wilayah, termasuk jalan dan jembatan.

5) Terjadinya Kerusakan dan Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup yang Mengakibatkan Tingginya Potensi Bencana

Kualitas lingkungan hidup yang menurun mempengaruhi kenyamanan masyarakat hingga dapat mengakibatkan potensi bencana yang tinggi. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pengelolaan persampahan, pengawasan dan pembinaan akan dampak limbah B3 serta *TENORM* (*Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material*), sebuah istilah yang merujuk pada bahan radioaktif alami yang konsentrasinya meningkat atau terpapar ke lingkungan akibat aktivitas manusia atau proses teknologi. Selain itu, penurunan kualitas lingkungan hidup juga dipengaruhi oleh tingginya risiko bencana banjir, kebakaran hutan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, abrasi dan kekeringan.

II.1.B Isu Strategis Daerah

II.1.B.1 Isu Strategis Level Global

***1) Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai Kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*)**

Isu strategis merupakan fokus utama dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis kondisi eksisting dan tinjauan terhadap isu-isu strategis di tingkat global, nasional, dan regional. Analisis isu-isu strategis menjadi elemen kunci dalam menyusun dokumen perencanaan yang menjadi dasar untuk merumuskan program-program prioritas. Penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi landasan untuk penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Timur. Isu strategis yang disusun mengacu pada hubungan antara pilar-pilar, termasuk:

a) Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
b) Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
c) Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
d) Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

e) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
f) Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
g) Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan, dan modern untuk semua orang.
h) Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
i) Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
j) Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
k) Membangun kota-kota serta permukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan, dan berkelanjutan.
l) Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
m) Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
n) Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
o) Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
p) Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
q) Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

2) Mega Tren Dunia 2045

Global Mega Trend Dunia 2045 akan dihadapi oleh Indonesia yaitu:

a) Demografi Global

Pertumbuhan diproyeksi hingga tahun 2045 akan melambat dengan pertambahan sekitar 0,84 persen per tahun. Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan menempati menjadi urutan ke-5 pada tahun 2045. Kemudian Pada tahun 2045, India diperkirakan menjadi negara berpenduduk terbesar di dunia serta jumlah penduduk Nigeria akan melampaui Indonesia.

Arus migrasi lintas negara semakin meningkat akibat tekanan demografi yang tinggi di Afrika dan Asia. Migrasi yang signifikan di kedua benua ini dipicu oleh disparitas ekonomi antar wilayah yang signifikan, yang mempengaruhi standar hidup. Migrasi lintas negara dapat berkontribusi pada keseimbangan pasar tenaga kerja global, terutama dalam kategori tenaga kerja berketerampilan rendah dan menengah. Perbedaan kebijakan migrasi di setiap negara menghasilkan variasi dalam arus migrasi, di mana jumlah populasi lanjut usia diperkirakan akan meningkat seiring dengan menurunnya tingkat fertilitas dan peningkatan harapan hidup. Proporsi populasi lanjut usia global semakin meningkat. Peningkatan populasi lanjut usia ini akan menimbulkan tekanan fiskal dan politis, khususnya terkait dengan perbaikan sistem kesehatan dan perluasan perlindungan sosial.

b) Urbanisasi Dunia

Pertumbuhan penduduk mendorong urbanisasi karena lebih dari separuh populasi dunia tinggal di perkotaan, dengan banyaknya migrasi dari pedesaan ke perkotaan, terutama di Asia. Menurut proyeksi PBB, jumlah penduduk perkotaan di Asia pada tahun 2050 diperkirakan akan mencapai 3,3 miliar orang, di mana sekitar 1 miliar di antaranya adalah penduduk perkotaan di Cina. Pada tahun 2050, sekitar 65 persen populasi global diproyeksikan tinggal di perkotaan, dengan 95 persen pertambahan terjadi di ekonomi berkembang. Pembangunan perkotaan di ekonomi berkembang seringkali kurang memadai dan kurang terencana, yang berpotensi memperburuk pelayanan masyarakat serta aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Pelayanan masyarakat yang krusial seperti penyediaan air, drainase, sanitasi, listrik, dan infrastruktur jalan perlu dipersiapkan dengan baik di kawasan permukiman tersebut.

Kesenjangan antara kota-kota semakin membesar, terutama dalam distribusi demografi antar wilayah serta fokus pada infrastruktur krusial seperti rumah sakit dan perguruan tinggi yang berkualitas. Antisipasi konsentrasi penduduk di kota metropolitan dilakukan melalui upaya pembangunan kota-kota sedang dan kecil yang lebih sesuai untuk ditempati, dengan menawarkan layanan yang sebanding dengan kota besar. Gagasan ini diimplementasikan melalui konsep-konsep seperti kota hijau, kota pintar, atau kota serba hadir (*ubiquitous cities*) yang saat ini tengah menjadi tren dalam pembangunan perkotaan secara global.

c) Meningkatnya Peranan *Emerging Economies*

Pergeseran geoekonomi global menjaga pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Diperkirakan sebanyak 84 negara berkembang pada tahun 2050 akan memiliki pendapatan per kapita yang melebihi negara-negara Eropa Selatan pada tahun 2015. Institusi ekonomi berperan sebagai pendorong pertumbuhan bagi negara-negara berkembang. Kebijakan makroekonomi yang kredibel dan didasarkan pada prinsip kehati-hatian telah menjadi landasan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang selama ini dan akan terus menjadi pilar utama di masa depan. Investasi jangka panjang dalam meningkatkan sumber daya manusia dan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Reformasi dan peningkatan iklim usaha akan mendukung pembentukan struktur ekonomi yang kompetitif dan berkualitas.

d) Integrasi Perdagangan Internasional

Diperkirakan bahwa negara-negara berkembang akan menjadi pusat perdagangan dan investasi global. Pertumbuhan perdagangan global akan didorong oleh peningkatan perdagangan di negara-negara berkembang. Pertumbuhan perdagangan antar negara berkembang diperkirakan mencapai 6 persen, hampir dua kali lipat dari pertumbuhan perdagangan global. Pertumbuhan perdagangan negara-negara berkembang akan terutama didorong oleh negara-negara di Asia Timur yang memiliki tingkat integrasi dan pertumbuhan yang tinggi. China, India, Indonesia, Vietnam, dan Malaysia diperkirakan akan mengalami pertumbuhan perdagangan internasional antara 8 hingga 11 persen setiap tahunnya hingga tahun 2030. China diproyeksikan menjadi eksportir terbesar di dunia, dengan peran dalam ekspor global mencapai 19 persen pada tahun 2030, naik dari 12 persen pada tahun 2012. India dan Indonesia diperkirakan akan menyumbang masing-masing 3 persen dan 2 persen dari total ekspor global pada tahun 2030. Peran ekonomi maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang dalam perdagangan global diperkirakan akan semakin menurun, mencapai hanya 12 persen, 14 persen, dan 4 persen pada tahun 2030, turun dari masing-masing 14 persen, 19 persen, dan 7 persen pada tahun 2012.

e) Keuangan Internasional

Negara-negara berkembang telah meningkatkan proporsi kepemilikan cadangan devisa secara signifikan. Proporsi cadangan devisa mereka naik dari 40 persen dari total global pada tahun 2003 menjadi 66 persen pada tahun 2013. Selain pengaruh kebijakan perdagangan Cina, banyak negara berkembang lainnya juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam investasi langsung asing (*Foreign Direct Investment*, FDI) dan investasi portofolio asing (*Foreign Portfolio*

Investment, FPI). Perkembangan di sektor keuangan berhubungan erat dengan kemajuan ekonomi mereka.

Kemajuan sektor keuangan dapat diukur dengan menggunakan Indeks Pengembangan Keuangan. Indeks ini menunjukkan hubungan positif dengan laju pertumbuhan ekonomi sampai pada titik tertentu, kemudian menurun membentuk pola kurva-U terbalik. Sebagai contoh, negara-negara di dunia ketiga seperti Gambia memiliki Indeks Pengembangan Keuangan yang rendah (0,2) yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat (1 persen). Sementara itu, Maroko memiliki Indeks Pengembangan Keuangan yang sedang (0,4) dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (5 persen). Sebaliknya, negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang memiliki Indeks Pengembangan Keuangan yang tinggi (0,8-0,9) namun pertumbuhan ekonominya lebih moderat (3 persen).

f) Kelas Pendapatan Menengah (*Middle Income Class*)

Pertumbuhan kelas menengah yang cepat menciptakan kesempatan dan juga tantangan karena jumlahnya yang semakin besar dan dampaknya yang luas secara ekonomi, sosial, dan politik. Berdasarkan segi ekonomi, kelas menengah akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendapatan per kapita akan mendorong konsumsi serta meningkatkan tabungan dan investasi. Hal ini memberikan peluang bagi industri dalam negeri maupun luar negeri untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat juga membuka peluang bagi perkembangan industri baru, termasuk di bidang keuangan dan investasi. Peluang ini harus dimanfaatkan secara optimal oleh industri dalam negeri.
Melihat dari perspektif sosial dan politik, pertumbuhan kelas menengah yang meningkat juga meningkatkan akses terhadap informasi dan eksposur masyarakat terhadap berbagai informasi dan ideologi. Eksposur terhadap informasi dan ideologi ini memiliki potensi untuk mengubah nilai-nilai di masyarakat, yang dapat menyebabkan konflik antargenerasi jika tidak dikelola dengan baik. Akses terhadap informasi juga membuka peluang bagi generasi yang lebih terbuka terhadap nilai-nilai global seperti demokrasi, persamaan hak, dan inovasi kreatif secara sosial, yang dapat mempengaruhi nilai budaya suatu negara.

g) Persaingan Sumber Daya Alam

Persaingan untuk mendapatkan sumber daya alam tetap tinggi. Bertambahnya jumlah penduduk global, meningkatnya aktivitas ekonomi, dan perubahan gaya hidup semakin meningkatkan permintaan terhadap sumber daya alam yang terbatas. Hal ini mendorong persaingan dalam perebutan sumber daya alam, baik di dalam negeri maupun antar negara. Meskipun diperkirakan bahwa peningkatan dalam sumber daya alam tidak akan cukup untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, terutama dengan perlambatan pertumbuhan penduduk global, kecuali jika terjadi terobosan teknologi yang berkelanjutan.

Siklus ekonomi global di masa depan, fluktuasi harga komoditas diperkirakan akan terus berlangsung. Meskipun teknologi terus berkembang untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, permintaan terhadap komoditas tetap tinggi, sehingga persaingan untuk sumber daya alam diperkirakan akan semakin meningkat.

h) Perubahan Teknologi

Tren global hingga tahun 2045 akan ditandai oleh kemajuan teknologi di berbagai sektor, seperti teknologi informasi dan komunikasi, bioteknologi dan rekayasa genetik, kesehatan dan pengobatan, energi terbarukan, perangkat *wearable*, otomatisasi dan robotika, serta kecerdasan buatan. Perkembangan teknologi ini akan mempercepat proses globalisasi dan pertukaran informasi antar negara. Selain itu, teknologi akan meningkatkan mobilitas, produktivitas, dan umur harapan hidup, terutama melalui kemajuan di bidang kesehatan dan rekayasa genetik. Perkembangan teknologi digital dan informasi akan berlangsung dengan cepat, mendukung pertumbuhan sektor jasa dan transaksi *online*. Revolusi di sektor keuangan dan perdagangan global juga didorong oleh teknologi digital, dengan transaksi menggunakan mata uang digital yang berpotensi mengubah proses transaksi global dan mendorong pergeseran dari ketergantungan pada sektor keuangan tradisional, terutama untuk negara-negara dengan mata uang kecil.

Perubahan teknologi yang cepat berdampak signifikan pada industri manufaktur. Revolusi industri pada abad ke-18 (industri 1.0) mengenalkan mekanisasi industri yang memicu transformasi ekonomi global secara cepat dan belum pernah terjadi sebelumnya. Revolusi ini berlanjut pada abad ke-19 (industri 2.0) dengan penggunaan listrik dan *peningkatan division of labor* yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui sistem produksi masal. Pada pertengahan abad ke-20 dimulai era revolusi industri (industri 3.0) dengan pengembangan mesin elektronik dan otomasi dalam produksi. Proses ini terus berlanjut, dan di abad ke-21, kita menyaksikan munculnya industri berbasis *cyber* yang mengelola produksi secara virtual dan mengotomatisasi proses (industri 4.0).

Tren industrialisasi akan menjadi penentu utama postur ekonomi global pada tahun 2045. Negara-negara maju yang telah memasuki era revolusi industri 3.0 dan 4.0 akan fokus pada industri yang dominan menggunakan otomatisasi dan perangkat produksi yang terhubung melalui sistem berbasis internet. Perkembangan ini sejalan dengan penurunan jumlah pekerja di negara-negara maju yang sedang mengalami penuaan penduduk. Produk yang dihasilkan oleh negara-negara maju ini cenderung berupa produk bernilai tinggi dan disesuaikan (*customized*).

Sementara itu, negara-negara berkembang akan beralih dari era industri 2.0 menuju industri 3.0, dimana permintaan terhadap pekerja terampil semakin meningkat. Ekonomi yang sedang

berkembang akan berada pada era industri 3.0, dimana produksi massal akan disertai dengan produksi *customized* yang efisien menggunakan dukungan perangkat elektronik dan robotik.

i) Perubahan Iklim

Tantangan utama yang dihadapi dunia saat ini adalah pemanasan global yang semakin intensif, yang tercermin dalam kejadian cuaca ekstrem dan perubahan iklim jangka panjang. Perubahan iklim memiliki dampak yang luas pada berbagai aspek kehidupan manusia. Pemanasan global terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan suhu global. Kenaikan emisi gas rumah kaca akan menyebabkan suhu global naik sekitar 2 hingga 5 derajat celcius. Proyeksi menunjukkan bahwa kenaikan suhu global ini akan mencapai puncaknya antara tahun 2030 dan 2060. Beberapa studi menyarankan bahwa kemungkinan terjadinya kenaikan suhu global lebih dari 5 derajat Celcius mencapai sekitar 20 persen. Kenaikan suhu global melebihi 5 derajat Celcius akan memiliki dampak yang serius bagi kehidupan di bumi.

Proses pemanasan global sedang berlangsung secara bertahap dengan dampak yang sudah mulai terasa saat ini. Pemanasan global menyebabkan perubahan pola cuaca dan iklim yang ekstrem. Hal ini meningkatkan risiko kekeringan di beberapa daerah dan sebaliknya, serta meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor di daerah lainnya. Perubahan kondisi atmosfer dan cuaca yang ekstrem juga meningkatkan potensi badai dan angin kencang seperti badai dan topan. Selain itu, penyakit endemik di wilayah tropis, seperti malaria dan demam berdarah, akan semakin sulit untuk diberantas. Potensi munculnya kembali penyakit lama dan munculnya jenis penyakit baru juga meningkat di seluruh wilayah, terutama di daerah tropis. Fenomena pencairan es di kutub juga meningkatkan permukaan air laut dan mengancam penduduk di kota-kota pesisir dengan risiko abrasi pantai. Meskipun dampak perubahan iklim terhadap produksi bahan pangan belum terasa secara signifikan saat ini, potensi masalah ini perlu diantisipasi sejak dini.

II.1.B.2 Isu Strategis Level Nasional

Hasil evaluasi dari RPJMN Tahun 2020-2024 menjadi landasan untuk rancangan strategis dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional. Evaluasi ini menetapkan agenda pembangunan yang meliputi: 1) Meningkatkan ketahanan ekonomi untuk pembangunan yang inklusif dan berkeadilan; 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi disparitas dan memastikan kesetaraan; 3) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; 4) Reformasi mental dan peningkatan budaya; 5) Penguatan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan layanan dasar; 6) Pembangunan lingkungan dan peningkatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim; 7) Meningkatkan stabilitas keamanan nasional dan transformasi pelayanan publik. Evaluasi ini membentuk tema dan arah kebijakan untuk RPJMN Tahun 2025- 2029, yaitu:

1) Isu Strategis Transformasi Sosial

Transformasi sosial fokus terhadap penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Tujuan dari transformasi sosial yaitu meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, *resilient*, unggul, dan berdaya saing. Isu strategis transformasi sosial diantaranya:

- Kesehatan untuk semua: pembangunan kesehatan untuk menghadapi tantangan dalam meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penguatan dan pemerataan kapasitas ketahanan kesehatan, serta *responsiveness* sistem kesehatan di seluruh wilayah.
- Pembangunan kualitas yang merata: penyiapan pembangunan pendidikan dihadapkan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang.
- Perlindungan sosial yang adaptif: perlindungan sosial yang adaptif menekankan percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

2) Isu Strategis Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi cenderung mengejar pertumbuhan produktivitas yang dilihat dari perkembangan sektor-sektor ekonomi. Beberapa sektor belum menunjukkan peningkatan pertumbuhan seperti industrialisasi yang cenderung mengalami penurunan. Tenaga kerja berpendidikan di sektor pertanian pada jenjang menengah ke bawah relatif tinggi. Penurunan produktivitas dapat terjadi di sektor pertanian akibat adopsi teknologi yang rendah serta degradasi kualitas lahan. Kemudian sektor UMKM dan koperasi dalam meningkatkan kapasitas produksi masih terkendala terutama sisi permodalan dan adopsi teknologi. Pembangunan berkelanjutan melalui transisi energi masih rendahnya pemanfaatan energy yang terbarukan. Pendekatan ekonomi hijau dan biru membutuhkan biaya dan teknologi dikarenakan belum mencapai posisi yang kuat. Adapun beberapa isu strategis transformasi ekonomi sebagai berikut**:**

a) Sektor Industri

- Deindustrialisasi dini, ditunjukkan oleh penurunan rasio PDB industri pengolahan per PDB;
- Rendahnya produktivitas tenaga kerja;
- Kompleksitas dan daya saing produk, produk industri pengolahan semakin kehilangan daya saingnya di pasar global;
- Adopsi teknologi kian masif, sementara TK di industri pengolahan masih didominasi oleh *unskilled labour*;
- *Mismatched* produksi dengan permintaan global;
- Rendahnya kemampuan inovasi, dalam *Global Innovation Index*;

- Tuntutan energi hijau semakin besar, sementara penggunaan energi fosil di industri pengolahan masih di atas 60% (IESR, 2022).

b) Produktivitas Tenaga Kerja

- Besarnya angkatan kerja berpendidikan SMP ke bawah sebesar 53,4% (BPS, 2023);
- Ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) di pasar kerja;
- Belum terbangunnya sistem informasi pasar kerja yang kredibel;
- Stagnasi tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan.

c) Pertanian

- Rendahnya nilai tambah produk pertanian;
- Rendahnya produktivitas pertanian;
- Rendahnya adopsi teknologi pertanian;
- *Aging farmer* dan degradasi kualitas lahan.

d) Ekonomi Biru

- Upaya konservasi kawasan perairan dan pesisir yang belum maksimal;
- Rendahnya produktivitas, nilai tambah, daya saing ekonomi biru yang tercermin pada rendahnya kontribusi PDB Maritim terhadap PDB Nasional;
- Rendahnya Kualitas, Keterjangkauan, dan Keamanan Pangan Akuatik/Pangan Biru;
- Rendahnya jumlah dan kualitas riset, penggunaan teknologi, inovasi, ketersediaan data dan informasi terkait kemaritiman dan perairan darat;
- Kurangnya pendanaan dan tata kelola pada sektor-sektor penghasil barang, penghasil jasa, dan upaya konservasi di kawasan perairan dan pesisir.

e) Ekonomi Kreatif

- Ekosistem kekayaan intelektual yang belum optimal;
- Ketersediaan data ekonomi kreatif yang sangat terbatas, sedangkan peranan data sangat penting untuk menyusun kebijakan;
- Kelembagaan ekonomi kreatif yang belum optimal, terutama untuk mendukung ekosistem kekayaan intelektual;
- Daya saing SDM Ekonomi kreatif yang rendah, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual;
- Rantai pasok ekonomi kreatif yang belum optimal, terutama di daerah.

f) UMKM dan Koperasi

- Rendahnya kontribusi dan jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil;
- Rendahnya pemanfaatan riset dan adopsi teknologi pada UMKM;
- Belum optimalnya akses UMKM terhadap pembiayaan dan pemasaran;
- Rendahnya wirausaha yang berorientasi untuk tumbuh.

g) Pekerjaan Hijau

- Minimnya pemahaman dan minat terhadap pekerjaan hijau;

- Belum terintegrasinya data, arah kebijakan, dan strategi pengembangan SDM dalam mendukung pekerjaan hijau;
- Belum memadainya pengembangan keahlian dan kompetensi tenaga kerja hijau;
- Terbatasnya akses pendanaan dan insentif dalam pengembangan pekerjaan hijau;
- Lemahnya peran asosiasi dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA) dalam mendukung pengembangan pekerjaan hijau.

h) Percepatan Transisi Energi

- Ketergantungan terhadap energi fosil yang cadangannya terus menurun;
- Emisi GRK sektor energi yang cukup tinggi terutama sektor pembangkit dan transportasi;
- Potensi energi terbarukan yang sangat besar dan pemanfaatan masih sangat kecil;
- Kualitas infrastruktur ketenagalistrikan yang belum memadai;
- Keterbatasan dukungan pendanaan transisi energi;
- Pemanfaatan energi baru yang belum berkembang;
- Dominasi pembangkit listrik berbasis fosil dan keterbatasan sistem penyaluran;
- Ketimpangan dan rendahnya kualitas pelayanan ketenagalistrikan;
- Ketergantungan pada produksi impor;
- Belum optimalnya tata kelola ketenagalistrikan termasuk kebijakan tarif dan harga terbatasnya rantai nilai domestik pendukung transisi energi;
- Keterbatasan untuk adopsi dan adaptasi perkembangan teknologi (termasuk digitalisasi).

i) Digital

- Perlunya penguatan pondasi dalam percepatan transformasi digital:
  - Belum meratanya infrastruktur konektivitas digital dan komputasi yang berkualitas;
  - Penguatan pengelolaan ekosistem infrastruktur, termasuk tata kelola dan regulasi;
  - Belum optimalnya adopsi perkembangan perangkat teknologi infrastruktur digital dan infrastruktur penyiaran.
- Digitalisasi Sektor Strategis:
  - Terdapat layanan pendidikan dan kesehatan belum berinternet:
  - Penguatan pemerintah digital (SPBE dan SDI):
  - Adopsi digital bagi pelaku UMKM belum optimal:
  - Inovasi dan pengembangan keuangan digital (*FinTech*);
  - Pengelolaan destinasi wisata, pertanian, perikanan, logistik, industri, serta sektor lain yang berbasis teknologi.

j) Badan Usaha Milik Negara

- Masih rendahnya produktivitas BUMN:
  - Masih rendahnya ROA BUMN (3,05% di tahun 2022);
  - Masih rendahnya kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara;
  - Masih rendahnya Daya Saing BUMN;

- Masih rendahnya *Total Asset Turn Over* BUMN (0,3% pada tahun 2022).

- Peran BUMN sebagai Agen Pembangunan:
  - Masih rendahnya *rasio capex* BUMN terhadap PDB (1.3% pada tahun 2022);
  - Masih rendahnya rasio persentase perusahaan negara yang telah melakukan kegiatan berkonsep *Creating Shared Value* (CSV) (70% pada tahun 2022).

k) Pariwisata

- Destinasi pariwisata menghadapi masalah degradasi lingkungan dan hilangnya budaya lokal akibat pariwisata yang tidak terkendali (*over tourism*) dan akulturasi budaya dari wisatawan;
- Terbatasnya amenitas, aksesibilitas, dan atraksi yang melaksanakan kaidah pariwisata berkelanjutan;
- Pengelolaan dan kualitas layanan pariwisata yang tidak berfokus pada kepuasan pengalaman;
- Rendahnya pengeluaran wisatawan akibat rendahnya investasi pariwisata dan pilihan kegiatan wisata;
- Kurangnya keterampilan SDM pariwisata dan rendahnya pemanfaatan ekonomi pariwisata oleh masyarakat lokal.

l) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

- Keterkaitan perekonomian secara domestik masih terbatas:
  - Pusat pertumbuhan masih berfokus di Jawa;
  - Infrastruktur konektivitas belum memadai dan belum terintegrasi;
  - Kinerja sistem logistik nasional belum optimal;
  - Pembangunan wilayah tidak merata;
  - Ketimpangan pembangunan antardaerah dan kebutuhan pendekatan.
- Perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta partisipasi dalam rantai nilai global masih belum optimal:
  - *Supply Side*:
    - Keterkaitan rantai nilai antarwilayah masih rendah serta ekspor serta terpusat di Pulau Jawa;
    - Masih rendahnya *awareness* daerah untuk diversifikasi ekspor;
    - Masih rendahnya daya saing ekspor domestik;
    - Pembiayaan ekspor masih terhambat;
    - Masih belum terintegrasinya fasilitasi dan informasi terkait perdagangan;
    - Keterbatasan informasi dalam mengakses data sektor perdagangan jasa;
    - Sektor jasa memiliki regulasi yang saling tumpang tindih;
    - Standarisasi produk ekspor yang masih belum optimal;
    - Masih belum optimalnya ekosistem persaingan usaha.
  - *Demand Side*:
    - Daya saing produk sektor jasa yang masih rendah;
    - Minat pelaku industri sektor jasa yang masih rendah untuk masuk ke dalam pasar global;
    - Adanya kebijakan dekarbonisasi (*decarbonization policies*) di beberapa negara;

    - Peningkatan kebijakan proteksionisme serta *trade barriers* yang tinggi (bea masuk, NTMs) di beberapa negara.
- Belum optimalnya penguatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global:
  - Infrastruktur yang belum memadai menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi;
  - Kekurangan pembiayaan, terutama di daerah dengan sumber daya keuangan terbatas;
  - Perlunya pasar yang kuat untuk mendukung investasi;
  - Biaya tinggi dan hambatan dalam menarik investasi.
- Daya dukung tercapainya integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global perlu diperkuat:
  - Masih terdapat regulasi yang menghambat perbaikan iklim berusaha;
  - Terbatasnya investasi produktif dan berkualitas yang mendukung upaya transformasi ekonomi;
  - Tumpang tindih peraturan dan birokrasi yang menghambat pembangunan infrastruktur;
  - Koordinasi cermat diperlukan dalam integrasi moda transportasi.

m) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

- Belum optimalnya kontribusi ekonomi perkotaan terhadap nasional;
- Pola pembangunan perkotaan yang menyerak;
- Pemenuhan layanan perkotaan yang belum memadai dan inklusif;
- Masalah sosial-ekonomi masyarakat perkotaan;
- Degradasi lingkungan perkotaan dan rendahnya ketangguhan bencana;
- Tata kelola yang belum terpadu, inovatif, dan kolaboratif;
- Kemiskinan dan ketimpangan di perkotaan perdesaan;
- Perubahan lanskap perdesaan;
- Pengelolaan rencana pembangunan kawasan perdesaan.

3) Isu Strategis Transformasi Tata Kelola

Tata kelola meliputi wilayah politik, administrasi, dan hukum tidak hanya menyangkut kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya, namun juga terkait dengan bagaimana pengelolaan tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, inklusif, bermanfaat, serta berdampak secara sosial dan ekonomi. Transformasi tata kelola digunakan untuk mengantisipasi *global megatrends* dan adanya perubahan lingkungan strategis di level global maupun nasional, terutama terkait dengan revolusi teknologi informasi dan komunikasi, meningkatnya tuntutan dan kesadaran masyarakat. Beberapa isu strategis yang diangkat dalam transformasi tata kelola sebagai berikut:

a) Integritas Partai Politik

Integritas partai politik belum terwujud karena standar etika belum ada, demokrasi internal belum optimal, kaderisasi belum terlembaga, rekrutmen politik belum terbuka, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan belum optimal, di samping biaya politik tinggi dan pendanaan dari negara yang belum memadai.

b) Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik

Belum meratanya akses pelayanan publik bagi masyarakat serta belum memadainya kompetensi digital penyelenggara dan pengguna pelayanan publik.

c) Sistem Penggajian Tunggal

Disparitas kesejahteraan ASN pusat dan daerah, remunerasi ASN belum memenuhi prinsip kompetitif, manfaat pensiun ASN masih rendah, dan adanya *dual system* penggajian ASN.

d) Kualitas Regulasi

Kondisi hiper regulasi, kewenangan pengelolaan regulasi yang tersebar di beberapa Kementerian, belum memadainya SDM di bidang regulasi, dan partisipasi pembentukan regulasi yang belum optimal.

e) Sistem Anti Korupsi dan Akuntabilitas Pembangunan

- Lemahnya kontrol dalam pencegahan di sektor – sektor yang rawan korupsi serta rendahnya budaya antikorupsi yang akhirnya mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi;
- Belum adanya sistem penilaian kementerian/ lembaga/daerah terintegrasi yang berbasis pada penilaian kinerja, anggaran, dan integritas;
- Indonesia memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 34 dari skala 0-100 pada 2023;
- Belum optimalnya peran APIP untuk dapat memberikan peringatan dini (*early warning system*) dan peningkatan manajemen risiko.

f) Manajemen Talenta

Penerapan sistem merit belum optimal, belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D, dan 34% ASN berusia 50 tahun ke atas (*aging*).

g) Integrasi Proses Bisnis

Proses bisnis dan tata kelola pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak efektif serta tumpang tindih program yang memboroskan anggaran.

4) Isu Strategis Transformasi Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Kepastian hukum dapat terjamin dengan aktivitas pemerintahan yang efektif dan responsif sehingga arah kebijakan tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis. Pemerintah dapat memantau kepastian hukum, pertahanan dan keamanan, teknologi dan informasi, komunikasi publik, dinamika politik dan tantangan global. Isu strategis lebih menekankan pada stabilitas makro, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, demokrasi dan hukum. Adapun Isu Strategis Transformasi Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia sebagai berikut:

a) Stabilitas Makro

Risiko *climate action*; Deglobalisasi; Krisis lapangan pekerjaan; Krisis utang, Konfrontasi geo-ekonomi; *Asset bubble burst*; Inflasi masih tinggi; tingkat suku bunga *higher for longer*; Tensi geopolitik;

Disrupsi rantai pasok; Perlambatan ekonomi China, AS dan Eropa, serta Divergensi ekonomi global; Transisi demografi; Perubahan iklim; Potensi pandemi ke depan; Digitalisasi; Rendahnya penerimaan perpajakan; Masih terbatasnya belanja negara, serta Imbal hasil obligasi yang tinggi.

b) Politik Luar Negeri

Dinamika geopolitik dan geoekonomi meningkatkan ketidakpastian pelaksanaan kebijakan luar negeri, beberapa di antaranya seperti konflik intra dan antar negara; disrupsi rantai pasok global dan tren *global economic decoupling*; belum terselesaikannya perundingan batas wilayah; serta belum idealnya postur dan sinergi pelaksanaan diplomasi Indonesia.

c) Demokrasi

Demokrasi masih prosedural dengan ciri:

- Kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat;
- Belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; informasi dan komunikasi publik belum merata;
- Permasalahan politik electoral seperti, politik uang, politisasi isu SARA;
- Fungsi-fungsi asasi parlemen belum terlaksana secara optimal;
- Nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi.

d) Hukum

Praktik penegakan hukum yang belum terpadu, efisien, dan berlandaskan HAM; Rendahnya kepatuhan hukum masyarakat sebagai akibat dari minimnya literasi dan pemberdayaan; Keterbatasan akses terhadap keadilan; dan Kelembagaan penegak hukum yang belum professional

e) Pertahanan

Dampak konflik hegemoni; perubahan tipologi perang yang semakin kompleks dan sarat penggunaan senjata *Chemical, Biological, Radioactive, Nuclear and High Yield Explosive* (CBRNE) termasuk respon negara-negara di dunia untuk memperkuat industri pertahanannya.

f) Keamanan

Insurgensi; konflik internal termasuk konflik sosial; serangan terorisme; pelanggaran batas wilayah dan kejahatan transnasional; disrupsi teknologi; pelanggaran hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi; serta perlindungan IIVN dari serangan siber.

5) Isu Strategis Transformasi Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi

Isu strategis transformasi ketahanan sosial, budaya, dan ekologi mencakup berbagai aspek yang penting dalam upaya untuk meningkatkan keberlanjutan dan kualitas hidup masyarakat. Ketahanan sosial mencakup kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dan bertahan dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ini mencakup penguatan jaringan sosial, peningkatan kapasitas komunitas dalam pengambilan keputusan bersama, serta peningkatan akses terhadap layanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Ketahanan budaya dengan mempertahankan nilai-

nilai budaya lokal, tradisi, serta kearifan lokal dalam menghadapi arus globalisasi dan modernisasi. Ketahanan ekologi berarti menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem alami serta memperkuat daya dukung lingkungan hidup bagi kehidupan manusia dan spesies lainnya. Keseimbangan pengakuan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan menjadi dimensi dasar dalam proses pembangunan. Agama dan kebudayaan harus menjadi landasan spiritual, etika, dan moral dalam penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Ketiga ketahanan ini masih terjadi beberapa hambatan dan kendala sehingga perlu menyusun isu strategis terhadap ketahanan sosial, budaya dan ekologi diantaranya:

a) Isu Agama

- Nilai agama belum optimal diejawantahkan menjadi kerja-kerja pembangunan yang membawa kebaikan bersama;
- Wawasan dan identitas nasional sebagai bangsa majemuk tidak serta merta melahirkan kehidupan beragama dan berbudaya yang inklusif, ditandai dengan capaian IKUB di tahun 2023 sebesar 76,02;
- Beragama belum disertai dengan kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan.

b) Isu Budaya

- Karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global
- Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa indonesia belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- Kearifan lokal belum dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi masyarakat, ditandai dengan capaian IPK di tahun 2022 sebesar 55,13

c) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

- Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda
- Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia belum optimal
- Ketimpangan gender yang masih tinggi 4 Kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif menjadi sulit terwujud

d) Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati

- Kualitas air, udara, tutupan lahan, dan air laut semakin menurun. Indeks Kesehatan Laut (OHI) Indonesia masih rendah (63) atau baru berada pada peringkat 152 dari 220 wilayah global. Biaya kesehatan akibat pencemaran lingkungan menjadi tinggi
- Peningkatan luasan lahan terkontaminasi limbah B3 yang cukup signifikan akibat pembuangan limbah secara ilegal
- Terdapat setidaknya sepuluh provinsi yang status TPA-nya sudah melebihi kapasitas daya tampungnya, antara lain: Provinsi Bengkulu, Kepulauan Riau, Jawa Barat, DIY, dan Banten, Bali,

Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Maluku
- Laju Kepunahan Spesies global semakin cepat dan sudah puluhan hingga ratusan kali lebih tinggi daripada rata-rata selama 10 juta tahun terakhir. Saat ini, sekitar 1 juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan

e) Pangan

- Belum idealnya kualitas, keragaman, dan keamanan pangan
- Belum optimalnya kapasitas produksi pangan nasional, termasuk pangan lokal dan pangan akuatik
- Belum terpadunya tata kelola sistem pangan, termasuk susut dan sisa pangan, Satu Data Pangan serta pendekatan *One Health*
- Masih belum optimal keterkaitan/nexus antara pangan, energi, dan air (*food, energy, and water nexus*)

f) Energi

- Akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah
- Pangsa pemanfaatan energi baru-terbarukan dalam bauran energi nasional yang masih kecil
- Efisiensi pengusahaan dan pemanfaatan energi yang belum berjalan baik
- Kurangnya eksplorasi
- Tata kelola energi oleh badan usaha yang belum efektif dan belum efisien
- Kewenangan pengelolaan energi pada level provinsi terbatas

g) Bencana dan Perubahan Iklim

- Tren kejadian bencana meningkat hampir tiga kali lipat dalam satu dekade terakhir, dengan didominasi bencana hidrometeorologi
- 53.000 desa terletak di daerah rawan bencana dan menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 51 juta keluarga

II.1.B.3Isu Strategis Level Regional

1) Evaluasi RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan pada 4 (empat) periode RPJMD dari 2005 hingga 2025, beberapa tahapan yang perlu dilakukan pada perencanaan pembangunan jangka panjang daerah di periode 2025 – 2045:

a) Aspek Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya

Sumber daya masih menjadi masalah utama pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dapat terlihat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia tercermin dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang hanya mencapai 8,25 tahun pada tahun 2023, serta fakta bahwa 54,25 persen penduduk yang bekerja adalah lulusan SD dan SMP, sehingga

perhatian serius untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan guna mendorong pengembangan kompetensi dan daya saing masyarakat. Selain itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu memperkuat nilai-nilai budaya lokal dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sehingga, isu yang diangkat pada aspek sumber daya manusia adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan isu pada sosial budaya adalah ketahanan sosial budaya yang masih perlu ditingkatkan.

b) Aspek Ekonomi

Ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih mengandalkan kepada sumber daya tak terbarukan (timah), belum memanfaatkan sumber daya terbarukan seperti agromaritim dengan pendekatan ekonomi biru dan ekonomi hijau. Juga belum dikembangkan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) seperti ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Pembangunan ekonomi yang masih bergantung pada sumber daya tak terbarukan, seperti timah, menunjukkan perlunya diversifikasi dengan memanfaatkan sumber daya terbarukan, seperti agromaritim, melalui pendekatan ekonomi biru dan ekonomi hijau untuk menciptakan keberlanjutan. Selain itu, pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan, termasuk ekonomi kreatif dan ekonomi digital, sangat penting untuk meningkatkan inovasi dan daya saing di era global yang semakin kompetitif. Sehingga, isu yang diangkat pada aspek ekonomi adalah pembangunan ekonomi yang masih bergantung pada sumber daya tak terbarukan.

c) Aspek Tata Kelola Pemerintahan

Permasalahan tata kelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menghadapi tantangan, ditandai dengan proses perizinan yang lama dan sulit, yang menghambat investasi dan pengembangan ekonomi daerah. Penegakan hukum terkait perizinan hingga pelaksanaan proyek belum berjalan secara optimal, mengakibatkan ketidakpastian dan kurangnya kepercayaan dari para pelaku usaha. Selain itu, tata kelola pemerintahan memerlukan peningkatan stabilitas, dan kepemimpinan daerah ditingkatkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa isu strategis pada aspek tata kelola pemerintahan tata kelola dan reformasi birokrasi yang belum optimal dan perlunya peningkatan stabilitas dan kepemimpinan daerah.

d) Aspek Infrastruktur

Pembangunan Kepulauan Bangka Belitung yang belum merata dan berkeadilan, yang ditandai belum meratanya persebaran sarana dan prasarana. Juga persebaran sumber daya yang berakibat belum meratanya pendapatan pada tingkat pendapatan yang tinggi. Rendahnya sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Hal ini ditandai dengan masih banyak sarana dan prasarana yang tidak sesuai standar dan banyak sarana dan prasarana yang rusak. Infrastruktur ini mencakup infrastruktur konvensional seperti air, energi, transportasi, sanitasi, dan telekomunikasi dan infrastruktur digital seperti internet dan *big data*. Sehingga isu strategis pada aspek infrastruktur adalah konektivitas antar wilayah di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung yang belum terintegrasi dan masih terbatasnya ketersediaan multi infrastruktur.

e) Aspek Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum optimal, terutama akibat aktivitas tambang timah yang masif, yang telah merusak lingkungan daratan dan pesisir, sehingga mengurangi daya dukung ekosistem. Selain itu, program mitigasi kebencanaan, baik fisik maupun non-fisik, yang mencakup desain pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi potensi bencana, belum terintegrasi secara sistematis, sementara akses terhadap sumber air bersih dan konservasi sumber daya air masih terbatas. Ketahanan ekologi harus dijaga dengan serius, mengingat kondisi provinsi yang terdiri dari pulau-pulau kecil dengan daya dukung lingkungan yang rendah. Serta provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu pengembangan program edukasi lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem, peningkatan infrastruktur yang ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, penguatan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga ketahanan sosial dan ekologi sebagaimana arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga menciptakan ketahanan yang lebih baik bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di masa depan.Sehingga, isu strategis pada aspek sumber daya alam dan lingkungan adalah terbatasnya daya dukung lingkungan kepulauan dan kerusakan ekosistem.

II.1.B.4 Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 202-2029

KLHS bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, dan program yang dirumuskan dalam RPJMD. Isu strategis yang diidentifikasi dalam KLHS berfungsi sebagai panduan untuk menyusun kebijakan dalam RPJMD. Perumusan isu strategis jangka menengah Kabupaten Belitung Timur menunjukkan tingkat prioritas dari berbagai isu strategis yang telah diidentifikasi selama proses penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029. Isu strategis KLHS Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 telah dirumuskan berdasarkan urutan prioritas. Urutan prioritas didasarkan pada isu strategi sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum tata kelola. Isu strategis KLHS yang telah disusun berdasarkan urutan prioritas diantaranya:

1. **Isu Strategis Sosial (urutan):**

   a) Penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan;
   b) Kerentanan keamanan dan ketahanan sosial;
   c) Peningkatan kesehatan dan pendidikan.

2. **Isu Strategis Ekonomi (urutan):**

   a) Penguatan ekonomi lokal dalam peningkatan investasi dan daya saing daerah;
   b) Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah;
   c) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (*Smart Economy*).

3. Isu Strategis Lingkungan (urutan):

a) Kerentanan kualitas lingkungan hidup;
b) Pengelolaan sampah berbasis *smart environment;*
c) Alih fungsi lahan;
d) Kebencanaan dan perubahan iklim;
e) Ancaman keanekaragaman hayati.

4. Isu Strategis Hukum Tata Kelola (urutan):

a) Pelayanan publik berbasis *smart governance*
b) Penciptaan *good governance* dan kelembagaan yang kondusif

Isu strategis KLHS dapat diselaraskan dengan isu strategis RPJMD dikarenakan KLHS menjadi acuan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.

II.1.B.5 Isu RPPLH Kabupaten Belitung Timur 2025-2055

Berdasarkan analisis data pada dokumen RPPLH Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2055, terdapat isu strategis yang menjadi permasalahan utama, terutama pada lingkungan hidup Kabupaten Belitung Timur, antara lain:

1. Isu Kualitas Air

Kualitas air menurun dikarenakan peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Belitung Timur tahun 2020-2023 mencapai 1,45%, berimplikasi pada peningkatan limbah domestik. Selain itu aktivitas pertambangan dan perkebunan yang membuang limbah langsung ke sungai juga berpengaruh pada kualitas air di Kabupaten Belitung Timur.

2. Isu Kerusakan Pesisir

Kerusakan pesisir dikarenakan tingkat abrasi yang tinggi dikarenakan adanya pengrusakan ekosistem mangrove. Selain itu, perilaku penduduk yang mengalihfungsikan lahan menjadi tambang timah ilegal dan tambak ikan juga mempengaruhi kerusakan pesisir. Pemanfaatan kayu mangrove secara masif untuk bahan bangunan juga mendorong kerusakan pesisir.

3. Alih Fungsi Lahan

Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Belitung Timur tahun 2020-2023 mencapai 1,45%, berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan untuk permukiman dan area terbangun lainnya. Ketersediaan lahan yang terus digunakan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan perilaku mereka mengabaikan etika lingkungan yang dapat menyebabkan bencana misalnya penebangan hutan, membuka lahan baru dengan cara membakar hutan dan kegiatan penggunaan lahan secara ilegal.

4. Perlindungan Geopark dan Keanekaragaman Hayati

Perlindungan geopark dan keanekaragaman hayati menjadi isu dikarenakan alih fungsi lahan di sekitar geopark dan hutan konservasi oleh penambangan timah ilegal, perkebunan sawit, dan permukiman. Selanjutnya, perburuan satwa langka di alam liar untuk diperjual belikan.

5. Kerusakan Daerah Aliran Sungai

Terjadinya degradasi lahan di DAS karena banyak aktivitas perkebunan skala besar dan juga tambang timah ilegal. Hal ini dikarenakan perilaku penduduk yang mengalihfungsikan lahan/membuka lahan baru.

6. Persampahan dan Limbah

Isu persampahan dan limbah diangkat dikarenakan penduduk yang terus bertambah, maka sampah yang dihasilkan akan terus meningkat. Sedangkan, kapasitas TPA Trafo Mayang yang digunakan untuk mengelola sampah sudah penuh.

7. Bencana Alam (Hidrometeorologi)

Kondisi topografi dan tingkat kelerengan menjadi faktor terjadinya bencana alam. Faktor alamiah seperti cuaca ekstrem, tingginya gelombang pasang air laut dan besarnya curah hujan juga menjadi pemicu terjadinya bencana alam. Kawasan rawan bencana banjir seperti Desa Mempaya Kecamatan Damar, Desa Baru, Kurnia Jaya, Mekar Jaya,Buding, Mayang dan Lenggang menjadi wilayah langganan banjir pada saat hujan dengan durasi waktu yang cukup lama. Penambangan ilegal yang terjadi, pembukaan lahan kebun semakin luas, dan penebangan pohon. Faktor cuaca yang sangat panas akibat kemarau berkepanjangan dan perubahan iklim El Nino. Pembakaran lahan untuk dijadikan kebun, ulah manusia membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan.

8. Perubahan Iklim

Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Belitung Timur tahun 2020-2023 yang mencapai 1,45% menjadi pemicu utama. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah penduduk juga meningkatkan moda transportasi, dimana hal tersebut meningkatkan pembakaran bahan bakar fosil yang dapat mempengaruhi iklim. Selain itu, perilaku penduduk yang membuka lahan hutan menjadi lahan tambang dan perilaku konsumsi sehingga meningkatkan timbulan sampah juga mempengaruhi perubahan iklim di Kabupaten Belitung Timur.

II.1.B.6 Potensi Daerah Kabupaten Belitung Timur

Berdasarkan analisis data makro dari evaluasi RPJPD Kabupaten Belitung Timur tahun 2005-2025 (dengan data dasar tahun 2022), serta beberapa dokumen evaluasi lainnya, teridentifikasi masih ada 5 kelompok besar permasalahan utama di Kabupaten Belitung Timur, antara lain:

1. Masalah daya saing dan pertumbuhan ekonomi
2. Masalah kualitas SDM
3. Masalah pemerataan infrastruktur dasar yang berkualitas
4. Masalah tata kelola pemerintahan
5. Masalah lingkungan hidup dan kebencanaan

Fokus utama RPJPD Kabupaten Belitung Timur 2025-2045 adalah menyelesaikan kelima masalah utama ini. Selain tantangan yang masih dihadapi, Kabupaten Belitung Timur juga memiliki potensi yang dapat dioptimalkan dalam pembangunan dua dekade ke depan. Optimalnya pengelolaan yang terstruktur, inklusif, dan efektif, potensi ini bisa menjadi alternatif ekonomi untuk masa depan Kabupaten Belitung Timur. Terdapat beberapa potensi yang dimiliki Kabupaten Belitung Timur, antara lain:

1. Sektor Pertambangan Timah. Sebagian besar potensi timah nasional berasal dari Provinsi Bangka Belitung, yang mencakup empat dari

sembilan kabupaten: Bangka, Bangka Tengah, Belitung, dan Belitung Timur. Belitung Timur memiliki potensi sumber daya tambang bijih timah sebesar 3.200.000 ton dan logam sebesar 30.400 ton. Nilai ekonomi potensial bijih timah di Kabupaten Belitung Timur diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 triliun.

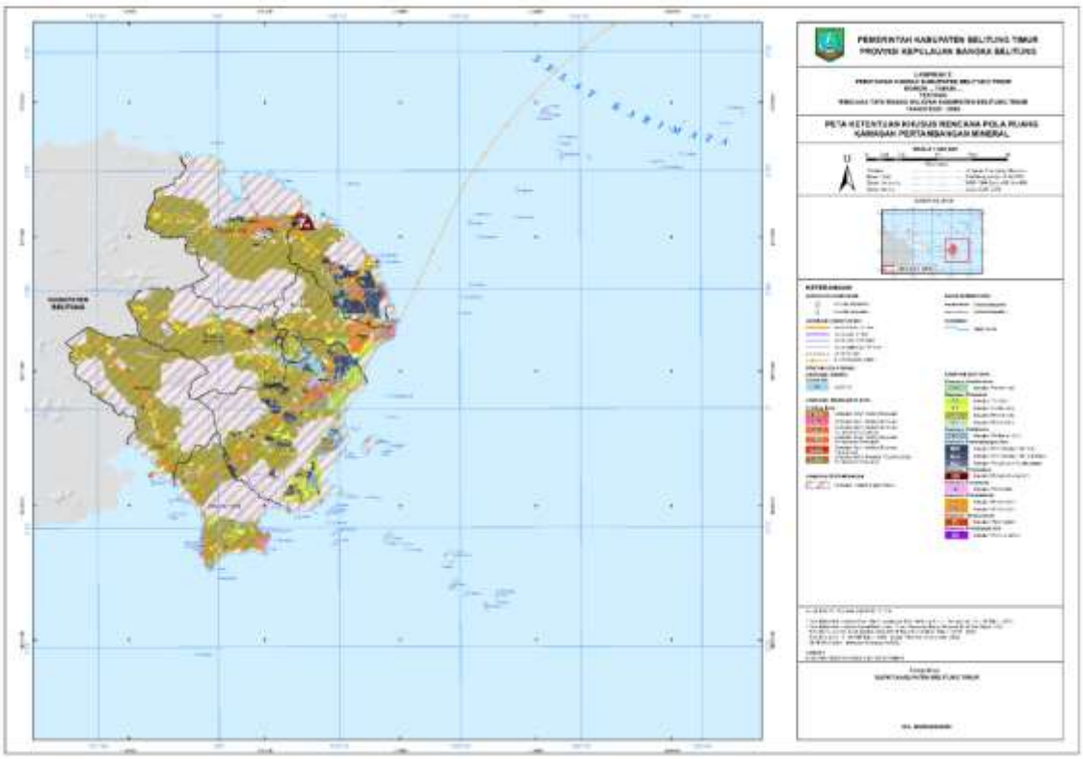

Sumber: RTRW Kabupaten Belitung Timur 2022-2042

Gambar 2. 37 Kawasan Pertambangan Kabupaten Belitung Timur

2. Sektor Perkebunan. Kabupaten Belitung Timur memiliki lima komoditas utama dari sektor perkebunan, yaitu kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, dan lada. Produktivitas kelima komoditas ini dapat ditingkatkan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat menjadi agro-industri yang memiliki daya saing ekonomi yang kuat.

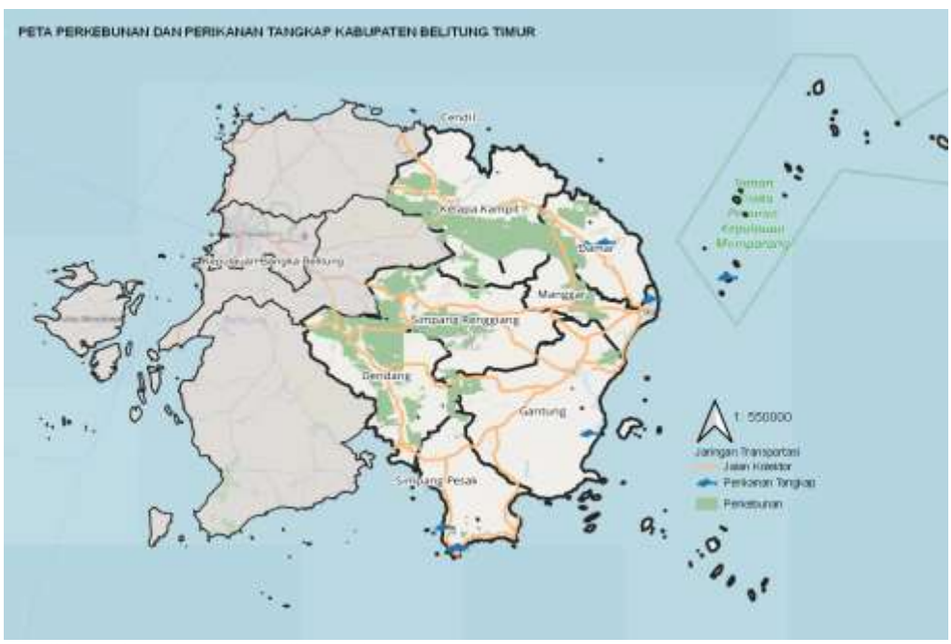

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2024

Gambar 2. 38 Potensi Perkebunan dan Perikanan Tangkap Kabupaten Belitung Timur

3. Sektor Perikanan. Sebagai bagian dari wilayah kepulauan, Kabupaten Belitung Timur memiliki potensi *blue economy* yang signifikan jika dikelola secara efektif. Pada tahun 2022, produksi perikanan budidaya mencapai 285.111 ton dengan nilai produksi sebesar 14.460.844.000, sedangkan produksi perikanan tangkap mencapai 40.010 ton dengan nilai produksi sebesar 1.343.626.082.000. Potensi ini dapat lebih ditingkatkan nilai ekonominya melalui proses hilirisasi semua produk perikanan.

4. Sektor Pariwisata. Potensi pariwisata di Belitung Timur belum dimanfaatkan secara optimal dan dapat menjadi alternatif ekonomi bagi masyarakat setempat. Potensi wisata geologi atau *geoheritage* dapat ditingkatkan dengan melibatkan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan menciptakan lapangan kerja, seperti melalui pengembangan ekowisata kelas dunia yang berfokus pada kekayaan alam, destinasi wisata kebugaran yang menonjolkan identitas khas daerah, serta sebagai tujuan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) dan perkotaan.

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2024

Gambar 2. 39 Peta Titik Lokasi Wisata Kabupaten Belitung Timur

5. Sektor Pendidikan: Potensi pendidikan di Belitung Timur datang dari rencana pembukaan Sekolah Unggulan Garuda dan Sekolah Rakyat (dapat dilihat pada Gambar 2.41) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Diharapkan Sekolah Unggulan Garuda dan Sekolah Rakyat memberikan kontribusi dalam sektor pendidikan, utamanya untuk memajukan kualitas SDM di Kabupaten Belitung Timur.

6. Sektor Kesehatan: Penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) di Kabupaten Belitung Timur, memberikan kesempatan agar akses kesehatan semakin dapat diakses oleh masyarakat. ILP mengintegrasikan layanan dari tingkat puskesmas, Pustu hingga posyandu untuk mendekatkan layanan akses. Menurut **Gambar 2.42**, kondisi sarana kesehatan di Belitung Timur menunjukkan puskesmas

telah tersedia di tiap kecamatan, dan Kabupaten Belitung Timur telah memiliki RSUD yang melayani Kabupaten Belitung Timur.

7. Sektor Infrastruktur: Infrastruktur merupakan bagian terpenting dalam pembangunan daerah. Memiliki wilayah kepulauan, Kabupaten Belitung Timur memiliki tantangan untuk memberikan pelayanan infrastruktur yang merata pada seluruh wilayah. Potensi yang dapat membantu pembangunan infrastruktur di Kabupaten Belitung Timur adalah dengan melakukan kerja sama dalam bentuk CSR. Beberapa hasil CSR di Kabupaten Belitung Timur adalah penyediaan infrastruktur telekomunikasi di Pulau Long dan Pulau Batun. Selain itu, potensi infrastruktur jalan yang sudah ada berupa ruas Jalan H.A.S. Hanandjoeddin yang berstatus Jalan Nasional. Potensi infrastruktur sumber daya air di Kabupaten Belitung Timur adalah dengan terbangunnya Situ Kalong Minyak dan Bendungan Pice Besar yang berfungsi untuk konservasi air dan sumber penyediaan air bersih.

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2024

Gambar 2. 40 Peta Potensi Sarana dan Prasarana Kabupaten Belitung Timur

8. Sektor Pemerintahan: Penerapan *Good Governance* dan penerapan digitalisasi di Belitung Timur. Salah satu penerapannya adalah dengan aplikasi Teras APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), yaitu aplikasi layanan pendampingan dan kampanye perubahan kultur budaya inspektorat.

Berdasarkan gambaran umum, beberapa potensi daerah yang dilihat dari sektor ekonomi ada yang menjadi sektor prioritas (basis) dan berpotensi. Penentuan prioritas dan potensial sektor ekonomi dilihat dari metode Location Quotient (LQ) Statis dan Dinamis. LQ statis sebuah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kekhasan atau spesialisasi relatif dari suatu sektor ekonomi di suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. LQ membantu untuk menentukan seberapa penting suatu sektor ekonomi tertentu bagi perekonomian suatu daerah. LQ dinamis memperhitungkan

perubahan dalam kekuatan relatif suatu sektor ekonomi dalam suatu wilayah terhadap sektor serupa di wilayah lain atau secara nasional. Ini dapat membantu untuk memahami tren jangka panjang dalam struktur ekonomi regional, seperti pergeseran kepentingan atau keunggulan komparatif dalam sektor tertentu. Hasil LQ statis dan dinamis akan menunjukkan beberapa sektor yang menjadi sektor basis-berpotensi, sektor basis-tidak berpotensi dan sektor non basis-berpotensi. Sektor yang menjadi prioritas (basis) dan berpotensi di Kabupaten Belitung Timur yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
3. Jasa Perusahaan
4. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sedangkan sektor ekonomi yang menjadi sektor basis tidak berpotensi di Kabupaten Belitung Timur adalah:

1. Pertambangan dan Penggalian
2. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kemudian sektor non basis tetapi berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Belitung Timur antara lain:

1. Pengadaan Listrik dan Gas
2. Konstruksi
3. Transportasi dan Pergudangan
4. Informasi dan Komunikasi
5. Real Estate
6. Jasa Pendidikan
7. Jasa Lainnya

Potensi daerah di Kabupaten Belitung Timur cukup beragam meskipun tidak menjadi sektor basis. Begitu pun dengan sektor yang dijadikan prioritas daerah namun mengalami penurunan pertumbuhan sektor. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur perlu mengevaluasi sektor-sektor yang dapat dijadikan prioritas daerah baik pada kategori sektor basis- berpotensi, sektor basis-tidak berpotensi dan sektor non basis-berpotensi.

II.1.B.7 Hubungan Prioritas Nasional Dalam RPJMD Belitung Timur

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, pengembangan taman bumi (*Geopark*) telah ditetapkan sebagai bagian dari Prioritas Nasional (PN) 2 dan PN 3. PN 2 berfokus pada pemantapan sistem pertahanan keamanan negara serta kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan, sementara PN 3 menitikberatkan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan lapangan kerja berkualitas, dan penguatan sektor agro maritim serta industri kreatif. Dalam konteks RPJMD Belitung Timur, pengembangan geopark sebagai salah satu aset strategis daerah perlu diintegrasikan ke dalam prioritas pembangunan. Hal ini sejalan dengan arahan RPJMN yang menekankan pentingnya penguatan tata kelola kelembagaan, optimalisasi pendanaan, dan penyusunan rencana aksi terintegrasi untuk mewujudkan geopark sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan, khususnya dalam kerangka UNESCO Global Geopark. Dalam RPJMN 2025-2029, pengembangan geopark Belitung Timur (Beltim) masuk ke dalam Prioritas Nasional (PN) 2 dan Prioritas Nasional (PN) 3. Berikut penjelasannya:

- **Prioritas Nasional (PN) 2:**

  Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan (ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru). Dalam konteks ini, geopark Belitung Timur dianggap sebagai area preservasi yang perlu dikelola secara berkelanjutan melalui penguatan tata kelola kelembagaan, optimalisasi pendanaan, dan penyusunan rencana aksi terintegrasi.

- **Prioritas Nasional (PN) 3:**

  Melanjutkan pengembangan infrastruktur, meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, serta mengembangkan industri kreatif dan agromaritim. Pada PN 3, *geopark* Belitung Timur disebutkan sebagai bagian dari diversifikasi atraksi pariwisata, khususnya dalam kerangka pengembangan *UNESCO Global Geopark*.

- **Prioritas Nasional (PN) 6:**
  Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan merupakan prioritas nasional ke-6. Kabupaten Belitung Timur mendukung prioritas ini dengan adanya Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) KAMPIT (Kampung Andalan Mandiri Pusat Inovasi Terpadu). Tujuan utama KAMPIT adalah menciptakan program paket wisata terpadu yang memanfaatkan potensi geosite, seperti Savana Jerumbang. Selain itu, program ini juga menyoroti hilirisasi budidaya kayu putih.

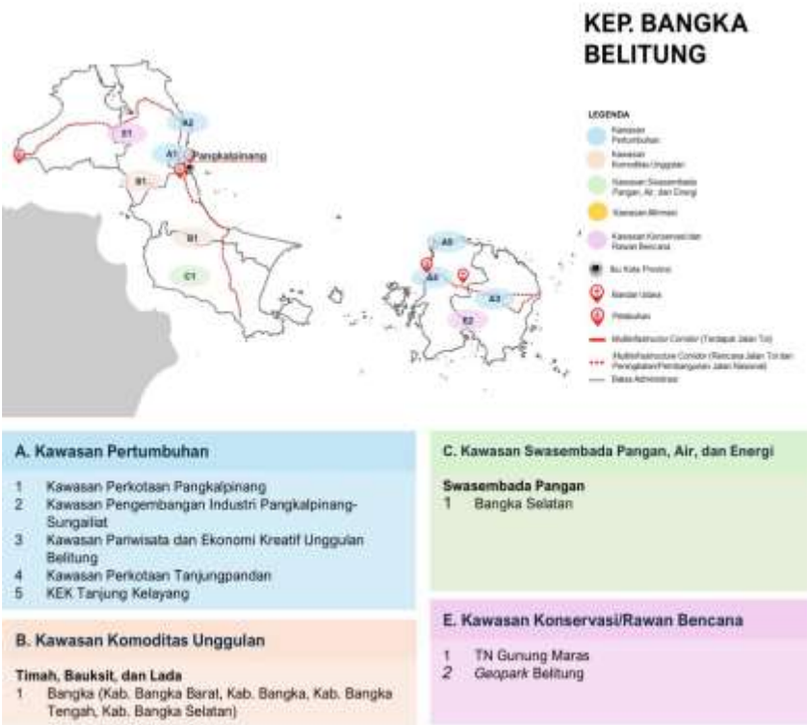

Sumber: RPJMN 2025-2029

Gambar 2. 41 Lokasi Prioritas RPJMN 2025-2029 di Kepulauan Bangka Belitung

Menurut RPJMN 2025-2029, Kabupaten Belitung Timur masuk dalam rencana kawasan pertumbuhan dan kawasan konservasi/rawan bencana. Selain itu, Kabupaten Belitung Timur juga masuk dalam program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan pangan, dan penanganan rawan pangan (PHTC). Lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 2. 127 LOKASI PRIORITAS DAN INDIKASI INTERVENSI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	LOKASI PRIORITAS	*HIGHLIGHT* INDIKASI INTERVENSI
E2	Kawasan Konservasi *Geopark* Belitung ● Kab. Belitung ● Kab. Belitung Timur	● Pengelolaan geologi untuk mendukung keanekaragaman ekosistem ● Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi ● Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan ● Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi ● Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keanekaragaman hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik
	● Kab. Belitung ● Kab. Belitung Timur ● Kabupaten Bangka Tengah	● Indikasi Daerah Prioritas intervensi program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan penanganan rawan pangan (PHTC)

Sumber: RPJMN 2025-2029

Berikut beberapa highlight intervensi berdasarkan RPJMN 2025-2029:

1. Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem, dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi;
2. Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan;
3. Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan untuk mendukung bioekonomi;
4. Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik;
5. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri;
6. Penguatan pengelolaan hutan lestari.

II.1.B.8 Pengintegrasian Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan (RPKP) ke dalam RPJMD Belitung Timur

Berdasarkan surat nomor T-02441/Dt.2.2/PP.03.04/02/2025 Kementerian PPN/Bappenas lokasi kawasan perdesaan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 di Belitung Timur adalah Kawasan KAMPIT. Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan (RPKP) Belitung Timur adalah sebuah dokumen perencanaan yang dirancang untuk mengarahkan pembangunan kawasan perdesaan secara terstruktur dan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan ekonomi lokal, dan pelestarian lingkungan. RPKP ini memprioritaskan pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih, serta mendorong pemberdayaan ekonomi melalui sektor agromaritim, pariwisata, dan industri kreatif berbasis potensi lokal seperti lada, kelapa, perikanan, dan kerajinan tangan. Selain itu, RPKP juga mengintegrasikan pengembangan geopark Belitung Timur sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan, sambil memastikan pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Koordinasi antar-pemangku kepentingan dan mekanisme monitoring yang terstruktur, RPKP Belitung Timur bertujuan untuk menciptakan kawasan perdesaan yang mandiri, sejahtera, dan selaras dengan target pembangunan nasional serta RPJMD Belitung Timur. Arahan menurut RPJMN 2025-2029, RPKP dilakukan dengan meningkatkan kemandirian desa. Sehingga, arahan yang dimaksud fokus kepada aspek:

a) Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur, termasuk perumahan dan permukiman, air minum, sanitasi, persampahan, layanan kesehatan, dan konektivitas;
b) Transformasi ekonomi lokal, ketahanan sosial-budaya, dan pelestarian lingkungan perdesaan dalam rangka pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi skala lokal, pengembangan indikasi 30 Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP), penguatan lembaga ekonomi desa, pengelolaan dampak perubahan iklim, serta pengelolaan urbanisasi untuk memastikan terciptanya sinergi desa dan kota dalam pertukaran sumber daya, tenaga kerja, dan akses pasar sehingga terwujud pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan;
c) Penguatan tata kelola pemerintahan serta pemberdayaan pembangunan desa secara adaptif;
d) Pembangunan 30 daerah tertinggal untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan akses layanan dasar, penguatan ekonomi lokal, pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta pengurangan risiko bencana;
e) Pembangunan kawasan perbatasan melalui pemenuhan layanan dasar, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, penataan ruang dan penanggulangan bencana, serta penguatan tata kelola pemerintahan;
f) Pengembangan kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal, melalui pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, pengembangan ekonomi, redistribusi aset (tanah) transmigrasi, serta penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil;
g) Tata kelola pendampingan/penyuluhan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui integrasi pelaksanaan dan pengendalian berbagai program di tingkat masyarakat, penguatan kualitas pendamping/penyuluh dengan lebih terstandar, penguatan motivasi dan kapasitas masyarakat untuk berdaya, peningkatan pengetahuan dan akses masyarakat terhadap layanan sosial dan dasar, perluasan akses masyarakat terhadap pengembangan ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama penduduk miskin dan rentan.

Arahan yang dilakukan untuk mewujudkan pengembangan kawasan perdesaan di Belitung Timur adalah memfokuskan pengembangan kawasan perdesaan sebagai sentra penghasil komoditas unggulan yang berbasis potensi pariwisata, agropolitan, dan potensi bahari dalam suatu kawasan perdesaan yang terpadu.

Pengintegrasian Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan (RPKP) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Belitung Timur merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan terintegrasi. RPKP berperan penting dalam mengarahkan pembangunan kawasan perdesaan agar selaras dengan prioritas nasional dan daerah, khususnya dalam konteks pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pelestarian lingkungan.

II.1.B.9 Isu Strategis Daerah

1) Evaluasi RPJPD Kabupaten Belitung Timur 2005-2025

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan pada 4 (empat) periode RPJMD dari 2005 hingga 2025, beberapa tahapan yang perlu dilakukan pada perencanaan pembangunan jangka panjang daerah di periode 2025 – 2045:

a) Aspek Ekonomi

Misi utama dalam pembangunan di Kabupaten Belitung adalah peningkatan aktivitas perekonomian. Pembangunan ekonomi yang stabil harus dibarengi oleh penurunan inflasi, harga bahan pokok yang stabil, penambahan wirausaha yang baru dan berdaya saing. Selain itu peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja menjadi salah satu bagian dari aktivitas perekonomian yang positif.

Beberapa isu strategis pada aspek ekonomi bisa dijabarkan sebagai berikut:

a) Sektor pariwisata masih belum berkembang, terutama banyak potensi alam yang dimiliki Kabupaten Belitung Timur;
b) Infrastruktur belum lengkap dan belum merata;
c) Pemberdayaan masyarakat belum optimal untuk mendukung perekonomian di Kabupaten Belitung Timur;
d) Sektor pertanian dan perikanan belum menunjukkan tingkat produksi yang optimal;
e) Peran investasi di berbagai sektor ekonomi belum menunjukkan tingkat yang optimal dalam menciptakan lapangan kerja.

b) Aspek Infrastruktur

Salah satu yang dapat mendorong aktivitas perekonomian dengan membangun infrastruktur di Kabupaten Belitung Timur. Pembangunan infrastruktur digunakan untuk peningkatan akses, dukungan infrastruktur pelayanan dasar, dan jaminan ketersediaan sumber daya air. Peranan infrastruktur sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Belitung Timur. Beberapa isu strategis dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Belum optimalnya infrastruktur transportasi, untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, termasuk jalan dan jembatan;
b) Infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi belum mendukung secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis digital;
c) Infrastruktur publik seperti penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak, serta infrastruktur pendukung lainnya seperti pasar dan fasilitas umum lainnya belum optimal.

Dari beberapa kebijakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur di Kabupaten Belitung Timur yang memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

c) Aspek Lingkungan

Peranan lingkungan menjadi salah satu kunci penting dalam jangka panjang di Belitung Timur. Lingkungan yang sehat menjadi kunci keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan yang sehat berdampak terhadap keberlanjutan sumber daya alam, pengelolaan limbah yang baik, dan pelestarian ekosistem. Lingkungan yang sehat akan membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung keberlangsungan hidup manusia serta makhluk lainnya. Aspek lingkungan menjadi perhatian dan

prioritas terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d) Aspek Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas pembangunan di Belitung Timur. Beberapa isu strategi yang dapat diambil sebagai langkah menciptakan sumber daya manusia yang unggul antara lain:

a) Akses dan kualitas pendidikan masih belum optimal dan belum merata;
b) Akses dan kualitas pelayanan kesehatan masih belum optimal dan belum merata;
c) Keterampilan dan daya saing tenaga kerja masih rendah;
d) Masih tingginya resiko masyarakat masuk ke jurang kemiskinan;
e) Kesenjangan gender dan kesenjangan kesejahteraan keluarga masih tinggi;
f) Nilai-nilai budaya serta kearifan lokal masih belum terpelihara secara optimal.

Dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ini, diharapkan Belitung Timur dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul, yang akan menjadi motor penggerak pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

e) Aspek Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan ditujukkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Belitung Timur. Sejumlah isu strategis dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Penggunaan teknologi informasi masih rendah dalam mendukung proses administrasi dan pelaporan;
b) Mekanisme pengawasan dan evaluasi internal pemerintah belum optimal;
c) Kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan belum optimal;
d) Kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan perlu ditingkatkan;
e) Pencegahan terjadinya praktik korupsi dalam pemerintahan belum optimal.

Tahapan kebijakan strategis dilakukan secara konsisten diharapkan dapat meningkat secara signifikan dalam jangka panjang.

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026

Kebijakan pembangunan Kabupaten Belitung Timur yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021- 2026 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan yaitu “BELITUNG TIMUR BANGKIT DAN BERDAYA”. Visi tersebut diwujudkan menjadi 3 misi yaitu:

1. Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja

3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan

2) RTRW Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 – 2034

Dokumen RTRW Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 – 2034 sebagai bagian yang tidak terpisahkan sebagai acuan isu strategis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pencapaian Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
   a) Belum efektif dan efisiennya struktur dan kelembagaan birokrasi
   b) Pelayanan publik yang belum prima
   c) Optimalisasi transformasi digital tata kelola pemerintahan

2. Pengembangan Ekonomi Sektor Prioritas
   a) Pengembangan ekonomi sektor pertanian
   b) Pengembangan ekonomi sektor perikanan
   c) Pengembangan ekonomi sektor industri pengolahan
   d) Pengembangan ekonomi sektor pariwisata

3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing
   a) Kualitas pendidikan dasar
   b) Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat
   c) Belum optimalnya pelayanan terhadap kesehatan ibu dan anak
   d) Belum optimalnya pengendalian penduduk dan keluarga berencana
   e) Perlunya peningkatan pembudayaan dan pemassalan olahraga
   f) Kualitas tenaga kerja belum merespon perkembangan kebutuhan pasar kerja

4. Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Pengurangan Risiko Bencana
   a) Aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang masih perlu ditingkatkan
   b) Ketaatan dalam pemanfaatan pola ruang
   c) Pengoptimalan sistem perkotaan (Sistem Pusat Pelayanan)
   d) Infrastruktur pelayanan dasar
   e) Peningkatan kualitas lingkungan hidup
   f) Pengurangan terhadap risiko bencana

Penyusunan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 – 2029 didapat dari permalahan pokok RPJPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 – 2045 pada tahapan 1 yaitu: “Penguatan Fondasi Transformasi (2025 – 2029)”. Isu Strategis yang dibuat dengan cara mengidentifikasi permasalahan pokok RPJPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 – 2045 (Tahapan 1) yang diolah menjadi berbagai isu strategi pada setiap misi.

TABEL 2. 128 ISU STRATEGIS RPJMD KABUPATEN BELITUNG TIMUR

MISI	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS DAN RPPLH	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	ISU STRATEGIS DAERAH
Misi 1: Mewujudkan inovasi tata kelola	Transformasi digital tata kelola pemerint	Belum optimalnya tata kelola reformasi birokrasi	Pelayanan Publik Berbasis *Smart*	Membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan	Isu strategis transformasi tata kelola	Reformasi birokrasi yang belum optimal	Peningkatan kinerja perangkat daerah dan

MISI	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS DAN RPPLH	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	ISU STRATEGIS DAERAH
pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif.	ahan Kabupaten Belitung Timur	pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas	*Governance*	inklusif di seluruh tingkatan.	pemerintahan	dan peningkatan stabilitas dan kepemimpinan daerah	profesionalisme ASN
	Penerapan *Good Governance* dan Kelembagaan yang kondusif	Belum optimalnya kinerja pengawasan Pemerintah Daerah	Penciptaan *Good Governance* dan Kelembagaan yang Kondusif				a) Optimalisasi kinerja pengawasan Pemerintah Daerah b) Peningkatan tata kelola pemerintahan desa c) Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik
Misi 2: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas produktif, berakhlak, berbudaya, dan bahagia.	a) Rencana pembangunan Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat b) Penyediaan kemudahan akses kesehatan melalui Integrasi Layanan Primer (ILP)	Masih rendahnya kualitas serta daya saing sumber daya manusia	Peningkatan Kesehatan dan Pendidikan	***Sustainable Development Goals:*** Pemerataan pendidikan dan kesehatan	Isu strategis transformasi sosial pada kesehatan dan kesejahteraan untuk semua	Rendahnya kualitas sumber daya manusia	a) Pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Belitung Timur b) Pemerataan akses kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Belitung Timur
			Kerentanan Keamanan dan Ketahanan Sosial	a) Mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di	Isu strategis transformasi sosial pada perlindungan sosial yang adaptif	Ketahanan sosial budaya yang masih perlu ditingkatkan	a) Kesenjangan gender dan kesenjangan kesejahteraan keluarga

MISI	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS DAN RPPLH	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	ISU STRATEGIS DAERAH
				segala umur b) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.	dan nilai agama yang belum optimal		masih tinggi. b) Nilai-nilai budaya serta kearifan lokal masih belum terpeliharа secara optimal.
	Kerja sama berupa CSR terkait penanaman tanaman pangan di Kabupaten Belitung Timur	Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur	Penanggulangan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan	a) Penurunan kemiskinan dan menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.	Isu strategis transformasi sosial belum optimalnya ketahanan pangan		a) Masih tingginya resiko masyarakat masuk ke jurang kemiskinan.
Misi 3: Menciptakan percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM, pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, kelautan, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan	Sektor pertanian dan perikanan merupakan penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Belitung Timur	Rendahnya produktivitas serta daya saing ekonomi daerah	Penguatan Ekonomi Lokal dalam Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah	***Sustainable Development Goals:*** Perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif	Isu strategis transformasi ekonomi pada rendahnya produktivitas dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan	Pembangunan ekonomi yang masih bergantung pada sumber daya tak terbarukan dan pemanfaatannya belum berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi	Peningkatan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan belum optimal
					Isu strategis transformasi ekonomi pada tenaga kerja yang belum berpendidikan tinggi dan partisipasi angkatan kerja perempuan yang stagnan		Pemberdayaan masyarakat belum optimal untuk mendukung perekonomian di Kabupaten Belitung Timur.

MISI	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS DAN RPPLH	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	ISU STRATEGIS DAERAH
	Kabupaten Belitung Timur memiliki *Geopark* Belitong yang sudah diakui oleh UNESCO				Pengelolaan dan kualitas layanan pariwisata, serta kualitas keterampilan SDM pariwisata		a) Optimalisasi potensi sektor pariwisata yang dapat menghadirkan alternatif pendapatan bagi daerah dan masyarakat b) Infrastruktur belum lengkap dan belum merata.
	Capaian Realisasi Investasi Kabupaten Belitung Timur yang mengalami peningkatan	Belum optimalnya peningkatan pertumbuhan realisasi investasi	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Smart Economy)		Produktivitas tenaga kerja dan adaptasi teknologi pada industri		Peningkatan pertumbuhan realisasi investasi
Misi 4: Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas dan memadai untuk pemerataan kesejahteraan	Rencana pembangunan jalan antar kabupaten (Desa Jangkang, Kabupaten Belitung Timur dengan Desa Kembiri, Kabupaten Belitung)	Belum meratanya konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur pelayanan dasar	Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan pembangunan permukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan, dan berkelanjutan.	Isu Transformasi Ekonomi pada Pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengembangan perkotaan dan perdesaan	Konektivitas antar wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang belum terintegrasi	Belum optimalnya infrastruktur transportasi, untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, termasuk jalan, jembatan.
	Bantuan CSR terhadap infrastruktur telekomunikasi di Pulau terpencil					Masih terbatasnya ketersediaan multi infrastruktur	Infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi belum mendukung secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi

MISI	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS DAN RPPLH	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	ISU STRATEGIS DAERAH
							berbasis digital.
	Terdapat Situ Kulong Minyak dan Bendungan Pice Besar yang difungsikan untuk penyediaan air						Rencana Tata Ruang Wilayah dalam rencana pembangunan
							Peningkatan pemenuhan pemukiman yang layak
Misi 5: Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam yang bijaksana, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Revitalisasi lahan kritis di Kabupaten Belitung Timur	Terjadinya kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan hidup yang mengakibatkan tingginya potensi bencana	a) Kerentanan Kualitas Lingkungan Hidup b) Kebencanaan dan Perubahan Iklim Ancaman Keanekaragaman Hayati c) Alih Fungsi Lahan d) Pengelolaan Sampah Berbasis *Smart Environment*	Pelestarian sumber daya alam dan perubahan iklim	Pencemaran lahan, terancamnya keanekaragaman hayati dan risiko kebencanaan	Kualitas lingkungan yang sehat berdampak terhadap keberlanjutan sumber daya alam, pengelolaan limbah yang baik, dan pelestarian ekosistem.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
	Kabupaten Belitung Timur menjadi salah satu lokasi proyeksi TPST di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				TPA yang melebih kapasitas		
	Kabupaten Belitung Timur memiliki Situ Kulong Minyak di Kecamatan Manggar dan Bendungan Pice Besar yang bertujuan untuk mengonservasi air	Belum optimalnya pelayanan air bersih di Kabupaten Belitung Timur		Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.	Kualitas air, udara, tutupan lahan, dan air laut semakin menurun.		Peningkatan layanan akses air minum aman dan akses sanitasi aman

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2025

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

III.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

III.1.A Visi dan Misi

3.1.1.1 Visi

RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 berisi penjabaran visi, misi, serta program dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menjadi visi pembangunan yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai setidaknya dalam kurun lima tahun mendatang. RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 adalah tahapan pembangunan periode pertama atau awal dari RPJPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045 sehingga menjadi penting karena berpengaruh terhadap pencapaian target akhir pembangunan sesuai RPJPD.

Visi pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 berdasarkan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

BELTIM NYAMAN & BERKEMAJUAN

NYAMAN	BERKEMAJUAN
Secara etimologi berarti sesuatu yang memberikan atau menghasilkan kepuasan/ kelegaan/ keamanan/ ketenangan/ keceriaan	Kondisi masyarakat Belitung Timur yang merasakan perbaikan dan perubahan positif secara berkesinambungan dalam semua sektor pembangunan kehidupan masyarakat. Seperti, pertumbuhan ekonomi, kualitas pendidikan, fasilitas dan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup, kelestarian lingkungan, dan pemerataan pembangunan.
iNovatif, berdaYA saing, MANdiri	
Gerakan bersama dengan semangat kolaborasi, sinergitas, dan gotong royong antara Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat, dalam mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreativitas dan inovasi dalam percepatan pembangunan, sebagai upaya menciptakan daya saing dan kemandirian daerah, demi terwujudnya kehidupan masyarakat Belitung Timur yang Maju, Sejahtera, dan Bahagia	

3.1.1.2 Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi pembangunan yang berisi rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi. Misi mengarahkan sekaligus membatasi proses pencapaian tujuan pembangunan yang diterjemahkan dalam berbagai strategi dan arah kebijakan sebagai acuan dalam perumusan perencanaan agar sesuai dan sejalan untuk pencapaian visi pembangunan Kabupaten Belitung Timur.

Adapun rumusan misi sesuai visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif**

Sebagai salah satu prasyarat pembangunan daerah, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan memberikan pengaruh positif terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan untuk membentuk jalannya pemerintahan daerah yang selalu mengedepankan keinginan masyarakat, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, juga keadilan sosial dalam masyarakat. Sedangkan prinsip pemerintah yang bersih (*clean government*) berperan dalam meningkatkan transparansi serta menekan penyalahgunaan wewenang pemerintahan. Kedua prinsip tersebut dapat digambarkan melalui pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengawasan kinerja serta evaluasi pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Peningkatan kapasitas pada sektor terkait perlu dilakukan dalam kurun lima tahun ke depan yang bermuara pada peningkatan reformasi birokrasi di lingkup pemerintahan Kabupaten Belitung Timur sebagai suatu kepastian terciptanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan.

Pelaksanaan pelayanan publik juga berjalan seiring dengan perkembangan pesat teknologi informasi. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur untuk terus melakukan adaptasi berupa peningkatan kualitas layanan dan juga kinerjanya. Terakhir, berkaitan dengan pembenahan manajemen penyelenggaraan tata pemerintahan adalah kebutuhan akan manajemen kelembagaan dan juga sumber daya aparatur yang efisien. Nantinya, sistem kelembagaan manajemen aparatur yang tepat dan efisien akan tercermin dalam bentuk peningkatan efektivitas dalam pelaksanaan tugas fungsi tiap organisasi pemerintah daerah dan juga profesionalisme aparatur di Kabupaten Belitung Timur.

2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Produktif, Berakhlak, Berbudaya, dan Bahagia

Salah satu cara agar masyarakat dapat sejahtera adalah dengan mengembangkan sumber daya manusia. Kondisi sumber daya manusia Kabupaten Belitung Timur yang masih perlu ada peningkatan, memerlukan dukungan dari pemerintah. Fokus pada periode ini adalah meningkatkan dan memeratakan pelayanan kesehatan, pendidikan, serta budaya yang mencakup seluruh lapisan masyarakat seperti: masyarakat pra-sejahtera dan pekerja rentan dengan berlandaskan asas inklusivitas dan keadilan.

3. Mempercepat Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Perkebunan, Pariwisata, Perikanan, dan Ekonomi Kreatif, Serta Memperkuat Kolaborasi Antar Pelaku Pembangunan

Pembangunan ekonomi Kabupaten Belitung Timur lima tahun mendatang diprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi ada bidang pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, kelautan, dan ekonomi kreatif. Pembangunan ekonomi Belitung Timur juga mendorong kolaborasi antar-*stakeholder* serta pemberdayaan pada wilayah perdesaan. Melalui perhatian terhadap bidang-bidang tersebut dapat memperkuat perekonomian lokal serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Belitung Timur perlu memperbaiki beberapa kondisi yang berdampak bagi pembangunan ekonomi di Belitung Timur. Perbaikan dapat dilakukan dengan cara peningkatan pembukaan lapangan kerja, bantuan kepada UMKM, bantuan kepada petani dan nelayan, serta menyediakan pelatihan, pendampingan, magang, dan mendukung kerja sama dengan berbagai *stakeholder*. Selain itu, potensi desa perlu diberdayakan dengan fokus pada pengolahan dan pemanfaatan hasil alam menjadi produk siap konsumsi. Ide-ide tersebut diharapkan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

4. Meningkatkan dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Publik Yang Berkualitas dan Memadai Untuk Pemerataan Kesejahteraan

Misi ini menitikberatkan pada penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana publik yang berkualitas, bisa dinikmati semua kalangan, namun dalam pembangunannya tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan infrastruktur merupakan fondasi pertumbuhan ekonomi serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui misi ini berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, karena ketersediaan infrastruktur yang andal merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia usaha.

5. Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Bijaksana, Berwawasan Lingkungan, dan Berkelanjutan

Misi ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Belitung Timur. Selain itu, juga memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Seluruh kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Belitung Timur merupakan warisan yang seharusnya dapat dinikmati oleh generasi sekarang, melainkan juga generasi yang akan datang.

III.1.B Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan lima misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Belitung Timur, maka dirumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran merupakan turunan atau penjabaran secara operasional yang akan berjalan selaras dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Penjabaran ini nantinya akan menjadi penghubung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam bentuk strategi dan arah kebijakan daerah. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai sebuah visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Tahapan perumusan tujuan dalam perencanaan kebijakan termasuk RPJMD layaknya titik kritis. Hal tersebut dikarenakan tingkatannya yang tinggi secara prioritas sehingga ikut mempengaruhi penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Secara alur, visi–misi Bupati dan Wakil Bupati untuk periode lima tahun akan menjadi landasan serta dijabarkan ke dalam sebuah tujuan untuk dioperasionalkan lewat program–program penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, tercapainya tujuan juga dianggap sebagai dampak keberhasilan dari tercapainya program–program yang ditetapkan. Rumusan tujuan berdasarkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- **Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**
  Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih merupakan tujuan dari misi pertama yaitu membenahi manajemen penyelenggaraan tata pemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal tersebut perlu didukung oleh peningkatan kapasitas dalam beberapa hal antara lain perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan; pengelolaan keuangan; dan juga pengawasan. Selain itu, peningkatan kinerja dan koordinasi antar pemangku kepentingan juga mengambil peran penting upaya pembenahan penyelenggaraan tata pemerintahan.

- **Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat**
  Peningkatan kualitas hidup masyarakat terkait dengan kualitas lingkungan hidup yang ada. Kabupaten Belitung Timur masih memiliki permasalahan dengan kualitas sanitasi dan air minum. Akses sanitasi dan air minum yang aman dan layak, pelayanan persampahan serta peningkatan aksesibilitas menjadi perhatian penting dalam upaya peningkatan kinerja kualitas hidup di wilayah Kabupaten Belitung Timur dalam lima tahun mendatang. Selain itu, terdapat juga urgensi isu dan beberapa permasalahan terkait lingkungan hidup yang harus diselesaikan.

- **Tujuan 3 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan**
  Peningkatan perekonomian lokal membawa dampak yang luas bagi kondisi perekonomian di suatu daerah. Meningkatnya perekonomian lokal di suatu daerah maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin baik. Peningkatan perekonomian lokal dapat dicapai melalui beberapa hal, salah satunya adalah pengembangan sektor prioritas daerah. Selain itu, Kabupaten Belitung Timur juga perlu mengembangkan potensi daerah terutama pada sektor yang berhubungan dengan ekonomi biru.

- **Tujuan 4 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata**
  Peningkatan pembangunan infrastruktur yang layak serta dapat diakses secara luas dengan mudah oleh masyarakat menjadi tujuan pembangunan sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terjangkau dan berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kinerja infrastruktur wilayah sehingga secara beriringan dapat mendorong produktivitas masyarakat. Pembangunan infrastruktur akan meliputi pengembangan infrastruktur internet di pedesaan, sehingga pemberdayaan desa akan semakin meningkat.

- **Tujuan 5 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**
  Fokus kepada kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Belitung Timur, di mana terdapat permasalahan terkait pencemaran lingkungan dari aktivitas penambangan timah. Tujuan yang ditetapkan berfokus pada penurunan intensitas emisi GRK. Tujuan ini memperhatikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dengan keberlanjutan lingkungan melalui tata kelola yang bijaksana, pengembangan ekonomi hijau, serta pengendalian pencemaran dan perubahan iklim. Selain itu, tujuan ini juga berfokus pada persampahan, perbaikan kualitas air, dan penegakan regulasi terkait pencemaran.

TABEL 3. 1 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029

VISI	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE	TARGET					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
BELTIM NYAMAN & BERKEMAJUAN	[1] Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif.	[1.1] Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	82,58	82,58	83,06	83,54	84,02	84,5	85
		[1.1.1] Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	66,37 (B)	70,01 (BB)	71,50	73,00	74,00	75,01 (BB)	75,50
			Indeks SPBE	Nilai	4,16	3,5	3,0	3,25	3,5	3,75	4
			Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	79,03	80	80	70	73	77	81
			Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,01	4,05	4,10	4,15	4,20	4,25	4,30
			Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3	3
		[1.1.2] Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	83,45	83,71	83,97	84,23	84,48	84,74	85,00
	[2] Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas produktif, berakhlak, berbudaya, dan bahagia.	[2.1] Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,62	73,98	74,35	74,71	75,10	75,49	75,89
		[2.1.1] Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,69	11,79	11,89	11,99	12,09	12,14	12,19
			Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,99	9,13	9,28	9,42	9,57	9,61	9,71
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	84,09	85	86	87	88	89	90
		[2.1.2] Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,89	73,04	73,20	73,35	73,51	73,66	73,77
			Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	17,1	16,34	15,38	14,42	13,46	12,47	11,51
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	Persen	10,32	10,32	10,12	9,92	9,72	9,52	9,32
		[2.1.3] Meningkatnya kesejahteraan sosial dan budaya	Angka Kemiskinan	Angka	6,36	6,20	6,04	5,87	5,71	5,59	5,55
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	59,28	59,68	60,07	60,47	60,86	61,26	61,26
			Indeks Pembangu	Nilai	87,55	87,83	88,1	88,38	88,65	88,73	88,93

VISI	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE	TARGET					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			nan Gender								
			Indeks Perlindungan Anak	Nilai	67,66	68,86	70,06	71,26	72,46	73,05	73,66
			Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	52,67	54,34	56	57,67	59,33	60	61
	[3] Mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, kelautan, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan	[3.1] Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	-0.03	3,05	3,08	3,36	3,86	4.36	4.86
			Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	Ribu Rupiah	82.608,71	83.940,00	87.140,00	90.350,00	93.550,00	96.750,00	99.950,00
			Indonesia *Blue Economy Index* (IBEI)	Nilai	26,49	26,49	29,06	31,62	34,19	36,75	39,32
			Rasio Gini	Nilai	0,251	0,225	0,217	0,208	0,201	0,192	0,184
		[3.1.1] Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Juta Rupiah	1.617.560	3.168.130	3.400.430	3.632.720	3.865.020	4.097.310	4.329.610
			PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	Juta Rupiah	181.320	191.390	209.100	227.160	237.310	247.308	265.090
			PDRB Industri Pengolahan	Juta Rupiah	1.066.580	1.146.850	1.192.500	1.272.770	1.318.420	1.398.690	1.444.340
			Tingkat Inflasi	Persen	1,38	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1
		[3.1.2] Meningkatnya pertumbuhan investasi	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Juta Rupiah	1.068.106	450.000	468.000	494.000	520.000	546.000	572.000
		[3.1.3] Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.63	2.60	2.33	2.26	2.19	1.54	1.47
	[4] Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas dan memadai untuk pemerataan	[4.1] Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Nilai	NA	73,925	77,235	80,18	80,7	81,22	81,295
		[4.1.1] Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Angka	63,10	75,83	75,83	80,67	80,67	80,67	80,67
		[4.1.2] Meningkatnya kualitas	Indeks Infrastruktur Wilayah	Nilai	73,53	72,02	78,64	79,69	80,73	81,77	81,92

VISI	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE	TARGET					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	kesejahteraan	sarana dan prasarana wilayah									
	[5] Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	[5.1] Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	NA	17,67	18,39	19,11	19,83	20,55	21,27
		[5.1.1] Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	67,76	76,34	76,51	76,68	76,85	77,02	77,19
			Indeks Risiko Bencana	Angka	152,06	152,06	150,39	148,72	147,05	145,38	143,71

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2025

III.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

III.2.A Strategi RPJMD Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

TABEL 3. 2 MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI RPJMD KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Berfokus pada percepatan digitalisasi birokrasi, penguatan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong kepemimpinan kolaboratif.
2	Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas produktif, berakhlak, berbudaya, dan bahagia	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi Meningkatnya kesejahteraan sosial dan budaya	Berfokus pada menciptakan SDM yang tidak hanya unggul dalam kompetensi, tetapi juga sehat, produktif, berakhlak, berbudaya, dan bahagia.
3	Mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebunan , pariwisata, perikanan, kelautan, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Meningkatnya pertumbuhan investasi Meningkatnya kesempatan kerja	Berfokus pada percepatan pembangunan ekonomi daerah melalui optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif
4	Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas dan memadai untuk pemerataan kesejahteraan	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata	Meningkatnya konektivitas antar wilayah Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
5	Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Berfokus pada keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dengan keberlanjutan lingkungan melalui tata kelola yang bijaksana, pengembangan ekonomi hijau, serta pengendalian pencemaran dan perubahan iklim. Dengan memperkuat regulasi, pengawasan, kolaborasi multi-pihak, serta meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan Kabupaten Belitung Timur dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2025

MISI 1: Mewujudkan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Digital dan Kepemimpinan Kolaboratif

1. **Strategi 1**: **Berfokus pada percepatan digitalisasi birokrasi, penguatan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong kepemimpinan kolaboratif.**
   Melalui digitalisasi, proses birokrasi menjadi lebih efisien dan responsif, sementara transparansi dan akuntabilitas ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi untuk memastikan keterbukaan informasi dan pengawasan publik. Kepemimpinan kolaboratif mendorong sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, menciptakan partisipasi aktif dalam pembangunan. Implementasi strategi ini diharapkan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan selaras dengan agenda transformasi digital nasional, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

MISI 2: Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Produktif, Berakhlak, Berbudaya dan Bahagia

2. **Strategi 2: Berfokus pada menciptakan SDM yang tidak hanya unggul dalam kompetensi, tetapi juga sehat, produktif, berakhlak, berbudaya, dan bahagia.**
   Penciptaan SDM yang unggul, sehat, produktif, berakhlak, berbudaya, dan bahagia memerlukan pendekatan terintegrasi melalui pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, serta pembinaan karakter dan mental. Pemerintah dan *stakeholder*s terkait perlu memastikan akses layanan kesehatan yang merata, program peningkatan produktivitas, dan penguatan nilai-nilai moral serta budaya lokal. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mampu menghadapi tantangan global, tetapi juga dapat hidup harmonis, menjaga identitas budaya, dan mencapai kebahagiaan yang seimbang antara aspek material dan spiritual, menciptakan fondasi yang kokoh untuk pembangunan berkelanjutan.

MISI 3: Mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebunan , pariwisata, perikanan, kelautan, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan

3. **Strategi 3: Berfokus pada percepatan pembangunan ekonomi daerah melalui optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif**
   Strategi ini berfokus pada percepatan pembangunan ekonomi daerah dengan mengoptimalkan potensi sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Melalui peningkatan produktivitas, inovasi teknologi, dan penguatan rantai nilai, diharapkan sektor-sektor tersebut dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mempromosikan kekayaan budaya serta alam daerah. Melalui pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan, pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan yang merata dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

MISI 4: Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas dan memadai untuk pemerataan kesejahteraan

4. **Strategi 4: Berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.**

Strategi ini berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan memperluas akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, dan jaringan komunikasi, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa. Infrastruktur yang memadai juga akan mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Melalui pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan, kualitas hidup masyarakat akan meningkat, dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat terwujud secara merata dan berkeadilan.

MISI 5: Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan

5. **Strategi 5: Strategi Kebijakan berfokus pada keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dengan keberlanjutan lingkungan melalui tata kelola yang bijaksana, pengembangan ekonomi hijau, serta pengendalian pencemaran dan perubahan iklim. Dengan memperkuat regulasi, pengawasan, kolaborasi multi-pihak, serta meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan Kabupaten Belitung Timur dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.**
   Strategi Kebijakan ini berfokus pada menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan melalui tata kelola yang bijaksana, pengembangan ekonomi hijau, serta upaya pengendalian pencemaran dan perubahan iklim. Dengan memperkuat regulasi dan sistem pengawasan, mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan, diharapkan Kabupaten Belitung Timur dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Langkah ini tidak hanya memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang, sekaligus mendukung komitmen global dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

TABEL 3. 3 PENAHAPAN PEMBANGUNAN RPJMD

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)
Prakondisi Transformasi: Fokus kepada penataan arah, regulasi, dan infrastruktur pendukung sebagai pijakan untuk pembangunan transformasi pada tahun 2026	**Fondasi Transformasi:** Fokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penguatan kesejahteraan sosial, pengembangan awal sektor-sektor ekonomi unggulan, pembangunan infrastruktur dasar, serta upaya perlindungan awal lingkungan hidup.	**Pengembangan Fondasi:** Peningkatan sistem tata kelola digital, pengembangan layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih merata dan terintegrasi, penguatan ekonomi kreatif dan pertanian, konektivitas wilayah, serta penguatan regulasi lingkungan.	**Penguatan Fondasi:** Konsolidasi tata kelola berbasis digital, akselerasi SDM unggul dan berbudaya, percepatan pertumbuhan ekonomi sektor prioritas, peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur publik, dan optimalisasi pengelolaan SDA secara berkelanjutan.	**Konsolidasi Capaian:** Menuju kondisi "Beltim Nyaman dan Berkemajuan", dilakukan konsolidasi hasil transformasi dengan mendorong stabilitas dan daya tahan sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan lingkungan.	**Transisi Menuju RPJPD Tahap II (2045)**: Akselerasi dan pemantapan arah pembangunan jangka panjang berfokus pada sistem pemerintahan bersih dan akuntabel, SDM unggul, ekonomi tangguh, infrastruktur berdaya saing, serta lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2025

Penahapan pembangunan dalam RPJMD disusun secara strategis dan bertahap untuk mengakomodasi lima misi pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pada Tahap I (2025), Pembangunan difokuskan pada prakondisi transformasi, antara lain pada penataan arah, regulasi, dan infrastruktur pendukung sebagai pijakan untuk membangun transformasi pada tata kelola pemerintahan, sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan.

Pada Tahap II (2026), pembangunan difokuskan pada pondasi transformasi, dengan menekankan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pemenuhan pelayanan dasar

seperti pendidikan dan kesehatan, penguatan kesejahteraan sosial, pengembangan awal sektor-sektor ekonomi unggulan, pembangunan infrastruktur dasar, serta perlindungan awal terhadap lingkungan hidup.

Memasuki Tahap III (2027), dilakukan pengembangan fondasi melalui peningkatan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih merata dan terintegrasi, serta peningkatan sektor ekonomi seperti pertanian dan ekonomi kreatif. Pada tahap ini, juga diperkuat konektivitas antar wilayah serta regulasi dan kesadaran terhadap perlindungan lingkungan hidup.

Pada Tahap IV (2028), difokuskan pada penguatan fondasi, yaitu konsolidasi sistem tata kelola digital, akselerasi peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berbudaya, percepatan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi prioritas, peningkatan kualitas serta aksesibilitas infrastruktur publik, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Tahap V (2029) diarahkan pada konsolidasi capaian, yakni memantapkan hasil transformasi sebelumnya dalam rangka menciptakan kondisi "Beltim Nyaman dan Berkemajuan", dengan menekankan pada stabilitas dan ketahanan sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Akhirnya, Tahap VI (2030) menjadi fase transisi menuju RPJPD Tahap II (2025–2045), di mana pembangunan diarahkan untuk mempercepat dan memantapkan transformasi menuju sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel, penguatan SDM unggul, perekonomian yang tangguh dan inklusif, infrastruktur berdaya saing, serta pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

III.2.B **Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029**

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

TABEL 3. 4 ARAH KEBIJAKAN RPJMD TAHUN 2025-2029

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif	1) Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.
		2) Peningkatan pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja yang berbasis sistem merit dengan pemanfaatan teknologi informasi.
		3) Peningkatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.
		4) Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi pelayanan perizinan berbasis digital.
		5) Peningkatan kepemimpinan kolaboratif yang terintegrasi melalui penguatan koordinasi dan kemitraan strategis antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta lembaga/organisasi mitra lainnya dalam tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital
		6) Penguatan tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sistem digital perpajakan dan retribusi daerah, peningkatan kapasitas pengelolaan aset sebagai sumber PAD, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dan evaluasi kinerja penerimaan daerah.
2.	Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas produktif, berakhlak,	1) Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur serta layanan pendidikan dan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah pesisir dan terpencil
		2) Peningkatan kompetensi dan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan guna memastikan layanan publik yang profesional dan merata

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN
	berbudaya, dan bahagia.	3) Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif, penguatan sistem registrasi sosial ekonomi, dan optimalisasi layanan jaminan sosial
		4) Peningkatan akses pendidikan vokasi, pelatihan kerja, serta dukungan terhadap inisiatif usaha masyarakat melalui kegiatan padat karya, bantuan permodalan, dan penguatan pemasaran
		5) Optimalisasi nilai agama, budaya, peran pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan manusia seutuhnya
3	Mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan.	1) Peningkatan produktivitas serta mutu komoditas unggulan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pangan melalui penerapan teknologi tepat guna dan diversifikasi
		2) Peningkatan kompetensi dan regenerasi petani, nelayan, ekonomi kreatif, serta pelaku sektor produktif lainnya, termasuk penguatan peran generasi muda melalui pelatihan dan pendidikan vokasional.
		3) Mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan nilai tambah produk dan menciptakan lapangan kerja
		4) Penyiapan regulasi dan kebijakan yang mendorong investasi produktif, inklusif, dan berkelanjutan di berbagai sektor unggulan daerah (pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan)
4	Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas dan memadai untuk pemerataan kesejahteraan	1) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan jaringan telekomunikasi hingga ke pelosok dan wilayah Kabupaten Belitung Timur
		2) Penguatan infrastruktur pengolahan limbah, sistem drainase, dan pengelolaan sumber daya air yang efisien untuk mendukung lingkungan permukiman yang sehat dan berkelanjutan
		3) Peningkatan kualitas dan konsistensi pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar pembangunan infrastruktur dan pemukiman yang terintegrasi.
		4) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana publik di kawasan permukiman untuk mendukung kehidupan masyarakat yang nyaman dan aman
		5) Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai sarana interaksi sosial dan budaya serta peningkatan kapasitas instruktur bersertifikasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas
		6) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur strategis, termasuk pelabuhan bertaraf internasional dan sistem transportasi massal yang terintegrasi dan menjangkau pulau-pulau terkecil (Pelabuhan Manggar, Pelabuhan Dendang dan Teluk Asam)
5	Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	1) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup
		2) Penguatan regulasi persampahan, baik sampah rumah tangga maupun sampah industri, sampai ke level desa.
		3) Peningkatan KIE (komunikasi, Informasi dan Edukasi) kebencanaan dan penanggulangan bencana.
		4) Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2025

III.3 Program Pembangunan Daerah RPJMD 2025-2029

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

III.3.A **Program Pembangunan Daerah**

Dalam upaya pencapaian visi misi pembangunan daerah, diperlukan langkah-langkah konkret melalui program-program pembangunan yang secara langsung berhubungan dengan pencapaian visi misi tersebut. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah menetapkan 138 program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang. Program-program pembangunan Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

MISI 1: Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
6. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
7. Program Pengelolaan Arsip
8. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
9. Program Perizinan Penggunaan Arsip
10. Program Akreditasi dan Sertifikasi
11. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
12. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
13. Program Penyelenggaraan Pengawasan
14. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
15. Program Kepegawaian Daerah
16. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
17. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
18. Program Perekonomian dan Pembangunan
19. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
20. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
21. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
22. Program Riset dan Inovasi Daerah
23. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
24. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
25. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
26. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
27. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
28. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
29. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
30. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
31. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
32. Program Administrasi Pemerintahan Desa
33. Program Penataan Desa

34. Program Peningkatan Kerjasama Desa
35. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
36. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
37. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
38. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
39. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
40. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
41. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
42. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran

MISI 2: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas produktif, berakhlak, berbudaya, dan bahagia

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan Kurikulum
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
5. Program Pembinaan Perpustakaan
6. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
7. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
9. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman
10. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
11. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
12. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
13. Program Penanganan Kerawanan Pangan
14. Program Pengawasan Keamanan Pangan
15. Program Pemberdayaan Sosial
16. Program Rehabilitasi Sosial
17. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
18. Program Penanganan Bencana
19. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
20. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
21. Program Perlindungan Perempuan
22. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
23. Program Pemenuhan Hak Anak
24. Program Perlindungan Khusus Anak
25. Program Pengendalian Penduduk
26. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
27. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
28. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
29. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
30. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
31. Program Pengembangan Kebudayaan
32. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

33. Program Pembinaan Sejarah
34. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
35. Program Pengelolaan Permuseuman

MISI 3: Mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan.

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5. Program Penyuluhan Pertanian
6. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
7. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
8. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
10. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
11. Program Pemasaran Pariwisata
12. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
13. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
14. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
15. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
16. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
17. Program Pengembangan Ekspor
18. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
19. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
20. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
21. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
22. Program Pengembangan UMKM
23. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
24. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
25. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
26. Program Perencanaan Tenaga Kerja
27. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
28. Program Penempatan Tenaga Kerja
29. Program Hubungan Industrial
30. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
31. Program Promosi Penanaman Modal
32. Program Pelayanan Penanaman Modal
33. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
34. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

MISI 4: Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas dan memadai untuk pemerataan kesejahteraan

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
2. Program Pengelolaan Pelayaran
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
7. Program Penataan Bangunan Gedung
8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
9. Program Penyelenggaraan Jalan
10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
12. Program Pengembangan Perumahan
13. Program Kawasan Permukiman
14. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
15. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
16. Program Penatagunaan Tanah

MISI 5: Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas dan memadai untuk pemerataan kesejahteraan

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
11. Program Pengelolaan Persampahan

III.3.B Program Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029

Program prioritas dihasilkan melalui penjenjangan kinerja yang dimulai dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran hingga *outcome* dan dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya. Program prioritas juga diselaraskan dengan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati. Berikut perumusan program prioritas RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029.

TABEL 3. 6 PERUMUSAN PROGRAM PRIORITAS RPJMD TAHUN 2025-2029

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
[1] Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif.	[1.1] Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan			1. Indeks Reformasi Birokrasi			
		[1.1.1] Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika 2. Meningkatnya	1. Nilai SAKIP 2. Indeks SPBE 3. Indeks Profesionalisme ASN 4. Indeks Pelayanan Publik	**Nyaman Layanan Publik**	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2. URUSAN STATISTIK 3. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDU

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah 3. Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk 4. Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil 5. Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional 6. Terwujudnya Pengelolaan ASN yang Efektif dan Profesional Melalui Penerapan Program Kepegawaian yang Terpadu dan Berdasarkan Sistem Merit 7. Meningkatnya tata kelola arsip 8. Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem statistik Nasional (SSN) 9. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat	5. Maturitas SPIP		3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 4. Program Pendaftaran Penduduk 5. Program Pencatatan Sipil 6. Program Pengelolaan Arsip	DUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4. URUSAN KEARSIPAN
					Program Internet Desa Nyaman	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Nyaman ASN Berkemajuan	1. Program Kepegawaian Daerah 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Penataan Organisasi)	1. KEPEGAWAIAN 2. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 3. SEKRETARIAT DAERAH
					Nyaman Desa Berdaya **RT Ku Nyaman**	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3. URUSAN TENAGA KERJA

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM 10. Meningkatnya daya saing UMKM 11. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja				
		[1.1.2] Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel 2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah 3. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah 4. Menurunnya terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan baik bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan 5. Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi 6. Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundan	● Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) ● Opini BPK	**Nyaman Bersinergi**	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 3. Program Riset dan Inovasi Daerah 4. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 5. Program Pengelolaan Keuangan 6. Program Pengelolaan Pendapatan 7. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 8. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penangan	1.UNSUR SEKRETARIAT DAERAH 2.UNSUR PENGAWASAN 3.UNSUR PERENCANAAN 4.UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.UNSUR SEKRETARIAT DPRD 6.UNSUR KEUANGAN 7.UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			g-undangan 7. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat serta produk hukum yang dihasilkan 8. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan serta Layanan Pengadaan Barang dan Jasa			an Konflik Sosial 9. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 10. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 11. Program Perekonomian dan Pembangunan	
[2] Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas produktif, berakhlak, berbudaya, dan bahagia.	[2.1] Meningkatnya kualitas hidup masyarakat			Indeks Pembangunan Manusia			
		[2.1.1] Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Harapan Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah	**Nyaman Cerdas**	8. Program Pengelolaan Pendidikan 9. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	URUSAN PENDIDIKAN
			Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			
		[2.1.2] Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup Prevalensi Stunting pada Balita	**Nyaman Sehat**	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 3. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	URUSAN KESEHATAN
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)			
		[2.1.3] Meningkatnya kesejahte	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan	Angka Kemiskinan	**Nyaman Sejahtera**	4. Program Pemberda	URUSAN SOSIAL

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
		raan sosial dan budaya	bermasyarakat Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif			yaan Sosial 5. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
			Terwujudnya berkebudayaan maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan			
			Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender			
			Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga	Indeks Pembangunan Pemuda			
			Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Perlindungan Anak			
[3] **Mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan.**	[3.1] Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan			• Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) • Produk Domestik Regional Bruto per Kapita • Indonesia Blue Economy Index (IBEI) • Rasio Gini			
		[3.1.1] Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian 2. Meningkatnya produksi perikanan tangkap	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	**Petani & Nelayan Nyaman**	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1. URUSAN PERTANIAN 2. URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 3. URUSAN PARIWISATA
			1. Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif 2. Meningkatnya nilai tambah perdagangan	PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	**Nyaman Kreatif Berkarya**	1. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			1. Meningkatnya daya saing industri	PDRB Industri Pengolahan			
				Tingkat Inflasi			
		[3.1.2] Meningkatnya pertumbuhan investasi	1. Meningkatnya daya saing UMKM 2. Terwujudnya iklim investasi	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	**UMKM Ku Nyaman Berdaya**	1. Program Pengembangan UMKM	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			yang kompetitif				
		[3.1.3] Meningkatnya kesempatan kerja	1. Meningkatnya kemudahan berinvestasi 2. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Penganggur an Terbuka	**Nyaman Kerja**	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. URUSAN TENAGA KERJA 2. URUSAN PENANAMAN MODAL
[4] Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas dan memadai untuk pemerataan kesejahteraan	[4.1] Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata			Indeks Pembangun an Infrastruktu r Wilayah			
		[4.1.1] Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	**Gerbang Ekonomi**	Program Pengelolaan Pelayaran	URUSAN PERHUBUNGAN
		[4.1.2] Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hunian, menguranggi luasan kawasan kumuh, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan infrastruktur jalan 2. Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi 3. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman 4. Meningkatnya bangunan dan lingkungan	Indeks Infrastruktu r Wilayah	**Infrastru ktur Nyaman**	1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 3. Program Penyelenggaraan Jalan 4. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2. URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			yang tertata 5. Meningkatnya kualitas sistem drainase 6. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas				
[5] Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam yang bijaksana, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	[5.1] Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			Penurunan Intensitas Emisi GRK			
		[5.1.1] Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan kabupaten 3. Meningkatnya tata kelola persampahan 4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum 5. Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi 6. Terciptanya keadilan dalam penugasan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Indeks Risiko Bencana	**Nyaman Lestari** **Nyaman Air Bersih**	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 3. Program Pengelolaan Persampahan 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	**1.** URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT **2.** URUSAN LINGKUNGAN HIDUP **3.** URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Terwujudnya kualitas	Indeks Kualitas			

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			lingkungan hidup	Lingkungan Hidup			
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup				
			Terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan				
			Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan				

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, (diolah)

III.3.C **Program Unggulan dan Andalan Kepala Daerah**

Program Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2025–2029 dirancang untuk mewujudkan tata kelola pembangunan daerah yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program ini terdiri dari 17 Program Unggulan (PU) yang dikembangkan menjadi 11 Program Andalan (PA) dengan 41 Program Prioritas.

Program Unggulan merupakan Program Kepala Daerah yang disampaikan pada masa proses pemilihan kepala daerah. Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, program-program ini menjadi fokus yang diusung oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui inovasi tata kelola pemerintahan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemenuhan kebutuhan dasar yang merata. Berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pengembangan sektor-sektor unggulan, serta pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, program-program ini dirancang untuk menciptakan perubahan positif yang terukur dan berkelanjutan di seluruh aspek kehidupan daerah.

TABEL 3. 5 PROGRAM UNGGULAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

PROGRAM UNGGULAN	KETERANGAN
MISI 1: Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif	
Nyaman Layanan Publik	Program inisiatif pelayanan publik yang menggunakan sistem terpadu satu pintu sebagai bagian dari transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Penerapan dalam sistem administrasi elektronik, portal informasi publik, aplikasi *mobile,* dan manajemen pengaduan digital. Dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses layanan, dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, sehingga dapat menciptakan pengalaman layanan publik yang lebih baik dan responsif
Nyaman ASN Berkemajuan	Meningkatkan kualitas dan daya saing Aparatur Sipil Negara (ASN). Fokus program ini meliputi pengembangan kapasitas ASN melalui pelatihan berkelanjutan dan standarisasi kompetensi. Tujuan utamanya meningkatkan keterampilan ASN, mendorong inovasi dan kreativitas, serta menerapkan teknologi baru guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Dengan memastikan ASN mematuhi standar profesional tinggi diharapkan dapat memperkuat kontribusi ASN dalam memajukan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
Nyaman Bersinergi	Memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk ASN (Aparatur Sipil Negara), sektor swasta, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, dalam upaya bersama untuk memajukan daerah dengan investasi dan kerja sama. Program ini bertujuan pada: Mendorong kolaborasi yang efektif dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah
Nyaman Desa Berdaya	Berkolaborasi dengan pemerintahan Desa untuk menggerakkan ekonomi lokal yang berbasis pengolahan sumber daya alam yang sesuai dengan potensi desa. Fokus kepada pengolahan dan pemanfaatan hasil alam menjadi produk siap konsumsi (*ready to eat*). Serta meningkatkan kapasitas pengolahan dan pemasaran serta memperkuat ekonomi dari desa.

PROGRAM UNGGULAN	KETERANGAN
RT Ku Nyaman	Kolaborasi dengan pemerintahan Desa dalam memperkuat peran RT sebagai ujung tombak dalam menjaga stabilitas dan kenyamanan masyarakat.
Internet Desa Nyaman	Meningkatkan pelayanan publik berbasis digital mulai dari Desa dengan menyediakan akses internet yang luas dan merata ke seluruh desa dengan jargon "Internet Untuk Semua" Program ini fokus pada penguatan komunikasi dan jaringan informasi di ruang publik, sekolah-sekolah, balai desa, dan fasilitas umum
MISI 2: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas produktif, berakhlak, berbudaya, dan bahagia	
Nyaman Cerdas	Meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Belitung Timur. Menyediakan fasilitas pendidikan berupa baju seragam, sepatu, tas, dan alat tulis sekolah gratis setiap tahunnya untuk siswa SD hingga SMA. Selain itu, menawarkan beasiswa kuliah sarjana (S1) bagi siswa berprestasi yang kurang mampu secara ekonomi. Di samping itu, program ini juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik.
Nyaman Sehat	Berfokus pada pelayanan kesehatan prima yang cepat dan mudah diakses. Salah satu inisiatif utama adalah penyediaan susu, vitamin, dan makanan bergizi bagi ibu hamil dan menyusui, yang bertujuan untuk mencegah prevalensi stunting. Selain itu, terdapat program berobat gratis untuk semua lapisan masyarakat di mana masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit. Program ini dilaksanakan dengan pola yang sinergi, tertib, dan berbasis data, serta didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan dan pengendalian
Nyaman Sejahtera	Ditujukan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat pra-sejahtera, dengan memberikan bantuan pangan kepada kelompok kategori disabilitas, anak terlantar dan warga miskin ekstrem. Selain itu, bantuan langsung tunai (BLT) untuk lansia (jompo) dan pemberian sembako rutin kepada masyarakat yang membutuhkan atau kesulitan kondisi perekonomian. Memastikan jaminan kesehatan terpenuhi, jaminan asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, serta memfasilitasi kelompok disabilitas agar mendapat akses pada lapangan kerja formal dan informal.
MISI 3: Mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat kolaborasi antar pelaku pembangunan.	
Nyaman Kerja	Membuka lapangan pekerjaan baru melalui kerja sama strategis dengan investor. Program ini berfokus pada menarik investasi di sektor-sektor potensial seperti pariwisata, pertanian, perikanan, kelautan dan industri kreatif. Dengan memfasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah dan investor, program ini akan menciptakan berbagai peluang kerja baru bagi masyarakat lokal, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, program ini juga menyediakan pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja lokal, sehingga mereka siap mengisi posisi-posisi baru yang tercipta.
UMKM Ku Nyaman Berdaya	Mempercepat pertumbuhan UMKM lokal di Belitung Timur. Memberikan dukungan menyeluruh kepada pelaku UMKM melalui akses mudah terhadap modal usaha, pendampingan jangka panjang dalam manajemen bisnis, serta pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di setiap desa. Selain itu, program ini memperluas akses UMKM ke pasar nasional dan internasional melalui platform e-*commerce*, pameran produk, dan kerja sama dengan jaringan distribusi yang kuat, mendorong kemitraan dengan perusahaan besar dan investor untuk menciptakan ekosistem bisnis yang dinamis dan berkelanjutan dengan membuka Klinik UMKM Beltim.
Petani & Nelayan Nyaman	Mendorong kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Dengan memberikan dukungan komprehensif kepada petani dan nelayan melalui penyediaan perlengkapan kerja, seperti jaring, perahu, dan alat tangkap modern bagi nelayan, serta sarana produksi pertanian, seperti benih unggul, bibit, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian, termasuk traktor dan kultivator. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan keterampilan melalui pelatihan teknis, pendampingan penerapan teknologi, serta pengelolaan usaha berkelanjutan.
Nyaman Kreatif Berkarya	Berfokus pada sektor industri kreatif dengan menyediakan pelatihan, pendampingan, magang, serta mendukung kerja sama dengan berbagai *stakeholder*. Membangun ekosistem ekonomi kreatif yang inovatif dan kompetitif dengan mengoptimalkan setiap fasilitas yang tersedia, dan memfasilitasi akses pasar melalui platform digital dan pameran kreatif
MISI 4: Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas dan memadai untuk pemerataan kesejahteraan	

PROGRAM UNGGULAN	KETERANGAN
Gerbang Ekonomi	Reaktivasi Pelabuhan Manggar bertujuan menjadikannya sebagai pusat distribusi utama yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di Belitung Timur. Reaktivasi ini melibatkan perbaikan aksesibilitas dan efisiensi distribusi barang dan orang, sehingga proses importasi dan eksportasi menjadi lebih cepat dan lancar. Revitalisasi pelabuhan mencakup pembenahan area muat dan bongkar barang, pengembangan terminal penumpang, serta peningkatan fasilitas penyimpanan dan fasilitas pendukung lainnya.
Infrastruktur Nyaman	Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana publik di desa. Program ini mencakup penyediaan fasilitas penerangan jalan umum, pembangunan jembatan dan jalan desa, serta perluasan jangkauan akses air bersih. Selain itu, program ini juga berfokus pada pengembangan fasilitas olahraga dan seni, pembangunan rumah ibadah, perbaikan sistem drainase, dan penyediaan ruang terbuka hijau
MISI 5: Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam yang bijaksana, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	
Nyaman Lestari	Berfokus pada aspek lingkungan hidup. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas lingkungan melalui penghijauan (reboisasi) di lokasi pasca tambang timah, serta memperketat pengawasan terhadap pabrik atau perusahaan di Belitung Timur untuk memastikan alokasi program pelestarian lingkungan. Selain itu, program ini memberikan perhatian khusus pada masalah sampah dengan menyediakan sistem pengelolaan yang baik.
Nyaman Air Bersih	Upaya menangani kondisi air bersih yang terdampak oleh aktivitas penambangan. Memastikan seluruh warga di Kabupaten Belitung Timur memiliki akses yang memadai terhadap air bersih. Upaya yang dilakukan dengan pengembangan infrastruktur dan jaringan distribusi yang efisien ke setiap rumah warga. Serta pemantauan terhadap kualitas air, dan penegakan regulasi terkait pencemaran

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2025

Program Andalan diprioritaskan untuk masyarakat miskin yang tercantum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Desil I, II, dan III. Namun, apabila jumlah penerima dari ketiga desil tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan, maka desil IV dan selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai penerima bantuan, dengan terlebih dahulu melalui kajian dari perangkat daerah teknis yang membidangi pemberian bantuan langsung kepada masyarakat.

Dalam komponen bantuan ekonomi, **bantuan modal usaha sebesar Rp2–50 juta** difokuskan untuk pelaku **UMKM di sektor ekonomi kreatif**, yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung pengembangan Geopark sebagai destinasi pariwisata, sebagai upaya mendukung pertumbuhan dan inovasi di sektor tersebut. Namun demikian, **UMKM di sektor lain juga dapat menerima bantuan** ini, sepanjang memenuhi kriteria dan ketentuan yang berlaku.

Seluruh tahapan pelaksanaan Program Andalan, termasuk teknis penyaluran, kriteria penerima, dan mekanisme verifikasi, akan **dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah terkait**, agar implementasinya berjalan secara terarah, transparan, dan akuntabel. Pada tabel 3.7 dipetakan Program Prioritas pada setiap Program Unggulan dan Program Andalan Daerah.

Gambar 4.1 Program Unggulan dan Andalan Daerah

TABEL 3. 7 PROGRAM UNGGULAN DAN ANDALAN KEPALA DAERAH

KODE	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN PROGRAM UNGGULAN (SPU)	INDIKATOR PROGRAM UNGGULAN (IPU)	DO INDIKATOR	KODE	PROGRAM ANDALAN (PA)	INDIKATOR PROGRAM ANDALAN (IPA)	TARGET IPU/IPA						KODE	PROGRAM PRIORITAS	PAGU					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			2025	2026	2027	2028	2029	2030
PU.1	Nyaman Layanan Publik	Meningkatnya kemudahan akses layanan publik melalui digitalisasi	Persentase layanan publik yang terdigitalisasi	Mengukur sejauh mana jenis layanan sudah tersedia secara digital dalam sistem terpadu.				50%	75%	80%	85%	90%	90%	PP.1	PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.877.397.750	1.572.363.883	2.022.440.100	2.086.222.100	2.239.195.600	2.239.195.600
			Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan digital (hasil Survei IKM Digital)	Menggambarkan kualitas pengalaman pengguna terhadap layanan berbasis digital				70	75	80	85	90	90	PP.2	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	285.697.300	297.757.300	557.616.000	590.947.400	634.279.000	634.279.000
			Persentase kunjungan layanan digital terpadu (Lawang Beltim)	Mengukur keterjangkauan dan pemanfaatan oleh masyarakat				30	35	40	45	50	50	PP.3	PENDAFTARAN PENDUDUK	15.360.900	10.000.000	15.360.900	10.000.000	104.393.700	104.393.700
			Persentase aduan masyarakat yang terselesaikan melalui sistem pengaduan digital	Menggambarkan kecepatan respons dan efektivitas tindak lanjut.				100	100	100	100	100	100	PP.4	PENCATATAN SIPIL	20.880.500	10.000.000	88.153.200	95.946.800	98.028.600	98.028.600
			Persentase unit layanan yang terintegrasi ke dalam sistem satu pintu digital	Menunjukkan cakupan dan konsolidasi pelayanan dalam platform terpadu.				70	75	80	85	90	90	PP.5	PENGELOLAAN ARSIP	79.537.900	360.000.000	79.537.900	360.000.000	217.402.700	217.402.700
														PP.6	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	68.738.500	68.738.500	127.179.500	134.587.300	137.507.400	137.507.400
PU.2	Internet Desa Nyaman	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis	Persentase desa yang memiliki akses internet aktif (tetap dan/atau nirkabel)	Mengukur cakupan penetrasi internet di seluruh desa				70	75	80	85	90	90	PP.7	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	840.000.000	840.000.000	936.927.900	963.553.900	984.460.300	984.460.300

KODE	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN PROGRAM UNGGULAN (SPU)	INDIKATOR PROGRAM UNGGULAN (IPU)	DO INDIKATOR	KODE	PROGRAM ANDALAN (PA)	INDIKATOR PROGRAM ANDALAN (IPA)	TARGET IPU/IPA						KODE	PROGRAM PRIORITAS	PAGU					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			2025	2026	2027	2028	2029	2030
		digital di tingkat desa	Jumlah pusat layanan internet di ruang publik di desa yang berfungsi (titik hotspot)	menilai penyediaan infrastruktur pendukung				5	10	15	20	25	25	PP. 1	PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.877.397.750	1.572.363.883	2.022.440.100	2.086.222.100	2.131.487.100	2.131.487.100
PU. 3	Nyaman ASN Berkemajuan	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN				80	80	70	77	81	81	PP. 8	KEPEGAWAIAN DAERAH	1.036.559.200	887.316.213	1.126.084.500	1.161.543.300	1.186.745.500	1.186.745.500
														PP. 9	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	112.443.700	112.443.700	346.594.800	373.056.300	381.150.500	381.150.500
			Jumlah inovasi pelayanan publik yang diinisiasi oleh ASN per tahun	Mengukur kontribusi ASN terhadap pembaruan dan efisiensi layanan				111	131	151	171	191	191	PP. 10	RISET DAN INOVASI DAERAH	571.629.400	869.672.000	769.119.700	789.439.000	806.567.500	806.567.500
PU. 4	Nyaman Bersinergi	Meningkatnya partisipasi sektor non-pemerintah dalam pembiayaan, pelaksanaan, atau inovasi program pembangunan	Jumlah kegiatan mendukung pembangunan yang melibatkan mitra non-pemerintah daerah	Menggambarkan tingkat partisipasi sektor luar pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan				10	10	10	10	10	10	PP. 11	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	945.490.000	910.450.000	948.715.900	969.067.200	990.093.200	990.093.200
														PP. 12	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	479.031.700	564.391.200	487.199.900	494.237.500	504.961.000	504.961.000
														PP. 10	RISET DAN INOVASI DAERAH	571.629.400	869.672.000	769.119.700	789.439.000	806.567.500	806.567.500
														PP. 13	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	305.919.100	140.919.100	300.118.300	311.880.600	318.647.500	318.647.500
														PP. 14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	166.065.500	166.065.500	195.949.100	202.322.900	206.712.700	206.712.700

KODE	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN PROGRAM UNGGULAN (SPU)	INDIKATOR PROGRAM UNGGULAN (IPU)	DO INDIKATOR	KODE	PROGRAM ANDALAN (PA)	INDIKATOR PROGRAM ANDALAN (IPA)	TARGET IPU/IPA						KODE	PROGRAM PRIORITAS	PAGU					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			2025	2026	2027	2028	2029	2030
														PP. 15	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIA	1.370.096.503	1.370.096.503	1.390.357.500	1.419.516.900	1.450.316.400	1.450.316.400
														PP. 16	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.031.398.100	13.794.278.750	15.369.534.100	15.885.228.900	16.229.892.900	16.229.892.900
														PP. 17	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	162.034.000	162.034.000	8.201.045.800	8.473.142.200	8.656.985.100	8.656.985.100
														PP. 18	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	552.249.300	552.249.300	792.244.900	827.998.300	845.963.500	845.963.500
														PP. 19	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN	98.686.348.450	98.888.000.000	97.451.555.600	98.888.000.000	99.108.000.000	100.175.000.000
														PP. 20	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN	1.186.054.400	1.244.664.500	1.220.100.000	1.326.906.900	2.144.885.600	2.035.000.000
PU. 5	Nyaman Desa Berdaya	Terbangunnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan desa dalam pengembangan usaha ekonomi produktif.	Jumlah desa yang mengembangkan produk olahan SDA lokal siap konsumsi (ready to eat)	Menunjukkan tingkat adopsi dan replikasi program				5	10	15	20	25	25	PP. 7	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	840.000.000	840.000.000	936.927.900	963.553.900	984.460.300	984.460.300
			Jumlah unit usaha ekonomi produktif desa yang terbentuk atau difasilitasi.	UMKM desa, BUMDesa, koperasi pengolahan				4	4	4	4	4	4	PP. 21	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
														PP. 22	PROGRAM PELATIHAN KERJ DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	19.841.000	19.891.000	185.000.000	185.000.000	185.000.000	185.000.000

KODE	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN PROGRAM UNGGULAN (SPU)	INDIKATOR PROGRAM UNGGULAN (IPU)	DO INDIKATOR	KODE	PROGRAM ANDALAN (PA)	INDIKATOR PROGRAM ANDALAN (IPA)	TARGET IPU/IPA						KODE	PROGRAM PRIORITAS	PAGU					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			2025	2026	2027	2028	2029	2030
PU.6	RT-Ku Nyaman	Mendorong keterlibatan aktif RT dalam menjaga keamanan, kenyamanan, serta mediasi sosial tingkat lingkungan	Persentase RT aktif yang terlibat dalam program pelayanan publik	(Contoh: distribusi bantuan sosial, pendataan kependudukan, layanan aduan)				50	55	60	65	70	70	PP.7	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	840.000.000	840.000.000	936.927.900	963.553.900	984.460.300	984.460.300
PU.7	Nyaman Cerdas	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Rata-rata jumlah tahun yang diharapkan dapat dijalani oleh anak usia 7 tahun untuk bersekolah sepanjang hidupnya dengan asumsi tingkat partisipasi pendidikan saat ini terus berlanjut di masa mendatang.	PA.1	Gratis Seragam, Sepatu, Tas, dan Alat Tulis untuk Anak Sekolah	Jumlah anak penerima bantuan	500	750	1000	1000	1000	1000	PP.23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	250.000.000	675.000.000	900.000.000	1.125.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000
			Rata-rata lama Sekolah	Rata-rata jumlah tahun yang telah dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal, baik yang telah tamat maupun belum	PA.2	1.000 (Seribu) Beasiswa Kuliah Sarjana (S1)	Jumlah penerima beasiswa S1	75	200	225	250	250	250	PP.17	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	750.000.000	2.000.000.000	2.250.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000

KODE	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN PROGRAM UNGGULAN (SPU)	INDIKATOR PROGRAM UNGGULAN (IPU)	DO INDIKATOR	KODE	PROGRAM ANDALAN (PA)	INDIKATOR PROGRAM ANDALAN (IPA)	TARGET IPU/IPA						KODE	PROGRAM PRIORITAS	PAGU					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			2025	2026	2027	2028	2029	2030
				tamat pada jenjang tertentu.																	
PU. 8	Nyaman Sehat	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Tingkat UHC	Universal Health Coverage	PA. 3	Pelayanan dan Pengguna an BPJS Secara Gratis Bagi Masyarak at yang Belum Terdaftar	Jumlah kepesertaa n/ tahun	45.76 1	54.7 45	58.3 45	61.9 45	65.54 5	65.54 5	PP. 24	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	49.961.598. 411	47.203.282. 702	48.619.381. 183	50.077.96 2.619	51.580.30 1.497	51.580.301. 497
			Angka Kematian Ibu (AKI)	jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup				119	119	119	60	60	60		*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1.268.895. 910	1.268.895. 910	1.268.895. 910	1.268.895. 910	1.268.895. 910	1.268.895.9 10
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	dibandingk an dengan total jumlah bayi yang lahir hidup				100	100	100	100	100	100								
			Prevalensi stunting	persentase balita (anak usia di bawah lima tahun) yang mengalami gangguan pertumbuh an ditandai dengan tinggi badan di bawah standar usia menurut				16,34	15,3 8	14,4 2	13,4 6	12,4 7	11,5 1		*Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*	20.757.189. 600	24.832.332. 000	26.465.292. 000	28.098.25 2.000	29.731.21 2.000	29.731.212. 000

KODE	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN PROGRAM UNGGULAN (SPU)	INDIKATOR PROGRAM UNGGULAN (IPU)	DO INDIKATOR	KODE	PROGRAM ANDALAN (PA)	INDIKATOR PROGRAM ANDALAN (IPA)	TARGET IPU/IPA						KODE	PROGRAM PRIORITAS	PAGU					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			2025	2026	2027	2028	2029	2030
				kurva WHO																	
PU.9	Nyaman Sejahtera	Menurunnya jumlah masyarakat pra-sejahtera melalui intervensi bantuan sosial yang tepat sasaran	Persentase penerima bantuan sosial yang tepat sasaran (sesuai verifikasi dan validasi DTKS/P3KE)	Mengukur akurasi penyaluran berdasarkan data terverifikasi	PA.4	Bantuan Kebutuhan Hidup Senilai 2 Juta Rupiah Per KK Setiap Tahun	Jumlah KK penerima bantuan	17	514	514	514	496	496	PP.25	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	34.000.000	2.588.000.000	2.588.000.000	2.588.000.000	2.552.000.000	2.552.000.000
			Persentase penerima manfaat yang puas terhadap layanan bansos	Diukur melalui survei kepuasan	PA.8	Bantuan Sembako bagi Nelayan pada Musim Kencang	Jumlah nelayan penerima bantuan	0	300	300	300	300	300									
					PA.5	Insentif Umroh (Gratis) Nyaman Beltim Berkah	Jumlah penerima insentif	7	7	7	7	10	10	PP.17	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	300.000.000	300.000.000
					PA.6	Bantuan Tunai Majelis Taklim dan Remaja Masjid	Jumlah penerima bantuan	39	39	39	39	39	39	PP.17	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	195.000.000	195.000.000	195.000.000	195.000.000	195.000.000	195.000.000
PU.10	Petani dan Nelayan Nyaman	Meningkatnya kesejahteraan Petani dan Nelayan	Persentase Petani/Nelayan yang Berada di Atas Garis Kemiskinan	mengguna kan data desil pengeluaran rumah tangga atau capaian program penanggulangan kemiskinan berbasis profesi.	PA.7	Gratis Bantuan Bibit Sawit Unggul dan Pupuk	Jumlah bibit sawit yang disalurkan (batang)	0	8.700	9.000	10.000	10.000	10.000	PP.26	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	696.000.000	738.000.000	850.000.000	900.000.000	900.000.000
							Jumlah pupuk yang disalurkan (kg)	0	43.500	45.000	50.000	50.000	50.000			-	224.895.000	247.500.000	300.000.000	325.000.000	325.000.000
					PA.8	Gratis Bantuan	Jumlah KUB	15	15	15	15	15	15	PP.27	PROGRAM PENGELOLAA	766.929.500	843.622.450	927.984.695	1.020.783.765	1.122.861.481	1.122.861.481

KODE	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN PROGRAM UNGGULAN (SPU)	INDIKATOR PROGRAM UNGGULAN (IPU)	DO INDIKATOR	KODE	PROGRAM ANDALAN (PA)	INDIKATOR PROGRAM ANDALAN (IPA)	TARGET IPU/IPA						KODE	PROGRAM PRIORITAS	PAGU					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			2025	2026	2027	2028	2029	2030
						Perahu, Perawatan Perahu, dan Sembako Nelayan Musim Angin Kencang	penerima								N PERIKANAN TANGKAP						
							Jumlah perahu bantuan	0	25	20	15	10	10			-	84.750.600	74.580.528	61.528.639	45.121.219	45.121.219
							Jumlah perahu yang menerima perawatan	0	75	80	85	90	90			-	75.000.000	80.000.000	85.000.000	90.000.000	90.000.000
PU. 11	Nyaman Kreatif Berkarya	Mendorong tumbuhnya wirausaha baru di sektor industri kreatif berbasis potensi lokal	Jumlah pelaku industri kreatif yang mengikuti pelatihan, magang, atau pendampingan					0	20	20	20	20	20	PP. 28	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
			Jumlah pelaku industri kreatif yang memperoleh akses pasar melalui platform digital					0	5	5	5	5	5								
PU. 12	UMKM Ku Nyaman Berdaya	Meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM lokal yang aktif dan berkelanjutan			PA. 9	Bantuan Modal 2 s/d 50 Juta Rupiah untuk Membuka Usaha dan Pengembangan Usaha (UMKM)	Jumlah UMKM penerima	10	100	100	100	100	100	PP. 29	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
			Persentase UMKM yang memperoleh akses pembiayaan atau bantuan permodalan	Mengukur keberhasilan akses terhadap sumber daya keuangan				NA	10	10	10	10	10			-	-	-	-	-	-
			Jumlah UMKM yang onboarding ke platform e-commerce atau marketplace digital	Indikator transformasi digital dan perluasan pasar				NA	10	10	10	10	10			-	-	-	-	-	-

KODE	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN PROGRAM UNGGULAN (SPU)	INDIKATOR PROGRAM UNGGULAN (IPU)	DO INDIKATOR	KODE	PROGRAM ANDALAN (PA)	INDIKATOR PROGRAM ANDALAN (IPA)	TARGET IPU/IPA						KODE	PROGRAM PRIORITAS	PAGU					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			2025	2026	2027	2028	2029	2030
PU.13	Nyaman Kerja	Tersediannya lapangan kerja baru	jumlah lapangan kerja tersedia		PA.10	10.000 (Sepuluh Ribu) Lapangan Kerja Tersedia	Jumlah lapangan kerja tersedia					10000	10000	PP.30	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	19.841.000	19.891.000	185.000.000	185.000.000	185.000.000	185.000.000
														PP.31	PROGRAM PELATIHAN KERJ DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	375.000.000	375.000.000	375.000.000	375.000.000	375.000.000
PU.14	Gerbang Ekonomi	Meningkatkan peran Pelabuhan Manggar sebagai pusat distribusi logistik dan mobilitas penumpang di Belitung Timur	Jumlah fasilitas pelabuhan yang direhabilitasi/dibangun					0	0	1	2	2	2	PP.32	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	433.327.200	433.327.200	433.327.200	433.327.200	433.327.200	433.327.200
PU.15	Infrastruktur Nyaman	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan layanan publik di desa.			PA.11	Renovasi 1.000 (Seribu) Rumah Warga Tak Layak	Jumlah RTLH direnovasi	67	200	200	200	333	333	PP.33	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.847.500.000	8.500.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000	14.152.500.000	14.152.500.000
														PP.34	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	383.312.500	250.000.000	589.963.200	624.034.400	637.574.100	637.574.100
			Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik					79,55	81,05	82,1	83,05	84,1	84,1	PP.35	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	4.550.024.460	7.000.000.000	15.561.126.600	16.697.073.700	17.059.352.400	17.059.352.400
			Persentase desa yang memiliki akses terhadap **air bersih** layak					97	97	97	100	100	100	PP.36	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	948.604.400	1.600.000.000	5.493.825.800	5.958.154.000	6.087.428.900	6.087.428.900
														PP.37	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	5.148.338.000	2.000.000.000	4.668.084.400	4.840.653.600	4.945.681.900	4.945.681.900

KODE	PROGRAM UNGGULAN	SASARAN PROGRAM UNGGULAN (SPU)	INDIKATOR PROGRAM UNGGULAN (IPU)	DO INDIKATOR	KODE	PROGRAM ANDALAN (PA)	INDIKATOR PROGRAM ANDALAN (IPA)	TARGET IPU/IPA						KODE	PROGRAM PRIORITAS	PAGU					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			2025	2026	2027	2028	2029	2030
PU.16	Nyaman Lestari	Meningkatnya kualitas lingkungan di wilayah pasca tambang melalui reklamasi atau penghijauan	Indeks Kualitas Lahan	tingkat kesuburan dan kemampuan suatu lahan dalam mendukung produktivitas pertanian secara berkelanjutan				62,7	62,77	62,84	62,91	62,98	62,98	PP.38	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	647.959.950	541.276.275	780.094.100	810.658.300	828.247.200	828.247.200
														PP.39	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	13.312.000	26.395.800	20.137.600	20.606.000	21.053.100	21.053.100
		Terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di wilayah Belitung Timur	Persentase pengelolaan sampah					100	100	100	100	100	100	PP.40	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.165.641.800	2.239.168.800	3.279.249.800	3.434.494.900	3.509.013.600	3.509.013.600
PU.17	Nyaman Air Bersih	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih yang layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan					40,57	45	50	55	60	60	PP.41	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.903.604.100	1.100.000.000	2.305.079.900	2.415.024.700	2.467.423.800	2.467.423.800
														PP.36	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	948.604.400	1.600.000.000	5.493.825.800	5.958.154.000	6.087.428.900	6.087.428.900

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2025

III.3.D Pemetaan Sinergi Program Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Program Unggulan/Andalan Kabupaten Belitung Timur

Pemetaan program prioritas menunjukkan adanya sinergi yang jelas antara inisiatif-inisiatif kunci di tingkat provinsi dan kabupaten. Program unggulan dan andalan yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur berfungsi sebagai implementasi yang terperinci dan berorientasi pada kebutuhan lokal dari kerangka besar Program Prioritas dan PHTC Provinsi. Terdapat sinergi yang kuat dan hubungan sebab-akibat yang jelas antara inisiatif di kedua tingkatan pemerintahan.

Tabel 3. 8 Analisis Komparatif Program Prioritas Provinsi dengan Program Unggulan/Andalan

Program Prioritas Provinsi	Program Unggulan/Andalan Kab. Belitung Timur yang Relevan	Sifat Kontribusi	Analisis Sinergi
PP1-Penguatan pendidikan, sains, teknologi, digitalisasi dan pelatihan vokasi	Nyaman Cerdas (PU.7)**:** (PA.1) Menyediakan seragam dan perlengkapan sekolah gratis serta beasiswa S1 bagi siswa berprestasi kurang mampu	Langsung	**Implementasi Langsung:** Program kabupaten secara konkret mewujudkan agenda pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang menjadi prioritas provinsi.
PP2-PP3-Menjamin pelayanan kesehatan untuk semua, penurunan stunting, dan penggalakan hidup bersih & sehat.	Nyaman Sehat (PU.8): Berobat gratis dengan KTP, penyediaan gizi untuk ibu hamil dan menyusui untuk pencegahan stunting	Langsung	**Implementasi Langsung:** Inisiatif kabupaten adalah eksekusi langsung dari prioritas provinsi untuk memperluas cakupan pelayanan kesehatan dan mengatasi masalah stunting.
PP6-Pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial dan penguatan sosial masyarakat	Nyaman Sejahtera (PU.9): Bantuan pangan untuk disabilitas dan warga miskin ekstrem, BLT untuk lansia, dan jaminan sosial bagi pekerja rentan	Langsung	**Implementasi Langsung:** Program kabupaten secara spesifik menyasar kelompok rentan sesuai dengan arahan provinsi untuk memperkuat jaring pengaman sosial.
PP13-Reformasi birokrasi dan mendukung reformasi politik dan hukum	Nyaman Layanan Publik (PU.1) : penerapan sistem administrasi alektronik, portal informasi publik untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif	Langsung	**Implementasi Langsung:** Program kabupaten secara langsung mendukung terwujudnya pemerintahn yang efektif, trasparan dan akuntabel untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik

Program Prioritas Provinsi	Program Unggulan/Andalan Kab. Belitung Timur yang Relevan	Sifat Kontribusi	Analisis Sinergi
PP4-PP18 Pengembangan pariwisata yang berkualitas	Nyaman Kreatif Berkarya (terkait Geopark Belitong) (PU.11)	Langsung	Sinergi kuat. Pengembangan Geopark di tingkat kabupaten adalah implementasi langsung dari prioritas pariwisata provinsi. Diperlukan koordinasi dalam promosi dan standar pengelolaan.
PP17- Hilirisasi dan industrialisasi berbasis komoditas unggulan	- Petani & Nelayan Nyaman (PU.10) - Gratis Bantuan Bibit Sawit dan Unggul (PA.7)	Memungkinkan (*Enabling*)	Sinergi baik. Program kabupaten untuk meningkatkan produktivitas sektor primer (pertanian, perikanan) menyediakan bahan baku yang diperlukan untuk program hilirisasi provinsi.
Penciptaan kesempatan kerja dan penguatan produktivitas UMKM & koperasi	Nyaman Kerja: 10.000 Lapangan Kerja (PA.10)	Langsung	Sinergi sangat kuat. Program-program ini secara langsung berkontribusi pada target provinsi dalam hal penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya saing ekonomi lokal.
	UMKM Ku Nyaman Berdaya (PU.12) : (PA.9)Bantuan modal, pendampingan, dan pelatihan bagi UMKM	Langsung	
Pembangunan hunian berkualitas terjangkau	Renovasi 1.000 Rumah Tak Layak Huni (PA.11)	Langsung	Sinergi sangat kuat. Program renovasi RTLH kabupaten secara langsung berkontribusi pada pencapaian target provinsi untuk hunian layak.
Penguatan tata kelola pemerintahan melalui e-Government	- Nyaman Layanan Publik (PU.1) - Internet Desa Nyaman (PU.2)	Langsung	Sinergi sangat kuat. Program digitalisasi layanan dan penyediaan internet desa di kabupaten adalah fondasi implementasi e-government yang dicanangkan provinsi.
PP20-Mengembangan ekosistem inovasi, riset dan teknologi yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Nyaman Bersinergi (PU.4)	*Enabling*	Sinergi sangat kuat. Program ini memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dan jejaring nasional untuk mengembangkan ide-ide baru, menghubungkan riset dengan indsutri
Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan	- Petani & Nelayan Nyaman (PU.10) - Gratis bantuan perahu, perawatan perahu dan sembako pada	Langsung	Sinergi sangat kuat. Program ini memperkuat basis produksi di sektor primer yang menjadi fondasi ketahanan pangan dan peningkatan

Program Prioritas Provinsi	Program Unggulan/Andalan Kab. Belitung Timur yang Relevan	Sifat Kontribusi	Analisis Sinergi
	musim angin kencang (PA.8) - Gratis bantuan bibit sawit unggul dan pupuk (PA.7)		
Penataan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup	Nyaman Lestari (PU.16) (reklamasi lahan pasca tambang)	Langsung	Sinergi kuat. Upaya reklamasi di tingkat kabupaten merupakan aksi konkret untuk mencapai tujuan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dari provinsi.

Keselarasan tersebut diwujudkan melalui pemetaan sasaran, arah kebijakan, dan program prioritas Kabupaten Belitung Timur yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa bentuk keterpaduan antara lain:

1. **Bidang Ekonomi dan Investasi**

   Program penguatan ketahanan pangan, pengembangan ekonomi kreatif, dan penguatan daya saing pariwisata daerah di Belitung Timur sejalan dengan sasaran provinsi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta pariwisata.

2. **Bidang Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah**

   Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Belitung Timur selaras dengan agenda provinsi dalam meningkatkan keterhubungan wilayah dan memperluas aksesibilitas antar kabupaten/kota, serta mendukung konektivitas menuju kawasan strategis pariwisata nasional.

3. **Bidang Sumber Daya Manusia**

   Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Belitung Timur, termasuk pengembangan sekolah unggulan, penyediaan beasiswa pendidikan, dan peningkatan fasilitas kesehatan, mendukung arah kebijakan provinsi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan berdaya saing.

4. **Bidang Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana**

   Upaya pengelolaan lingkungan berkelanjutan, rehabilitasi ekosistem pesisir, serta penguatan mitigasi bencana di Belitung Timur mendukung kebijakan provinsi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, adaptasi perubahan iklim, dan ketangguhan daerah terhadap bencana.

5. **Bidang Tata Kelola Pemerintahan**

   Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan reformasi birokrasi di Kabupaten Belitung Timur merupakan bagian dari upaya sinkronisasi dengan kebijakan provinsi untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Perbandingan dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Provinsi

PHTC adalah program berdaya ungkit tinggi yang dirancang untuk memberikan hasil cepat dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Program andalan Kabupaten Belitung Timur banyak yang selaras dan menjadi ujung tombak pelaksanaan PHTC provinsi.

Tabel 3. 9 Tabel Perbandingan PHTC Provinsi dengan Program Unggulan/Andalan Kabupaten Belitung Timur

No	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Provinsi	Program Unggulan/Andalan Kab. Belitung Timur yang Selaras	Analisis Sinergi
1	**Beasiswa dan seragam sekolah SMA/SMK gratis**	**Nyaman Cerdas (Andalan PA.1 & PA.2):** Program "Gratis Seragam, Sepatu, Tas, dan Alat Tulis" dan "1.000 Beasiswa Kuliah Sarjana (S1)".[1]	Program andalan kabupaten ini merupakan implementasi yang lebih komprehensif dari PHTC provinsi, bahkan memperluasnya hingga ke jenjang perguruan tinggi.
2	**BPJS Gratis**	**Nyaman Sehat (Andalan PA.3):** Program "Berobat Gratis Cukup Pakai KTP" di Puskesmas dan RSUD.	Meskipun mekanismenya berbeda (jaminan pemda vs. iuran BPJS), tujuannya sama yaitu memastikan akses layanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat.
3	**50.000 Lapangan kerja baru**	**Nyaman Kerja (Andalan PA.10):** Menargetkan penciptaan "10.000 Lapangan Kerja Tersedia	Target kabupaten menyumbang 20% dari total target PHTC provinsi, menunjukkan peran strategis Belitung Timur dalam penciptaan lapangan kerja regional.
4	**Bantuan bibit dan benih gratis** & **Pelatihan dan modernisasi alat tangkap 5.000 nelayan**	**Petani & Nelayan Nyaman:** Memberikan bantuan sarana produksi pertanian (benih, pupuk) dan perlengkapan kerja nelayan (jaring, perahu).	Program kabupaten secara langsung mengeksekusi PHTC provinsi dengan memberikan bantuan konkret kepada petani dan nelayan untuk meningkatkan produktivitas.
5	**Rehabilitasi 25.000 ha**	**Nyaman Lestari:** Fokus pada reklamasi lahan	Arah program kabupaten sejalan dengan target PHTC provinsi dalam

No	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Provinsi	Program Unggulan/Andalan Kab. Belitung Timur yang Selaras	Analisis Sinergi
	lahan bekas tambang	pasca-tambang dan pelestarian lingkungan	memulihkan lahan kritis akibat aktivitas pertambangan
6	**E-government (penyediaan internet gratis)**	**Internet Desa Nyaman:** Menyediakan akses internet yang luas dan merata ke seluruh desa	Program ini adalah implementasi PHTC provinsi di tingkat desa, memastikan konektivitas digital hingga ke unit pemerintahan terkecil
7	**Implementasi Program Pangan dan Gizi Nasional (termasuk PHTC)**	**Nyaman Sehat & Nyaman Sejahtera:** Kabupaten Belitung Timur diidentifikasi sebagai daerah prioritas intervensi program PHTC nasional, yang didukung melalui program unggulan kabupaten	Kabupaten Belitung Timur menjadi lokasi implementasi langsung dari program pangan dan gizi yang juga merupakan bagian dari PHTC.

III.3.E **Pemetaan Sinergi Program RPJMD dengan Proyek Strategis Nasional (PSN)**

Pemetaan dukungan program daerah terhadap agenda nasional memerlukan pemahaman mendalam terhadap arsitektur dan prioritas kerangka perencanaan nasional. Proyek Strategis Nasional (PSN) 2025-2029 merupakan instrumen kebijakan sentral yang menjadi acuan dalam penetapan arah, prioritas, dan alokasi sumber daya pembangunan.

PSN periode 2025-2029 disusun sebagai instrumen teknis untuk mendukung dan memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas utama dalam RPJMN 2025-2029. Kerangka pikir PSN dirancang sebagai kumpulan proyek atau program yang bersifat strategis, terukur, dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran-sasaran Program Prioritas Presiden [Image]. Penetapan PSN diintegrasikan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk menjamin keselarasan dengan siklus perencanaan dan penganggaran tahunan.

Landasan utama PSN adalah delapan Misi Presiden (Asta Cita), yang diterjemahkan menjadi delapan Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 secara substantif telah selaras dan mendukung pencapaian agenda Prioritas Nasional (PN) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Keterkaitan ini memastikan bahwa arah pembangunan daerah tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga berkontribusi secara sinergis terhadap tujuan pembangunan nasional. Berikut adalah analisis keterkaitannya dengan Prioritas Nasional

- **Prioritas Nasional 1** yang bertujuan untuk memperkuat fondasi negara melalui ideologi, demokrasi, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dijawab secara komprehensif melalui Misi 1 dan Misi 2 RPJMD Kabupaten Belitung Timur. Dimana Misi 1 menjadi landasan utama dalam mendukung demokrasi yang substansial. Hal ini diimplementasikan melalui strategi percepatan digitalisasi birokrasi, penguatan transparansi, dan akuntabilitas untuk mewujudkan good governance dan clean government, yang meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan pelayanan publik yang merata—sebuah esensi dari negara demokrasi. Selain itu, program-program yang mendukung fungsi DPRD dan pengawasan internal. Dan untuk Misi 2 secara langsung mendukung pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Keterkaitan ini terlihat jelas dalam program-program unggulan seperti "**Nyaman Sehat**" (hak atas kesehatan), "**Nyaman Cerdas**" (hak atas pendidikan), dan "**Nyaman Sejahtera**" yang memberikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia. RPJMD ini juga secara eksplisit mengangkat isu kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, yang diwujudkan melalui program pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak.
- **Prioritas Nasional 2:** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan (ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru).
- **Prioritas Nasional 3**: Melanjutkan pengembangan infrastruktur, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, serta mengembangkan industri kreatif dan agromaritim.
- **Prioritas Nasional 4** : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
- **Prioritas Nasional 5**: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- **Prioritas Nasional 6:** Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
- **Prioritas Nasional 7:** Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan. Prioritas ini menjadi inti dari **Misi 1 RPJMD Kabupaten Belitung Timur**, yaitu *"Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif"*. Misi ini secara langsung menargetkan reformasi birokrasi, penegakan hukum, dan penciptaan pemerintahan yang bersih dan akuntabel

- **Prioritas Nasional 8**: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Prioritas Nasional 8 yang berfokus pada harmoni lingkungan, budaya, dan sosial dijawab secara sinergis oleh **Misi 5** dan **Misi 2** RPJMD Kabupaten Belitung Timur

Implementasi prioritas-prioritas tersebut termanifestasi dalam daftar program dan proyek spesifik, di antaranya Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (*Food Estate*), Program Hilirisasi Nikel, Timah, Bauksit, dan Tembaga, Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan, dan Pembangunan 3 Juta Rumah. Keselarasan antara RPJMD Kabupaten Belitung Timur dengan PSN 2025-2029 menunjukkan adanya sinergi, baik melalui dukungan langsung terhadap proyek spesifik maupun melalui kontribusi tematik yang sejalan dengan Prioritas Nasional (PN).
Keterkaitan eksplisit teridentifikasi pada program-program daerah yang secara langsung menjadi lokasi prioritas nasional:

- **Pengembangan Geopark Belitong:** Komitmen yang tertuang RPJMD Belitung Timur dalam pengembangan pariwisata Geopark Belitong selaras dengan penetapannya dalam **PN 2 (pengembangan ekonomi biru dan hijau)** dan **PN 3 (diversifikasi atraksi pariwisata)** dalam RPJMN 2025-2029.
- **Pembangunan Kawasan Perdesaan KAMPIT:** Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) KAMPIT di Kecamatan Kelapa Kampit diidentifikasi sebagai lokasi kawasan perdesaan prioritas nasional, yang menjadi implementasi langsung dari **PN 6 (Membangun dari Desa dan dari Bawah)**.
- **Implementasi Program Pangan dan Gizi Nasiona**l: Kabupaten Belitung Timur diidentifikasi sebagai daerah prioritas untuk intervensi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Bantuan Pangan, dan penanganan rawan pangan (PHTC). Dukungan daerah terwujud melalui Program Unggulan Nyaman Sehat dan Nyaman Sejahtera.
- **Program Pembangunan Sekolah Rakyat:** Sejalan dengan PSN Pembangunan Sekolah Rakyat yang bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah menunjukkan komitmen nyata. Hal ini dibuktikan dengan penetapan Kabupaten Belitung Timur sebagai salah satu lokasi pembangunan dan penyiapan lahan seluas 8,6 hektare. Inisiatif ini merupakan implementasi langsung dari Misi 2 RPJMD dan mendukung pencapaian **PN 4 (Pembangunan SDM)** serta **PN 6 (Pemberantasan Kemiskinan)**.
- **Program Pembangunan SMA Unggul Garuda:** Sejalan dengan PSN Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur secara proaktif mendukung rencana pembangunan SMA Unggul Garuda di daerah.

Program ini bertujuan untuk menciptakan pusat pendidikan menengah berkualitas tinggi dengan sistem asrama (*boarding school*) yang berfokus pada Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM). Komitmen daerah ini diwujudkan melalui penyiapan beberapa alternatif lokasi lahan untuk pembangunan. Inisiatif ini merupakan implementasi langsung dari Misi 2 RPJMD dan mendukung pencapaian **PN 4 (Pembangunan SDM)**, yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi.

- **Program Koperasi Desa Merah Putih:** Sebagai respons terhadap PSN Koperasi Merah Putih yang bertujuan memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kabupaten Belitung Timur telah mencapai progres signifikan. Seluruh 39 desa/kelurahan di wilayah ini telah menyelesaikan proses pengesahan badan hukum Koperasi Merah Putih per Juni 2025. Komitmen ini, yang didukung dengan rencana pelatihan SDM pengurus, selaras dengan Misi 3 RPJMD dan secara langsung mendukung **PN 3 (Peran Aktif Koperasi)** dan **PN 6 (Membangun dari Desa)**.

Matriks pemetaan keselarasan disajikan dalam tabel berikut.

TABEL 3.10 MATRIKS DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS RPJMD KABUPATEN BELITUNG TIMUR TERHADAP PRIORITAS NASIONAL (PN)

Prioritas Nasional (PN)	Proyek Strategis Nasional (PSN) Terkait	Misi RPJMD	Program Prioritas	Program Unggulan/Andalan	Jenis Dukungan	Indikator Kunci	Target 2029	
PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) **PN 7:** Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	-	Misi 1 Misi 2	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial - Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	- Nyaman Bersinergi - Nyaman Sehat - Nyaman Cerdas - Nyaman Sejahtera	Tematik	Indeks Demokrasi Indonesia	53,01	nilai
						Indeks Pembangunan Manusia	75,44	nilai
						Indeks Pembangunan Kebudayaan	61,26	nilai
PN 4: Pembangunan SDM	Program Penuntasan TBC, Program Makan Bergizi Gratis	Misi 2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Nyaman Sehat	Langsung (PHTC) & Tematik	Prevalensi Stunting pada Balita	12,47	persven
PN 4: Pembangunan SDM **PN 6:** Pemberantasan Kemiskinan	Program Pembangunan Sekolah Rakyat	Misi 2	- Program Pemberdayaan Sosial - Program Pengelolaan Pendidikan	Nyaman Cerdas	Langsung (Lokasi Prioritas)	Rata-Rata Lama Sekolah	9,61	tahun
PN 4 : Pembangunan SDM	Program Pembangunan SMA Unggul Garuda	Misi 2	Program Pengelolaan Pendidikan		Langsung (Lokasi Prioritas)			
PN 2: Swasembada Pangan	Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (*Food Estate*)	Misi 3	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Petani & Nelayan Nyaman	Tematik	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.097.310	Juta Rupiah
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap					

Prioritas Nasional (PN)	Proyek Strategis Nasional (PSN) Terkait	Misi RPJMD	Program Prioritas	Program Unggulan/Andalan	Jenis Dukungan	Indikator Kunci	Target 2029	
PN 3: Pengembangan Industri Kreatif	Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)	Misi 3	Program Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nyaman Kreatif Berkarya	Langsung (Geopark Belitong)	PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	247.308	Juta Rupiah
PN 3: Peran Aktif Koperasi **PN 6:** Membangun dari Desa, Pemerataan Ekonomi	Program Koperasi Desa Merah Putih	Misi 3	Program Pengembangan UMKM	UMKM Ku Nyaman Berdaya	Langsung (Implementasi Penuh)	Persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	10,86	persen
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Nyaman Desa Berdaya	Tematik	Persentase Desa Mandiri	100	persen
PN 3: Pengembangan Infrastruktur	PSN Pembanguna/ Pengembangan Pelabuhan	Misi 4	Program Pengelolaan Pelayaran	Gerbang Ekonomi	Langsung (Pelabuhan Manggar)	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	80,67	angka
PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya	-	Misi 5	- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingknagn dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Nyaman Lestari	Tematik	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

IV.1 RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2030

Sub bab 4.1 dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini membahas kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah sebagai landasan penting dalam mewujudkan visi dan misi daerah. Pendanaan yang efisien dan tepat sasaran akan memastikan keberlanjutan dan pencapaian target-target pembangunan yang telah direncanakan. Melalui perencanaan anggaran yang matang, sinergi antar perangkat daerah, serta optimalisasi sumber daya, program-program pembangunan daerah dapat terlaksana dengan efektif dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

TABEL 4. 1 RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.1.1	**MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN**															
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				**985.145.300**		**985.145.300**		**1.145.000.000**		**1.185.000.000**		**1.188.540.000**		**1.191.160.000**	PEMERINTAHAN UMUM
	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	70	70		70		75		80		85		90		
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				**1.366.011.900**		**1.366.011.900**		**1.589.000.000**		**1.644.000.000**		**1.648.600.000**		**1.652.230.000**	PEMERINTAHAN UMUM
	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				**166.065.500**		**166.065.500**		**170.000.000**		**192.000.000**		**192.610.000**		**193.040.000**	PEMERINTAHAN UMUM
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	70	70		70		75		80		85		85		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				**130.895.400**		**130.895.400**		**144.000.000**		**154.000.000**		**155.000.000**		**155.340.000**	PEMERINTAHAN UMUM
	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan	Persentase	70	70		70		75		80		85		85		

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan															
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				**1.370.096.503**		**1.370.096.503**		**1.594.000.000**		**1.649.000.000**		**1.653.610.000**		**1.657.250.000**	PEMERINTAHAN UMUM
	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	70	70		70		75		80		85		85		
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				**6.886.654.100**		**6.886.654.100**		**6.886.654.100**		**12.691.807.000**		**13.626.654.100**		**14.786.654.100**	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase kebijakan pemerintahan dan kerjasama yang difasilitasi	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Kebijakan Pembinaan Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Regulasi yang tersusun secara ideal, tepat fungsi dan tepat sasaran	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				**552.249.300**		**532.230.965**		**532.230.965**		**732.230.965**		**772.230.965**		**932.230.965**	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Indeks Tata Kelola Pengadaan	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				**12.031.398.100**		**13.794.278.750**		**13.794.278.750**		**13.794.278.750**		**13.794.278.750**		**13.794.278.750**	SEKRETARIAT DPRD
	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Predikat	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		
	Persentase Rancangan Perda Tahun N	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				**305.919.100**		**140.919.100**		**548.595.598**		**481.158.118**		**344.050.119**		**289.164.211**	PERENCANAAN
	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				**196.231.100**		**63.507.100**		**1.617.578.596**		**1.592.259.078**		**1.534.123.106**		**1.392.363.199**	PERENCANAAN
	Persentase Keselarasan RPJMD kedalam RKPD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Keselarasan RPJMD kedalam RKPD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Keselarasan RPJMD kedalam RKPD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENELITIAN DAN				**571.629.400**		**15.000.000**		**45.000.000**		**50.000.000**		**30.000.000**		**35.000.000**	PENELITIAN DAN

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PENGEMBANGAN DAERAH															PENGEMBANGAN
	Persentase implemetasi rencana kelitbangan	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				**287.889.000**		**456.629.400**		**1.365.000.000**		**1.425.000.000**		**1.440.000.000**		**1.440.000.000**	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	NA	0		0		10		10		10		10		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				**1.036.559.200**		**905.397.513**		**2.175.233.800**		**2.437.313.500**		**2.360.198.200**		**2.519.964.500**	KEPEGAWAIAN
	Persentase Pelaksanaan Program Pengadaan, Mutasi, Promosi, Pengembangan Kompetensi, dan Evaluasi Kinerja ASN yang Sesuai dengan Prosedur dan Sasaran yang Ditentukan	Persentase	99.97	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				**112.443.700**		**935.143.700**		**1.148.784.500**		**1.464.347.120**		**1.276.745.500**		**1.571.916.600**	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan	Persentase	8.33	10		12		14		16		18		20		

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional															
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				**954.850.000**		**847.890.941**		**743.270.000**		**708.270.000**		**658.270.000**		**658.270.000**	INSPEKTORAT DAERAH
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persen	93.54	93.6		93.64		93.69		93.74		93.79		93.84		
	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti (Irban Kesra, Irban Pemerintahan, Irban Ekbang dan Irban Investigasi) (Persen)	Persentase	82.93	82.98		83.03		83.08		83.15		83.20		83.25		
	Persentase keterjadian kasus hukum pada perangkat daerah dan pemerintah desa	Persentase	0	0		-		-		-		-		-		
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				**479.031.700**		**408.581.000**		**295.000.000**		**295.000.000**		**295.000.000**		**295.000.000**	INSPEKTORAT DAERAH
	Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Tindak Lanjut Hasil Konsultansi	Persentase	80	82		85		90		95		95		95		
	Peringkat Capaian Atas Target Rencana Aksi Program pencegahan Korupsi Terintegrasi dengan KPK RI (MCSP KPK) pada area Pengawasan Tingakt Provinsi	Peringkat	3	3		3		3		3		3		3		
	Persentase Perangkat Daerah ZI yang ditingkatkan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Persentase	2	6		6		6		9		9		9		

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				**840.000.000**		**840.000.000**		**1.650.000.000**		**1.665.000.000**		**1.666.500.000**		**1.666.650.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	Persentase	100	100		100	-	100		100		100		100		
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				-		**225.000.000**		**247.500.000**		**249.750.000**		**249.975.000**		**249.997.500**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase kerjasama antardesa terfasilitasi	Persentase	0	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				**77.000.000**		**77.000.000**		**528.000.000**		**540.000.000**		**596.000.000**		**608.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang diberdayakan	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENATAAN DESA						**50.000.000**									URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase penataan desa yang terfasilitasi	Persentase	0	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		**64.353.300**		**64.353.300**		**10.000.000**		**254.881.407**		**200.592.879**		**178.359.418**		**178.359.418**	URUSAN PEMERINTAHAN

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
																BIDANG ADMINISTRASI bp SIPIL
	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persentase	7,36	30		40		50		60		70		75		
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	85,33	85,45		85,50		85,55		85,60		85,65		85,70		
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		**10.000.000**		**177.934.700**		**10.000.000**		**28.000.000**		**32.233.461**		**10.000.000**		**10.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi penduduk yang meninggal	Persentase	99,95	99,96		99,97		99,98		99,99		99,99		99,99		
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan pada penduduk usia 0-17 tahun	Persentase	99,71	99,82		99,83		99,84		99,85		99,86		99,87		
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi penduduk yang menikah	Persentase	82,12	82,22		82,32		82,42		82,52		82,62		82,72		
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi penduduk yang bercerai	Persentase	43,12	43,22		43,32		43,42		43,52		43,62		43,72		
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		**10.000.000**		**29.029.000**		**10.000.000**		**35.000.000**		**15.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						-	-	-		-		-		-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**1.907.884.000**		**175.244.000**		**1.057.160.640**		**1.094.894.880**		**1.101.081.917**		**1.101.081.917**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persentase		100		100		100		100		100		100		
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase		100		100		100		100		100		100		
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase	60	100		100		100		100		100		100		
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	50	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				**285.697.300**		**297.757.300**		**354.500.000**		**355.000.000**		**356.700.000**		**357.480.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Pemerintah Daerah (survei)															
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				**1.877.397.750**		**2.089.171.238**		**1.639.000.000**		**1.749.000.000**		**1.659.000.000**		**1.634.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Tingkat Kematangan Aspek TIK / Teknologi Digital	Angka	3	3		2,5		2,75		3		3,25		3,5		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				**68.738.500**		**68.738.500**		**73.000.000**		**80.000.000**		**80.520.000**		**80.700.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai	2,76	2,6		2,6		2,6		2,6		2,6		2,6		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				**79.886.000**		**92.793.000**		**115.900.000**		**107.900.000**		**108.740.000**		**108.980.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Predikat	Level III	Level II		Level II		Level II		Level II		Level II		Level II		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				**79.537.900**		**100.000.000**		**100.000.000**		**150.000.000**		**175.000.000**		**275.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persentase	60	60,5		62		65		67		70		72		
	Tingkat digitalisasi arsip	Nilai	9 0	90,90		91		91,10		91,15		91,20		91,		
	Nilai Pengawasan kearsipan eksternal	Nilai	87	87		87,05		87,10		87,15		87,20		87,25		
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				**83.517.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**110.000.000**		**125.000.000**		**195.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
	Persentase arsip yang	Persentase	75	75,05		75,20		76		76,55		77		78		

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	dilindungi dan terselamatkan															
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				-		**51.491.300**		**81.491.300**		**61.500.000**		**48.500.000**		**57.500.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	Persentase	66	67		68		69		70		73		75		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						**1.000.000**		**55.000.000**		**55.000.000**		**60.000.000**		**60.000.000**	KECAMATAN DAMAR
	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**2.141.100**		**2.141.100**		**10.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**	KECAMATAN DENDANG
	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase		100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**2.250.000**		**10.000.000**		**45.000.000**		**55.000.000**		**65.000.000**		**70.000.000**	KECAMATAN GANTUNG
	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**1.146.800**		**1.146.800**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**	KECAMATAN KELAPA KAMPIT
	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	di wilayah kecamatan															
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**19.758.100**		**19.758.100**		**19.758.100**		**19.758.100**		**19.758.100**		**19.758.100**	KECAMATAN MANGGAR
	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**1.000.000**		**1.000.000**		**60.000.000**		**60.000.000**		**60.000.000**		**60.000.000**	KECAMATAN SIMPANG PESAK
	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase		100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**7.241.300**		**7.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase		100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**5.400.000**		**6.000.000**		**330.000.000**		**330.000.000**		**380.000.000**		**380.000.000**	KECAMATAN DAMAR
	Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**43.000.000**		**43.000.000**		**510.000.000**		**415.000.000**		**415.000.000**		**415.000.000**	KECAMATAN DENDANG

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase		100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**59.317.400**		**80.000.000**		**615.000.000**		**670.000.000**		**720.000.000**		**775.000.000**	KECAMATAN GANTUNG
	Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**29.603.000**		**30.000.000**		**500.000.000**		**500.000.000**		**606.639.310**		**606.639.310**	KECAMATAN KELAPA KAMPIT
	Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**52.322.400**		**52.322.400**		**552.322.400**		**420.393.000**		**490.533.500**		**490.533.500**	KECAMATAN MANGGAR
	Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**72.150.000**		**30.000.000**		**675.000.000**		**675.000.000**		**678.000.000**		**678.000.000**	KECAMATAN SIMPANG PESAK
	Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Persentase		100		100		100		100		100		100		

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**163.771.000**		**150.000.000**		**420.000.000**		**447.500.000**		**450.000.000**		**450.000.000**	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
	Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase		100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						**1.000.000**		**55.000.000**		**70.000.000**		**75.000.000**		**75.000.000**	KECAMATAN DAMAR
	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				**5.682.800**		**5.682.800**		**25.000.000**		**45.000.000**		**45.000.000**		**45.000.000**	KECAMATAN DENDANG
	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase		100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				**20.733.400**		**30.000.000**		**85.000.000**		**85.000.000**		**65.000.000**		**65.000.000**	KECAMATAN GANTUNG
	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				**6.075.000**		**6.075.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**	KECAMATAN KELAPA KAMPIT

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				**9.999.200**		**9.999.200**		**29.999.200**		**30.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**	KECAMATAN MANGGAR
	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				**5.500.000**		**2.000.000**		**54.000.000**		**54.000.000**		**54.000.000**		**54.000.000**	KECAMATAN SIMPANG PESAK
	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase		100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				**4.994.600**		**6.000.000**		**57.000.000**		**49.000.000**		**32.000.000**		**39.000.000**	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase		100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**2.745.524.084**		**2.750.775.701**		**2.470.919.600**		**2.496.508.000**		**2.503.518.700**		**2.503.518.700**	KECAMATAN DAMAR
	Persentase Pendukung Urusan Layanan Penunjang	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**2.891.059.000**		**2.901.636.248**		**2.388.975.300**		**2.500.399.700**		**2.565.391.200**		**2.565.391.200**	KECAMATAN DENDANG
	Persentase Pendukung Urusan Layanan Penunjang	Persentase		100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**3.140.874.600**		**3.104.807.775**		**2.427.660.500**		**2.408.907.200**		**2.430.352.000**		**2.450.000.000**	KECAMATAN GANTUNG
	Persentase Pendukung Urusan Layanan Penunjang	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**3.238.200.890**		**3.190.801.697**		**2.551.829.700**		**2.617.840.900**		**2.534.273.990**		**2.534.273.990**	KECAMATAN KELAPA KAMPIT
	Persentase Pendukung Urusan Layanan Penunjang	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**2.881.332.586**		**2.892.181.965**		**2.512.486.400**		**2.719.486.400**		**2.719.986.400**		**2.719.986.400**	KECAMATAN MANGGAR
	Persentase Pendukung Urusan Layanan Penunjang	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**2.750.396.922**		**2.689.398.073**		**2.057.437.000**		**2.090.043.320**		**2.124.356.100**		**2.124.356.100**	KECAMATAN SIMPANG PESAK
	Persentase Pendukung Urusan Layanan Penunjang	Persentase		100		100		100		100		100		100		

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**2.384.331.700**		**2.407.057.787**		**2.313.571.100**		**2.339.305.000**		**2.410.176.000**		**2.403.176.000**	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
	Persentase Pendukung Urusan Layanan Penunjang	Persentase		100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						**2.000.000**		**61.500.000**		**61.500.000**		**71.500.000**		**71.500.000**	KECAMATAN DAMAR
	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Nilai		100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**9.000.000**		**9.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**	KECAMATAN DENDANG
	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Nilai		100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**25.000.000**		**25.000.000**		**70.000.000**		**85.000.000**		**91.000.000**		**100.000.000**	KECAMATAN GANTUNG
	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Nilai		100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**8.569.500**		**8.600.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**75.000.000**		**75.000.000**	KECAMATAN KELAPA KAMPIT
	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Nilai		100		100		100		100		100		100		

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**49.779.800**		**49.779.800**		**49.779.800**		**49.779.800**		**49.779.800**		**49.779.800**	KECAMATAN MANGGAR
	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Nilai		100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**7.310.000**		**7.000.000**		**21.000.000**		**21.000.000**		**39.000.000**		**39.000.000**	KECAMATAN SIMPANG PESAK
	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Nilai		100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**21.763.700**		**21.500.000**		**35.000.000**		**37.500.000**		**40.000.000**		**40.000.000**	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Nilai		100		100		100		100		100		100tarf		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						-		**25.000.000**		**25.000.000**		**30.000.000**		**30.000.000**	KECAMATAN DAMAR
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**2.663.200**		**2.663.200**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.000.000**	KECAMATAN DENDANG
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase		100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN				**0**		**10.000.000**		**30.000.000**		**35.000.000**		**40.000.000**		**45.000.000**	KECAMATAN GANTUNG

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PEMERINTAHAN UMUM															
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**3.375.000**		**3.375.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**75.000.000**		**75.000.000**	KECAMATAN KELAPA KAMPIT
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**16.340.400**		**16.340.400**		**16.340.400**		**16.340.400**		**16.340.400**		**16.340.400**	KECAMATAN MANGGAR
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**1.000.000**		**1.000.000**		**30.000.000**		**53.401.080**		**60.000.000**		**60.000.000**	KECAMATAN SIMPANG PESAK
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase		100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**6.186.300**		**6.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**	KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase		100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**186.730.628.872**		**187.242.432.221**		**165.905.057.035**		**116.500.000.000**		**117.000.000**		**117.000.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	91,73	93		95		97		99		100		100		

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**164.575.606.807**		**169.763.129.204**		**168.000.831.651**		**168.483.403.094**		**169.651.051.867**		**170.625.652.079**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	Indeks Kepuasan Masyarakt (IKM)	Persen	97	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**11.424.777.512**		**16.087.310.485**		**19.070.799.600**		**19.691.988.300**		**19.993.426.500**		**19.993.426.500**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,67	83		83,5		84		84,5		85		85		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**3.989.446.790**		**4.214.950.062**		**3.902.903.305**		**3.925.456.405**		**3.925.456.405**		**3.925.456.405**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (BPBD)
					7.314.330.806		**10.580.450.209**		**4.367.489.560**		**4.439.927.520**		**4.234.426.800**		**4.234.426.800**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATPOL PP)
	Indeks Kepuasan Masyarakat BPBD	Nilai		**81**		**82**		**83**		**84**		**85**		**86**		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,9	84		86		88		90		92		94		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				**4.932.441.864**		**4.852.467.152**		**5.148.762.924**		**5.189.306.484**		**5.259.169.374**		**10.869.318.989**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA															PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**6.279.561.436**		**6.557.325.494**		**4.560.441.228**		**4.859.434.775**		**4.876.532.221**		**4.876.532.221**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83,25	84		84		85		85		86		86		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**9.314.813.500**		**9.763.250.151**		**5.714.687.651**		**5.799.767.329**		**5.838.888.051**		**5.838.888.051**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,94	85		86		87		88		89		90		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**6,124,965,448**		**5,438,974,272**		**4.122.334.893**		**4.266.802.860**		**4.372.662.482**		**4.372.662.482**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Indeks Kepuasan Masyarakat (pegawai disdukcapil)	Nilai	92,67	80		82		84		86		88		90		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**6.128.513.388**		**6.504.909.277**		**3.602.693.700**		**3.683.958.700**		**3.686.314.500**		**3.650.825.900**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	N/A	100		100		100		100		100		100		

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**6.041.708.934**		**6.558.138.496**		**4.816.035.380**		**4.834.684.850**		**4.851.967.340**		**4.851.967.340**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	**80,2**	**80,22**		**80,23**		**80,3**		**80,35**		**80,36**		**80,37**		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**7.186.928.692**		**7.611.190.515**		**7.666.028.600**		**7.668.480.000**		**7.819.651.700**		**7.819.651.700**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	NA	81		82		83		84		85		85		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**5.694.678.050**		**5.694.097.900**		**3.583.392.800**		**3.944.620.500**		**3.954.620.500**		**3.954.620.500**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Nilai	89,5	89,5		90		90,5		91		91,5		91,5		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**7.233.706.056**		**8.024.645.078**		**6.764.732.514**		**6.792.896.200**		**6.810.785.600**		**6.869.683.500**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Indeks Kepuasan Masyarakat olehraga(Indeks)	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**7.073.106.602**		**7.041.331.963**		**5.684.521.270**		**5.896.656.308**		**5.918.139.399**		**5.918.139.399**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Nilai	NA	80		82		83		84		85		85		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN				**5.117.701.162**		**5.562.170.100**		**5.769.867.400**		**6.045.639.200**		**5.967.488.200**		**5.967.488.200**	URUSAN PEMERINTAHAN

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															BIDANG PERPUSTAKAAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	86,010	86,15		86,35		86,55		86,65		86,75		86,85		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**11.254.386.306**		**11.394.226.218**		**6.511.911.420**		**6.428.632.800**		**6.351.436.160**		**10.519.374.419**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Nilai	89,39	89,45		89,75		90		90,25		90,5		90,5		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**7.200.327.650**		**7.650.883.637**		**5.737.727.900**		**5.850.032.000**		**5.942.973.000**		**5.942.973.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,89	83		83,2		83,4		83,6		83,8		84		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**5.325.803.634**		**6.212.646.640**		**5.855.655.700**		**5.987.386.800**		**6.122.400.613**		**6.122.400.613**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NIlai	88,92	88,94		88,96		88,98		89		89,02		89,02		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**28.413.670.582**		**27.918.153.884**		**25.314.384.735**		**28.314.384.735**		**28.531.693.135**		**30.314.384.735**	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**22.089.575.516**		**22.711.180.000**		**23.631.182.050**		**24.558.516.350**		**25.390.662.150**		**25.390.662.150**	SEKRETARIAT DPRD

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,25	88,31		88,41		88,51		89		89,20		90		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**6.257.824.816**		**6.336.573.397**		**4.183.080.912**		**4.263.497.094**		**4.481.350.039**		**4.672.792.572**	PERENCANAAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat	NIlai	80	81		82		83		84		85		86		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**10.862.253.077**		**10.939.500.000**		**7.859.500.000**		**8.184.000.000**		**9.060.000.000**		**9.975.000.000**	KEUANGAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat	NIlai	93,06	94		95		95		95		95		95		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**5.748.896.530**		**5.934.287.436**		**4.628.150.700**		**4.121.425.980**		**4.436.547.300**		**4.101.547.300**	KEPEGAWAIAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat	NIlai	88.57	88.60		88.70		88.80		88.80		88.90		89		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**3.455.717.080**		**3.482.482.746**		**4.028.697.349**		**3.876.697.349**		**4.062.337.349**		**4.051.677.349**	PEMERINTAHAN UMUM
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai Kesbangpol)	NIlai	80	81		82		83		84		85		86		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**12.113.887.400**		**12.269.491.796**		**12.173.755.500**		**12.442.852.100**		**12.784.594.400**		**12.784.594.400**	INSPEKTORAT DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NIlai	80	85		85		90		90		95		95		

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.1.2	**MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**															
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				**98.686.348.450**		**98.888.000.000**		**98.888.000.000**		**97.451.555.600**		**99.108.000.000**		**100.175.000.000**	URUSAN BIDANG KEUANGAN DAERAH
	Ketepatan waktu penyusunan APBD	Predikat	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		
	Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Predikat	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		
	Persentase Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan tepat waktu	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Realisasi Anggaran Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase	98	98		98		98		98		98		98		
	Persentase data keuangan daerah yang terinput ke dalam sistem informasi secara tepat waktu	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				**349.692.000**		**415.000.000**		**409.300.000**		**415.000.000**		**645.000.000**		**890.000.000**	URUSAN BIDANG KEUANGAN DAERAH
	Persentase aset daerah yang telah bersertifikat	Persentase	95	95		96		96		96		96		96		
	Persentase aset daerah yang tercatat dalam neraca daerah	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				**1.186.054.400**		**1.244.664.500**		**1.220.100.000**		**1.326.906.900**		**2.144.885.600**		**2.035.000.000**	URUSAN BIDANG KEUANGAN DAERAH
	Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase	12	13		14		15		15		15		15		
2.1.1	**MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN**															

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				**40.653.533.636**		**40.989.606.100**		**101.857.483.000**		**105.451.570.700**		**109.672.259.400**		**109.672.259.400**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
	APK PAUD	Persentase	86,47	87		87		88		89		90		91		
	APK SD	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	APK SMP	Persentase	91,76	93		93		94		95		95		97		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				**93.915.200**		**90.000.000**		**180.000.000**		**250.000.000**		**320.000.000**		**320.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
	Persentase sekolah Dikdas yang menerapkan kurikulum Mulok	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase sekolah PAUD dan PNF yang menerapkan kurikulum Mulok	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				**89.209.000**		**90.000.000**		**200.000.000**		**280.000.000**		**360.000.000**		**360.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
	Persentase sekolah yang terpenuhi Tendik dan Tenaga Kependidikan seseuai kebutuhan	Persentase	-	88		92		94		95		96		96		
	Persentase Guru yang Berpendidikan S1/DIV	Persentase	92,81	93		95		96		96		98		98		
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				**65.054.000**		**35.000.000**		**160.000.000**		**230.000.000**		**300.000.000**		**300.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
	Persentase kegiatan pengembangan bahasa dan sastra daerah	Persentase	-	50		50		55		60		65		70		
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				**78.563.500**		**15.000.000**		**17.000.000**		**19.000.000**		**21.000.000**		**26.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
																PERPUSTAKAAN
	Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	Persentase	20	21		25		30		40		50		51		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				**715.065.300**		**188.127.000**		**213.000.000**		**256.000.000**		**283.670.000**		**333.670.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
	Persentase Perpustakaan yang dibina	Persentase	35	36		50		60		65		75		75,5		
2.1.2	**MENINGKATNYA PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN TERINTEGRASI**															
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**45.736.699.161**		**44.789.547.429**		**45.833.012.087**		**47.013.022.785**		**47.434.104.870**		**48.033.942.296**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	Angka Kematian Ibu (AKI)	Nilai	119	119		119		119		60		60		60		
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persentase	17,10	16,34		15,38		14,42		13,46		12,47		11,51		
	Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk;	Rasio	0,82	0,86		0,9		0,94		0,97		1,01		1,01		
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang terakreditasi Paripurna	Persentase	0	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar;	Persentase	67,9	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ibu bersalin	Persentase	78,73	100		100		100		100		100		100		

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;															
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar;	Persentase	77,19	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar;	Persentase	92,07	100		100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;	Persentase	96,24	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;	Persentase	63,96	100		100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;	Persentase	80,37	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;	Persentase	94,93	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita Diabetes yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;	Persentase	88,92	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar;	Persentase	102,99	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan	Persentase	103,09	100		100		100		100		100		100		

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	pelayanan TBC sesuai standar;															
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar;	Persentase	81,2	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase	65	78		80		82		84		85		87		
	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) %;	Persentase	98,23	98,6		99		99		100		100		100		
	Persentase Penilaian Capaian Tatanan Kehidupan Sehat Mandiri	Persentase	71	71		81		81		81		91		91		
	Cakupan balita wasting yang ditangani	Persentase	-	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				**905.230.500**		**905.230.500**		**961.472.982**		**905.230.500**		**914.282.805**		**905.230.500**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	Persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar	Persentase	71	75		80		85		85		90		95		
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				**10.992.300**		**11.322.069**		**11.661.731**		**12.011.583**		**12.011.583**		**10.992.300**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	Persentase sarana produksi pangan yang dilakukan pengawasan	Persentase	-	50		50		50		50		50		50		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				**330.647.200**		**349.398.866**		**359.880.832**		**370.677.257**		**333.953.672**		**330.647.200**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri (Persen)	Persentase	-	40		50		65		75		80		80		

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				**175.417.000**		**175.417.000**		**702.207.000**		**711.207.000**		**720.207.000**		**729.207.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Rata-Rata Jumlah Anak Perkeluarga	Anak	2	2		2		2		2		2		2		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				**1.188.788.000**		**1.188.788.000**		**1.623.195.000**		**1.637.510.600**		**1.652.395.000**		**1.666.711.100**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase peserta KB aktif	Persentase	73,9	75,4		77		78		80		81		83		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				**755.000.000**		**755.000.000**		**871.826.800**		**871.826.800**		**871.826.800**		**871.826.800**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Cakupan Bina Keluarga Aktif	Persentase	80	80		80		82		84		86		88		
2.1.3	**MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN BUDAYA**															
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				**11.100.000**		**2.093.974.900**		**1.897.281.926**		**1.897.281.926**		**1.961.281.926**		**2.747.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang tersedia	Persentase		83		100		100		100		100		100		

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				**235.408.500**		**235.824.500**		**269.824.500**		**269.824.500**		**269.824.500**		**667.364.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase	100	12		23		27		27		12		12		
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				**47.474.900**		**60.000.000**		**90.000.000**		**90.000.000**		**90.000.000**		**85.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				**48.525.000**		**145.125.000**		**594.525.000**		**594.525.000**		**594.525.000**		**770.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
	Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kota	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				-		-		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**35.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Mendapat Pengelolaan Secara Baik	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER				**14.577.100**		**14.577.100**		**50.723.150**		**95.324.790**		**61.177.100**		**220.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN															BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Pelaksanaan RAD PUG	Persentase	80	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				**196.514.200**		**196.514.200**		**196.514.200**		**246.514.200**		**246.514.200**		**337.969.271**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				**48.725.600**		**48.725.600**		**48.725.600**		**48.725.600**		**83.725.600**		**48.725.600**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase keluarga yang terlayani	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				**46.227.000**		**46.227.000**		**46.227.000**		**46.227.000**		**46.227.000**		**300.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Desa Ramah Anak	Persentase	2,56	20.51		38,46		56,41		74,36		94,87		100		
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				**309.175.800**		**309.175.800**		**309.175.800**		**309.175.800**		**309.175.800**		**355.046.541**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
																PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				**816.261.100**		**616.888.100**		**680.467.000**		**660.567.000**		**710.550.000**		**750.685.100**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Persentase wirausaha muda	Persentase	3,1	2,75		3		3		4		4		4		
	Persentase peran serta pemuda dalam organisasi kepemudaan	Persentase	24,36	25		26		27		28		30		32		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				**6.136.809.940**		**5.287.976.764**		**2.604.897.086**		**2.705.857.000**		**2.815.907.000**		**2.930.015.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Persentase pembinaan cabang keolahragaan	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				**232.717.700**		**202.090.700**		**266.772.000**		**250.852.000**		**212.012.000**		**232.700.200**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Persentase organisasi pramuka aktif	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				**628.691.800**		**229.000.000**		**950.000.000**		**950.000.000**		**950.000.000**		**950.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Nilai	65	65		67		70		72		75		75		

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persentase	55	35		35		62		62		67		67		
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Nilai	15	25		25		65		65		67		67		
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				**49.944.000**		**126.000.000**		**190.000.000**		**195.000.000**		**195.000.000**		**195.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Persentase	15	25		25		70		72		75		75		
	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Persentase	65	60		60		65		70		75		75		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				**118.801.500**		**45.000.000**		**65.000.000**		**65.000.000**		**65.000.000**		**65.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
	Persentase kunjungan wisatawan ke museum	Persentase	65	70		65		65		70		75		75		
3.1.1	**MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI**															
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				**0**		**0**		**150.000.000**		**169.338.357**		**175.000.000**		**175.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
																KECIL, DAN MENENGAH
	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	59,28	59,78		59,78		59,78		59,78		59,78		59,78		
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				**0**		**75.000.000**		**200.000.000**		**250.000.000**		**275.000.000**		**275.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persentase	32.14	32,40		33		33		34		35		35		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				**32.460.700**		**0**		**250.000.000**		**250.000.000**		**275.000.000**		**275.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	Persentase Usaha Mikro yang mempunyai izin usaha	Persentase	7.58	8,26		8,26		9,58		10,22		10,86		10,86		
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				**0**		**502.406.400**		**659.182.840**		**700.000.000**		**726.006.980**		**726.006.980**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	Persentase Peningkatan Jumlah Wirausaha Baru Usaha Mikro	Persentase	8,2	8,26		8,92		9,58		10,22		10,86		10,86		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN								**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	100	100	-	100	-	100		100		100		100		

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				**107.358.800**		**106.996.800**		**304.000.000**		**308.000.000**		**312.000.000**		**316.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	85,3	85,4		85,9		86,4		86,9		87,4		87,9		
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				**14.136.800**		**14.136.800**		**22.000.000**		**24.000.000**		**25.000.000**		**26.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase	NA	17,94		15,38		15,38		12,82		10,26		7,69		
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				**68.566.800**		**30.000.000**		**92.000.000**		**94.000.000**		**96.000.000**		**98.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	91,86	91,86		92		92,5		93		93,5		94		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				**1.152.125.000**		**1.883.152.056**		**4.682.179.380**		**5.602.143.200**		**6.212.351.040**		**3.480.010.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		NA	3		3		3		3		4		5		
	Peningkatan Produksi Hortikultura		NA	3		3		3		3		3		3		
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		NA	3		3		5		5		5		5		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				**400.924.000**		**403.424.000**		**2.100.000.000**		**1.410.000.000**		**1.440.000.000**		**890.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Persentase	NA	15		15		15		15		15		15		
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN				**262.226.200**		**232.461.700**		**485.000.000**		**495.000.000**		**506.000.000**		**515.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	MASYARAKAT VETERINER															
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persentase	NA	3		3		3		3		5		5		
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persentase	NA	10		10		10		20		20		20		
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				**49.511.800**		**49.511.800**		**200.000.000**		**200.000.000**		**320.000.000**		**250.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persentase	NA	20		20		20		20		20		20		
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persentase	NA	30		30		30		30		30		30		
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				**172.710.000**		**172.710.000**		**793.280.000**		**912.000.000**		**912.000.000**		**912.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persentase	NA	20		20		20		20		20		20		
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Persentase	NA	5		5		5		5		5		5		
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				**581.005.400**		**434.532.600**		**1.056.259.230**		**879.072.192**		**903.025.801**		**903.025.801**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	-44	15		15		15		15		15		15		
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				**670.540.600**		**375.058.188**		**1.000.000.000**		**1.100.000.000**		**1.200.000.000**		**1.200.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
																BIDANG PARIWISATA
	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	NA	40		40		80		80		80		80		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						**150.540.600**		**300.000.000**		**315.000.000**		**330.750.000**		**330.750.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	NA	0		10		20		20		30		30		
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL								**250.000.000**		**250.000.000**		**270.000.000**		**270.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	NA	NA		NA		10		10		10		10		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				**2.039.609.200**		**2.055.000.000**		**2.945.000.000**		**2.955.000.000**		**3.275.000.000**		**3.275.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	41242.91	43.966		41,864.00		42,073.00		42,283.00		42,495.00		42,707.00		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				**987.366.200**		**1.037.372.000**		**1.495.000.000**		**1.565.000.000**		**1.980.000.000**		**1.980.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	2.628,18	1.800		2.733,31		2.785,87		2.838,43		2,891		2943,56		

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				**36.040.000**		**55.000.000**		**125.000.000**		**125.000.000**		**140.000.000**		**140.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Luasan Kawasan Konservasi	Ha	124.320,70	124.320.7		124.320,70		124.320,70		124.320,70		124.320,70		124.320,70		
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				**579.051.400**		**583.100.000**		**2.130.000.000**		**2.315.000.000**		**1.750.000.000**		**1.750.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	68,54	67		70,61		71,67		72,75		73,84		74,94		
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				**-**		**-**		**3.000.000**		**3.500.000**		**3.350.000**		**3.350.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	0	40		45		50		55		60		60		
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				**-**				**8.500.000**		**9.000.000**		**10.050.000**		**10.050.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
	Nilai Ekspor Barang	USD	264.700.000	271.012.182,91		289.983.035,71		310.281.848,21		332.001.577,58		355.241.688,01		355.241.688,01		
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				**820.664.300**		**384.671.900**		**411.806.549**		**412.256.549**		**412.835.549**		**412.835.549**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				**55.239.000**		**25.039.000**		**464.592.951**		**506.931.951**		**524.297.438**		**524.297.438**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase	3,449	3,19		3,19		3,19		3,19		3,19		3,19		
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				**65.582.600**		**51.380.500**		**66.497.600**		**66.497.600**		**66.497.600**		**66.497.600**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
	Indeks Tertib Ukur	Nilai	66,71	68		69		70		71		72		72		
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				**68.735.100**		**68.735.100**		**169.034.800**		**170.034.800**		**171.034.800**		**171.034.800**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
	Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah	Persentase	56,68	5,95		3		3		3		3		3		
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				**-**		**-**		**4.711.200**		**4.811.200**		**4.911.200**		**4.911.200**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persentase	100	32,5		3		3		3		3		3		
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				**-**		**-**		**4.050.000**		**4.500.000**		**5.000.000**		**5.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Industri	100	66,67		3		3		3		3		3		
3.1.2	**MENINGKATNYA PERTUMBUHAN INVESTASI**															
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				**19.841.000**		**19.891.000**		**204.000.000**		**64.000.000**		**54.000.000**		**54.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
	Jumlah Investor yang merealisasikan	Investor	345	365		385		405		425		445		445		

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	investasinya (PMDN/PMA) (pelaku usaha)															
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				**41.125.000**		**41.075.000**		**515.000.000**		**500.000.000**		**500.000.000**		**500.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi (persen)	Persentase	1,85	2		2		2		2		2		2		
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				**44.852.700**		**45.069.800**		**87.000.000**		**87.000.000**		**87.000.000**		**87.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (persen)	Persentase	NA	84		85		86		87		88		88		
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				**38.979.000**		**38.979.000**		**120.650.000**		**120.650.000**		**120.650.000**		**120.650.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha (persen)	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				-		**4.829.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**		**10.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
	Persentase Pemanfaatan data dan informasi Penanaman modal (persen)	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
3.1.3	**MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA**															

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				**0**		**0**		**75.000.000**		**0**		**33.000.000**		**33.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Persentase	88,89	89,47		90		90,23		90,75		91,05		91,05		
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				**159.150.000**		**310.000.000**		**1.145.032.632**		**1.330.188.151**		**1.378.856.776**		**1.378.856.776**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persentase	3,72	4,28		4,73		9,04		9,5		10,09		10,09		
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				**0**		**65.000.000**		**140.000.000**		**140.000.000**		**140.000.000**		**140.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	Persentase	73,33	76,19		77,27		78,26		79,17		80		80		
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				**371.040.000**		**339.390.000**		**529.006.000**		**639.161.517**		**610.674.623**		**610.674.623**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Pekerja	2877	2716		2736		2756		2776		2796		2796		
4.1.1	**MENINGKATNYA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH**															

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				**5.993.498.700**		**6.013.092.700**		**6.009.032.000**		**6.024.032.000**		**6.025.032.000**		**6.025.032.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
	Konektivitas Darat (km)	Km	471,5	510,3		510,3		590,3		590,3		590,3		590,3		
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	15	15,5		15,6		15,8		15,9		16		16,1		
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				**433.327.200**		**433.327.200**		**561.717.220**		**590.232.650**		**629.558.460**		**629.558.460**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
	Konektivitas Laut	Unit	2	2		2		3		3		3		3		
4.1.2	**MENINGKATNYA KUALITAS SARANA DAN PRASARANA WILAYAH**															
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				**948.604.400**		**1.600.000.000**		**2.250.000.000**		**2.500.000.000**		**2.200.000.000**		**2.200.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Rasio	37,93	-		-		38		-		39		39		
	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Rasio	10,26	12,26		12,26		14,26		16,26		18,26		18,26		

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase irigasi dalam kondisi baik, luas irigasi yang dapat berfungsi dengan baik dan efisiensi penggunaan air irigasi	Persentase	52,9	52,9		57,9		62,9		67,9		72,9		72,9		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				**1.903.604.100**		**1.100.000.000**		**1.200.000.000**		**1.200.000.000**		**1.200.000.000**		**1.200.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Persentase	NA	38		40,57		47		50		55		55		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				**0**		**1.200.000.000**		**750.000.000**		**750.000.000**		**600.000.000**		**600.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persentase	8	8		16		21		26		30		30		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				**5.148.338.000**		**2.000.000.000**		**850.000.000**		**800.000.000**		**800.000.000**		**800.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	NA	87		87,35		88,27		89,18		90,09		90,09		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				**522.373.000**		**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase dokumen teknis penataan	Persentase	NA	100		100		100		100		100		100		

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	bangunan gedung yang diterbitkan															
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				**383.312.500**		**250.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang ditata dan dipelihara	Persentase	NA	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				**4.550.024.460**		**7.000.000.000**		**5.000.000.000**		**5.500.000.000**		**5.500.000.000**		**5.500.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase	79,5	79,7		79,9		80,1		80,3		80,5		80,7		
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				**523.064.000**		**280.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis	Persentase	NA	37,5		40,62		44,73		51,53		53,18		53,18		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				**500.656.300**		**1.100.000.000**		**2.000.000.000**		**2.000.000.000**		**2.000.000.000**		**2.000.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase kesesuaian tata ruang	Persentase	NA	70		75		80		85		85		85		
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				**351.872.600**		**268.000.000**		**500.000.000**		**500.000.000**		**500.000.000**		**500.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persentase	58,24	59,1		59,96		60,82		61,68		62,54		62,54		
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				**253.441.600**		**101.000.000**		**500.000.000**		**500.000.000**		**500.000.000**		**500.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase permukiman yang tertata	Persentase	99,37	99,61		99,71		99,76		99,81		99,86		99,86		
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				**3.278.198.200**		**6.784.000.000**		**9.000.000.000**		**9.000.000.000**		**9.000.000.000**		**9.000.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persentase	4,78	2,06		2,01		1,96		1,91		1,86		1,86		
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				**1.570.937.170**		**2.347.000.000**		**9.000.000.000**		**10.000.000.000**		**11.000.000.000**		**11.000.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persentase	99,37	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				**246.290.000**		**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
																BIDANG PERTANAHAN
	Persentase Tanah Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	Persentase	NA	62,44		72,5		80,5		85,5		92,5		100		
5.1.1	**MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN**															
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				**64.259.500**		**70.534.500**		**325.000.000**		**337.969.314**		**343.000.000**		**343.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				**647.959.950**		**541.276.275**		**1.000.000.000**		**1.012.969.314**		**1.018.000.000**		**1.018.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kualitas Air	Nilai	54	75,26		75,46		75,66		75,86		76,06		76,08		
	Indeks Kualitas Udara	Nilai	92,33	84,71		84,91		85,11		85,31		85,51		86		
	Indeks Kualitas Lahan	Nilai	45,95	62,7		62,77		62,84		62,91		62,98		63		
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				**-**		**-**		**250.000.000**		**262.969.314**		**268.000.000**		**268.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase	32,5	32,5		32,5		52,5		62,5		72,5		72,5		
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN				**8.863.200**		**8.863.200**		**50.000.000**		**62.969.314**		**68.000.000**		**68.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	BERACUN (LIMBAH B3)															
	Persentase ketaatan perusahaan dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	Persentase	90	90		90		90		90		90		90		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				**13.312.000**		**26.395.800**		**80.000.000**		**92.969.314**		**98.000.000**		**98.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Perizinan Berusaha dan Persetujuan lingkungan yang diterbitkan kabupaten	Persentase	35	35		40		45		50		55		60		
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				**0**		**70.000.000**		**70.000.000**		**82.969.314**		**88.000.000**		**88.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	Persentase	5	5		10		15		20		25		25		
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				**189.002.400**		**0**		**200.000.000**		**212.969.314**		**218.000.000**		**218.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya.	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				**38.838.100**		**157.840.500**		**80.000.000**		**92.969.314**		**98.000.000**		**98.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase capaian penghargaan bidang lingkungan hidup	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				**2.250.000**		**4.185.000**		**10.000.000**		**12.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti di Kabupaten	Persentase	0	80		80		80		90		90		90		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				**2.165.641.800**		**2.739.168.800**		**6.000.000.000**		**6.012.969.310**		**6.019.619.188**		**6.019.619.188**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase pengelolaan sampah	Persentase	67,85	68,85		69,85		69,85		69,85		69,85		69,85		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				**1.676.699.300**		**1.240.248.395**		**1.610.248.395**		**1.610.248.395**		**1.610.248.395**		**1.610.248.395**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase		100		100		100		100		100		100		
	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persentase		100		100		100		100		100		100		
	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase		100		100		100		100		100		100		

NO	SASARAN/ PROGRAM/INDIKATOR	SATUAN	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				**126.432.500**		**126.432.500**		**774.076.000**		**837.985.000**		**931.696.283**		**931.696.283**	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	100	100		100		100		100		100		100		

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2025

IV.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sub bab ini menyajikan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan dalam mencapai visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati. Indikator kinerja ini selanjutnya ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setiap indikator dikembangkan berdasarkan aspek dan fokus sesuai dengan bidang urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan masing-masing. Indikator-indikator ini mencerminkan capaian kinerja yang akan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Misi Kabupaten Belitung Timur.

IV.2.A **Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029. IKU disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah, serta mencerminkan arah strategis pembangunan lima tahunan yang ingin dicapai. Indikator ini diperoleh dari indikator tujuan dan sasaran terpilih yang paling relevan dan representatif terhadap arah kebijakan pembangunan daerah.

TABEL 4. 2 TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	82,58	82,58	83,06	83,54	84,02	84,5	85	
2	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,19	73,98	74,35	74,71	75,10	75,49	75,89	
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	-0,03	3,05	3,08	3,36	3,86	4,36	4,86	
4	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	Ribu Rupiah	82.608,71	83.940	87.140	90.350	93.550	96.750	99.950	
5	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	Nilai	26,49	26,49	29,06	31,62	34,19	36,75	39,32	
6	Gini Rasio	Nilai	0,251	0,225	0,217	0,208	0,201	0,192	0,184	
7	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Nilai	NA	73,925	77,235	80,18	80,7	81,22	81,295	
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	NA	17,67	18,39	19,11	19,83	20,55	21,27	
9	Nilai SAKIP	Nilai	66,37 (B)	70,01 (BB)	71,5	73	74	75,01 (BB)	75,5	
10	Indeks SPBE	Nilai	4,16	3,5	3	3,25	3,5	3,75	4	
11	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	79,03	80	80	70	73	77	81	
12	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,01	4,05	4,1	4,15	4,2	4,25	4,3	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
13	Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	
14	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
15	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	83,45	83,71	83,96	84,226	84,484	84,742	85	
16	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,69	11,79	11,89	11,99	12,09	12,14	12,19	
17	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,99	9,13	9,28	9,42	9,57	9,61	9,71	
18	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	84,09	85	86	87	88	89	90	
19	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,89	73,04	73,2	73,35	73,51	73,66	73,77	
20	Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	17,1	16,34	15,38	14,42	13,46	12,47	11,51	
21	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	Persen	10,32	10,32	10,12	9,92	9,72	9,52	9,32	
22	Angka Kemiskinan	Angka	6,36	6,20	6,04	5,87	5,71	5,59	5,55	
23	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	59,28	59,58	60,07	60,47	60,86	61,26	61,26	
24	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	87,55	87,83	88,1	88,38	88,65	88,73	88,93	
25	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	67,66	68,86	70,06	71,26	72,46	73,05	73,66	
26	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	52,67	54,34	56	57,67	59,33	60	61	
27	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Juta Rupiah	1.617.560	3.168.130	3.400.430	3.632.720	3.865.020	4.097.310	4.329.610	
28	PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	Juta Rupiah	181.320	191.390	209.100	227.160	237.310	247.308	265.090	
29	PDRB Industri Pengolahan	Juta Rupiah	1.066.580	1.146.850	1.192.500	1.272.770	1.318.420	1.398.690	1.444.340	
30	Tingkat Inflasi	Persen	1,38	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1	
31	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMDN/PMA)	Juta Rupiah	1.068.106	450.000	468.000	494.000	520.000	546.000	572.000	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
32	Tingkat Penganggura n Terbuka	Persen	2,63	2,60	2,33	2,26	2,19	1,54	1,47	
33	Rasio Konektivitas Wilayah	Angka	63,1	75,83	75,83	80,67	80,67	80,67	80,67	
34	Indeks Infrastruktur Wilayah	Nilai	73,53	72,02	78,64	79,69	80,73	81,77	81,92	
35	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	67,76	76,34	76,51	76,68	76,85	77,02	77,19	
36	Indeks Risiko Bencana	Nilai	152,06	152,06	150,39	148,72	147,05	145,38	143,71	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2025

IV.2.B **Indikator Kinerja Daerah**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menetapkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai acuan utama dalam mengukur capaian pembangunan selama periode RPJMD 2025–2029. IKD digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah, serta untuk mengevaluasi konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja pembangunan daerah. IKD tersebut mencakup indikator makro pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

TABEL 4. 3 TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH TAHUN 2025 - 2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	62,29	62,56	62,83	63,1	63,37	63,64	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	10,32	10,12	9,92	9,72	9,52	9,32	IUP
3	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	81,41	100	100	100	100	100	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Nilai	76,34	76,51	76,68	76,85	77,02	77,19	IUP
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	25	29,69	34,38	39,06	43,75	43,75	
6	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	343,20	392,74	442,28	491,82	541,36	590,90	
7	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	10	14,38	18,75	23,13	27,5	27,5	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	17,67	18,39	19,11	19,83	20,55	21,27	IUP
9	Indeks Risiko Bencana	Nilai	152,06	150,39	148,72	147,05	145,38	143,71	
10	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,48	0,49	0,5	0,51	0,52	0,53	
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,7	1,73	1,76	1,79	1,81	1,83	
12	Rasio Jenis Kelamin	%	106	106	106	106	106	106	
13	Kepadatan Penduduk	Orang/km²	54	55	56	57	58	59	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,05	3,08	3,36	3,86	4,36	4,86	IUP
2	Tingkat Kemiskinan	%	6,2	6,04	5,87	5,71	5,59	5,5	IUP
3	PDRB Per Kapita	Ribu Rupiah	83.940	87.140	90.350	93.550	96.750	99.950	IUP
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,60	2,33	2,26	2,19	1,54	1,47	IUP
5	Gini Rasio	Nilai	0,225	0,217	0,208	0,201	0,192	0,184	IUP
6	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,98	74,35	74,71	75,10	75,49	75,89	IUP
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,04	73,20	73,35	73,51	73,66	73,77	
8	Indeks Keluarga Sehat	Nilai	0,315	0,320	0,325	0,330	0,335	0,340	
9	Prevalensi Stunting	%	16,34	15,38	14,42	13,46	12,47	11,51	
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,13	9,28	9,42	9,57	9,61	9,71	
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,79	11,89	11,99	12,09	12,14	12,19	
12	Skor Kemampuan Literasi SD	%	64,55	67,05	69,55	72,05	74,55	77,05	
13	Skor Kemampuan Literasi SMP	%	78,16	79,26	80,36	81,46	83,66	83,66	
14	Skor Kemampuan Numerasi SD	%	55,23	58,13	61,03	63,93	66,83	69,73	
15	Skor Kemampuan Numerasi SMP	%	67,31	68,81	70,31	71,81	73,31	74,81	
16	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	85	86	87	88	89	90	
17	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	80	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	
18	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	76,47	76,47	77,15	77,82	78,50	79,18	
19	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	59,68	60,07	60,47	60,86	61,26	61,26	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
20	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	68,86	70,06	71,26	72,46	73,05	73,66	
21	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Nilai	69,5	69,5	71,41	73,31	75,22	77,13	
22	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,46	0,46	0,45	0,44	0,43	0,43	
23	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	87,83	88,1	88,38	88,65	88,73	88,93	
24	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	54,34	56	57,67	59,33	60	61	
25	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Informal	Persentase	1	1,56	2,12	2,68	3,25	3,25	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1	Angka Ketergantungan	%	42.48	42.49	45.68	44.18	44.14	44.14	
2	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	23,75	24,64	25,53	26,42	27,31	27,31	
3	Kontribusi PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	2,91	**2,91**	2,95	2,98	3,02	**3,06**	
4	Rasio Kewirausahaan	%	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,64	70,72	70,8	70,88	70,96	71,04	
6	Indeks Ekonomi Hijau	Nilai	72,08	73,36	74,64	75,92	77,2	78,48	
7	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Nilai	26.49	28.00	30	32	34	36.75	
8	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	23%	25.18 %	27.36 %	29.54 %	31.72 %	33.9%	
9	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai	6,3	6,6	6,77	6,88	6,88	6,88	
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Miliar Rupiah	3.308, 56	3.622, 29	3.871, 72	3.988, 37	4.115, 99	4.429, 72	
11	Ekspor Barang dan Jasa	Miliar Rupiah	547,25	606,12	664,99	723,86	782,73	841,6	
12	Indeks Infrastruktur Wilayah	Nilai	73,53	72,02	78,64	79,69	80,73	81,77	
13	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	53,5	55,507	57,514	59,521	61,528	61,53	
14	Persentase Desa Mandiri	%	51,28	64,1	76,92	89,74	100	100	
15	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	
16	Tingkat Inflasi	%	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
1	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	97,75	97,89	98,03	98,17	98,31	98,31	
2	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,05	4,10	4,15	4,20	4,25	4,30	
3	Indeks Merit Sistem	Nilai	257	264,15	271,3	278,45	292,75	292,75	
4	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	
5	Capaian Aksi HAM	Angka	89,2	90	90,5	91	91,5	92	
6	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai	70	70	70	73	73	73	
7	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Nilai	53,01	53,01	53,01	53,01	53,01	53,01	
8	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,52	3,7	3,88	4,06	4,24	4,42	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2025

IV.2.C **Indikator Kinerja Kunci**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, IKK menjadi alat utama untuk mengukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029.

TABEL 4. 4 TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2025 - 2030

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
APK PAUD	Persentase	86,47	87	87	88	89	90	91
APK SD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
APK SMP	Persentase	91,76	93	93	94	95	95	97
APS (5-6) PAUD	Persentase	94,81	96,61	98,41	100	100	100	100
APS (7-15) SD/SMP	Persentase	97,09	97,2	97,31	97,42	97,54	97,65	97,76
APS (7-18) Kesetaraan Kesetaraan	Persentase	8,69	9,45	10,21	10,97	11,74	12,5	13,26
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	Persentase	56,99	56,99	58	59,015	60,025	61,05	61,05
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat	Persentase	30,60	30,60	32,59	34,58	36,57	38,57	38,57

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
nasional untuk numerasi								
Persentase sekolah Dikdas yang menerapkan kurikulum Mulok	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase sekolah PAUD dan PNF yang menerapkan kurikulum Mulok	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase sekolah yang terpenuhi Tendik dan Tenaga Kependidikan sesuai kebutuhan	Persentase	-	88	92	94	95	96	96
Persentase Guru yang Berpendidikan S1/DIV	Persentase	92,81	93	95	96	96	98	98
Persentase kegiatan pengembangan bahasa dan sastra daerah	Persentase	-	50	50	55	60	65	70
Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B PAUD	Persentase	75,4	100	100	100	100	100	100
Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 PAUD	Persentase	76,53	85,28	85,78	86,28	86,78	87,28	87,78
Iklim Inklusivitas SD	Angka	58,46	60,96	63,46	65,96	68,46	70,96	73,46
Iklim Inklusivitas SMP	Angka	62,68	65,08	67,48	69,88	72,28	74,68	77,08
Iklim Keamanan SD	Angka	74,83	75,73	76,63	77,53	78,43	79,33	80,23
Iklim Keamanan SMP	Angka	74,68	76,18	77,68	79,18	80,68	82,18	83,68
Iklim Kebinekaan SMP	Angka	74,32	75,32	76,32	77,32	78,32	79,32	80,32
Iklim Kebinekaan SD	Angka	71,63	72,63	73,63	74,63	75,63	76,63	77,63
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	119	119	119	119	60	60	60
Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	Angka	12,3	12,3	11,87	11,44	11,01	10,58	10,58
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persentase	17,10	16,34	15,38	14,42	13,46	12,47	11,51
Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk	Nilai	0,82	0,86	0,9	0,94	0,97	1,01	1,01
Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang terakreditasi Paripurna	Persentase	0	100	100	100	100	100	100
Persentase ibu hamil	Persentase	67,9	100	100	100	100	100	100

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar								
Persentase Ibu hamil KEK mendapat Makanan Tambahan	Persentase	67,80	70	75	80	85,00	90,00	90,00
Persentase Ibu hamil menerima Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) sebanyak 180 butir selama masa kehamilan	Persentase	65,10	70	75	80	85,00	90,00	90,00
Persentase Ibu hamil menerima makanan bergizi seimbang	Persentase	NA	70	75	80,00	85,00	90,00	90,00
Persentase Ibu hamil memeriksakan kehamilannya 6 kali selama masa kehamilan	Persentase	74,00	80	82	85,00	88,00	90,00	90,00
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Persentase	78,73	100	100	100	100	100	100
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Persentase	77,19	100	100	100	100	100	100
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persentase	92,07	100	100	100	100	100	100
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase	96,24	100	100	100	100	100	100
Persentase anak baru lahir yang mendapatkan inisiasi menyusu dini	Persentase	66,22	68	70	72	74,00	75,00	75,00
Persentase anak usia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif	Persentase	68,60	73	76	79	82,00	85,00	85,00
Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MPASI);	Persentase	60,90	73	76	79	82,00	85,00	85,00
Persentase anak usia 6-23 bulan yang masih mendapat air susu ibu (ASI)	Persentase	58,95	61	6	67	70,00	73,00	73,00
Persentase anak usia 0-23 bulan gizi buruk yang mendapatkan	Persentase	100,00	100	100	100	100,00	100,00	100,00

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
tatalaksana gizi buruk								
Persentase anak usia 0-23 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan nya	Persentase	91,92	93	94	95	96,00	97,00	97,00
Persentase anak usia 0-23 bulan gizi kurang yang mendapat asupan gizi	Persentase	65,00	68	70	75	80,00	85,00	85,00
Persentase anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan imunisasi rutin lengkap	Persentase	73,00	75	80	85	95,00	100,00	100,00
Persentase anak usia 0-23 bulan diare yang mendapatkan oralit dan zinc	Persentase	100,00	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan obat cacing;	Persentase	100,00	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase anak usia 24-59 bulan gizi buruk yang mendapatkan pelayanan tata laksana gizi buruk	Persentase	65,00	68	70	75,00	80,00	85,00	85,00
Persentase anak usia 24-59 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan ya	Persentase	91,92	93	94,00	95,00	96,00	97,00	97,00
Persentase anak usia 24-59 bulan gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Persentase	65,00	68	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
Persentase anak usia 24-59 bulan diare yang mendapatkan oralit dan zinc	Persentase	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase temuan kasus pneumonia pada anak usia 24-59 bulan	Persentase	40,00	40	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Persentase anak usia 24-59 bulan yang mendapatkan obat cacing	Persentase	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Remaja Putri yang mengonsumsi TTD	Persentase	61,30	65	67,00	70,00	75,00	80,00	80,00
Persentase Remaja putri yang mendapatkan pemeriksaan anemia	Persentase	95,60	96	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00
Persentase Calon Pengantin yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan pra nikah	Persentase	86,70	88	89,00	90,00	91,00	92,00	92,00

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Calon Pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	Persentase	74,58	80	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase	63,96	100	100	100	100	100	100
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase	80,37	100	100	100	100	100	100
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase	94,93	100	100	100	100	100	100
Persentase penderita Diabetes yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase	88,92	100	100	100	100	100	100
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase	102,99	100	100	100	100	100	100
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persentase	103,09	100	100	100	100	100	100
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persentase	81,2	100	100	100	100	100	100
Persentase pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase	65	78	80	82	84	85	87
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) %	Persentase	98,23	98,6	99	99	100	100	100
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*)	Persentase	22,46	22,46	27,295	32,13	36,965	41,80	41,80
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*)	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Penilaian Capaian Tatanan Kehidupan Sehat Mandiri	Persentase	71	71	81	81	81	91	91

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Cakupan balita wasting yang ditangani	Persentase	NA	100	100	100	100	100	100
Persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar	Persentase	71	75	80	85	85	90	95
Persentase sarana produksi pangan yang dilakukan pengawasan	Persentase	NA	50	50	50	50	50	50
Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri (Persen)	Persentase	NA	40	50	65	75	80	80
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Nilai	37,93	37,93	37,93	38	38	39	39
Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Nilai	10,26	12,26	12,26	14,26	16,26	18,26	18,26
Persentase irigasi dalam kondisi baik, luas irigasi yang dapat berfungsi dengan baik dan efisiensi penggunaan air irigasi	Persentase	52,9	52,9	57,9	62,9	67,9	72,9	72,9
Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Persentase	NA	38	40,57	47	50	55	55
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persentase	8	8	16	21	26	30	30
Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	NA	87	87,35	88,27	89,18	90,09	90,09
Persentase dokumen teknis penataan bangunan gedung yang diterbitkan	Persentase	NA	100	100	100	100	100	100
Persentase Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya,	Persentase	NA	100	100	100	100	100	100

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang ditata dan dipelihara								
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase	79,5	79,7	79,9	80,1	80,3	80,5	80,7
Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis	Persentase	NA	37,5	40,62	44,73	51,53	53,18	53,18
Persentase kesesuaian tata ruang	Persentase	NA	70	75	80	85	85	85
Kapasitas Air Baku (m^3/detik)	Angka	0,55	0,624	0,698	0,772	0,846	0,92	0,92
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persentase	58,24	59,1	59,96	60,82	61,68	62,54	62,54
Persentase permukiman yang tertata	Persentase	99,37	99,61	99,71	99,76	99,81	99,86	99,86
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	Persentase	4,78	2,06	2,01	1,96	1,91	1,86	1,86
Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	Persentase	99,37	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persentase	NA	100	100	100	100	100	100
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase	NA	100	100	100	100	100	100
Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase	60	100	100	100	100	100	100
Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	50	100	100	100	100	100	100
Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	NA	100	100	100	100	100	100
Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persentase	NA	100	100	100	100	100	100
Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	NA	100	100	100	100	100	100
Cakupan Penyebaran	Persentase	100	100	100	100	100	100	100

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran								
Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang tersedia	Persentase		83	100	100	100	100	100
Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti	Persentase	100	12	23	27	27	12	12%
Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kota	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Mendapat Pengelolaan Secara Baik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
Persentase Tanah Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	Persentase	NA	62,44	72,5	80,5	85,5	92,5	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
Persentase Pelaksanaan RAD PUG	Persentase	80	100	100	100	100	100	100
Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase keluarga yang terlayani	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Desa Ramah Anak	Persentase	2,56	20,51	38,46	56,41	74,36	94,87	100

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Persentase	88,89	89,47	90	90,23	90,75	91,05	91,05
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persentase	3,72	4,28	4,73	9,04	9,5	10,09	10,09
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	Persentase	73,33	76,19	77,27	78,26	79,17	80	80
Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Pekerja	2.877	2.716	2.736	2.756	2.776	2.796	2.796
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	59,28	59,78	59,78	59,78	59,78	59,78	59,78
Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persentase	32,14	32,40	33	33	34	35	35
Persentase Usaha Mikro yang mempunyai izin usaha	Persentase	7,58	8,26	8,26	9,58	10,22	10,86	10,86
Persentase Peningkatan Jumlah Wirausaha Baru Usaha Mikro	Persentase	8,2	8,26	8,92	9,58	10,22	10,86	10,86
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	85,3	85,4	85,9	86,4	86,9	87,4	87,9
Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase	NA	17,94	15,38	15,38	12,82	10,26	7,69
Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu	Persentase	91,86	91,86	92	92,5	93	93,5	94

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Keamanan Pangan								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Kualitas Air	Nilai	54	75,26	75,46	75,66	75,86	76,06	76,08
Indeks Kualitas Udara	Nilai	92,33	84,71	84,91	85,11	85,31	85,51	86
Indeks Kualitas Lahan	Nilai	45,95	62,7	62,77	62,84	62,91	62,98	63
Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase	32,5	32,5	32,5	52,5	62,5	72,5	72,5
Persentase ketaatan perusahaan dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	Persentase	90	90	90	90	90	90	90
Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Perizinan Berusaha dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan Kabupaten	Persentase	35	35	40	45	50	55	60
Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	Persentase	5	5	10	15	20	25	25
Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase capaian penghargaan bidang lingkungan hidup	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti di Kabupaten	Persentase	0	80	80	80	90	90	90
Persentase pengelolaan sampah	Persentase	67,85	68,85	69,85	69,85	69,85	69,85	69,85
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persentase	7,36	30	40,00	50,00	60	70	75,00
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	85,33	85,45	85,50	85,55	85,60	85,65	85,70
Rasio Pasangan Non Muslim berakta kawin	Nilai	0,821	0,822	0,823	0,824	0,825	0,826	0,827
Rasio Pasangan non muslim berakta cerai	Nilai	0,431	0,432	0,433	0,434	0,435	0,436	0,437
Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi penduduk	Persentase	99,95	99,96	99,97	99,98	99,99	99,99	99,99

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
yang meninggal								
Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi penduduk usia 0-17 tahun	Persentase	99,71	99,82	99,83	99,84	99,85	99,86	99,87
Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang menikah	Persentase	82,12	82,22	82,32	82,42	82,52	82,620	82,72
Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan penduduk yang bercerai	Persentase	43,12	43,22	43,32	43,42	43,52	43,62	43,72
Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase kerjasama antar desa terfasilitasi	Persentase	0	100	100	100	100	100	100
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang diberdayakan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase penataan desa yang terfasilitasi	Persentase	0	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	Nilai	2	2	2	2	2	2	2
Persentase peserta KB aktif	Persentase	73,9	75,4	77	78	80	81	83
Cakupan Bina Keluarga Aktif	Persentase	80	80	80	82	84	86	88
Persentase Ibu Nifas menerima pelayanan Keluarga Berencana (KB)	Persentase	73,90	75,40	77	78	80	81	81
Persentase kelompok sasaran Pendampingan keluarga 1000 HPK	Persentase	70	70	70	73	75	77	77
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
Konektivitas Darat	km	471,5	510,3	510,3	590,3	590,3	590,3	590,3
Persentase Kelengkapan Jalan yang telah	Persentase	15	15,5	15,6	15,8	15,9	16	16,1

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terpasang terhadap Kondisi Ideal								
Konektivitas Laut	unit	2	2	2	3	3	3	3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
Tingkat Kematangan Aspek TIK / Teknologi Digital	Angka	3	3	2,5	2,75	3	3,25	3,5
Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Indeks SPBE	Nilai	4,16	3,5	3	3,25	3,5	3,75	4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,76	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Level	Level III	Level II	Level II	Level II	Level II	Level II	Level II
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
Jumlah Investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA)	Investor	345	365	385	405	425	445	445
Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Persentase	1,85	2	2	2	2	2	2
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persentase	NA	84	85	86	87	88	88
Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pemanfaatan data dan informasi Penanaman modal	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
Persentase wirausaha muda	Persentase	3,1	2,75	3	3	4	4	4

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase peran serta pemuda dalam organisasi kepemudaan	Persentase	24,36	25	26	27	28	30	32
Persentase pembinaan cabang keolahragaan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase organisasi pramuka aktif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase	65	65	67	70	72	75	75
Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persentase	55	35	35	62	62	67	67
Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Persentase	15	25	25	65	65	67	67
Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Persentase	15	25	25	70	72	75	75
Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Persentase	65	60	60	65	70	75	75
Persentase kunjungan wisatawan ke museum	Persentase	65	70	65	65	70	75	75
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
Persentase Perpustakaan yang dibina	Persentase	35	36	50	60	65	75	75,50
Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	Persentase	20	21	25	30	40	50	51
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persentase	60	60,50	62	65	67	70	72
Tingkat digitalisasi arsip	Nilai	90	90,90	91	91,10	91,15	91,20	91,25
Nilai Pengawasan kearsipan eksternal	Nilai	87	87	87,05	87,10	87,15	87,20	87,25
Persentase arsip yang dilindungi dan terselamatkan	Persentase	75	75,05	75,20	76	76,55	77	78
Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	Persentase	66	67	68	69	70	73	75
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
URUSAN PEMERINTAH								

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
AN BIDANG PERTANIAN								
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	NA	3	3	3	3	4	5
Peningkatan Produksi Hortikultura	Persentase	NA	3	3	3	3	3	3
Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persentase	NA	3	3	5	5	5	5
Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Persentase	NA	15	15	15	15	15	15
Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persentase	NA	3	3	3	3	5	5
Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persentase	NA	10	10	10	20	20	20
Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persentase	NA	20	20	20	20	20	20
Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persentase	NA	30	30	30	30	30	30
Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persentase	NA	20	20	20	20	20	20
Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Persentase	NA	5	5	5	5	5	5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	-44	15	15	15	15	15	15
Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	NA	40	40	80	80	80	80
Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	NA	0	10	20	20	30	30
Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	NA	NA	NA	10	10	10	10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	41.242,91	43.966	41.864,00	42.073,00	42.283,00	42.495,00	42.707,00

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	2.628,18	1.800	2.733,31	2.785,87	2.838,43	2.891	2.943,56
Luasan Kawasan Konservasi	Ha	124.320,7	124.320,7	124.320,70	124.320,70	124.320,70	124.320,70	124.320,70
Angka Konsumsi Ikan	Kg/kapita/tahun	68,54	67	70,61	71,67	72,75	73,84	74,94
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	0	40	45	50	55	60	60
Nilai Ekspor Barang	USD	264.700.000	271.012.182,91	289.983.035,71	310.281.848,21	332.001.577,58	355.241.688,01	355.241.688,01
Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase	3,449	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
Indeks Tertib Ukur	Nilai	66,71	68	69	70	71	72	72
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah	Persentase	56,68	5,95	3	3	3	3	3
Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persentase	100	32,5	3	3	3	3	3
Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persentase	100	66,67	3	3	3	3	3
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
SEKRETARIAT DAERAH								
Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase kebijakan pemerintahan dan kerjasama yang difasilitasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Kebijakan Pembinaan Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Regulasi yang tersusun secara ideal, tepat fungsi dan tepat sasaran	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	Persentase	100	100	100	100	100	100	100

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
dan Pembangunan								
Persentase Indeks Tata kelola Pengadaan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
SEKRETARIAT DPRD								
Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Predikat	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Persentase Rancangan Perda Tahun N	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
PERENCANAAN								
Ketepatan waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Tingkat ketercapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Kesesuaian Program RKPD ke dalam APBD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Keselarasan RPJMD ke dalam RKPD Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Keselarasan RPJMD ke dalam RKPD Pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Keselarasan RPJMD ke dalam RKPD Pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian	Persentase	100	100	100	100	100	100	100

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah								
Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	NA			10	10	10	10
KEUANGAN								
Ketepatan waktu penyusunan APBD	Predikat	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Predikat	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Persentase Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan tepat waktu	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Realisasi Anggaran Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase	98	98	98	98	98	98	98
Persentase data keuangan daerah yang terinput ke dalam sistem informasi secara tepat waktu	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase aset daerah yang telah bersertifikat	Persentase	95	95	96	96	96	96	96
Persentase aset daerah yang tercatat dalam neraca daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase	12%	13	14%	15%	15%	15%	15%
KEPEGAWAIAN								
Persentase Pelaksanaan Program Pengadaan, Mutasi, Promosi, Pengembangan Kompetensi, dan Evaluasi Kinerja ASN yang Sesuai dengan Prosedur dan Sasaran yang Ditentukan	Persentase	99,97	100	100	100	100	100	100
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Persentase	8,33	10	12	14	16	18	20
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
INSPEKTORAT DAERAH								
Persentase terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan	Persentase	80	85	85	90	90	95	95
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan/Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	Persentase	93,54	93,60	93,64	93,69	93,74	93,79	93,84
Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti (Irban Kesra, Irban Pemerintahan, Irban Ekbang dan Irban Investigasi) (Persen)	Persentase	82,93	82,98	83,03	83,08	83,15	83,20	83,25
Persentase keterjadian kasus hukum pada perangkat daerah dan pemerintah desa	Persentase	0	0	0	0	0	0	-
Persentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Tindak Lanjut Hasil Konsultansi	Persentase	80	82	85	90	95	95	95
Peringkat Capaian Atas Target Rencana Aksi Program pencegahan Korupsi Terintegrasi dengan KPK RI (MCSP KPK) pada area Pengawasan Tingkat Provinsi	Peringkat	3	3	3	3	3	3	3
Persentase Perangkat Daerah ZI yang ditingkatkan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Persentase	2	6	6	6	9	9	9
UNSUR KEWILAYAHAN								
KECAMATAN DAMAR								
Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
di Tingkat Desa								
Persentase Pendukung Urusan Layanan Penunjang	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88,47	88,5	90	92	94	95	96
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
KECAMATAN DENDANG								
Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pendukung Urusan Layanan Penunjang	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80	80	81	82	83	84	85
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
KECAMATAN GANTUNG								
Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pendukung Urusan Layanan Penunjang	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Kepuasan	Nilai	87,51	88,85	87,5	88	88,05	88,10	88,15

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Masyarakat (IKM)								
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
KECAMATAN KELAPA KAMPIT								
Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pendukung Urusan Layanan Penunjang	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87	88	88	88.20	88.30	88.50	88.60
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
KECAMATAN MANGGAR								
Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pendukung Urusan Layanan Penunjang	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	91.44	91,4	91.5	91.6	91.7	91.8	91.9
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
KECAMATAN SIMPANG PESAK								
Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pendukung Urusan Layanan Penunjang	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82	82	83	84	85	86	87
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
KECAMATAN SIMPANG RENGGIANG								
Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah di Tingkat Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pendukung Urusan Layanan Penunjang	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,05	84,05	85,38	85,4	85,5	85,55	85,6
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
PEMERINTAHAN UMUM								
Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan	Persentase	70	70	70	75	80	85	90

URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Karakter Kebangsaan								
Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	70	70	70	75	80	85	85
Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	70	70	70	75	80	85	85
Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	70	70	70	75	80	85	85

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2025

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 merupakan dokumen arah pembangunan jangka menengah yang disusun secara sistematis dan terintegrasi, guna mengarahkan pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sekaligus menjadi pedoman bersama dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di tengah dinamika tantangan dan peluang global, nasional, dan lokal.

RPJMD ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi riil daerah, potensi yang dimiliki, serta isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Belitung Timur. Dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan RPJMD ini mampu mewujudkan pembangunan daerah yang berdampak nyata dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

V.1 Kaidah Pelaksanaan dan Kesinambungan Perencanaan

Untuk menjamin agar visi dan misi dalam RPJMD ini dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel, ditetapkan kaidah pelaksanaan yang mengikat seluruh jenjang perencanaan di bawahnya. RPJMD ini berfungsi sebagai instrumen strategis utama yang menjadi acuan mutlak bagi dokumen perencanaan selanjutnya, menciptakan sebuah alur kesinambungan yang terpadu dan tidak terpisahkan.

1. **Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah:** Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur **wajib** menjadikan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai satu-satunya rujukan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Proses ini dilakukan melalui mekanisme *cascading* (penjabaran berjenjang), di mana setiap tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas dalam RPJMD diterjemahkan secara operasional menjadi sasaran, program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang lebih spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dengan demikian, kinerja setiap Perangkat Daerah akan terukur kontribusinya secara langsung terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD ini.
2. **Dasar Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD):** RPJMD sebagai rencana lima tahunan akan diimplementasikan dalam tahapan tahunan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setiap tahunnya, RKPD akan menetapkan prioritas pembangunan tahunan dengan mengacu pada sasaran dan program yang telah digariskan dalam RPJMD, disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah dan dinamika isu aktual yang berkembang. RKPD menjadi jembatan yang menghubungkan perencanaan strategis jangka menengah dengan penganggaran tahunan.
3. **Acuan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD):** Kesinambungan antara perencanaan dan penganggaran dipastikan dengan menjadikan RKPD sebagai pedoman utama dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dengan demikian, alokasi anggaran

dalam APBD setiap tahunnya akan dipastikan fokus untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD, yang merupakan turunan langsung dari RPJMD. Mekanisme ini menjamin bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah diarahkan untuk mencapai visi "BELTIM NYAMAN & BERKEMAJUAN".

V.2 Masa Transisi

RPJMD Kabupaten Belitung Timur disusun berdasarkan RPJMN 2025-2029, tetapi mengingat masa jabatan berakhir kepala daerah berakhir pada Februari 2030, maka semua indikator dirancang sampai tahun 2030. Sehingga, dokumen perencanaan di tahun 2030 masih mengacu pada dokumen RPJMD saat ini sampai terpilihnya kepala daerah yang baru. Selama masa transisi, pelaksanaan pembangunan tetap mengacu pada visi jangka panjang daerah (RPJPD 2025–2045), dengan menjaga kesinambungan kebijakan, menghindari kekosongan arah pembangunan, serta memastikan keberlanjutan program strategis yang belum selesai pada masa jabatan sebelumnya.

V.3 Pengendalian dan Evaluasi

Untuk memastikan pelaksanaan RPJMD berjalan sesuai jalur, akan dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala dan berjenjang. Kepala Daerah akan memimpin langsung evaluasi capaian kinerja pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun dan pada pertengahan periode. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk melakukan akselerasi, koreksi, atau penyesuaian strategi jika diperlukan, tanpa menyimpang dari visi dan misi utama. Pelibatan DPRD dan masyarakat dalam proses pengawasan juga akan terus diperkuat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Dengan komitmen yang kokoh dari pimpinan daerah, sinergi seluruh Perangkat Daerah, serta dukungan penuh dari masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, kita berkeyakinan bahwa cita-cita untuk mewujudkan Kabupaten Belitung Timur yang Nyaman dan Berkemajuan pada tahun 2029 dapat kita raih bersama.

Apabila terjadi perubahan signifikan di luar kendali seperti bencana, krisis ekonomi, atau kebijakan nasional yang berdampak langsung terhadap daerah, RPJMD dapat dilakukan penyesuaian melalui mekanisme revisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005